BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa setiap unit pemerintahan adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan secara periodik wajib menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan oleh kepala SKPD meliputi transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan atas transaksi dan penyiapan laporan keuangan SKPD sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

   Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memuat pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai :

a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. Upaya entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
f. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

   LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

   LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

c. Neraca

   Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional (LO)

   LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2. Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan SKPD

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

4.1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
4.3. Kebijakan Akuntansi Beban
4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja
4.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang
4.8. Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka
4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi
4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan
4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah
4.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
4.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
4.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

4.16. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.3. Penjelasan Pos - Pos Neraca

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas

5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup

BAB 2
EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Perekonomian nasional tahun 2018 tumbuh sebesar 5,17 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 8,99 persen; diikuti Jasa Perusahaan sebesar 8,64 persen; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,13 persen. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 19,86 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar- Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 13,02 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,81 persen; dan Konstruksi sebesar 10,53 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 56,22 persen.

Berdasarkan pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,74 persen; yang diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 2,17 persen dan komponen lainnya sebesar 0,26 persen. Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 55,74 persen, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 32,29 persen, Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 20,97 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 8,98 persen, Komponen Perubahan Inventori sebesar 2,28 persen, dan Komponen Pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 1,22 persen. Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 22,06 persen.

Inflasi nasional tahun 2018 sebesar 3,13% masih memenuhi target sasaran inflasi 3,5±1%. Kondisi ini karena terjaganya inflasi inti dan komponen bahan makanan, serta *administered prices* yang rendah. Capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter dalam mengelola perekonomian dan koordinasi kebijakan yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

Ekonomi Jawa Tengah tahun 2018 tumbuh sebesar 5,32 persen meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 5,26 persen, dan lebih baik apabila dibandingkan nasional sebesar 5,17% persen. Struktur perekonomian Jawa Tengah tahun 2018 didominasi tiga lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan (34,50 persen); pertanian, kehutanan dan perikanan (14,04 persen); dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (13,51 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2018, Industri Pengolahan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 1,50 persen, diikuti Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,82 persen, serta Konstruksi sebesar 0,63 persen. Sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 0,35 persen di bawah sektor informasi komunikasi yang memberikan sumbangan 0,56 persen. Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, dan investasi menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Akan tetapi, komponen impor luar negeri yang juga meningkat signifikan menjadi penahan pertumbuhan ekonomi tahun 2018.

Besaran inflasi di Jawa Tengah tahun 2018 terkendali pada angka 2,82 persen lebih baik dibandingkan inflasi tahun 2017 yang mencapai sebesar 3,71 persen. Hal ini tidak lepas dari peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah. Berbagai upaya dilakukan untuk mengendalikan tingkat inflasi antara lain melalui pemenuhan ketersediaan dan pendistribusian pasokan, pembentukan harga yang terjangkau, perluasan akses informasi dan penerapan

protokol manajemen lonjakan harga. Disamping itu telah dirilis aplikasi SiHati Generasi III sehingga memudahkan pantauan informasi pasokan dan perkembangan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Jawa Tengah. Informasi yang lebih komprehensif dimaksud membantu pemerintah Jawa Tengah dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengendalian inflasi di Jawa Tengah.

Tingkat kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah semakin mengecil yang ditunjukkan oleh indikator Indeks Williamson sebesar 0,62 pada Tahun 2016 lebih rendah apabila dibandingkan Tahun 2015 sebesar 0,638. Pada kondisi ketimpangan antar kelompok pendapatan mendasarkan indikator Indeks Gini telah terjadi pemerataan pendapatan termasuk dalam kategori menengah ditunjukkan dari capaian Tahun 2018 sebesar 0,357 lebih baik di banding tahun 2017 sebesar 0,365.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. IPM Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu dari 69,98 pada tahun 2016 menjadi 70,52 pada tahun 2017 meskipun masih di bawah rata-rata IPM Nasional sebesar 70,81.

Jumlah penduduk miskin tahun 2018 (September) sebanyak 3,87 juta jiwa (11,19%), menurun sebesar 1,04% dibanding tahun 2017 (September) sebanyak 4,20 juta jiwa (12,23%). Penurunan persentase penduduk miskin tersebut di atas rata-rata nasional sebesar 0,46 persen. Strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan yaitu dengan 3 (tiga) mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan peningkatan kerjasama penanganan lintas sektor, pelibatan swasta, perguruan tinggi, perbankan, unsur masyarakat, pemerintah pusat/kabupaten-kota yang didukung dengan penguatan kelembagaan dan data berbasis spasial.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tegah periode bulan Agustus 2018 sebesar 4,51 persen turun dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar 4,57%. Upaya menekan angka pengangguran antara lain : pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan penguatan program link and match, menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan friendly bagi investasi, peningkatan kapasitas ketrampilan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja, penyelenggaraan bursa kerja serta meningkatkan kegiatan kewirausahaan.

NTP Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar 102,25 meningkat 1,85 dari NTP umum Tahun 2017 sebesar 100,40. Hal ini menunjukkan perubahan indeks harga yang diterima petani (lt) lebih tinggi dibandingkan dengan perubahan indeks harga yang dibayar petani (lb), secara relatif semakin kuat tingkat kemampuan/daya beli petani.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan Jawa Tengah selama tahun 2018 sebagai berikut :

1. Kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan;
2. Masih cukup tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin, terutama kemiskinan di perdesaan, yang mata pencaharian penduduknya dominan di sektor pertanian;

3. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan daya saing tenaga kerja terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka;
4. Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat, baik dari ketersediaan, distribusi, maupun diversifikasi;
5. Masih cukup tingginya kecenderungan ketergantungan terhadap energi fosil, serta pelayanan jaringan listrik untuk masyarakat yang belum optimal;
6. Perlunya peningkatan pelayanan infrastruktur yang mendukung dinamika aktivitas kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta pengurangan kesenjangan antar wilayah;
7. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang ditandai dengan meningkatkan kerusakan ekosistem teresterial dan pesisir-laut, serta meningkatnya pencemaran lingkungan hidup;
8. Masih perlunya peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi;
9. Masih perlunya peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah.

Dengan melihat berbagai permasalahan pembangunan daerah di Jawa Tengah, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Pengurangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan keterlibatan atau dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya untuk menekan jumlah penduduk miskin. Upaya penanggulangan kemiskinan antara lain melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan, serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.

2. Pengurangan Pengangguran

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah saat ini, terjadi fenomena pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian seperti sektor industri pengolahan dan perdagangan.

Berdasarkan hal tersebut maka penanganan pengangguran di Jawa Tengah berfokus pada upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok petani (buruh tani dan petani penggarap), nelayan, masyarakat terkena PHK, anak putus sekolah dan sektor UMKM. Selain itu, perlu diupayakan perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan yang berorientasi pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumber daya lokal termasuk kewirausahaan di kalangan pemuda.

Upaya penanganan pengangguran dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang pada akhirnya aspek-aspek produktif tersebut diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pasar tenaga kerja.

3. Pembangunan Infrastruktur

Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sektor yang sinergis dengan rencana tata ruang. Pengembangan dan pembenahan sarana angkutan massal hingga di pedesaan juga menjadi hal penting sebagai penyeimbang dari pembangunan infrastruktur fisik.

Kondisi rasio elektrifikasi di Jawa Tengah, yang masih belum sepenuhnya terlayani pasokan listrik memerlukan pembangunan infrastruktur energi melalui pembangunan jaringan listrik pedesaan serta pengembangan sumber energi alternatif berupa energi baru terbarukan seperti mikro hidro, *solar cell*, dan panas bumi.

Pembangunan infrastruktur sumber daya air diarahkan untuk mengantisipasi banjir dan kekeringan yang merupakan fenomena tahunan. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk kepentingan produksi dan konsumsi dilakukan melalui perlindungan terhadap kawasan resapan air di daerah hulu, dengan membangun sebanyak mungkin tampungan air dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap sumber-sumber air. Pembangunan jaringan irigasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dilakukan dengan tetap memperhatikan ketepatan lokasi dan memprioritaskan wilayah lumbung padi dan wilayah yang termasuk dalam LP2B.

Pengembangan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi hal penting dalam mendukung perwujudan desa berdikari, karena melalui teknologi informasi yang mampu menjangkau hingga tingkat desa, maka komunikasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan lebih terbuka dan intensif. Selain itu juga, dengan pengembangan teknologi informasi dapat untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat serta fungsi kontrol dari masyarakat terhadap proses pembangunan daerah.

Hal terpenting yang menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur adalah upaya meningkatkan peran dan penanganan infrastruktur dalam keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, seperti upaya penanganan rob, pembangunan pelabuhan, bandar udara, transportasi massal dan pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembebasan tanah. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan *soft power* melalui peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; peningkatan *Public Private Parthnership* (PPP) dan penguatan kapasitas partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang komprehensif.

Pertumbuhan dan kegiatan sosial ekonomi juga perlu mempertimbangkan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat menjamin keutuhan lingkungan hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan akan datang serta mengurangi resiko bencana. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan hidup melalui upaya rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam.

4. Kedaulatan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, situasi pangan di Jawa Tengah berada pada tataran konstruksi ketahanan pangan, walaupun secara statistik Jawa Tengah berada pada surplus komoditas pangan dan merupakan kontributor pangan nasional. Persoalan terbesar pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat adalah pada

ketidakberdayaan masyarakat dan pemerintah dalam membangun kemampuan pangan lokal berdaulat, yang didukung dengan regenerasi petani, penyediaan alat produksi serta tanah di pedesaan.

Kedaulatan pangan merupakan hak rakyat dan pemerintah Jawa Tengah sebagai bagian dari NKRI, untuk menentukan sendiri kebijakan dan strategi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang sehat dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya lokal, dengan tetap memperhatikan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perlindungan serta dukungan terutama untuk mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin yang rawan pangan.

Kedaulatan pangan di Jawa Tengah diwujudkan melalui empat pilar, yaitu: 1) reformasi agraria dengan melindungi dan menata ulang sumber-sumber produksi pangan; 2) mewujudkan pertanian berkelanjutan melalui pemeliharaan dan pengembangan pertanian berbasis bahan baku, sumberdaya dan kearifan lokal; 3) menciptakan cadangan pangan dari surplus produksi pangan serta melakukan perdagangan pangan yang adil, yang mampu memberikan penghasilan lebih pada produsen pangan kecil; dan 4) mengembangkan pola konsumsi dan diversifikasi produk aneka pangan lokal, dan tidak hanya tergantung pada bahan pangan eksternal.

5. Kedaulatan Energi

Ketergantungan terhadap sumber energi fosil yang masih cukup tinggi di Jawa Tengah ditunjukkan dengan bekerjanya rantai ekonomi energi dalam moda transportasi, listrik, maupun industri yang menggunakan pasokan energi fosil. Sementara pemanfaatan potensi sumber energi non fosil, terutama sumber EBT di Jawa Tengah masih belum optimal. Sedangkan potensi sumberdaya yang dimiliki Jawa Tengah yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi alternatif baru cukup besar seperti panas bumi, air, serta potensi lahan yang cukup luas sebagai area pengembangan sumber energi baru terbarukan.

Kebijakan energi Provinsi Jawa Tengah yaitu menemukan terobosan baru dalam pengadaan energi, yang didukung dengan pengembangan teknologi tepat guna sehingga secara berangsur-angsur ketergantungan terhadap energi fosil terutama di Jawa Tengah dapat tereduksi dan menggeser paradigma pemanfaatan energi tak terbarukan menjadi pemanfaatan energi baru terbarukan.

Upaya guna memenuhi kebutuhan energi di Jawa Tengah adalah dengan mengembangkan energi alternatif berbasis gas, sumberdaya energi baru terbarukan, maupun bahan bakar nabati, yang dikelola secara mandiri di level lokal, sesuai dengan kapasitas sumberdaya yang dimiliki Jawa Tengah.Upaya tersebut juga perlu diikuti dengan upaya pengembangan budaya hemat energi, yang akan mendorong masyarakat untuk lebih pintar dalam memanfaatkan energi secara berdaulat.

6. Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Langkah-langkah konkrit utamanya terkait serah terima P3D, peningkatan kapasitas aparatur serta manajemen kepegawaian (rekruitmen, pengembangan karir, penggajian dan batas usia pensiun pegawai aparatur sipil negara) menjadi isu yang paling strategis.

Peran partisipasi masyarakat dalam mewujudkan demokrasi di daerah masih perlu ditingkatkan terutama pelaksanaan pesta demokrasi seperti keikutsertaan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan pengambilan keputusan kebijakan pembangunan yang bersifat strategis melalui forum *rembug*.

Kondusivitas daerah juga masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, serta dilaksanakan secara terpadu bersama dinas/instansi terkait dan komponen masyarakat sehingga mampu membuka peluang investasi di wilayah Jawa Tengah dan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 diarahkan pada upaya penuntasan capaian sasaran dan target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dan berbagai permasalahan serta isu strategis, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 ditujukan untuk "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari". Mendasarkan hal tersebut maka prioritas pembangunan daerah tahun 2018, meliputi:

a. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, difokuskan pada:
    1) Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal dengan pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis dan magang;
    2) Penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal;
    3) Peningkatan realisasi dan persebaran investasi dengan memberikan kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi;
    4) Perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; kondisi kerja yang kompetitif; perbaikan iklim dan penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan; serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
    5) Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan promosi daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata;
b. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin, difokuskan pada:
    1) Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan berupa: beasiswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat non kuota APBN, perbaikan rumah tidak layak huni, listrik perumahan, dan jamban;
    2) Jaminan perlindungan sosial, utamanya bagi kepala rumah tangga miskin non produktif;

3) Peningkatan perlindungan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS;
4) Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal; pemberdayaan UMKM; permodalan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan UKM; pelatihan dan keterampilan kerja di berbagai Balai Latihan Kerja; pemberdayaan, pelatihan dan pemberian modal bagi Keluarga Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi;
5) Pengembangan kewirausahaan pemuda untuk meningkatkan ketrampilan serta menumbuhkan jiwa wirausaha pemuda dan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah;
6) Penyediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terintegrasi Nomor Induk Kependudukan guna memenuhi akses layanan sosial dasar;
7) Verifikasi dan validasi sasaran program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dengan data PBDT 2015;

c. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar, difokuskan pada:
1) Penyediaan secara bertahap Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/SLB sesuai SNP untuk meningkatkan daya tampung siswa lulusan SMP/MTs/SMPLB;
2) Penyediaan pendampingan BOS untuk peningkatan penyeleng-garaan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
3) Peningkatan kualifikasi S1/D4 dan sertifikasi bagi pendidik SMA/SMK/SLB;
4) Pendampingan akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit, Sertifikasi Tenaga Kesehatan, pendampingan masyarakat beresiko kesehatan melalui program OSOC, penyelesaian pentahapan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
5) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
6) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan keluarga;
7) Pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda untuk meningkatkan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan;

d. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, difokuskan pada:
1) Pengembangan komoditas padi gogo, padi lahan salinitas, jagung hibrida dan intensifikasi kedelai;
2) Pengembangan kawasan hortikultura buah dan sayuran;
3) Pemanfaatan lahan melalui integrated farming system (IFS) untuk komoditas padi, jagung dan kedelai;
4) Peningkatan penanaman dan intensifikasi tanaman perkebunan semusim dan tahunan;
5) Pengembangan ternak pada sentra produksi sapi dan kambing;
6) Pengembangan perikanan budidaya melalui pemanfaatan pakan mandiri dan pengembangan perikanan tangkap dengan optimalisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;

7) Pembangunan dan pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) serta terwujudnya lumbung cadangan Pemerintah Provinsi;
8) Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE) melalui peningkatan pelayanan jaringan listrik melalui pembangunan jaringan listrik perdesaan; sambungan listrik murah; fasilitasi perijinan dan jaringan pelayanan serta akses listrik kepada PLN; fasilitasi dukungan pembangunan PLTU Batang, Jepara dan Cilacap;
9) Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap energy mix di Jawa Tengah;

e. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana, dengan fokus pada:
1) Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan ruas alternatif jalan nasional/provinsi (sejajar pantura), ruas jalan eks alih status kabupaten/kota, ruas jalan rawan bencana, ruas jalan yang terdapat penyempitan (*bottle-neck*), ruas penghubung wilayah pantai utara-selatan, ruas jalan di perbatasan (Jawa Barat, Jawa Timur dan DIY), peningkatan akses/konektivitas ke wilayah kemiskinan tinggi serta ruas pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian;
2) Penanganan infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan keselamatan pada daerah rawan kecelakaan (blackspot);
3) Penataan sistem transportasi massal untuk mengatasi kemacetan melalui peningkatan pelayanan transportasi publik dan keselamatan utamanya percepatan operasionalisasi Angkutan massal anglomerasi Kedungsapur (koridor Semarang - Bawen); keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan fasilitasi percepatan rencana Bandara Wirasaba Purbalingga;
4) Penanganan infrastruktur jaringan irigasi utamanya pada daerah lumbung pangan melalui peningkatan kondisi jaringan irigasi yang tersinkronisasi dengan Kabupaten/kawasan penghasil padi dan sawah LP2B serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat;
5) Penanganan sungai dan muaranya (pantai) pada daerah rawan banjir dan rob pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali-Comal utamanya di Sungai Bodri, Kendal, Blukar, Damar, Bulanan, Meduri, Bremi, Pemali, Comal serta mendorong pada Wilayah Sungai kewenangan Pusat utamanya di Sungai Bengawan Solo, Banjir Kanal Timur (BKT), Serang, Juwana, Lusi, Wulan, Kabuyutan, Cisanggarung, Gelis, Piji, Logung, Mangkang, Progo, Wawar, Tipar, Serayu, Citanduy, Cibereum, Cikonde, Luk Ulo dan sabuk pantai di wilayah Pantura;
6) Penanganan bangunan penampungan air pada daerah rawan kekeringan melalui peningkatan ketersediaan air baku dengan memperbanyak pembangunan embung/penanganan tampungan air sebagai bagian dari "program pembangunan 1.000 embung" serta mendorong dukungan Nasional, Kabupaten/kota dan masyarakat/ swasta terhadap program tersebut;
7) Penanganan infrastruktur air minum melalui peningkatan cakupan pelayanan air bersih utamanya percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pengembangan SPAM Regional (Bregas, Keburejo); pelibatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan serta pengelolaan air bersih;

8) Penanganan sanitasi dan drainase di daerah kumuh perkotaan/ miskin pedesaan melalui pembangunan MCK Komunal dan Dukungan Program SANIMAS serta rintisan pengelolaan IPLT;
9) Pengelolaan sampah/TPA melalui percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional (TPA Regional Magelang);
10) Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (mangrove) dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah melalui rehabilitasi dan konservasi DAS termasuk lahan kritis dan kawasan pesisir;
11) Pemantauan kualitas air, udara dan tanah melalui program penilaian kinerja perusahaan dan program kali bersih, pembangunan IPAL di sentra-sentra IKM dan peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM untuk menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah;
12) Penyediaan logistik untuk mencukupi kebutuhan kabupaten/kota terdampak bencana;
13) Pemenuhan sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana;
14) Pengembangan Early Warning System bencana berbasis masyarakat;
15) Pengembangan masyarakat tangguh bencana;

f. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada:
1) Pemantapan kondusivitas wilayah dan antisipasi terhadap dampak Pilkada serentak Kabupaten/Kota dan Provinsi;
2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kehidupan berdemokrasi;
3) Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu:
a) Manajemen perubahan yang dilaksanakan antara lain melalui implementasi penetapan *agent of change* (Kader Revolusi Mental) dan kode etik Aparatur Sipil Negara;
b) Penguatan Pengawasan yang bebas dari KKN melalui implementasi Aksi PPK; penerapan SPIP, pembangunan Zona Intregitas, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media; optimalisasi SIMWAS-Online untuk percepatan tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan;
c) Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah melalui optimalisasi penggunaan e-SAKIP; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengembangan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik;
d) Penataan dan Penguatan Organisasi melalui penyusunan produk hukum daerah bidang kelembagaan, penataan kelembagaan non struktural;
e) Penataan Tatalaksana meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi dan pembentukan PTSP;
f) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional, dan berkinerja tinggi melalui pemgembangan pegawai ASN berbasis kompetensi, penyusunan kelas jabatan dan pola pembinaan karir yang terbuka;

g) Peraturan Perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif serta selaras melalui penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan; pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; pemantauan dan evaluasi Perda/Perkada secara berkala;
h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui peningkatan kualitas dan pendekatan layanan kepada masyarakat berupa kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi dengan menyusun *Standart Operasional Prosedure* dan penyediaan media pengaduan masyarakat;

4) Peningkatan kualitas penyusunan laporan pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
5) Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi, kompeten, kapabel, berintegritas, serta didukung oleh sistem pembinaan karir yang jelas dan terbuka (*merit system*);
6) Peningkatan layanan publik melalui perluasan cakupan pengukuran kinerja unit layanan publik, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7) Gerakan revolusi mental yang berorientasi pada nilai-nilai utama yaitu integritas, peningkatan etos kerja dan budaya gotong-royong;
8) Peningkatan nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah melalui pagelaran dan pertunjukan kesenian rakyat;
9) Peningkatan peran pemuda dalam wawasan kebangsaan, keimanan dan ketaqwaan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS guna menangkal upaya destruktif;
10) Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan melalui pembangunan asrama atlet dan gedung terpadu II di Jatidiri.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kinerja pendapatan daerah ditempuh melalui berbagai kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah tahun 2018 yang meliputi:

a. Optimalisasi pungutan PAD melalui :
   1) Peningkatan Intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
   2) Penyempurnaan dasar hukum pemungutan retribusi dan penyesuaian tarif retribusi;
   3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel;
   4) Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis *online system;*
b. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM aparatur;
c. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
d. Meningkatkan sinergitas dengan mitra (Kepolisian RI dan Kanwil Bea Cukai) dalam pemungutan pajak daerah;
e. Inventarisasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
f. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;
g. Optimalisasi BUMD.

Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut ditempuh melalui upaya penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel; menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah tahun 2018 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow program* dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Kebijakan umum Belanja Daerah tahun 2018, yaitu:

a. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi :

1) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
2) Belanja Bunga dari pejabat daerah digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya;
3) Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
4) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakat yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
5) Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
6) Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada kabupaten/kota;
7) Bantuan Keuangan diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, pemerintah daerah lainnya dan partai politik;
8) Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk :

1) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional;
2) Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah Kabupaten/Kota melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dengan mempertimbangkan luas wilayah; Jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin; Besarnya Pendapatan Asli

Daerah (PAD); *Product Domestic Regional Bruto* (*PDRB*); Keterkaitan dengan program/kegiatan/peran/posisi strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah; Komitmen Kabupaten/Kota dalam penyediaan dana pendampingan pada tahun sebelumnya; Kinerja pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) pada tahun sebelumnya; Kontribusi dalam penyediaan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

3) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dengan mempertimbangkan prioritas provinsi Jawa Tengah meliputi: Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan, rintisan model desa berdikari, peningkatan ketahanan masyarakat desa dan pendampingan operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

b. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :

1) Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS;
2) Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya;
3) Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Belanja Langsung Tahun 2018, yang diarahkan untuk :

1) Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
2) Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
3) Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat melalui forum koordinasi di bidang perencanaan;
4) Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
5) Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan;
6) Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk:

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2017 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2018 yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
b. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;

Sedangkan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan, diarahkan untuk :

a. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
b. Pembentukan dana cadangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

3.1.1. Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Provinsi Jawa Tengah TA. 2018 sejumlah Rp24.815.550.076.000,00 terealisasi sejumlah Rp24.702.318.190.582,30 atau 99,54% dari target, mengalami peningkatan sejumlah Rp999.143.559.075,00 atau 4,22% apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2017 sejumlah Rp23.703.174.631.507,00.

Realisasi pendapatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi PAD sebesar Rp13.711.836.037.849,34 (55,51% dari total pendapatan); Pendapatan transfer sebesar Rp10.968.474.152.733,00 (44,40% dari total pendapatan) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp22.008.000.000,00 (0,09% dari total pendapatan), sebagaimana ditunjukan pada gambar 3.1

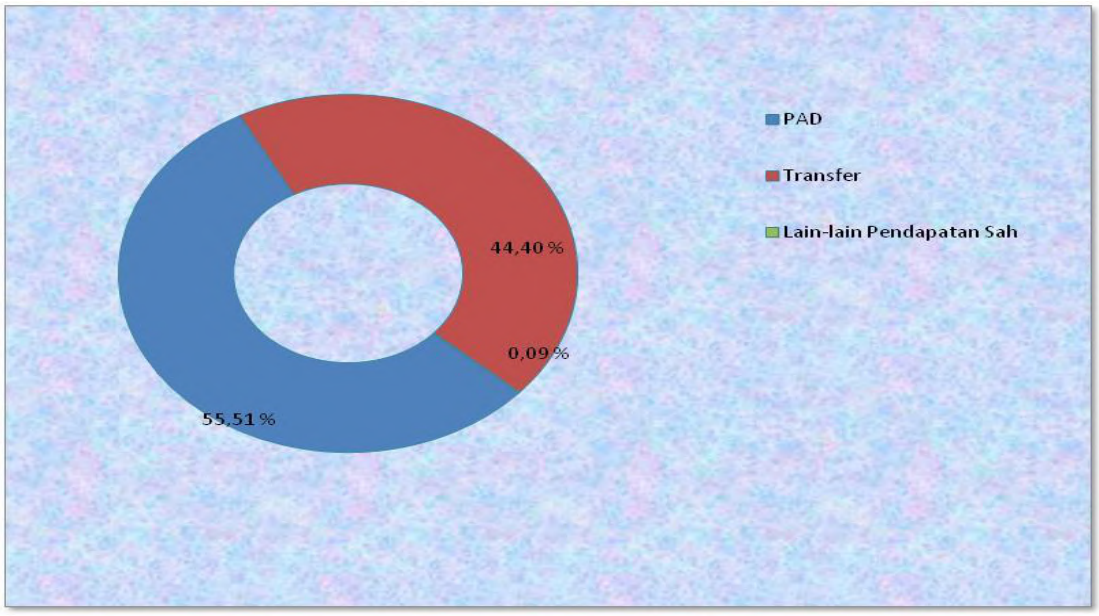

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018

GAMBAR 3.1 PROPORSI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 (DALAM %)

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp13.396.772.661.000,00 terealisasi sejumlah Rp13.711.836.037.849,34 (102,35%). Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp12.547.513.389.400,00 maka realisasi PAD mengalami kenaikan sejumlah Rp1.164.322.648.449,34 atau 9,28%.

Rincian penyumbang PAD terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp11.507.119.643.262,00 (83,92%); Pendapatan Retribusi Daerah Rp104.870.144.923,00 (0,76%); Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp459.626.767.964,00 (3,35%) dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp1.640.219.481.700,34 (11,96%) sebagaimana Gambar 3.2 berikut :

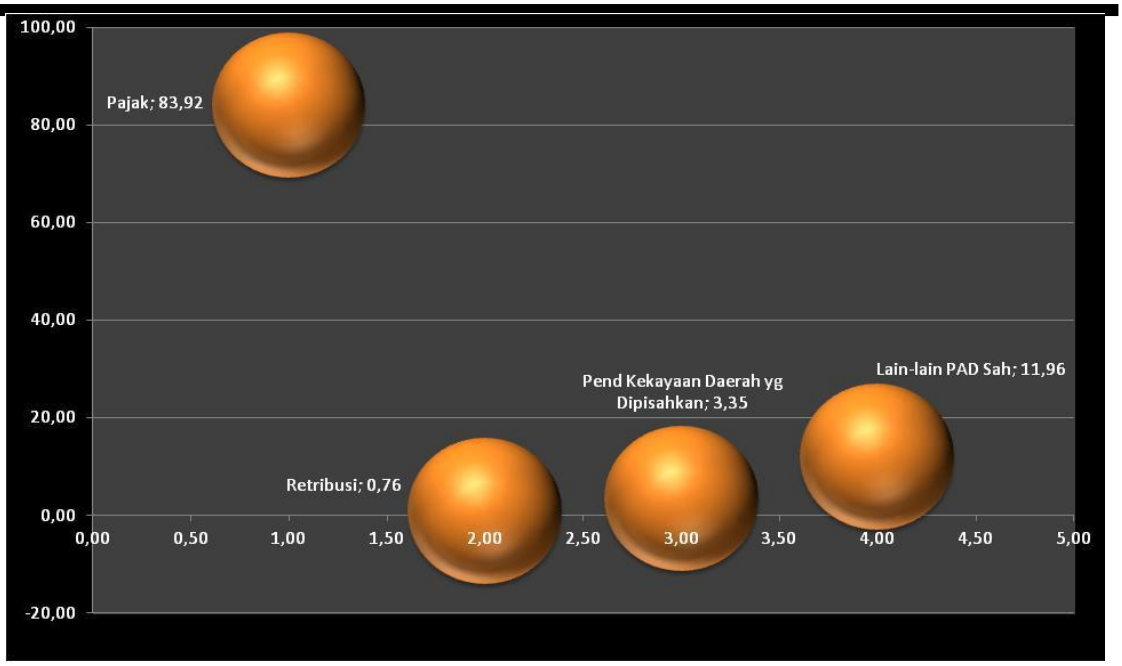

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018

GAMBAR 3.2 PROPORSI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 (DALAM %)

Secara keseluruhan pencapaian kinerja PAD sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama tahun anggaran 2018 dan perbandingannya dengan tahun anggaran 2017 ditunjukkan dalam Gambar 3.3

Grafik tersebut menunjukkan bahwa untuk tahun anggaran 2018 maupun 2017 sumber utama PAD adalah dari Pendapatan Pajak Daerah. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp934.421.310.652,00 atau (8,84%) dibandingkan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp10.572.698.332.610,00. Target Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp11.087.697.617.000,00, terealisasi sebesar Rp11.507.119.643.262,00 (103,78%).

Pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp104.870.144.923,00 (96,23%) dari target sebesar Rp108.979.571.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.502.252.356,00 (-2,33%) dibandingkan tahun anggaran 2017.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun anggaran 2018 sebesar Rp459.626.767.964,00 (100%) dari target sebesar Rp459.626.558.000,00, atau bila dibandingkan tahun anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp88.554.286.463,00 (23,86%).

Sedangkan realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun anggaran 2018 dibandingkan tahun anggaran 2017 juga mengalami peningkatan sebesar Rp143.849.303.690,34 (9,61%), dengan realisasi sebesar Rp1.640.219.481.700,34 (94,24%) dari target sebesar Rp1.740.468.915.000,00.

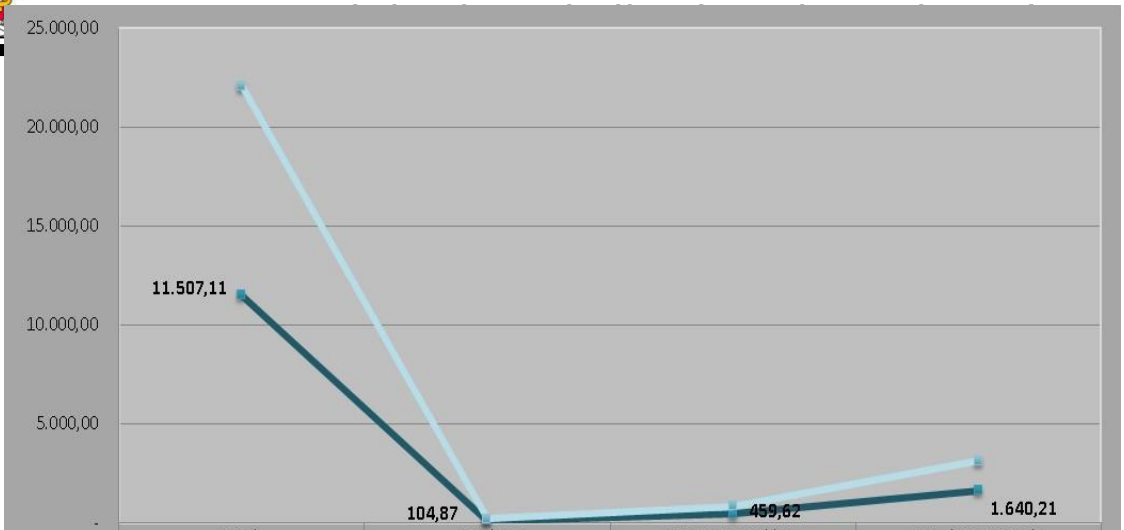

	Pajak	Retribusi	PKD yg Dipisahkan	Lain-lain PAD Sah
2017	10.572,69	107,37	371,07	1.496,37
2018	11.507,11	104,87	459,62	1.640,21

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018

GAMBAR 3.3 PENCAPAIAN KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 (MILYAR RUPIAH)

Tahun anggaran 2018, target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp4.907.443.329.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.689.611.788.683,00 (95,56%), target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp6.489.326.086.000.000,00 realisasinya sebesar Rp6.277.665.043.013,00 (96,74%).

Sebagaimana ditunjukkan gambar 3.4., proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2018, yakni sebagai berikut: Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp769.449.921.024,00 (7,02%); Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3.652.586.431.000,00 (33,30%); Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp267.575.436.659,00 (2,44%); Dana Tambahan Penghasilan Guru-PNSD sebesar Rp1.028.894.671.500,00 (9,38%); Dana Insentif Daerah sebesar Rp33.500.000.000,00 (0,31%); Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp5.204.476.040.000,00 (47,45%); Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK & BOKB) sebesar Rp3.640.458.000,00 (0,03%); Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan sebesar Rp2.975.310.100,00 (0,03%); dan Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp4.178.563.413,00 (0,04%).

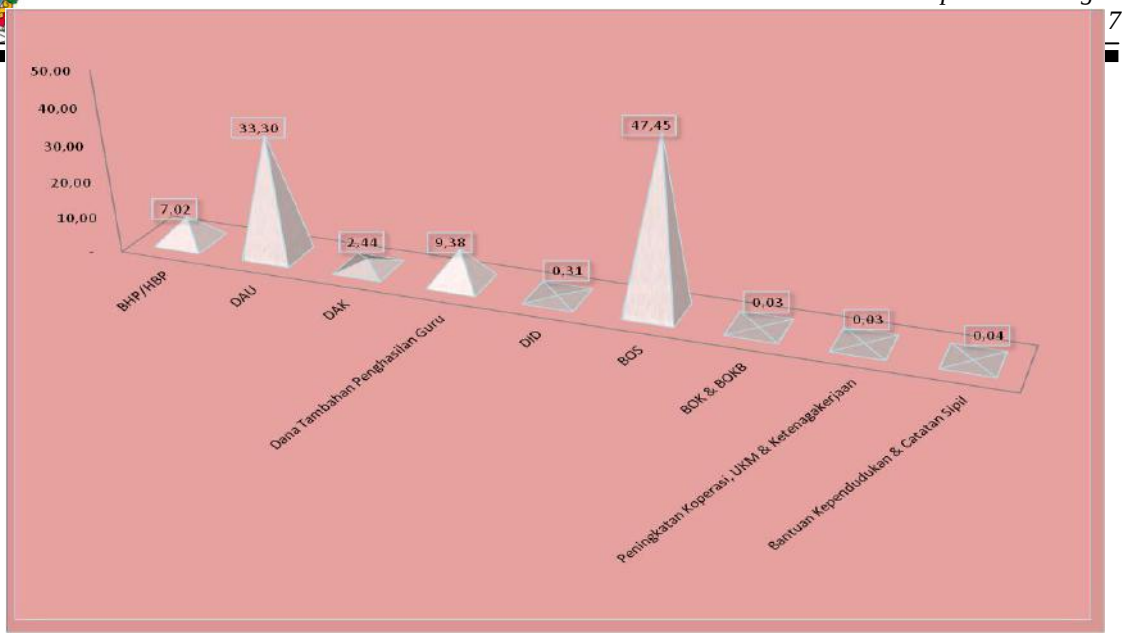

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018

GAMBAR 3.4 PROPORSI PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2018 (DALAM %)

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Transfer dari Pemerintah Pusat selama tahun anggaran 2018 dan perbandingannya dengan tahun anggaran 2017 ditunjukkan dalam Gambar 3.5.

Grafik di bawah menunjukkan bahwa Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak bersumber dari Pemerintah Pusat tahun anggaran 2018 sebesar Rp769.449.921.024,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp848.309.911.393,00, mengalami penurunan sebesar Rp78.859.990.369,00 (-9,30%);

Realisasi Dana Alokasi Umum tahun anggaran 2018 sebesar Rp3.652.586.431.000,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp3.652.586.431.000,00 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan (100%);

Realisasi Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2018 sebesar Rp267.575.436.659,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp6.566.890.148.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.299.314.712.041,00 (-95,93%);

Realisasi Dana Insentif Daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp33.500.000.000,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp50.197.943.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.697.943.000,00 (-33,26%);

Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa untuk tahun anggaran 2018 terdapat realisasi Dana Tambahan Penghasilan Guru - PNSD sebesar Rp. 1.028.894.671.500,00; Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp. 5.204.476.040.000,00; Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK & BOKB) sebesar Rp. 3.640.458.000,00; Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan sebesar Rp. 2.975.310.100,00; dan realisasi Bantuan kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp. 4.178.563.413,00.

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018

GAMBAR 3.5 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2018 (MILYAR RUPIAH)

Tahun anggaran 2018, target komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp22.008.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.008.000.000,00 (100,00%) lebih rendah dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp36.938.923.844,00. Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp22.008.000.000,00.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah antara lain :

1. Perhitungan proyeksi pendapatan masih mendasarkan data series penerimaan tahun sebelumnya dan belum sepenuhnya menggunakan analisis perhitungan proyeksi pendapatan;
2. Pelayanan dan pengelolaan pajak yang belum optimal karena terbatasnya sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung;
3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu;
4. Kecenderungan berkurangnya prosentase penguasaan saham pemerintah Provinsi pada beberapa BUMD sehingga berpotensi terjadi delusi dan tidak lagi menjadi pemegang saham pengendali;
5. Belum optimalnya pengembangan sumber sumber pendapatan lain dan masih bergantungnya pada penerimaan pajak daerah;
6. Belum optimalnya pengamanan fisik dan administrasi aset pemerintah daerah sehingga berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan

Sedangkan solusi yang telah ditempuh antara lain :

1. Menginventarisir potensi sumber-sumber pendapatan secara cermat dan teliti, mengakomodasi variabel-variabel ekonomi makro dan variabel lain yang memiliki korelasi terhadap masing-masing potensi pendapatan, sehingga perhitungan proyeksi pendapatan sesuai dengan potensi riil dan kondisi perekonomian saat ini;
2. Pengembangan model pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pembayaran elektronik berbasis android;

3. Menggali potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kegiatan razia gabungan, meningkatkan kegiatan penagihan tunggakan pajak secara *door to door*, memberikan doorprize kepada wajib pajak yang taat pajak melalui gebyar hadiah samsat 2018, melakukan penagihan melalui telepon kepada wajib pajak yang menunggak; Berkoordinasi dengan asosiasi dan dealer untuk melakukan strategi promosi dan inovasi penjualan kendaraan bermotor guna menarik konsumen sehingga dapat menjaga angka penjualan kendaraan bermotor.
4. Mengupayakan tambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah agar dapat menunjang rencana bisnis BUMD dengan harapan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah;
5. Peningkatan kinerja BUMD, revitalisasi dan optimalisasi pendayagunaan aset-aset milik Pemerintah serta menggali potensi yang mendukung penerimaan retribusi daerah.
6. Inventarisasi ulang atas aset tetap secara komprehensif dengan melibatkan tim appraisal independen guna pengamanan dan perolehan penghitungan nilai ekonomis aset, koordinasi lintas SKPD dalam upaya pengamanan dan pemanfaatan aset mangkrak, mempromosikan aset melalui spanduk, media massa dan Sistem Informasi Komprehensif Bidang Aset Daerah (Sikom-BAD).

3.1.2. Belanja Daerah

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3.6 di bawah ini, target anggaran belanja dan transfer tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp26.186.587.329.000,00 realisasinya mencapai 93,48% atau sebesar Rp24.478.632.557.339,00. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp15.702.411.154.886,00 atau 64,15%, sedangkan Belanja Modal sebesar Rp1.681.752.306.368,00 atau 6,87%, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp13.118.505.530,00 atau 0,05% dan Belanja Transfer sebesar Rp7.081.350.590.555,00 atau 28,93%

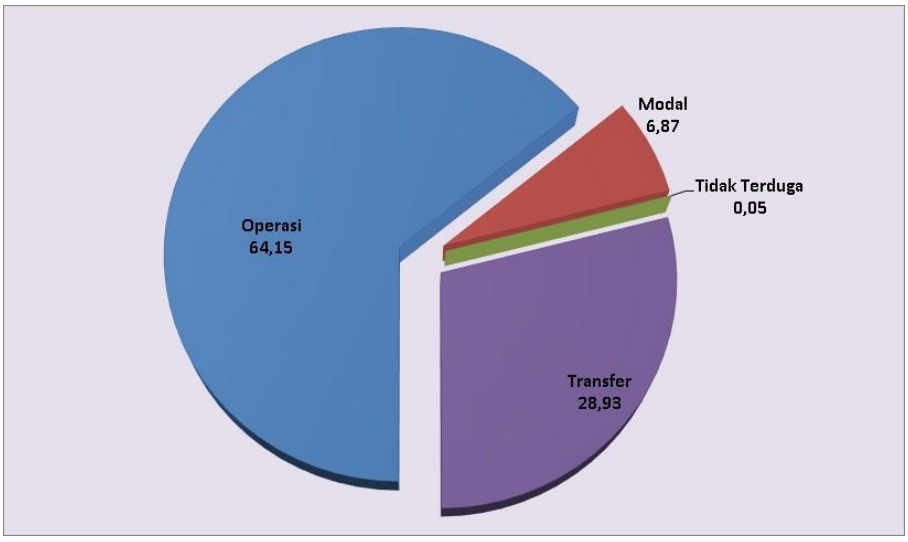

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018

GAMBAR 3.6 PROPORSI BELANJA DAN TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2018 (DALAM %)

Proporsi belanja operasi tahun anggaran 2018 terdiri dari belanja pegawai Rp6.468.261.263.572,00 atau 41,19%, belanja barang sebesar Rp4.042.705.957.394,00 atau

25,75%, belanja hibah Rp5.150.000.983.920,00 atau 32,80%, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp41.442.950.000,00 atau 0,26% seperti ditunjukkan dalam gambar 3.7 berikut:

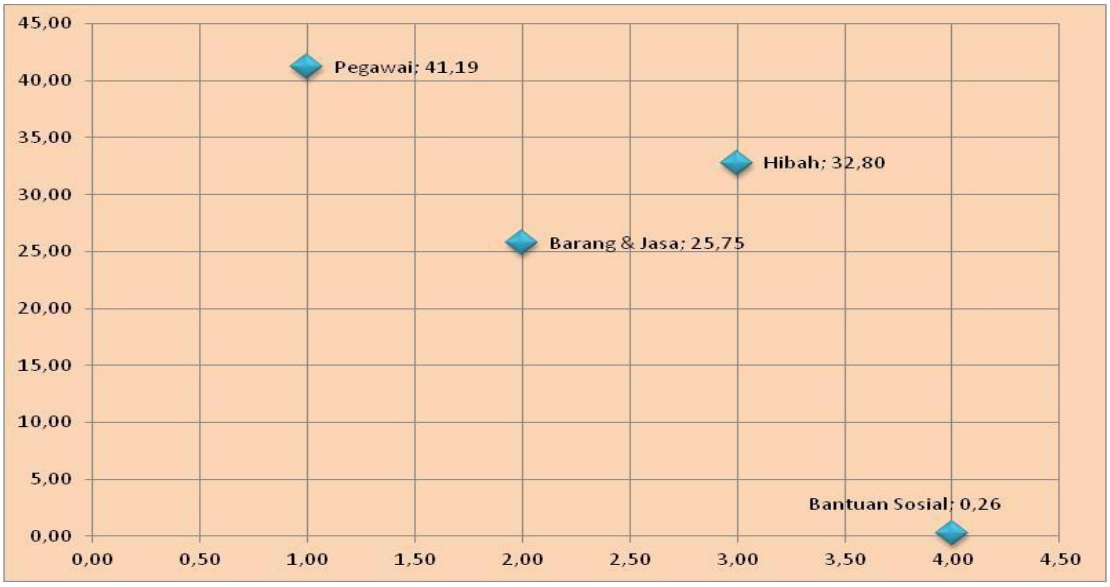

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018

GAMBAR 3.7 PROPORSI BELANJA OPERASI
TAHUN ANGGARAN 2018 (DALAM %)

Perbandingan kinerja belanja operasi tahun anggaran 2018 dan 2017 ditunjukkan dalam grafik 3.8 di bawah.

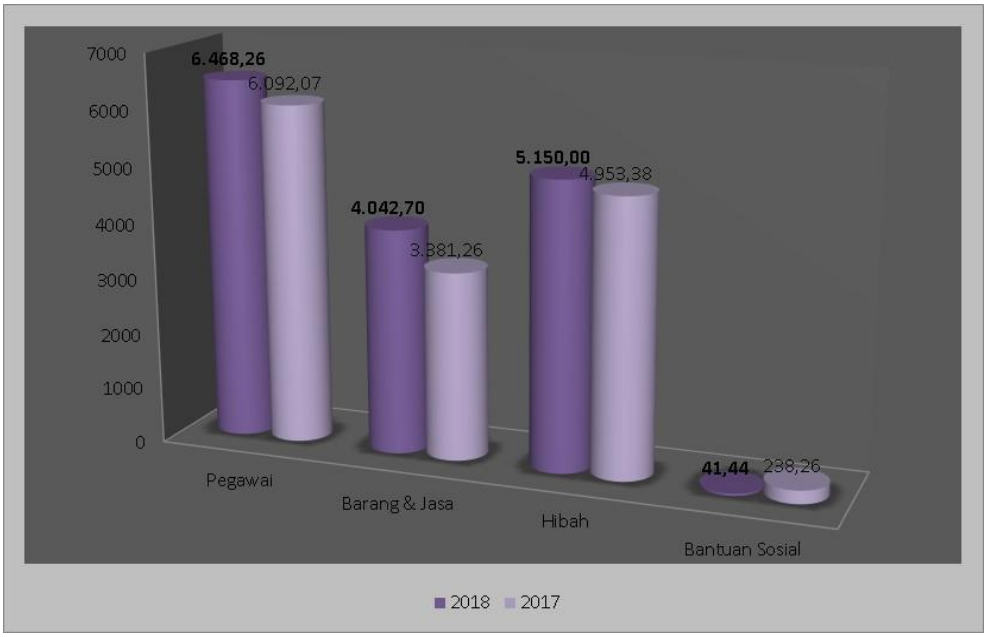

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018

GAMBAR 3.8 PENCAPAIAN KINERJA BELANJA OPERASI
TAHUN ANGGARAN 2018 (MILYAR RUPIAH)

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2018 sebesar Rp6.468.261.263.572,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp6.092.077.750.517,00 mengalami kenaikan sebesar Rp376.183.513.055,00 (6,17%);

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2018 sebesar Rp4.042.705.957.394,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp3.381.260.846.633,00 mengalami kenaikan sebesar Rp661.445.110.761,00 (19,56%);

Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2018 sebesar Rp5.150.000.983.920,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp4.953.383.281.751,00 mengalami kenaikan sebesar Rp196.617.702.169,00 (3,97%);

Realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2018 sebesar Rp41.442.950.000,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp238.268.220.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp196.825.270.000,00 (-82,61%);

Pada komponen belanja modal tahun anggaran 2018, proporsi belanja modal tanah sebesar Rp25.931.283.415,00 (1,54%), belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp578.372.832.490,00 (34,39%), belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp349.657.564.473,00 (20,79%), belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp598.655.967.923,00 (35,60%), dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp128.797.833.067,00 (7,66%) dan belanja modal aset tak berwujud sebesar Rp336.825.000,00 (0,02%), sebagaimana ditunjukkan dalam grafik 3.9.

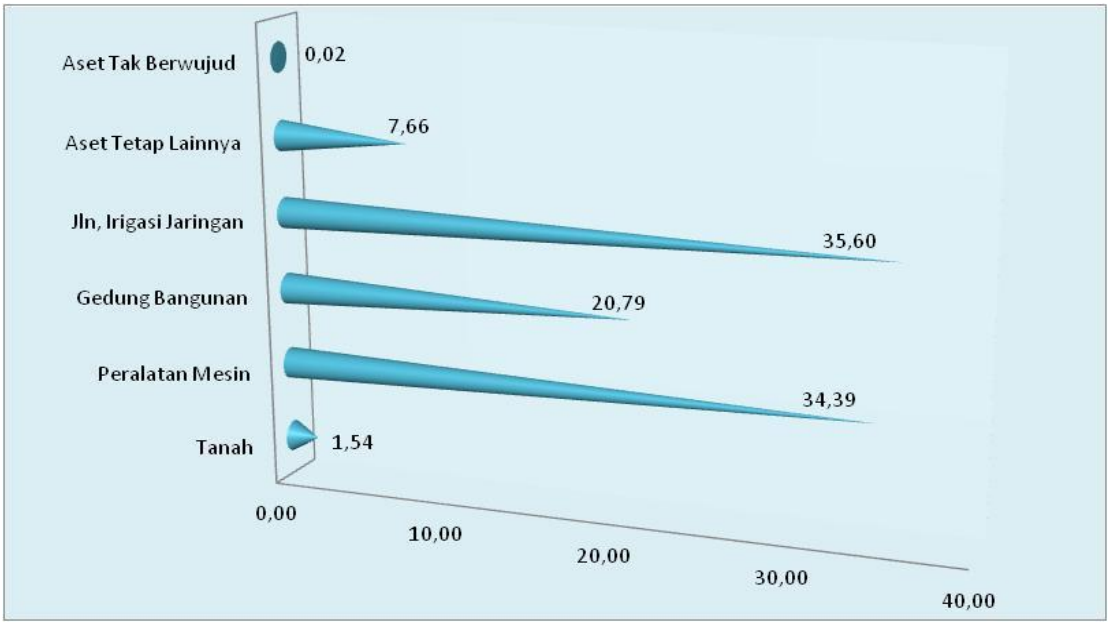

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018

GAMBAR 3.9 PROPORSI BELANJA MODAL
TAHUN ANGGARAN 2018 (DALAM %)

Perkembangan realisasi belanja modal tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2017 ditunjukkan dalam grafik 3.10. Secara keseluruhan, belanja modal tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp227.154.221.904,00 (15,62%) dari sebesar Rp1.454.598.084.464,00 tahun 2017 menjadi Rp1.681.752.306.368,00 pada tahun 2018.

Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2018 sebesar Rp25.931.283.415,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp21.650.743.424,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.280.539.991,00 (19,77%);

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2018 sebesar Rp578.372.832.490,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp321.441.003.601,00 mengalami kenaikan sebesar Rp256.931.828.889,00 (79,93%);

Realisasi belanja modal gedung bangunan tahun anggaran 2018 sebesar Rp349.657.564.473,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp308.934.759.265,00 mengalami kenaikan sebesar Rp40.722.805.208,00 (13,18%);

Realisasi belanja modal jalan, irigasi, jaringan tahun anggaran 2018 sebesar Rp598.655.967.923,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp799.019.206.624,00 mengalami penurunan sebesar Rp200.363.238.701,00 (-25,08%);

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2018 sebesar Rp128.797.833.067,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.794.491.050,00 mengalami kenaikan sebesar Rp126.003.342.017,00 (4508,99%);

Realisasi belanja modal aset tak berwujud tahun anggaran 2018 sebesar Rp336.825.000,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp757.880.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp421.055.500,00 (-55,56%).

	Tanah	Peralatan Mesin	Gedung Bangunan	Jln, Irigasi Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Aset Tak Berwujud
2018	25,93	578,37	349,65	598,65	128,79	0,33
2017	21,65	321,44	308,93	799,01	2,79	0,75

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018

GAMBAR 3.10 PENCAPAIAN KINERJA BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2018 (MILYAR RUPIAH)

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah, yakni sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penggunaan *Cash Management System* (CMS) oleh pengelola keuangan SKPD/UPT/Balai/Satker karena keterbatasan pemahaman SDM pengelola keuangan dan ketersediaan sarana prasarana yang belum menjangkau daerah pelosok.
2. Adanya kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota yang mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangannya;
3. Masih adanya unit kerja pasca pemberlakuan SOTK baru di Tahun 2018 yang belum sepenuhnya terakomodir kebutuhan anggarannya;

4. Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan sekolah serta barang milik daerah di Satuan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) serta Satuan Pendidikan Khusus (SLB).

Beberapa langkah solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain :

1. Menyelenggarakan bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan di tingkat SKPD/UPT/Balai, melakukan pengembangan dan sinkronisasi antara aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi *Cash Management System* serta aplikasi pajak serta mendorong dan menghimbau Bank Jateng untuk meningkatkan pelayanan sampai dengan pelosok untuk menjangkau UPT/Balai/Satker.
2. Melakukan pengendalian, monitoring dan akselerasi serta asistensi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bagi kabupaten/kota penerima Bantuan Keuangan;
3. Mengoptimalkan pembiayaan dari SKPD induk.
4. Menyediakan sistem pengeloaan keuangan sekolah dan barang milik daerah, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan sekolah serta melakukan bimbingan teknis kepada bendahara dan pengurus barang sekolah tentang pentingnya pengelolaan keuangan dan barang milik sekolah.

3.1.3. Pembiayaan Daerah

Target Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp1.511.037.253.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.528.916.848.598,20 atau 101,18%. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah mengalami kenaikan sejumlah Rp882.341.208.843,00 atau 136,46% apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah TA. 2017 sejumlah Rp646.575.639.755,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp140.000.000.000,00 terealisasi Rp140.000.000.000,00 atau 100%. Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah mengalami penurunan Rp164.000.000.000,00 atau -53,95% apabila dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2017 sejumlah Rp304.000.000.000,00.

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Program pada SKPD

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Program Kegiatan pada masing-masing SKPD tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.1.953.719.507.000,00 realisasi sebesar Rp 1.844.877.421.103,00 atau 94,43% yang terdiri dari 12 program dan 96 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	33.884.494.000	29.536.773.218	87,17
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	18.698.719.000	17.716.822.413	94,75
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1.598.188.000	1.431.572.300	89,57
4	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	1.817.413.430.000	1.720.252.377.854	94,65
5	PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS	38.083.655.000	36.833.531.074	96,72
6	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.995.986.000	5.472.631.500	91,27
7	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	11.432.454.000	9.973.572.485	87,24
8	PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN	7.068.581.000	6.553.078.800	92,71
9	PROGRAM PEMBINAAN TRADISI. KESENIAN DAN NILAI BUDAYA	15.169.000.000	12.997.850.902	85,69
10	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN DAN CAGAR BUDAYA	3.850.000.000	3.586.955.557	93,17
11	PROGRAM PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA	450.000.000	447.705.000	99,49
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	75.000.000	74.550.000	99,4
	JUMLAH	**1.953.719.507.000**	**1.844.877.421.103**	**94,43**

2. URUSAN KESEHATAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Kesehatan sebesar Rp 2.053.234.638.000,00 realisasi sebesar Rp 1.718.455.756.921,00 atau 83,70% yang dilaksanakaan oleh 8 (delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni :

a). DINAS KESEHATAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 225.804.305.000,00 realisasi sebesar Rp 202.673.134.252,00 atau 89,76% yang terdiri dari 12 program dan 83 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	33.967.126.000	28.661.022.539	84,38
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	10.270.641.000	9.301.184.611	90,56
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	120.000.000	104.264.750	86,89
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	731.800.000	616.595.000	84,26
5	PROGRAM JASA PELAYANAN KESEHATAN	20.436.546.000	13.029.789.954	63,76
6	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT	6.727.210.000	6.273.394.144	93,25
7	PROGRAM FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN	8.400.000.000	7.176.406.873	85,43
8	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	27.009.341.000	23.125.729.498	85,62
9	PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN	4.900.000.000	3.810.834.820	77,77
10	PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.735.000.000	3.314.890.419	88,75
11	PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN	103.471.415.000	102.288.152.220	98,86
12	PROGRAM MANAJEMEN. INFORMASI & REGULASI KESEHATAN	6.035.226.000	4.968.134.424	82,32
	JUMLAH	**225.804.305.000**	**202.673.134.252**	**89,76**

b). RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebesar Rp 771.869.965.000,00 realisasi sebesar Rp 644.914.601.048,00 atau 83,55% yang terdiri dari 6 program dan 8 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.750.000.000	8.749.939.649	99,99
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.000.000.000	882.033.657	88,203
3	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD (URUSAN KESEHATAN)	700.584.249.000	580.518.775.902	82,862
4	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	60.935.716.000	54.281.619.590	89,080
5	PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	300.000.000	259.081.700	86,361
6	PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN	300.000.000	223.150.550	74,384
	JUMLAH	**771.869.965.000**	**644.914.601.048**	**83,55**

c). RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebesar Rp 474.359.488.000,00 realisasi sebesar Rp.411.768.051.176,00 atau 86,81% yang terdiri dari 6 program dan 7 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	10.024.972.000	10.024.960.632	99,99
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	350.000.000	330.111.500	94,32
3	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD (URUSAN KESEHATAN)	434.009.516.000	373.172.322.744	85,98
4	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	29.800.000.000	28.068.041.950	94,19
5	PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	25.000.000	24.945.000	99,78
6	PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN	150.000.000	147.669.350	98,45
	JUMLAH	**474.359.488.000**	**411.768.051.176**	**86,81**

d). RSUD TUGUREJO SEMARANG

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada RSUD Tugurejo Semarang sebesar Rp 213.270.819.000,00 realisasi sebesar Rp 180.934.989.665,00 atau 84,84% yang terdiri dari 4 program dan 5 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	10.424.980.000	10.424.655.006	99,99
2	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD (URUSAN KESEHATAN)	154.970.839.000	125.741.436.857	81,14
3	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	47.800.000.000	44.693.954.353	93,50
4	PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN	75.000.000	74.943.449	99,92
	JUMLAH	**213.270.819.000**	**180.934.989.665**	**84,84**

e). RSUD KELET DONOREJO JEPARA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran program setelah perubahan untuk dan kegiatan yang dialokasikan pada RSUD Kelet Donorejo Jepara sebesar Rp.127.543.997.000,00 realisasi sebesar Rp.102.098.581.236,00 atau 80,05% yang terdiri dari 5 program dan 8 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	17.249.000.000	17.016.510.846	98,65
2	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD (URUSAN KESEHATAN)	41.664.377.000	33.114.370.864	79,48
3	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	67.580.620.000	50.949.133.416	75,39
4	PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	595.000.000	590.448.936	99,24
5	PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN	455.000.000	428.117.174	94,09
	JUMLAH	**127.543.997.000**	**102.098.581.236**	**80,05**

f). RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada RSJD Amino Gondohutomo Semarang sebesar Rp 84.845.595.000,00 realisasi sebesar Rp.70.099.813.000,00 atau 82,62% yang terdiri dari 5 program dan 7 kegiatan, yaitu:

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	9.602.800.000	9.537.717.111	99,32
2	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD (URUSAN KESEHATAN)	51.776.921.000	40.957.284.593	79,10
3	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	23.128.874.000	19.271.845.496	83,32
4	PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	162.000.000	161.994.800	100
5	PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN	175.000.000	170.971.000	97,70
	JUMLAH	**84.845.595.000**	**70.099.813.000**	**82,62**

g). RSJD SURAKARTA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada RSJD Surakarta sebesar Rp 93.264.108.000,00 realisasi sebesar Rp 54.566.407.048,00 atau 58,51% yang terdiri dari 5 program dan 7 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.000.000.000	7.281.629.097	91,02
2	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD (URUSAN KESEHATAN)	39.036.906.000	30.648.171.339	78,51
3	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	44.477.202.000	15.184.452.250	34,14
4	PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.000.000.000	923.572.776	92,36
5	PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN	750.000.000	528.581.586	70,48
	JUMLAH	**93.264.108.000**	**54.566.407.048**	**58,51**

h). RSJD DR. RM SOEDJARWADI KLATEN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada RSJD DR. RM Soedjarwadi Klaten sebesar Rp 62.276.361.000,00 realisasi sebesar Rp.51.400.179.496,00 atau 82,54% yang terdiri dari 5 program dan 6 kegiatan, yaitu:

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.223.200.000	5.162.046.962	98,83
2	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD (URUSAN KESEHATAN)	51.431.361.000	41.106.917.959	79,93
3	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	4.721.800.000	4.302.512.265	91,12
4	PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	400.000.000	360.030.290	90,01
5	PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN	500.000.000	468.672.020	93,73
	JUMLAH	**62.276.361.000**	**51.400.179.496**	**82,54**

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 940.565.085.000,00 realisasi sebesar Rp 862.260.279.565,00 atau 91,67% yang dilaksanakaan oleh 2 (dua) Satuan Perangkat Daerah (SKPD), yaitu :

a). DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya sebesar Rp 697.961.858.000,00 realisasi sebesar Rp 647.037.772.897,00 atau 92,70% yang terdiri dari 9 program dan 83 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.203.313.000	6.902.887.145	84,15
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	11.554.014.000	10.773.706.605	93,25
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	383.180.000	378.622.000	98,81
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	75.000.000	47.900.000	63,87
5	PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	332.901.465.000	328.970.563.321	98,82
6	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN PENGGANTIAN JEMBATAN	308.937.041.000	266.658.493.566	86,31
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	26.819.734.000	25.572.398.727	95,35
8	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI	3.704.042.000	3.298.370.806	89,05
9	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG SERTA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	5.384.069.000	4.434.830.727	82,37
	JUMLAH	**697.961.858.000**	**647.037.772.897**	**92,70%**

b). DINAS PEKERJAAN UMUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang sebesar Rp.242.603.227.000,00 realisasi sebesar Rp.215.222.506.668,00 atau 88,71% yang terdiri dari 10 program dan 102 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.935.399.000	7.136.133.198	89,93
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	7.220.805.000	6.464.881.205	89,53
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	400.000.000	383.105.000	95,78
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	2.245.000.000	1.854.119.280	82,59
5	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI. RAWA SERTA JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	69.282.065.000	64.222.333.104	92,70
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	68.441.977.000	57.928.695.413	84,64
7	PROGRAM PENGEMBANGAN. PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI. DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	32.936.646.000	28.627.227.943	86,92
8	PROGRAM PEGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI	48.481.335.000	44.032.018.690	90,82
9	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	2.445.000.000	1.873.395.848	76,62
10	PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN TATA RUANG	3.215.000.000	2.700.596.987	84,00
	JUMLAH	**242.603.227.000**	**215.222.506.668**	**88,71**

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 20.695.000.000,00 realisasi sebesar Rp 18.502.039.990,00 atau 89,40% yang terdiri dari 8 program dan 37 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.486.000.000	3.060.725.314	87,80
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.410.000.000	1.343.355.280	95,27
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	170.000.000	136.675.300	80,40
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	680.000.000	583.895.669	85,87
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN DAN PERDESAAN	4.666.000.000	4.196.927.968	89,95

6	PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN	4.052.000.000	3.461.991.000	85,44
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	2.508.000.000	2.275.314.779	90,72
8	PROGRAM PENATAAN. PENGUASAAN. PEMILIKAN. PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	3.723.000.000	3.443.154.680	92,48
	JUMLAH	**20.695.000.000**	**18.502.039.990**	**89,40**

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp 75.783.592.000,00 realisasi sebesar Rp 73.830.870.049,00 atau 97,42% yang dilaksanakaan oleh 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu :

a). SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp 38.264.000.000,00 realisasi sebesar Rp 37.998.472.084,00 atau 99,31% yang terdiri dari 9 program dan 40 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.538.655.000	3.433.984.833	97,04
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.479.500.000	3.428.276.658	98,53
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	300.000.000	296.375.000	98,79
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	325.000.000	324.692.500	99,91
5	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	835.000.000	834.327.042	99,92
6	PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	2.915.000.000	2.893.735.494	99,27
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	950.000.000	925.766.452	97
8	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DAN RAKYAT TERLATIH (RATIH)	24.239.125.000	24.181.557.105	99,76
9	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.681.720.000	1.679.757.000	99,88
	JUMLAH	**38.264.000.000**	**37.998.472.084**	**99,31**

b). BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp 37.519.592.000,00 realisasi sebesar Rp 35.832.397.965,00 atau 95,50% yang terdiri dari 8 program dan 51 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.593.000.000	2.444.844.204	94,29
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.373.500.000	2.232.156.511	94,04
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	715.000.000	693.170.000	96,95
4	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	9.389.092.000	8.710.467.650	92,77
5	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	6.440.000.000	6.386.855.600	99,17
6	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	2.815.000.000	2.769.527.000	98,38
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	2.000.000.000	2.000.000.000	100
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	11.194.000.000	10.595.377.000	94,65
	JUMLAH	**37.519.592.000**	**35.832.397.965**	**95,50**

6. URUSAN SOSIAL

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Sosial sebesar Rp.142.339.500.000 realisasi sebesar Rp 136.911.235.654,00 atau 96,19% yang dilaksanakaan oleh 2 (dua) Satuan Perangkat Daerah (SKPD), yaitu :

a). DINAS SOSIAL

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Dinas Sosial sebesar Rp 112.731.500.000,00 realisasi sebesar Rp 111.166.130.754,00 atau 98,61% yang terdiri dari 9 program dan 55 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	61.166.529.000	60.159.188.735	98,35
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	17.491.512.000	17.216.764.480	98,43
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	1.755.152.000	1.754.882.000	99,98
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	2.002.541.000	2.001.729.000	99,96
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN. KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	10.711.000.000	10.659.565.775	99,52
6	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	9.324.800.000	9.249.187.464	99,19

7	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL	1.500.000.000	1.498.627.000	99,91
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	6.154.966.000	6.146.286.500	99,86
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	2.625.000.000	2.479.899.800	94,47
	JUMLAH	**112.731.500.000**	**111.166.130.754**	**98,61**

b). SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 29.608.000.000,00 realisasi sebesar Rp 25.745.104.900,00 atau 86,95% yang terdiri dari 8 program dan 66 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.550.000.000	4.087.839.216	89,84
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5.333.358.000	4.472.293.097	83,86
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	32.000.000	32.000.000	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	320.000.000	288.496.849	90,16
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	17.702.642.000	15.384.861.395	86,91
6	PROGRAM POS. TELEKOMUNIKASI DAN SAR	730.000.000	601.307.115	82,37
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI. INFORMASI DAN MEDIA MASSA	300.000.000	276.758.289	92,25
8	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA	640.000.000	601.548.939	93,99
	JUMLAH	**29.608.000.000**	**25.745.104.900**	**86,95**

7. URUSAN TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Tenaga Kerja yang dialokasikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras sebesar Rp 47.600.000.000,00 realisasi sebesar Rp 44.816.760.599,00 atau 94,15% yang terdiri dari 7 program dan 68 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	13.310.292.000	12.141.000.429	91,22
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	8.712.881.000	8.254.181.872	94,74
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	300.000.000	262.351.953	87,45
4	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	7.229.500.000	6.912.823.490	95,62
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	8.754.551.000	8.429.342.040	96,29
6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	7.566.384.000	7.341.153.568	97,02
7	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	1.726.392.000	1.475.907.247	85,49
	JUMLAH	**47.600.000.000**	**44.816.760.599**	**94,15**

8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemberdayaan Perempuan yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp 19.336.980.000,00 realisasi sebesar Rp 18.853.404.231,00 atau 97,50% yang terdiri dari 13 program dan 66 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.836.532.000	1.751.820.455	95,39
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	798.872.000	793.202.695	99,29
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	9.050.000	9.050.000	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	35.150.000	32.975.000	93,81
5	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PEREMPUAN DAN ANAK	75.000.000	75.000.000	100
6	PROGRAM KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	1.210.862.000	1.188.237.800	98,13
7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	8.453.248.000	8.187.760.398	96,86
8	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA ANAK DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	946.796.000	942.722.000	99,57

9	PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA	4.525.575.000	4.429.226.050	97,87
10	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)	150.000.000	149.666.000	99,78
11	PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL BKB - POSYANDU - PAUD	322.000.000	321.976.800	99,99
12	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB MANDIRI	172.000.000	172.000.000	100
13	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU - BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK BINA KELUARGA DAN BINA BALITA	801.895.000	799.767.033	99,73
	JUMLAH	**19.336.980.000**	**18.853.404.231**	**97,50**

9. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran program dan kegiatan untuk Urusan Lingkungan Hidup yang dialokasikan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp 92.021.180.000,00 realisasi sebesar Rp 80.008.138.243,00 atau 86,95% yang terdiri dari 15 program dan 75 kegiatan, yaitu:

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	10.908.865.000	9.754.526.067	89,42
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	13.973.315.000	13.133.183.203	93,99
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	450.000.000	446.123.000	99,14
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	300.000.000	245.464.800	81,82
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN	9.300.000.000	9.100.578.364	97,86
6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSEVASI SUMBER DAYA ALAM	2.125.000.000	2.117.751.200	99,66
7	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	600.000.000	575.330.600	95,89
8	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM	1.000.000.000	993.340.500	99,33
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SDA DAN LH	1.300.000.000	1.227.146.796	94,40
10	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000	91.682.163	91,68
11	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	15.110.000.000	13.817.335.848	91,44
12	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	2.300.000.000	2.262.521.146	98,37
13	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN	2.304.475.000	2.192.364.192	95,14
14	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	10.050.000.000	9.173.870.852	91,28
	JUMLAH	**92.021.180.000**	**80.008.138.243**	**86,95**

10. URUSAN PANGAN

DINAS KETAHANAN PANGAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pangan yang dialokasikan pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp 20.325.120.000,00 realisasi sebesar Rp19.953.160.726,00 atau 98,17% yang terdiri dari 6 program dan 34 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.094.600.000	2.040.467.932	97,42
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	739.300.000	721.408.315	97,58
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000	41.000.000	82
4	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	13.306.220.000	13.218.182.079	99,34
5	PROGRAM PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI DAN POLA KONSUMSI PANGAN	2.650.000.000	2.452.662.400	92,55
6	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	1.485.000.000	1.479.440.000	99,63
	JUMLAH	**20.325.120.000**	**19.953.160.726**	**98,17**

11. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp.28.954.057.000,00 realisasi sebesar Rp 27.280.210.965,00 atau 94,22% terdiri dari 7 program dan 45 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.289.800.000	3.085.094.462	93,78
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.885.200.000	2.837.273.379	98,34
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	40.000.000	39.500.000	98,75

4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5.116.477.000	4.672.474.282	91,32
5	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	2.050.000.000	1.857.886.450	90,63
6	PROGRAM FASILITASI PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN DESA	10.650.000.000	10.015.902.576	94,05
7	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT	4.922.580.000	4.772.079.816	96,94
	JUMLAH	**28.954.057.000**	**27.280.210.965**	**94,22**

12. URUSAN PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Perhubungan yang dialokasikan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp 81.803.200.000,00 realisasi sebesar Rp.77.379.987.334,00 atau 94,59% terdiri dari 7 program dan 53 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	14.299.819.000	13.464.032.321	94,16
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	7.102.038.000	6.725.447.164	94,70
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	632.875.000	609.171.500	96,25
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100.000.000	97.235.450	97,24
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN DARAT	56.227.268.000	53.491.367.520	95,13
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT	2.691.200.000	2.500.656.579	92,92
7	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	750.000.000	492.076.800	65,61
	JUMLAH	**81.803.200.000**	**77.379.987.334**	**94,59**

13. URUSAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang dialokasikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 49.761.000.000,00 realisasi sebesar Rp 47.699.143.974,00 atau 95,86% terdiri dari 11 program dan 45 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	10.981.936.000	10.228.465.622	93,14
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6.506.196.000	6.075.640.147	93,38
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	125.000.000	121.192.000	96,95
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	140.000.000	139.850.000	99,89
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI. INFORMASI DAN MEDIA MASSA	19.552.550.000	19.242.585.524	98,41
6	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	5.205.450.000	4.836.131.041	92,91
7	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	456.368.000	442.784.000	97,02
8	PROGRAM PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.273.500.000	1.272.794.850	99,94
9	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	1.720.000.000	1.698.817.465	98,77
10	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/ STATISTIK DAERAH	1.300.000.000	1.291.923.634	99,38
11	PROGRAM PENINGKATAN PERSANDIAN DAERAH	2.500.000.000	2.348.959.691	93,96
	JUMLAH	**49.761.000.000**	**47.699.143.974**	**95,86**

14. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dialokasikan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp.59.481.680.000,00 realisasi sebesar Rp 55.899.930.898,00 atau 93,98% yang terdiri dari 8 program dan 38 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.769.960.000	5.452.999.471	94,51
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.048.320.000	4.004.861.553	98,93
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	150.000.000	147.577.000	98,38
4	PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UMKM	10.875.000.000	10.639.469.266	97,83
5	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA	6.773.400.000	6.197.422.355	91,50

6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM KUMKM	11.800.000.000	10.945.658.410	92,76
7	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	18.065.000.000	16.563.660.853	91,69
8	PROGRAM PENGEMBANGAN AKSES PERMODALAN DAN EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN	2.000.000.000	1.948.281.990	97,41
	JUMLAH	**59.481.680.000,00**	**55.899.930.898**	**93,98**

15. URUSAN PENANAMAN MODAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Penanaman Modal yang dialokasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp18.776.200.000,00 realisasi sebesar Rp 17.157.872.688,00 atau 91,38% yang terdiri dari 7 program dan 35 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.080.200.000	3.615.276.635	88,61
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5.279.020.000	4.451.169.154	84,32
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	10.000.000	7.355.190	73,55
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	272.500.000	251.754.209	92,39
5	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	2.347.790.000	2.245.175.229	95,63
6	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM DAN REALISASI INVESTASI	5.926.940.000	5.729.832.621	96,67
7	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA. SARANA DAN PRASARANA DAERAH	859.750.000	857.309.650	99,72
	JUMLAH	**18.776.200.000**	**17.157.872.688**	**91,38**

16. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dialokasikan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp.293.090.994.000,00 realisasi sebesar Rp 276.365.317.363,00 atau 94,29% yang terdiri dari 12 program dan 56 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	13.511.514.000	12.111.019.627	89,63
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	8.073.550.000	7.780.562.217	96,37
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	300.000.000	286.081.000	95,36
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN/ORGANISASI OLAH RAGA	3.071.800.000	2.954.541.000	96,18
5	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN	1.628.600.000	1.439.280.289	88,38
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	1.200.000.000	1.091.434.350	90,95
7	PROGRAM PENINGKATAN PENYADARAN DAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN	9.854.000.000	9.464.235.379	96,04
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN	147.397.839.000	142.785.382.485	96,87
9	PROGRAM PEMBIBITAN. PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	73.472.869.000	67.782.588.290	92,26
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	11.241.935.000	10.063.866.350	89,52
11	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	20.763.887.000	18.215.121.730	87,73
12	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	2.575.000.000	2.391.204.646	92,86
	JUMLAH	**293.090.994.000**	**276.365.317.363**	**94,29**

17. URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Perpustakaan dan Kearsipan yang dialokasikan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp17.792.270.000,00 realisasi sebesar Rp 17.310.743.920,00 atau 97,29% yang terdiri dari 12 program dan 54 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.769.460.000	4.605.429.695	96,56
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.887.700.000	2.819.878.825	97,65
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000	24.887.000	99,55

4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	405.110.000	403.751.050	99,66
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA	3.085.000.000	3.024.210.900	98,03
6	PROGRAM PENINGKATAN SDM PERPUSTAKAAN	250.000.000	249.561.900	99,82
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN	2.300.000.000	2.194.334.040	95,41
8	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PERPUSTAKAAN	675.000.000	653.080.750	96,75
9	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	1.400.000.000	1.370.379.050	97,88
10	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	1.335.000.000	1.307.130.710	97,91
11	PROGRAM PENINGKATAN PEMASYARAKATAN KEARSIPAN KEPADA MASYARAKAT	500.000.000	498.100.000	99,62
12	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	160.000.000	160.000.000	100
	JUMLAH	**17.792.270.000**	**17.310.743.920**	**97,29**

18. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Kelautan dan Perikanan yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 81.582.224.000,00 realisasi sebesar Rp 70.440.626.361,00 atau 86,34% yang terdiri dari 9 program dan 54 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	9.619.600.000	8.589.181.111	89,29
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	7.765.400.000	7.453.221.939	95,98
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100.000.000	82.794.500	82,79
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	30.097.521.000	21.534.035.400	71,55
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	18.639.303.000	17.996.212.264	96,55
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	3.460.400.000	3.407.585.530	98,47
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.100.000.000	2.064.470.636	98,31
8	PROGRAM OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	8.200.000.000	7.764.966.981	94,69
9	PROGRAM REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.600.000.000	1.548.158.000	96,76
	JUMLAH	**81.582.224.000**	**70.440.626.361**	**86,34**

19. URUSAN PERTANIAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pertanian sebesar Rp 274.478.569.000,00 realisasi sebesar Rp 242.352.820.647,00 atau 88,30% yang dilaksanakaan oleh 2 (dua) Satuan Perangkat Daerah (SKPD), yaitu :

a). DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp 187.541.729.000,00 realisasi sebesar Rp166.081.679.800,00 atau 88,56% yang terdiri dari 5 program dan 71 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	11.611.000.000	10.392.360.483	89,50
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	15.401.686.000	13.920.179.294	90,38
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	190.000.000	105.175.000	55,36
4	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	144.517.893.000	126.870.143.000	87,79
5	PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN PENYULUHAN PERTANIAN	15.821.150.000	14.793.822.023	93,51
	JUMLAH	**187.541.729.000**	**166.081.679.800**	**88,56**

b). DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp 86.936.840.000,00 realisasi sebesar Rp76.271.140.847,00 atau 87,73% yang terdiri dari 4 program dan 35 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	11.481.796.000	10.759.114.846	93,71
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	14.507.644.000	12.083.396.595	83,29
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	200.000.000	177.300.000	88,65
4	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	60.747.400.000	53.251.329.406	87,66
	JUMLAH	**86.936.840.000**	**76.271.140.847**	**87,73**

20. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dialokasikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp.65.269.018.000,00 realisasi sebesar Rp 57.839.942.907,00 atau 88,62% yang terdiri dari 10 program dan 78 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.679.228.000	6.688.513.895	87,10
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	16.656.694.000	15.098.166.015	90,64
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	112.500.000	108.066.000	96,06
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	101.024.000	74.753.500	74,00
5	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	750.000.000	667.105.000	88,95
6	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM	3.350.000.000	3.221.087.000	96,15
7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN DAN AIR TANAH	14.243.195.000	12.584.830.644	88,36
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS	14.824.637.000	12.320.731.313	83,11
9	PROGRAM PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	7.201.740.000	6.768.180.540	93,98
10	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	350.000.000	308.509.000	88,15
	JUMLAH	**65.269.018.000**	**57.839.942.907**	**88,62**

21. URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Perindustrian dan Perdagangan yang dialokasikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp56.691.000.000,00 realisasi sebesar Rp 51.833.840.545,00 atau 91,43% yang terdiri dari 13 program dan 76 kegiatan, yaitu:

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	15.193.140.000	13.883.169.859	91,38
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5.476.860.000	5.296.348.975	96,70
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	437.000.000	416.110.202	95,22
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	285.000.000	270.820.000	95,02
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN	380.000.000	349.984.250	92,10
6	PROGRAM PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	300.000.000	254.470.000	84,82
7	PROGRAM PENINGKATAN EKSPOR. PROMOSI DAN EFISIENSI IMPOR	7.500.000.000	6.569.594.336	87,59
8	PROGRAM PENINGKATAN LOGISTIK DAERAH. AKSES PASAR DALAM NEGERI DAN PEMBERDAYAAN UDKM	4.335.000.000	3.887.500.260	89,68
9	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	3.600.000.000	3.498.791.120	97,19
10	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM. MESIN DAN TEKSTIL	7.394.500.000	6.824.429.625	92,29
11	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI. ELEKTRONIKA. TELEMATIKA DAN ANEKA	3.269.500.000	2.963.206.160	90,63
12	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO. KIMIA DAN HASIL HUTAN	6.000.000.000	5.504.873.158	91,75
13	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUTAN KELEMBAGAAN INDUSTRI DAN DAGANG	2.520.000.000	2.114.542.600	83,91
	JUMLAH	**56.691.000.000**	**51.833.840.545**	**91,43**

22. URUSAN ADMINISTRASI UMUM

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Administrasi Umum sebesar Rp 315.212.970.000,00 realisasi sebesar Rp 289.564.749.640,00 atau 91,86% yang dilaksanakaan oleh 2 (dua) Satuan Perangkat Daerah (SKPD), yaitu :

a). SEKRETARIAT DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp 159.819.250.000,00 realisasi sebesar Rp 150.691.842.291,00 atau 94,29% yang terdiri dari 11 program dan 118 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	43.780.750.000	40.029.097.627	91,43
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	52.956.000.000	50.808.680.445	95,95
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	390.000.000	357.230.000	91,60
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	550.000.000	455.832.125	82,88
5	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	150.000.000	142.351.900	94,90
6	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN	25.000.000	20.808.000	83,23
7	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.200.000.000	1.150.453.238	95,87
8	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.410.000.000	5.407.200.000	99,95
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	45.479.100.000	43.246.763.982	95,09
10	PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	6.580.000.000	6.218.391.676	94,50
11	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH	3.298.400.000	2.855.033.298	86,56
	JUMLAH	**159.819.250.000**	**150.691.842.291**	**94,29**

b). SEKRETARIAT DPRD

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp 155.393.720.000,00 realisasi sebesar Rp 138.872.907.349,00 atau 89,37% yang terdiri dari 5 program dan 35 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	37.287.372.000	34.794.181.394	93,31
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	15.075.374.000	14.169.121.581	93,99
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	1.071.670.000	963.100.000	89,87
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	5.400.890.000	4.750.119.650	87,95
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	96.558.414.000	84.196.384.724	87,20
	JUMLAH	**155.393.720.000**	**138.872.907.349**	**89,37**

23. URUSAN PENGAWASAN

INSPEKTORAT

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pengawasan yang dialokasikan pada Inspektorat sebesar Rp 25.540.220.000,00 realisasi sebesar Rp23.617.374.776,00 atau 92,47% yang terdiri dari 6 program dan 29 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.427.930.000	5.057.238.832	93,17
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.590.870.000	3.501.707.830	97,52
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	149.464.000	144.485.000	96,67
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	300.000.000	295.368.967	98,46
5	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	15.500.301.000	14.126.055.876	91,13
6	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	571.655.000	492.518.271	86,16
	JUMLAH	**25.540.220.000**	**23.617.374.776**	**92,47**

24. URUSAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDALITBANG)

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang dialokasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp 36.975.426.000,00 realisasi sebesar Rp35.588.858.882,00 atau 96,25% yang terdiri dari 10 program dan 37 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.221.957.000	6.652.760.774	92,12
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5.148.876.000	4.826.661.089	93,74
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	70.000.000	68.075.000	97,25

4	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN	200.000.000	199.741.859	99,87
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	80.000.000	79.573.000	99,47
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.300.000.000	7.023.274.354	96,21
7	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	1.900.000.000	1.899.753.698	99,99
8	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	2.488.653.000	2.457.308.284	98,74
9	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBERDAYA ALAM	2.460.000.000	2.434.001.162	98,94
10	PROGRAM PENGEMBANGAN IPTEK DAN INOVASI DAERAH	10.105.940.000	9.947.709.662	98,43
	JUMLAH	**36.975.426.000**	**35.588.858.882**	**96,25**

25. URUSAN KEUANGAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Keuangan sebesar Rp 256.046.820.000,00 realisasi sebesar Rp 226.937.252.270,00 atau 88,63% yang dilaksanakaan oleh 2 (dua) Satuan Perangkat Daerah (SKPD), yaitu :

a). BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp 203.221.820.000,00 realisasi sebesar Rp.182.433.887.554,00 atau 89,77% yang terdiri dari 5 program dan 37 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5=(4:3)x100**
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	92.618.043.000	85.029.220.997	91,81
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	81.947.120.000	70.954.815.989	86,59
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	436.000.000	386.952.000	88,75
4	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	18.516.537.000	17.072.078.739	92,20
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	9.704.120.000	8.993.660.829	92,68
	JUMLAH	**203.221.820.000**	**182.433.887.554**	**89,77**

b). BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 52.825.000.000,00 realisasi sebesar Rp.44.503.364.716,00 atau 84,25% yang terdiri dari 6 program dan 43 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	11.662.294.000	8.801.209.581	75,47
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	13.182.532.000	11.654.375.492	88,41
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	278.000.000	262.930.000	94,58
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	185.000.000	125.671.000	67,93
5	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	18.000.060.000	16.004.559.873	88,91
6	PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH	9.517.114.000	7.654.618.770	80,43
	JUMLAH	**52.825.000.000**	**44.503.364.716**	**84,25**

26. URUSAN KEPEGAWAIAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Kepegawaian yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp 33.201.138.000,00 realisasi sebesar Rp 28.198.722.822,00 atau 84,93% yang terdiri dari 4 program dan 51 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.997.440.000	4.450.563.461	89,06
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.705.949.000	4.387.664.433	93,24
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	218.500.000	178.359.587	81,63
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPEGAWAIAN DAN PERANGKAT DAERAH	23.279.249.000	19.182.135.341	82,40
	JUMLAH	**33.201.138.000**	**28.198.722.822**	**84,93**

27. URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pendidikan dan Pelatihan yang dialokasikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp 59.223.452.000,00 realisasi sebesar Rp 54.045.201.030,00 atau 91,26% yang terdiri dari 5 program dan 35 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEU
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	10.876.736.000	9.692.860.947	100	89,12
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12.076.483.000	11.904.740.185	100	98,58
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	482.000.000	466.017.249	100	96,68
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPEGAWAIAN DAN PERANGKAT DAERAH	32.190.670.000	28.818.516.338	100	89,52
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	3.597.563.000	3.163.066.311	100	87,92
	JUMLAH	**59.223.452.000**	**54.045.201.030**		**91,26**

28. URUSAN LAINNYA

BADAN PENGHUBUNG

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Lainnya yang dialokasikan pada Badan Penghubung sebesar Rp 15.437.270.000,00 realisasi sebesar Rp14.555.071.765,00 atau 94,29% yang terdiri dari 7 program dan 30 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.072.100.000	6.614.740.430	93,53
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.050.920.000	3.898.634.475	96,24
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	152.000.000	151.846.000	99,90
4	PROGRAM PEMBINAAN TRADISI. KESENIAN DAN NILAI BUDAYA	1.452.250.000	1.378.150.700	94,90
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	1.820.000.000	1.706.724.410	93,78
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	750.000.000	677.166.000	90,29
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	140.000.000	127.809.750	91,29
	JUMLAH	**15.437.270.000**	**14.555.071.765**	**94,29**

BAB 4
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sejak Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis Akrual. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 serta perkembangan keadaan khususnya yang berkaitan dengan peraturan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1 Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
2. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
4. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
5. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
6. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

4.2.1 Pendapatan – LO

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
b. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.2.2 Pendapatan - LRA

a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

c. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

4.3 Kebijakan Akuntansi Beban

4.3.1 Beban Operasi

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU atau LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

b. Beban Barang dan Jasa

1) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

3) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah, seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi. Beban bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.

4) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

5) Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

6) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

7) Beban Penyusutan

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.

8) Beban Amortisasi

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan.

9) Beban Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu:

a) Metode Penyisihan Piutang

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan.

b) Metode Penghapusan Langsung.

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Beban piutang tak tertagih diukur dengan:

a) Metode Penyisihan Piutang

Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih.

b) Metode Penghapusan Langsung.

Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali.

4.3.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Beban transfer daerah antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja dikelompokkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.
3. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.
4. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah.
5. Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya Surat pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh BUD.
6. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
7. Belanja disajikan pada LRA dan LAK dalam mata uang rupiah.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari SilPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman, penjualan investasi permanen lainnya dan penerimaan pembiayaan daerah lainnya.
2. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.
3. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
4. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1. Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemeritah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan,serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya yang dikelola oleh SKPD.
2. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal penyusunan neraca dan uang kas yang masih berada di bendahara penerimaan sebagai bagian dari Surplus/Defisit-LO yang bersumber dari Pendapatan-LO.

3. Saldo Simpanan di Bank adalah seluruh saldo rekening pemerintah daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
4. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Setara kas meliputi deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang kembali.
5. Berdasarkan unit pengelolaannya kas pemerintah dibagi menjadi dua :
   a. Kas Pemerintah Daerah Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD)
      1) Kas di Kas Daerah merupakan jumlah uang yang berada di rekening kas daerah pemerintah daerah yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
      2) Setara Kas merupakan deposito atau investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid.
   b. Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola SKPD

      Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD) dan Kas di Bendahara SKPD yang karena peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Kas Daerah.
6. Kas dan setara kas diakui pada saat Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
7. Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilai yang disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
8. Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca dan Laporan Arus Kas dijelaskan, diperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Antara lain mengungkapkan penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki pemerintah daerah.

4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Piutang diklasifikasikan ke dalam piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan dan piutang lainnya.
3. Piutang pungutan pendapatan terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi dan piutang PAD yang sah.
4. Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang pajak terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan

Bermotor, Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Air Permukaan dan Piutang Pajak Rokok.

5. Piutang retribusi adalah piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
6. Piutang PAD yang Sah meliputi Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, Piutang Badan Layanan Umum Daerah dan Piutang Bunga Deposito. Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antata pemerintah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit. Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui bila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut, telah ditetapkan surat ketetapan dan/atau telah diterbitkan surat penagihan. Piutang Bunga Deposito diakui sebesar nilai bunga deposito yang akan diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.
7. Piutang perikatan perjanjian adalah hak yang timbul akibat perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, terdiri dari piutang pemberian pinjaman, piutang penjualan kredit dan piutang kemitraan dengan pihak lain.
8. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini antara lain transfer pemerintah pusat lainnya seperti Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya.
9. Piutang lainnya diklasifikasikan dalam piutang tuntutan ganti rugi daerah dan piutang berdasarkan peristiwa lainnya.
10. Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah adalah Piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Bagian lancar TP/TGR merupakan bagian TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
11. Kriteria pengakuan piutang pajak :
    a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
    b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
    c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
12. Secara spesifik pengakuan jenis pendapatan terdiri dari piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer pemerintah dan piutang lainnya.
13. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

14. Piutang pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan / atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daearah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pemayaran atas tagihan tersebut. Terhadap Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pengakuan hak dilakukan pada saat berakhirnya masa pajak atau jatuh tempo. Penerbitan SKPD dilakukan secara Sistem Informasi Manajemen. Apabila hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan piutang pajak tidak terpenuhi seperti kendaraan rusak berat, kendaraan hilang, wajib pajak menutup usaha, wajib pajak meninggal, kendaraan dicabut registrasinya, alamat wajibpajak tidak diketahui kedudukan, kendaraan beralih kepemilikan atau dijual, maka atas SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDKB dapat dibatalkan untuk dilakukan koreksi sejak tanggal diketahui berdasarkan laporan hasil verifikasi.
15. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Mekanisme penarikan Retribusi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu menggunakan surat ketetapan dan dokumen yang persamakan dengan surat ketetapan.
16. Piutang Penjualan Aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara pemeritah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit.
17. Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui dengan kriteria telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut; telah ditetapkan surat ketetapan dan / atau; telah diterbitkan surat penagihan. Untuk piutang pasien rumah sakit dengan jaminan, dicatat sebesar pengakuan klaim pada pihak penjamin. Apabila hasil verifikasi dari pihak penjamin berbeda dengan pengajuan klaim maka dilakukan koreksi sesuai hasil verifikasi.
18. Piutang Bunga Deposito diakui sebesar nilai bunga deposito yang akan diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.
19. Penyisihan piutang tidak tertagih

    Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan tidak tertagih dan disajikan pada LO. Piutang terhadap Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan Piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Penyesuaian piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/ umur piutang sebagai berikut :

Lama menunggak	Kategori	% diragukan Tertagih
- 0 tahun sampai dengan 1 tahun	Lancar	0,5%
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Kurang Lancar	10%
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Diragukan	50%
- Lebih dari 5 tahun	Macet	100%

20. Penghentian pengakuan piutang

    Penghentian pengakuan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas dan penghapusbukuan (*write off*). Mekanisme penghapusan piutang diatur dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang. Untuk piutang pajak dan retribusi dapat dilakukan penghapusan piutang langsung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

21. Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan

    Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

22. Piutang dan penyisihan piutang disajikan sebagai aset lancar dalam Neraca, dan diungkapkan dalam CaLK meliputi, antara lain rincian jenis piutang dan saldo umur dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu

4.8 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

1. Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah.Contoh beban dibayar dimuka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa.
2. Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis terkonsumsi pada periode pelaporan.
3. Pencatatan beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban.
4. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi sebagai Beban Dibayar Dimuka.

5. Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS.
6. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca dan diungkapkan jenis beban dibayar dimuka pada CaLK.

4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

1. Investasi Jangka Pendek :
   a. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
   b. Harus memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah.
   c. Investasi jangka pendek terdiri dari Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) dan Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
   d. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SiLPA dan sebagai surplus atau defisit pada LO.
   e. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan.
   f. Investasi dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
   g. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
   h. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.
2. Investasi Jangka Panjang :
   a. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
   b. Investasi jangka panjang diklasifikasikan ke dalam investasi permanen dan investasi non permanen
   c. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA.
   d. Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi. surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam LO
3. Metode penilaian investasi pemerintah :
   a. Metode Biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan.

b. Metode Ekuitas yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

   Metode ekuitas diterapkan untuk :

   1) Kepemilikan sampai 50%, dan memiliki pengaruh yang signifikan; dan
   2) Kepemilikan lebih dari 50%.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk investasi non permanen berbentuk dana bergulir.

4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Barang persediaan terdiri dari :
   1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah yang terdiri dari barang pakai habis seperti alat tulis kantor,suku cadang; barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
   2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan kemasyarakat;
   3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat;
   4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
4. Persediaan diakui pada saat :
   1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan didalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral.
   2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

   Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.

Pada akhir periode pelaporan jumlah persediaan diketahui dengan melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*). *Stock opname* dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.

5. Pengukuran persediaan dilakukan dengan metode biaya perolehan, harga pokok produksi dan nilai wajar.
6. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.
7. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan :
   a. harga pembelian terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali) berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir tahun.
   b. persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaannya dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
8. Persediaan disajikan di Neraca pada bagian aset lancar.
9. Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:
   a. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   b. Nilai Persediaan yang kadaluarsa dan rusak atau usang serta persediaan yang dimusnahkan pada periode pelaporan.

4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
3. Klasifikasi Aset Tetap adalah : Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan; Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
4. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap : :
   a. Berwujud
   b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
   d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
   e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

6. Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.
7. Pengakuan spesifik atas aset tetap dijelaskan sebagai berikut :
   a. Kepemilikan atas aset tetap ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dalam hal ini misalnya ditandai dengan sertifikat tanah, berita acara serah terima pekerjaan dan bukti kepemilikan lain yang sah dan sesuai perundang-undangan. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti kepemilikan, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, misalnya telah terjadi pembayaran dan/ atau penguasaan atas aset tetap sudah beralih dari pemilik sebelumnya kepada entitas.
   b. Pengadaan aset tetap pemerintah yang sehjak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan. Penyerahan atas aset tetap tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
   c. Tanah yang tercatat di neraca pemerintah daerah, namun masih dalam sengketa berupa belum adanya bukti kepemilikan sah dan kepemilikan ganda yang dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain atau entitas pemerintah lain maka tanah tersebut diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
8. Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
9. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
10. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
11. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).
12. Atas aset hasil dari bonus maka biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.
13. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap maka perlu memperhatikan biaya perolehan aset yang terdiri dari harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat, dan seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/didistribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
14. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, maka biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas).
15. Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
16. Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya

perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

17. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
18. Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap.
19. Aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset ekstrakomtabledan berlaku sejak ditetapkan. Aset ekstrakomtabletidak disajikan pada neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.
20. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan *(carrying amount).*
21. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran *(expenses)* pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.
22. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadinya.
23. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan.Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/ konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
24. Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama.
25. Biaya perolehan aset pertukaran diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.
26. Biaya perolehan dari masing-masing aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
27. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

    Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle serta barang rusak berat, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai

yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

a. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).
b. Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagaimana tercantum pada tabel masa manfaat aset tetap dibawah ini :

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
					Peralatan dan Mesin			
					Alat Besar			
1	3	2	1	1	Alat Besar Darat	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	5
1	3	2	1	2	Alat Besar Apung	8	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	4
1	3	2	1	3	Alat Bantu	8	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	4
1	**3**	**2**	**2**		**Alat Angkutan**			
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	8	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	4
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Tak Bermotor	4	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	2	2	3	Alat Angkut Apung Bermotor	8	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	4
1	3	2	2	4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	4	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	2	5	Alat Angkut Bermotor Udara	20	<25%	0
							25%≤ sd <50%	3
							50%≤ sd <75%	6
							≥75%	9
1	**3**	**2**	**3**		**Alat Bengkel dan Ukur**			
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	5
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	**3**	**2**	**4**		**Alat Bengkel dan Ukur**			
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan	4	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	**3**	**2**	**5**		**Alat Kantor dan Rumah Tangga**			
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	**3**	**2**	**6**		**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**			
1	3	2	6	1	Alat Studio	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	5
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	5
1	**3**	**2**	**7**		**Alat Kedokteran dan Kesehatan**			
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	**3**	**2**	**8**		**Alat Kedokteran dan Kesehatan**			
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	8	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	4
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	<25%	0
							25%≤ sd <50%	3
							50%≤ sd <75%	5
							≥75%	8
1	3	2	8	3	Alat Praktek Sekolah	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	<25%	0
							25%≤ sd <50%	3
							50%≤ sd <75%	5
							≥75%	8

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	4
							≥75%	5
1	3	2	8	6	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	4
							≥75%	5
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	3
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	<25%	0
							25%≤ sd <50%	3
							50%≤ sd <75%	5
							≥75%	7
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	4
							≥75%	5
1	**3**	**2**	**9**		**Alat Persenjataan**			
1	3	2	9	1	Senjata Api	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	4
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	4	<25%	0
							25%≤ sd <50%	0
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	1
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	0
							50%≤ sd <75%	0
							≥75%	2
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	4	<25%	0
							25%≤ sd <50%	0
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	1
1	**3**	**2**	**10**		**Komputer**			
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							≥75%	1
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	1
1	**3**	**2**	**11**		**Alat Eksplorasi**			
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	3
1	**3**	**2**	**12**		**Alat Pengeboran**			
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	4
							≥75%	5
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	**3**	**2**	**13**		**Alat Produksi, Pengolahn dan Pemurnian**			
1	3	2	13	1	Sumur	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	13	2	Produksi	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	13	3	Pengolahan dan Pemurnian	15	<25%	0
							25%≤ sd <50%	3
							50%≤ sd <75%	5
							≥75%	6
1	**3**	**2**	**14**		**Alat Bantu Eksplorasi**			
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	4
							≥75%	5
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	10	<25%	0

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	4
							≥75%	5
1	**3**	**2**	**15**		**Alat Keselamatan Kerja**			
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	3
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	0
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	15	3	Alat SAR	2	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	1
1	3	2	15	4	Alat kerja Penerbangan	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	4
1	**3**	**2**	**16**		**Alat Peraga**			
1	3	2	15	1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	3
1	**3**	**2**	**17**		**Peralatan Proses/Produksi**			
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	8	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	2
1	**3**	**2**	**18**		**Rambu-Rambu**			
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15	<25%	0
							25%≤ sd <50%	3
							50%≤ sd <75%	4
							≥75%	7

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	**3**	**2**	**19**		**Peralatan Olahraga**			
1	3	2	19	1	Peralatan Olahraga	4	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	2
1	**3**	**3**			**Gedung dan Bangunan**			
1	3	3	1		**Bangunan Gedung**			
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja			
					Permanen	50	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
					Semi Permanen	25	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	7
					Darurat	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	5
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal			
					Permanen	50	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
					Semi Permanen	25	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	7
					Darurat	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	5
1	**3**	**3**	**2**		**Monumen**			
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	**3**	**3**	**3**		**Menara**			
1	3	3	3	1	Bangunan Menara Perambuan	40	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	**3**	**3**	**4**		**Tugu Titik Kontrol/Pasti**			
1	3	3	4	1	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	<25%	0

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	**3**	**4**			**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**			
1	**3**	**4**	**1**		**Jalan dan Jembatan**			
1	3	4	1	1	Jalan	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	5
1	3	4	1	2	Jembatan	50	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	**3**	**4**	**2**		**Bangunan Air**			
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	5
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	3
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	3
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Baku	40	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							≥75%	15
1	**3**	**4**	**3**		**Instalasi**			
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih/Baku	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	7
							≥75%	10
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	7
							≥75%	10
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	5
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	5
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	5
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	3
1	3	4	3	10	Instalasi Lainnya	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	3
1	**3**	**4**	**4**		**Jaringan**			

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	7
							≥75%	10
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik dan Komputer	40	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	5
							≥75%	10
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	7
							≥75%	10
1	**3**	**4**	**5**		**Alat Bercorak kebudayaan dan Kesenian**			
1	3	4	5	1	Alat Musik Modern/Band	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	

28. Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
29. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.
30. Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan bentuk fisik aset tersebut (klasifikasinya). Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.
31. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut.Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
32. Penyajian aset bersejarah (heritage assets) tidak harus di neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK. Beberapa Aset Tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.

33. Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

4.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan diakui pada saat pemerintah daerah mengeluarkan kas dari kas umum daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan.
3. Perolehan yang diterima atas dana cadangan berupa jasa giro atau bunga diakui sebagai pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga pada SKPKD.
4. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Sedangkanhasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.

4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan antara lain aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi daerah, aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset lain-lain.
2. Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik
3. Jenis-jenis aset tak berwujud adalah *Goodwill*, hak paten dan hak cipta, royalty, software, lisensi dan *franchise*, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tidak berwujud lainnya dan aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
4. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi definisi dari Aset Tak Berwujud dan kriteria pengakuan
5. Sesuatu dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika memenuhi kriteria :
    1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas.
    2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
6. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
7. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian, terdiri dari:
    a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat,
    b. Setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
8. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

9. Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset tak berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset tak berwujud tersebut.
10. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer dianggap sebagai beban pemeliharaan apabila sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
11. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatanya.Amortisasi dibagi menjadi amortisasi Amortisasi atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang) tidak dilakukan amortisasi.
12. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah :

$$\text{amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasikan}}{\text{Masa manfaat}}$$

    a. Nilai yang dapat diamortisasikan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (residu).
    b. Masa manfaat aset tak berwujud terbatas.
13. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya dengan keadaan dan alasan antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat Aset Tak Berwujud sehingga perlu digantikan dengan yang baru.
14. Aset tak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagia dari "Aset Lainnya".
15. Aset tak berwujud diungkapkan dalam Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut :
    a. masa manfaat dan metode amortisasi;
    b. nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan
    c. penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
16. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh penjualan kendaraan yang dilakukan secara angsuran.
17. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan pemerintah daerah secara angsuran kepada pemerintah telah ditandatangani.
18. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan asset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.
19. Tagihan penjualan angsuran disajikan dalam neraca disertai penjelasan dalam catatan atas laporan keungan.
20. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah adalah Tuntutan ganti rugi daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar

hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

21. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Non Bendahara terdiri dari :
    1. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah
       Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
    2. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi Daerah.
       Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau tuntutan piutang ganti rugi pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan.
    3. Pengakuan Beban
       Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara atau non bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.
22. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya" dan informasi yang perlukan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
23. Aset Kerjasama/Kemitraan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
24. Jenis-jenis aset kemitraan adalah Bangun, Guna, Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT), Bangun, Serah, Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO), Kerjasama Pemanfaatan (KSP).
25. Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya.
26. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK
27. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.
28. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
29. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
2. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan fihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang transfer dan utang jangka pendek lainnya.
6. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Termasuk pendapatan diterima dimuka adalah deposit/uang titipan pihak ketiga dalam transaksi *financial technology*.
7. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
8. Kewajiban pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK.

4.15 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

a. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.
b. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :
    a. Ekuitas digunakan untuk mencatat akun saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.
    b. Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK-PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan berada di SKPD.
c. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO dalam neraca
d. Ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi trasnsaksi resiprokal antara SKPKD dan SKPD.
e. Pada akhir periode pelaporan, ekuitas dikonsolidasikan akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasian.
f. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.16 Kebijakan Akuntansi Koreksi

1. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya
2. Ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan faktor lainnya.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

    a. Kesalahan tidak berulang

    1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

        Kesalahan ini yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO maupun beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

a) Koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b) Koreksi saat laporan keuangan telah terbit (Perda Pertanggungjawaban)

(1) Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

(a) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;

(b) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;

(2) Belanja dan Beban

(a) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih;

(b) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.

(3) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

(4) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

(5) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan,

(6) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan

keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

b. Kesalahan berulang dan sistematis

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

BAB 5
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah TA 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD TA 2018. Anggaran dan realisasi APBD TA 2018 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Pendapatan	24.815.550.076.000,00	24.702.318.190.582,34	99,54	23.703.174.631.507,00
2	Belanja dan transfer	26.186.587.329.000,00	24.478.632.557.339,00	93,48	22.884.713.018.754,00
3	**Surplus/(Defisit)**	**(1.371.037.253.000,00)**	**223.685.633.243,34**	**(16,32)**	**818.461.612.753,00**
4	Pembiayaan				
	- Penerimaan	1.511.037.253.000.00	1.528.916.848.598,20	101,18	646.575.639.755,00
	- Pengeluaran	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	100,00	304.000.000.000,00
	Pembiayaan netto	**1.371.037.253.000,00**	**1.388.916.848.598,20**	**101,30**	**342.575.639.755,00**
5	**SiLPA**	**0,00**	**1.612.602.481.841,54**	**0,00**	**1.161.037.252.508,00**

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

5.1.1 PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

5.1.1.1 Pendapatan Daerah Rp24.702.318.190.582,34

Total realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp24.702.318.190.582,34 atau 99,54% dari target Rp24.815.550.076.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp23.703.174.631.507,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Asli daerah	13.396.772.661.000,00	13.711.836.037.849,34	102,35	12.547.513.389.400,00
2	Pendapatan Transfer	11.396.769.415.000,00	10.968.474.152.733,00	96,24	11.118.722.318.263,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	22.008.000.000,00	22.008.000.000,00	100,00	36.938.923.844,00
	Jumlah	**24.815.550.076.000,00**	**24.702.318.190.582,34**	**99,54**	**23.703.174.631.507,00**

5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp13.711.836.037.849,34

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp13.711.836.037.849,34 atau 102,35% dari target Rp13.396.772.661.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp12.547.513.389.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Pajak Daerah	11.087.697.617.000,00	11.507.119.643.262,00	103,78	10.572.698.332.610,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	108.979.571.000,00	104.870.144.923,00	96,23	107.372.397.279,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	459.626.558.000,00	459.626.767.964,00	100,00	371.072.481.501,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.740.468.915.000,00	1.640.219.481.700,34	94,24	1.496.370.178.010,00
	Jumlah	**13.396.772.661.000,00**	**13.711.836.037.849,34**	**102,35**	**12.547.513.389.400,00**

5.1.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Rp11.507.119.643.262,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp11.507.119.643.262,00 atau 103,78% dari target Rp11.087.697.617.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp10.572.698.332.610,00. Pelaksanaan pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Kendaraan Bermotor	4.064.855.000.000,00	4.248.132.806.425,00	104,51	3.846.112.941.500,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.145.682.000.000,00	3.423.363.674.275,00	108,83	3.031.219.174.000,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.765.500.000.000,00	1.846.840.170.007,00	104,61	1.653.549.702.810,00
4	Pajak Air Permukaan	12.200.000.000,00	12.983.347.703,00	106,42	11.422.772.199,00
5	Pajak Rokok	2.099.460.617.000,00	1.975.799.644.852,00	94,11	2.030.393.742.101,00
	Jumlah	**11.087.697.617.000,00**	**11.507.119.643.262,00**	**103,78**	**10.572.698.332.610,00**

Capaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah melebihi target dikarenakan aktif melakukan ekstensifikasi dan intesifikasi Pajak Daerah, meningkatkan kegiatan penagihan dan meningkatkan mutu pelayanan Pajak seperti dengan menambah titik layanan SAMSAT (samsat mall, samsat keliling dan samsat paten) dan mempermudah pembayaran Pajak Kendaran Bermotor dengan pembayaran e-Samsat (SAKPOLE).

Realisasi Pajak Rokok yang tidak melampaui target dikarenakan untuk hasil pajak rokok triwulan III dan IV tahun 2018, Kementrian Keuangan langsung transfer kontribusi Pemerintah Provinsi dan Kabupate/Kota dari pajak rokok (37,5%) ke BPJS Kesehatan sebesar Rp213.417.268.719,00 tanpa melalui rekening Kas Umum Daerah.

5.1.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Rp104.870.144.923,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp104.870.144.923,00 atau 96,23% dari target Rp108.979.571.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp107.372.397.279,00. Pelaksanaan pengenaan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Jasa Umum	27.675.725.000,00	24.563.152.753,00	88,75	28.176.575.450,00
2	Retribusi Jasa Usaha	77.916.296.000,00	75.664.061.570,00	97,11	72.440.667.629,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	3.387.550.000,00	4.642.930.600,00	137,06	6.755.154.200,00
	Jumlah	**108.979.571.000,00**	**104.870.144.923,00**	**96,23**	**107.372.397.279,00**

5.1.1.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum Rp24.563.152.753,00

Realisasi untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp24.563.152.753,00 atau 88,75% dari target Rp27.675.725.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp28.176.575.450,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	26.526.625.000,00	23.142.707.753,00	87,24	26.840.492.950,00
2	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	350.400.000,00	515.800.000,00	147,20	667.475.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pendidikan	798.700.000,00	904.645.000,00	113,26	668.607.500,00
	Jumlah	**27.675.725.000,00**	**24.563.152.753,00**	**88,75**	**28.176.575.450,00**

5.1.1.1.1.2.1.1 Pendapatan Retribusi Jasa Kesehatan Rp23.142.707.753,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp23.142.707.753,00 atau 87,24% dari target Rp26.526.625.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp26.840.492.950,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Kesehatan.

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Kesehatan	26.526.625.000,00	23.142.707.753,00	87,24	26.840.492.950,00
	Jumlah	**26.526.625.000,00**	**23.142.707.753,00**	**87,24**	**26.840.492.950,00**

Realisasi pendapatan retribusi jasa kesehatan yang tidak melampaui target (87,24%) dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran klaim BPJS; adanya regulasi baru dari BPJS (sistem rujukan berjenjang *online*) yang mengakibatkan penurunan jumlah pasien rujukan paru; dan kurangnya jumlah Dokter Spesialis pada Balkesmas dan BKIM sehingga pelayanan menjadi kurang optimal.

5.1.1.1.1.2.1.2 Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp0,00

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Tahun Anggaran 2018 tidak dianggarkan dan Tahun Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Tahun Anggaran 2017 tidak dianggarkan

5.1.1.1.1.2.1.3 Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp515.800.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp515.800.000,00 atau 147,20% dari target Rp350.400.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp667.475.000,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas LH & Kehutanan	2.500.000,00	2.650.000,00	106,00	2.025.000,00
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	347.900.000,00	513.150.000,00	147,50	665.450.000,00
	Jumlah	**350.400.000,00**	**515.800.000,00**	**147,20**	**667.475.000,00**

Capaian realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp513.150.000,00 atau 147,50% dari target Rp350.400.000,00 dikarenakan adanya perubahan tarif sesuai Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5.1.1.1.1.2.1.4 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp904.645.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp904.645.000,00 atau 113,26 % dari target Rp798.700.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp668.607.500,00 dengan rincian sesuai SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	598.700.000,00	655.600.000,00	109,50	507.940.000,00
2	Dinas Koperasi dan UKM	100.000.000,00	120.000.000,00	120,00	50.000.000,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000,00	129.045.000,00	129,05	110.667.500,00
	Jumlah	**798.700.000,00**	**904.645.000,00**	**113,26**	**668.607.500,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah melebihi mencapai target antara lain :

1. Realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan melebihi target pada Dinas Koperasi dan UKM (120%) dikarenakan banyaknya minat dari peserta pendidikan dan pelatihan.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (129,05%) disebabkan banyaknya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan mau memanfaatkan pelatihan operator garmen secara mandiri, serta bersedia membayar pelatihan sebesar Rp100.000,00 sehingga meningkatkan penerimaan BIPTAK.

5.1.1.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rp75.664.061.570,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp75.664.061.570,00 atau 99.65% dari target Rp77.916.296.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp72.440.667.629,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	46.864.402.000,00	48.328.762.107,00	103,12	50.592.481.364,00
2	Retribusi Terminal	1.577.897.000,00	0,00	0,00	1.056.093.750,00
3	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	7.932.175.000,00	8.209.161.860,00	103,49	3.042.002.500,00
4	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	20.806.244.000,00	18.146.102.378,00	87,21	17.179.118.015,00
6	Retribusi Tempat Pelelangan	734.178.000,00	978.635.225,00	133,30	569.572.000,00
	Jumlah	**77.916.296.000,00**	**75.664.061.570,00**	**97,11**	**72.440.667.629,00**

5.1.1.1.1.2.2.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp48.328.762.107,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp48.328.762.107,00 atau 103,12% dari target Rp46.864.402.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp50.592.481.364,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.640.105.000,00	2.371.413.000,00	89,82	1.857.286.000,00
2	Dinas Kesehatan	606.201.000,00	860.081.000,00	141,88	673.480.000,00
3	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya	7.240.000.000,00	4.677.574.600,00	64,61	7.194.267.663,00
4	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	4.417.700.000,00	4.087.067.916,00	92,52	4.090.328.708,00
5	Satpol PP	385.000.000,00	456.495.636,00	118,57	396.458.600,00
6	Dinas Sosial	52.950.000,00	63.990.000,00	120,85	247.215.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.605.100.000,00	4.150.345.000,00	115,12	4.359.088.001,00
8	Dinas LH & Kehutanan	4.547.500.000,00	5.289.706.328,00	116,32	4.540.182.710,00
9	Dinas Perhubungan	1.959.045.000,00	2.032.583.500,00	103,75	737.771.000,00
10	Dinas Koperasi dan UKM	599.775.000,00	358.940.000,00	59,85	682.015.000,00
11	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	1.495.000.000,00	1.665.561.375,00	111,41	1.679.879.055,00
12	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	80.000.000,00	85.245.700,00	106,56	89.753.940,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.405.700.000,00	4.615.243.069,00	135,52	3.220.578.380,00
14	Dinas Pertanian dan Perkebunan	768.291.000,00	879.707.469,00	114,50	838.359.556,00
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.112.280.000,00	1.278.716.250,00	114,96	1.202.983.790,00
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.252.100.000,00	1.435.894.775,00	114,68	1.269.178.135,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.405.000.000,00	2.463.291.149,00	102,42	2.425.615.320,00
18	Sekretariat Daerah	1.854.850.000,00	1.698.624.800,00	91,58	2.133.480.000,00
19	Sekretariat DPRD	492.000.000,00	492.000.000,00	100,00	493.900.000,00

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
20	Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	25.200.000,00
21	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.388.355.000,00	3.881.444.565,00	114,55	4.358.887.541,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.954.150.000,00	2.184.444.611,00	111,78	5.136.253.725,00
23	Badan Pengembangan SDM	2.288.100.000,00	2.983.691.364,00	130,40	2.655.919.240,00
24	Badan Penghubung	290.000.000,00	291.500.000,00	100,52	284.400.000,00
	Jumlah	**46.864.402.000,00**	**48.328.762.107,00**	**103,12**	**50.592.481.364,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak mencapai target antara lain :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat mencapai target atau hanya sebesar (89,82%) dikarenakan Objek pendapatan yang letaknya kurang strategis, fasilitas yang kurang memadai.
2. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tidak dapat mencapai target atau hanya sebesar (64,61%) dikarenakan:
   a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tidak diperkenankan melakukan pemungutan retribusi di ruas-ruas jalan nasional, tidak dilakukan pemungutan reklame bando dan tidak melakukan pemungutan reklame pada median jalan.
   b. Berdasarkan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Nomor 28 Tahun 2009 tidak diperkenankan melakukan pemungutan pemasangan tiang dan kabel listrik/telepon.
   c. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tidak diperkenankan melakukan pemungutan Kios, Pipa, dan jalan masuk perusahaan.
   d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tidak diperkenankan melakukan pemungutan reklame produk tembakau berupa rokok dijalan utama/protokol, kawasan bebas rokok, melintang jalan dan ukuran maksimal 72m.
   e. Alat-alat berat yang dimiliki Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sudah tua dan lama sehingga menyebabkan minat pihak swasta utk meminjam/menyewa berkurang.
   f. Banyak rekanan yang sudah memiliki alat berat sendiri dan banyaknya rental alat berat yang ada menyebabkan terjadinya persaingan yang semakin berat.
   g. Untuk jenis alat berat Cold Milling yang selama ini banyak menghasilkan retribusi karena disewa oleh rekanan terutama dijalan Nasional namun sekarang ini tidak lagi disewa karena pihak Kementerian PU yang semula hanya memiliki 1 unit saat ini memiliki 4 unit. Dengan jumlah tersebut maka kebutuhan alat berat termaksud untuk pelaksanaan pekerjaan di jalan nasional sudah terpenuhi.
3. Dinas Koperasi dan UMKM tidak dapat mencapai target atau hanya sebesar (59,85%) dikarenakan berkurangnya minat untuk menyewa fasilitas yang disediakan di UMKM Centre.

5.1.1.1.1.2.2.2 Pendapatan Retribusi Terminal **Rp0,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar 0,00 atau 0,00% dari target Rp1.577.897.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Perhubungan	1.577.897.000,00	0,00	0,00	1.056.093.750,00
	Jumlah	**1.577.897.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.056.093.750,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dikarenakan belum ada Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan retribusi pelayanan masuk terminal bagi angkutan.

5.1.1.1.1.2.2.3 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa **Rp8.209.161.860,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp8.209.161.860,00 atau 103,49% dari target Rp7.932.175.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.042.002.500,00 dengan rincian sesuai SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Sosial	7.050.000,00	7.050.000,00	100,00	0,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	170.200.000,00	147.200.000,00	86,49	143.000.000,00
3	Dinas Koperasi & UKM	50.225.000,00	274.684.540,00	546,91	0,00
4	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	1.155.000.000,00	1.128.475.000,00	97,70	1.117.077.500,00
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	115.050.000,00	156.330.000,00	135,88	0,00
6	Sekretariat Daerah	166.650.000,00	113.550.000,00	68,14	102.700.000,00
7	Sekretariat DPRD	1.008.000.000,00	849.000.000,00	84,23	955.025.000,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.550.000.000,00	4.820.912.320,00	105,95	0,00
9	Badan Penghubung	710.000.000,00	711.960.000,00	100,28	724.200.000,00
	Jumlah	**7.932.175.000,00**	**8.209.161.860,00**	**103,49**	**3.042.002.500,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Villa tidak dapat mencapai target antara lain :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya mencapai 86,49 % dikarenakan disekitar Hotel BIP Tawangmangu saat ini banyak terdapat hotel-hotel dengan fasilitas yang lebih representatif serta sumber daya manusia yang kurang. Sarana prasarana Hotel BIP Tawangmangu kurang memadai, dengan kondisi hanya terdapat 22 kamar sehingga tidak mampu menampung pengunjung dengan jumlah yang besar.
2. Sekretariat Daerah hanya mencapai target 68,14% dan Sekretariat DPRD hanya mencapai target 84,23% disebabkan fasilitas yang disediakan kurang representatif dan sumber daya manusia yang masih minim sehingga kalah bersaing dengan kompetitor yang lebih memberikan pelayanan dan fasilitas yang lebih modern.

5.1.1.1.1.2.2.4 Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga Rp1.400.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.400.000,00, atau 100,00 % dari target Rp1.400.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.400.000,00, dengan rincian sesuai SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00
	Jumlah	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**100,00**	**1.400.000,00**

5.1.1.1.1.2.2.5 Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp18.146.102.378,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp18.146.102.378,00 atau 87,21% dari target Rp20.806.244.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp17.179.118.015,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.444.300.000,00	2.114.060.000,00	146,37	1.921.721.800,00
2	Dinas Pertanian dan Perkebunan	13.645.409.000,00	11.307.744.328,00	82,87	10.746.161.865,00
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.716.535.000,00	4.724.298.050,00	82,64	4.511.234.350,00
	Jumlah	**20.806.244.000,00**	**18.146.102.378,00**	**87,21**	**17.179.118.015,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan melebihi target atau (146,37%) dikarenakan peningkatan penjualan melampaui target khususnya dari balai air payau yaitu panen benih ikan dan penjualan udang di Maribaya. Sedangkan realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan tidak mencapai target atau (82,87%) disebabkan antara lain Penjualan hasil kebun untuk tahun 2018 tidak tercapai dikarenakan musim yang tidak menentu sehingga banyak tanaman perkebunan yang gagal panen seperti tanaman padi mengalami puso dan tanaman jeruk yang gagal panen.

5.1.1.1.1.2.2.6 Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan Rp978.635.225,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp978.635.225,00 atau 133,30% dari target Rp734.178.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp569.572.000,00 pendapatan ini dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	734.178.000,00	978.635.225,00	133,30	569.572.000,00
	Jumlah	**734.178.000,00**	**978.635.225,00**	**133,30**	**569.572.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp978.635.225,00 atau 133,30% dari target dikarenakan meningkatkan kualitas kayu industri di Tahun 2018 serta melakukan kerjasama dengan pihak KPKNL mengundang pembeli dari sektor industri kayu dan kualitas kayu yang dilelang lebih bagus sehinggga penawaran lelang kayu jenis sonokeling yang memiliki kualitas hampir sama dengan kayu jati namun dengan harga lebih murah sehingga banyak peminatnya.

5.1.1.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Rp4.642.930.600,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.642.930.600,00 atau 137,06% dari target Rp3.387.550.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.755.154.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Ijin Trayek	629.550.000,00	699.400.000,00	111,10	927.486.000,00
2	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	1.900.000.000,00	3.159.968.200,00	166,31	5.055.191.800,00
3	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	858.000.000,00	783.562.400,00	91,32	772.476.400,00
	Jumlah	**3.387.550.000,00**	**4.642.930.600,00**	**137,06**	**6.755.154.200,00**

5.1.1.1.1.2.3.1 Pendapatan Retribusi Ijin Trayek Rp699.400.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp699.400.000,00 atau 111,10% dari target Rp629.550.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp927.486.000,00 dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika	629.550.000,00	699.400.000,00	111,10	927.486.000,00
	Jumlah	**629.550.000,00**	**699.400.000,00**	**111,10**	**927.486.000,00**

5.1.1.1.1.2.3.2 Pendapatan Retribusi Ijin Usaha Perikanan Rp3.159.968.200,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.159.968.200,00 atau 166,31% dari target Rp1.900.000.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.055.191.800,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.900.000.000,00	3.159.968.200,00	166,31	5.055.191.800,00
	Jumlah	**1.900.000.000,00**	**3.159.968.200,00**	**166,31**	**5.055.191.800,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.159.968.200,00 atau 166,31% dikarenakan pada awal Tahun 2017 Pemerintah Pusat mengeluarkan regulasi berupa perpanjangan pelarangan alat cantrang, kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemilik kapal untuk perpanjangan ijin kapal hingga saat ini.

5.1.1.1.1.2.3.3 Pendapatan Retribusi IMTA **Rp783.562.400,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp783.562.400,00 atau 91,32% dari target Rp858.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp772.476.400,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan.

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	858.000.000,00	783.562.400,00	91,32	772.476.400,00
	Jumlah	**858.000.000,00**	**783.562.400,00**	**91,32**	**772.476.400,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp783.562.400,00 atau 91,32% dari target dikarenakan adanya Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dimana untuk kategori Manajer ke atas tidak memerlukan IMTA.

5.1.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan **Rp459.626.767.964,00**
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp459.626.767.964,00 atau 100,00% dari target Rp459.626.767.964,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp371.072.481.501,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	100,00	6.224.814.706,00
2	Bagian Laba PT. Bank Jateng	341.139.512.000,00	341.139.512.009,00	100,00	265.246.817.254,00
3	Bagian Laba BPR-BKK	67.219.079.000,00	67.219.285.749,00	100,00	57.031.441.365,00
4	Bagian Laba PDAB Slawi (Tirta Utama)	3.315.530.000,00	3.315.530.402,00	100,00	3.058.025.665,00
5	Deviden PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	3.917.051.000,00	3.917.051.730,00	100,00	4.295.992.206,00
6	Deviden PT. Asuransi Bangun Askrida	6.360.924.000,00	6.360.924.248,00	100,00	6.974.113.531,00
7	Deviden PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	20.903.469.000,00	20.903.469.671,00	100,00	20.886.360.443,00
8	Deviden PT. Sarana Patra Hulu Cepu	7.225.040.000,00	7.225.040.483,00	100,00	5.750.789.290,00
9	Deviden PT. Jamkrida	3.045.953.000,00	3.045.953.672,00	100,00	1.604.127.041,00
	Jumlah	**459.626.558.000,00**	**459.626.767.964,00**	**100,00**	**371.072.481.501,00**

5.1.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp1.640.219.481.700,34

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.640.219.481.700,34 atau 94,24% dari target Rp1.740.468.915.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.496.370.178.010,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	549.500.000,00	2.303.698.128,00	419,24	721.589.037,00
2	Penerimaan Jasa Giro	65.000.000.000,00	66.077.362.541,00	101,66	71.422.612.976,00
3	Penerimaan Bunga	135.010.000.000,00	173.055.752.450,00	128,18	148.368.770.222,00
4	Tuntutan Ganti Rugi	17.500.000,00	30.200.000,00	172,57	6.500.000,00
5	Pendapatan Denda Keterlambatan	0,00	2.281.614.797,00	0,00	1.647.983.674,00
6	Pendapatan Denda Pajak	125.000.000.000,00	147.065.780.931,00	117,65	76.503.535.952,00
7	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	89.478.463,00	0,00	40.253.695,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	7.707.921.585,00	0,00	8.671.337.519,00
9	Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	8.575.696.000,00	13.065.141.000,00	152,35	182.077.031,00
10	Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	16.631.219.000,00	16.884.628.386,00	101,52	19.258.228.260,00
11	Penerimaan dari BLUD	1.352.600.000.000,00	1.209.365.731.875,34	89,41	1.142.554.853.397,00
12	Penerimaan Lain-Lain	37.085.000.000,00	2.292.171.544,00	6,18	26.992.436.247,00
	Jumlah	1.740.468.915.000,00	1.640.219.481.700,34	94,24	1.496.370.178.010,00

5.1.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Rp2.303.698.128,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.303.698.128,00 atau 419,24% dari target Rp549.500.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp721.589.037,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.820.522.178,00

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Tidak Terpakai	140.000.000,00	151.439.739,00	108,17	378.309.872,00
2	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	63.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	202.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Penjualan Bahan Bekas Bangunan	126.000.000,00	1.669.082.439,00	1324,67	0,00
	Jumlah	**531.500.000,00**	**1.820.522.178,00**	**342,53**	**378.309.872,00**

2. Dinas Bina Marga dan Ciptakarya sebesar Rp460.538.450,00

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Penjualan Drum Bekas	0,00	38.249.000,00	0,00	57.204.500,00
2	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	0,00	422.289.450,00	0,00	273.374.665,00
	Jumlah	**0,00**	**460.538.450,00**	**0,00**	**330.579.165,00**

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp22.637.500,00

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Penjualan Hasil Peternakan	12.000.000,00	13.585.000,00	113,21	12.700.000,00
2	Penjualan Hasil Perikanan	6.000.000,00	9.052.500,00	150,88	0,00
	Jumlah	**18.000.000,00**	**22.637.500,00**	**125,76**	**12.700.000,00**

5.1.1.1.1.4.2 Penerimaan Jasa Giro **Rp66.077.362.541,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp66.077.362.541,00 atau 101,66% dari target Rp65.000.000.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp71.422.612.976,00 yang terdiri dari penerimaan jasa giro kas daerah dan bendahara pengeluaran seluruh SKPD.

5.1.1.1.1.4.3 Penerimaan Bunga **Rp173.055.752.450,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp173.055.752.450,00 atau 128,18% dari target Rp135.000.000.000,00 dan Bunga Jasa Dana Bergulir sebesar Rp7.621.250,00 yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp148.368.770.222,00. Rincian sebagai berikut:

a. Bunga Deposito

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Bank Jateng	135.000.000.000,00	120.803.424.547,00	89,48	141.135.616.371,00
2	Bank BTN	0,00	7.197.068.467,00	0,00	3.949.999.980,00
3	Bank Mandiri	0,00	283.561.642,00	0,00	997.117.196,00
4	Bank BRI	0,00	8.970.393.689,00	0,00	1.702.130.329,00
5	Bank Bukopin	0,00	296.746.570,00	0,00	184.683.627,00
6	Bank Muamalat	0,00	179.128.080,00	0,00	388.745.253,00
7	Dana cadangan	0,00	35.317.808.205,00	0,00	0,00
	Jumlah	**135.000.000.000,00**	**173.048.131.200,00**	**128,18**	**148.358.292.756,00**

b. Penerimaan Jasa Dana Bergulir

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Penerimaan jasa perguliran bantuan peralatan kpd IKM - Disperindag	10.000.000,00	7.621.250,00	76,21	10.477.466,00
	Jumlah	**10.000.000,00**	**7.621.250,00**	**76,21**	**10.477.466,00**

5.1.1.1.1.4.4 Tuntutan Ganti Rugi **Rp30.200.000,00**

Realisasi Penerimaan Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp30.200.000,00, terdiri dari Rp12.700.000,00 pada SKPKD yang merupakan pembayaran ganti rugi kehilangan kendaraan dinas roda 2 (dua) Merk Honda Supra X 125 Tahun 2013 No Pol H 9690 TG sesuai dengan SK Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah Nomor 979.4/789 tanggal 31 Juli 2018 dan Rp17.500.000,00 pada Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan ganti rugi uang atas denda CPNS yang mengundurkan diri/diterima bekerja di tempat lain, sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.500.000,00.

5.1.1.1.1.4.5 Pendapatan Denda Keterlambatan **Rp2.281.614.797,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.281.614.797,00 berupa denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada SKPD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang dianggarkan dan terealisasi pada SKPKD, sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.647.983.674,00.

5.1.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda Pajak **Rp147.065.780.931,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp147.065.780.931,00 berupa denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp142.209.882.987,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp4.846.620.825,00, dan Pajak Air Permukaan Rp9.277.119,00, Pendapatan ini dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

(Dalam Rupiah)

Badan Pengelola Pendapatan Daerah

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Denda Pajak Kendaraan Bermotor	125.000.000.000,00	142.209.882.987,00	113,77	72.022.378.352,00
2	Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	4.846.620.825,00	0,00	4.448.451.950,00
3	Denda Pajak Air Permukaan	0,00	9.277.119,00	0,00	24.680.143,00
4	Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan	0,00	0,00	0,00	8.025.507,00
	Jumlah	**125.000.000.000,00**	**147.065.780.931,00**	**117,65**	**76.503.535.952,00**

5.1.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda Retribusi **Rp89.478.463,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp89.478.463,00 sedangkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp40.253.695,00 dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Kesehatan	0,00	42.964.958,00	0,00	0,00
2	Dinas Perhubungan	0,00	41.733.165,00	0,00	39.120.175,00
3	Sekretariat DPRD	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	0,00	4.760.340,00	0,00	1.133.520,00
	Jumlah	**0,00**	**89.478.463,00**	**0,00**	**40.253.695,00**

5.1.1.1.1.4.8 Pendapatan dari Pengembalian **Rp7.707.921.585,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.707.921.585,00 sedangkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp8.671.337.519,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	810.735.242,00	0,00	244.917.836,00
2	Pengembalian Belanja Tahun Lalu	0,00	5.774.124.175,00	0,00	6.676.711.507,00
3	Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas	0,00	1.123.062.168,00	0,00	1.749.708.176,00
	Jumlah	**0,00**	**7.707.921.585,00**	**0,00**	**8.671.337.519,00**

5.1.1.1.1.4.9 Penerimaan Fasilitas Sosial dan Umum **Rp13.065.141.000,00**

Realisasi Penerimaan Fasilitas Sosial dan Umum untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp13.065.141.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp182.077.031,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Perhubungan	2.975.696.000,00	6.647.661.000,00	223,40	182.077.031,00
2	Badan Kepegawaian Daerah	5.600.000.000,00	6.417.480.000,00	114,60	0,00
	Jumlah	**8.575.696.000,00**	**13.065.141.000,00**	**152,35**	**182.077.031,00**

Realisasi pada Dinas Perhubungan berupa fasilitasi layanan umum *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng. Sedangkan realisasi pada BKD berupa fasilitasi layanan Pengadaan CPNS Kabupaten/Kota.

5.1.1.1.1.4.10 Penerimaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan **Rp16.884.628.386,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp16.884.628.386,00 sedangkan Tahun Anggaran 2017

sebesar Rp19.258.228.260,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Badan Kepegawaian Daerah	860.000.000,00	852.000.000,00	99,07	920.400.000,00
2	Badan Pengembangan SDM	15.771.219.000,00	16.032.628.386,00	101,66	18.337.828.260,00
	Jumlah	**16.631.219.000,00**	**16.884.628.386,00**	**101,52**	**19.258.228.260,00**

5.1.1.1.1.4.11 Penerimaan Lain-Lain Rp2.292.171.544,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.292.171.544,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp26.992.436.247,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Penerimaan Lain-Lain SKPD	0,00	2,270,987,404.00	0,00	26.954.790.347,00
2	Bagian Penjualan Hasil Kerajinan Kelompok Binaan	85.000.000,00	21.184.140,00	24,92	37.645.900,00
3	Ganti Rugi Aset Tidak Bergerak	37.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**37.085.000.000,00**	**2.292.171.544,00**	**6,18**	**26.992.436.247,00**

Adapun penerimaan lain-lain SKPD dapat dirinci sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	23.194.064.100,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	500.000,00	0,00
3	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya	0,00	0,00	2.700.000,00
4	Satpol PP	0,00	0,00	60.377.600,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	3.600.000,00	2.400.000,00
6	Dinas LH & Kehutanan	0,00	214.511.220,00	0,00
7	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	1.934.336.000,00
8	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	0,00	1.750.000,00	38.750.000,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	76.946.000,00	6.096.071,00
10	SKPKD	0,00	1.973.505.884,00	1.715.535.392,00
11	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	0,00	134.000,00	202.525,00
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	40.300,00	328.659,00
	Jumlah	**0,00**	**2.270.987.404,00**	**26.954.790.347,00**

5.1.1.1.1.4.12 Pendapatan BLUD Rp1.209.365.731.875,34

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.209.365.731.875,34 atau 89,41% dari target Rp1.352.600.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.142.554.853.397,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	700.000.000.000,00	558.511.054.245,00	79,79	540.854.692.386,00
2	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	345.000.000.000,00	378.199.410.543,00	109,62	321.889.626.780,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	150.000.000.000,00	127.452.509.025,00	84,97	132.866.179.783,00
4	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	36.600.000.000,00	33.772.692.350,34	92,28	32.095.444.183,00
5	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	41.000.000.000,00	40.046.766.822,00	97,68	41.740.352.390,00
6	RSJD Surakarta	35.000.000.000,00	30.993.713.539,00	88,55	31.999.726.777,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	45.000.000.000,00	40.389.585.351,00	89,75	41.108.831.098,00
	Jumlah	**1.352.600.000.000,00**	**1.209.365.731.875,34**	**89,41**	**1.142.554.853.397,00**

Target pendapatan pada Rumah Sakit tidak dapat optimal tercapai dikarenakan keterlambatan pembayaran klaim BPJS dan Jamkesda Kabupaten/Kota serta adanya regulasi rujukan secara berjenjang.

5.1.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Rp10.968.474.152.733,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp10.968.474.152.733,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	4.907.443.329.000,00	4.689.611.788.683,00	95,56	11.067.786.491.093,00
2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	6.489.326.086.000,00	6.277.665.043.013,00	96,74	50.197.943.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemda - Lainnya	0,00	1.197.321.037,00	0,00	737.884.170,00
	Jumlah	**11.396.769.415.000,00**	**10.968.474.152.733,00**	**96,24**	**11.118.722.318.263,00**

5.1.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Rp4.689.611.788.683,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.689.611.788.683,00 atau 95,56% dari target Rp4.907.443.329.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp11.067.786.491.093,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dana bagi hasil pajak	946.959.236.000,00	760.737.570.218,00	80,33	834.422.861.130,00
2	Dana bagi hasil bukan pajak	7.407.662.000,00	8.712.350.806,00	117,61	13.887.050.263,00
3	Dana Alokasi Umum	3.652.586.431.000,00	3.652.586.431.000,00	100,00	3.652.586.431.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	300.490.000.000,00	267.575.436.659,00	89,05	6.566.890.148.700,00
	Jumlah	**4.907.443.329.000,00**	**4.689.611.788.683,00**	**95,56**	**11.067.786.491.093,00**

5.1.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak Rp760.737.570.218,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp760.737.570.218,00 atau 80,33% dari target Rp946.959.236.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp834.422.861.130,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	60.246.912.000,00	63.026.027.692,00	104,61	65.474.849.091,00
2	Bagi Hasil PPh Pasal 25 & 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21	683.633.895.000,00	493.828.217.226,00	72,24	564.809.952.859,00
3	Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	203.078.429.000,00	203.883.325.300,00	100,40	204.138.059.180,00
	Jumlah	**946.959.236.000,00**	**760.737.570.218,00**	**80,33**	**834.422.861.130,00**

5.1.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Rp8.712.350.806,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp8.712.350.806,00 atau 117,61% dari target Rp7.407.662.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp13.887.050.263,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	3.870.290.000,00	3.400.440.964,00	87,86	3.900.637.875,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent)	0,00	0,00	0,00	57.819.224,00
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)	0,00	0,00	0,00	33.287.692,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	77.530.000,00	617.899.676,00	796,98	514.742.868,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	3.093.537.000,00	4.146.134.208,00	134,03	8.171.221.124,00
6	Bagi Hasil dari Panas Bumi	366.305.000,00	456.667.450,00	124,67	1.209.341.480,00
7	Bagi Hasil dari Minerba	0,00	91.208.508,00	0,00	0,00
	Jumlah	**7.407.662.000,00**	**8.712.350.806,00**	**117,61**	**13.887.050.263,00**

5.1.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum Rp3.652.586.431.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.652.586.431.000,00 atau 100% dari target Rp3.652.586.431.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.652.586.431.000,00.

5.1.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Rp267.575.436.659,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp267.575.436.659,00 atau 89,05% dari target Rp300.490.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.566.890.148.700,00.

5.1.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Rp6.277.665.043.013,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6.277.665.043.013,00 atau 96,74% dari target sebesar Rp6.489.326.086.000,00, sedangkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp50.197.943.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dana Tambahan Penghasilan Guru – PNSD	1.025.317.889.000	1.028.894.671.500,00	100,35	0,00
2	Dana Insentif Daerah	33.500.000.000	33.500.000.000	100,00	50.197.943.000
3	Bantuan Operasional Sekolah	5.419.435.200.000	5.204.476.040.000	96,03	0,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK & BOKB)	3.640.458.000	3.640.458.000	100,00	0,00
5	Peniingkatan Kapasitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan	3.000.000.000	2.975.310.100	99,18	0,00
6	Bantuan Kependudukan & Catatan Sipil	4.432.539.000	4.178.563.413	94,27	0,00
	Jumlah	**6.489.326.086.000,00**	**6.277.665.043.013,00**	**96,74**	**50.197.943.000,00**

5.1.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya Rp 1.197.321.037,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.197.321.037,00 tanpa target dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar sebesar Rp737.884.170,00.

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - Ketep Pass	0,00	1.197.321.037,00	0,00	737.884.170,00
	Jumlah	**0,00**	**1.197.321.037,00**	**0,00**	**737.884.170,00**

5.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp22.008.000.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp22.008.000.000,00 atau 100,00% dari target Rp22.008.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp36.938.923.844,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Hibah	22.008.000.000,00	22.008.000.000,00	100,00	36.938.923.844,00
	Jumlah	**22.008.000.000,00**	**22.008.000.000,00**	**100,00**	**36.938.923.844,00**

5.1.1.1.3.1 Pendapatan Hibah Rp22.008.000.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp22.008.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp36.938.923.844,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Hibah dari pemerintah	0,00	0,00	0,00	15.982.123.844,00
2	Penerimaan dari pihak ketiga jasa raharja	22.008.000.000,00	22.008.000.000,00	100,00	20.956.800.000,00
	Jumlah	**22.008.000.000,00**	**22.008.000.000,00**	**100,00**	**36.938.923.844,00**

5.1.2 PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp24.478.632.557.339,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Operasi	16.913.512.318.000,00	15.702.411.154.886,00	92.84	14.664.990.098.901,00
2	Belanja Modal	1.900.132.884.000,00	1.681.752.306.368,00	88.51	1.454.598.084.464,00
3	Belanja Tidak Terduga	18.000.000.000,00	13.118.505.530,00	72.88	1.130.950.000,00
4	Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendptan ke Kab/Kota	7.354.942.127.000,00	7.081.350.590.555,00	96.28	6.763.993.885.389,00
	Jumlah	**26.186.587.329.000,00**	**24.478.632.557.339,00**	**93.48**	**22.884.713.018.754,00**

5.1.2.1 Belanja Operasi **Rp15.702.411.154.886,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp15.702.411.154.886,00 atau 92,84% dari anggaran Rp16.913.512.318.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp14.664.990.098.901,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pegawai	6.718.835.921.000,00	6.468.261.263.572,00	96.27	6.092.077.750.517,00
2	Belanja Barang & Jasa	4.481.751.474.000,00	4.042.705.957.394,00	90.20	3.381.260.846.633,00
3	Belanja Hibah	5.667.713.173.000,00	5.150.000.983.920,00	90.87	4.953.383.281.751,00
4	Belanja Bantuan Sosial	45.211.750.000,00	41.442.950.000,00	91.66	238.268.220.000,00
	Jumlah	**16.913.512.318.000,00**	**15.702.411.154.886,00**	**92.84**	**14.664.990.098.901,00**

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai **Rp6.468.261.263.572,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6.468.261.263.572,00 atau 96,27% dari anggaran Rp6.718.835.921.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.092.077.750.517,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Gaji dan Tunjangan	2.946.044.508.000,00	2.828.931.352.450,00	96,02	2.871.009.569.397,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	2.913.931.980.000,00	2.843.074.890.934,00	97,57	2.678.230.711.148,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	44.904.124.000,00	39.739.333.000,00	88,50	29.995.000.000,00

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
4	Belanja insentif Pemungut Pajak	60.901.557.000,00	48.437.215.082,00	79,53	47.611.944.759,00
5	Honorarium PNS	52.071.853.000,00	47.422.588.500,00	91,07	42.569.898.500,00
6	Honorarium Non PNS	559.526.102.000,00	537.799.683.686,00	96,12	315.728.801.368,00
7	Belanja Pegawai BLUD	132.127.347.000,00	118.145.803.937,00	89,42	106.931.825.345,00
8	Belanja Pegawai BOS	9.328.450.000,00	4.710.395.983,00	50,49	0,00
	Jumlah	**6.718.835.921.000,00**	**6.468.261.263.572,00**	**96,27**	**6.092.077.750.517,00**

Adapun perincian belanja pegawai dimaksud dapat digambarkan per-SKPD sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.224.923.845.000,00	4,077,106,039,287.00	96,50	3.764.302.855.912,00
2	Dinas Kesehatan	106.756.467.000,00	104.422.409.971,00	97,81	103.591.619.013,00
3	RSUD Moewardi Surakarta	176.790.802.000,00	176.226.819.951,00	99,68	166.890.341.351,00
4	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	135.216.263.000,00	123.614.228.073,00	91,42	118.058.613.349,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	93.826.030.000,00	92.249.642.558,00	98,32	86.997.613.718,00
6	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	33.560.829.000,00	32.474.121.299,00	96,76	29.307.396.705,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	56.403.181.000,00	54.713.344.552,00	97,00	54.995.777.329,00
8	RSJD Surakarta	65.351.177.000,00	63.378.650.593,00	96,98	62.316.563.241,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	39.003.162.000,00	38.068.636.238,00	97,60	37.270.657.495,00
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya	113.870.082.000,00	110.081.620.927,00	96,67	115.041.350.380,00
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	103.160.832.000,00	99.197.653.573,00	96,16	97.044.015.230,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17.170.322.000,00	16.512.936.096,00	96,17	16.404.273.903,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	29.853.204.000,00	29.459.651.237,00	98,68	15.224.939.167,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.520.304.000,00	19.919.781.071,00	97,07	16.433.017.881,00
15	Dinas Sosial	131.194.728.000,00	128.368.444.077,00	97,85	127.763.720.348,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.803.238.000,00	10.995.652.871,00	93,16	9.255.074.770,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	76.249.382.000,00	74.565.079.495,00	97,79	74.862.473.724,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	18.698.524.000,00	18.000.684.400,00	96,27	15.479.218.682,00
19	Dinas LH & Kehutanan	132.880.894.000,00	128.889.500.028,00	97,00	125.835.727.760,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	16.377.056.000,00	15.869.143.796,00	96,90	14.800.041.411,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil	20.751.403.000,00	20.133.279.637,00	97,02	19.172.153.745,00
22	Dinas Perhubungan	47.059.267.000,00	46.128.130.408,00	98,02	53.584.358.273,00
23	Dinas Kominfo	24.603.914.000,00	23.407.534.167,00	95,14	23.521.396.963,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	23.537.008.000,00	23.013.493.628,00	97,78	21.462.070.796,00
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	13.270.141.000,00	12.766.310.844,00	96,20	14.516.274.287,00
26	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	45.810.180.000,00	44.927.045.126,00	98,07	46.450.409.194,00
27	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	26.520.675.000,00	26.052.115.632,00	98,23	25.658.492.647,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	56.745.017.000,00	53.570.485.951,00	94,41	53.745.308.910,00

NO	URAIAN	2018 Anggaran	2018 Realisasi	%	Realisasi 2017
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	154.576.957.000,00	150.918.937.732,00	97,63	155.673.470.553,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	39.547.008.000,00	38.442.184.910,00	97,21	37.650.346.307,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	28.562.907.000,00	27.897.945.241,00	97,67	26.598.966.750,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	49.791.527.000,00	47.888.836.090,00	96,18	48.378.896.853,00
33	KDH dan Wakil KDH	20.171.753.000,00	15.025.625.526,00	74,49	14.709.657.315,00
34	DPRD	79.237.195.000,00	78.928.893.019,00	99,61	55.475.495.474,00
35	Sekretariat Daerah	106.395.595.000,00	98.808.534.150,00	92,87	100.407.404.174,00
36	Sekretariat DPRD	25.354.068.000,00	24.844.803.152,00	97,99	24.374.391.762,00
37	Inspektorat	18.801.486.000,00	18.427.293.550,00	98,01	18.060.477.759,00
38	Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	32.987.430.000,00	32.318.874.375,00	97,97	31.086.598.101,00
39	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	190.491.777.000,00	169.187.584.727,00	88,82	169.272.158.796,00
40	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	35.323.930.000,00	34.248.419.713,00	96,96	34.571.971.050,00
41	Badan Kepegawaian Daerah	29.690.562.000,00	24.265.912.357,00	81,73	24.406.721.860,00
42	Badan Pengembangan SDM	35.064.559.000,00	32.285.379.617,00	92,07	31.239.589.230,00
43	Badan Penghubung	10.931.240.000,00	10.659.603.927,00	97,52	10.185.848.349,00
	Jumlah	**6.718.835.921.000,00**	**6,468,261,263,572.00**	**96.27**	**6.092.077.750.517,00**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp4.042.705.957.394,00

Realisasi belanja barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.042.705.957.394,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3,381,260,846,633.00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018 Anggaran	2018 Realisasi	%	Realisasi 2017
1	Belanja Bahan Pakai Habis	165.260.468.000,00	156.950.744.525,00	94,97	117.820.304.315,00
2	Belanja Bahan/Material	172.964.722.000,00	164.261.263.486,00	94,97	152.961.165.606,00
3	Belanja Jasa Kantor	350.860.428.000,00	307.057.701.855,00	87,52	228.906.936.609,00
4	Belanja Premi Asuransi	101.733.818.000,00	99.542.199.984,00	97,85	68.998.828.667,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.796.050.000,00	33.911.086.121,00	89,72	28.265.539.285,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.347.278.000,00	53.187.147.121,00	92,75	47.844.569.162,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	91.420.966.000,00	83.939.307.651,00	91,82	51.518.221.484,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	31.596.768.000,00	29.268.175.524,00	92,63	18.155.542.686,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	472.950.000,00	462.083.000,00	97,70	525.189.250,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.710.886.000,00	23.501.712.729,00	91,41	15.676.901.057,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	173.322.853.000,00	159.660.420.257,00	92,12	138.836.798.220,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.058.304.000,00	2.863.982.000,00	93,65	1.828.499.000,00
13	Belanja Pakaian Kerja	5.465.485.000,00	4.968.126.140,00	90,90	4.148.108.668,00
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari Teretntu	7.390.815.000,00	6.770.325.000,00	91,60	4.587.410.000,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	423.491.740.000,00	377.774.902.517,00	89,20	281.267.805.087,00
16	Belanja Pemeliharaan	313.658.659.000,00	300.886.017.699,00	95,93	259.042.979.367,00

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
17	Belanja Jasa Konsultansi	45.818.231.000,00	41.832.629.610,00	91,30	42.166.638.251,00
18	Belanja Barang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masy	442.500.000,00	439.778.000,00	99,38	0,00
19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.682.000.000,00	2.439.000.000,00	90,94	1.784.200.000,00
20	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.038.943.000,00	8.752.802.376,00	87,19	5.600.562.100,00
21	Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masy	30.090.601.000,00	29.001.221.000,00	96,38	33.162.540.000,00
22	Belanja Hadiah Barang	5.495.313.000,00	4.968.927.781,00	90,42	2.955.343.590,00
23	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	95.291.405.000,00	73.363.743.721,00	76,99	51.752.028.784,00
24	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	40.539.171.000,00	37.096.476.988,00	91,51	29.964.129.000,00
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.190.195.857.000,00	985.778.763.682,00	82,82	943.135.072.672,00
26	Belanja Pengadaan Jasa Lainnya	5.974.518.000,00	5.511.518.000,00	92,25	7.285.598.015,00
27	Belanja Barang Dana BOS	1.093.630.745.000,00	1.048.515.900.627,00	95,87	843.069.935.758,00
		4.481.751.474.000,00	**4.042.705.957.394,00**	**90,20**	**3.381.260.846.633,00**

Dari Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4.042.705.957.394,00 yang didalamnya terdapat Belanja Jasa Premi Asuransi sebesar Rp99.542.199.984,00, tidak termasuk kontribusi BPJS (37,5%) bagian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 yang dananya langsung ditransfer ke BPJS Kesehatan tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp74.877.421.583,00.

Adapun perincian belanja barang dan jasa dimaksud dapat digambarkan per-SKPD sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.236.736.101.000,00	1.170.881.913.278,00	94,86	949.236.990.275,00
2	Dinas Kesehatan	194.027.741.000,00	174.561.432.329,00	89,97	137.160.589.098,00
3	RSUD Moewardi Surakarta	621.655.949.000,00	514.065.432.862,00	82,69	502.663.817.746,00
4	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	324.497.847.000,00	281.060.228.868,00	86,61	259.599.051.625,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	140.187.475.000,00	112.332.232.580,00	80,13	119.883.750.289,00
6	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	44.694.157.000,00	38.808.675.603,00	86,83	34.981.155.191,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	46.192.970.000,00	39.649.368.917,00	85,83	31.090.021.251,00
8	RSJD Surakarta	42.580.500.000,00	33.976.566.903,00	79,79	37.415.482.188,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	44.187.361.000,00	37.497.815.883,00	84,86	28.494.675.842,00
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya	152.085.649.000,00	146.937.132.630,00	96,61	137.632.580.449,00
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	77.842.439.000,00	72.631.963.264,00	93,31	72.201.675.369,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17.795.366.000,00	15.684.737.890,00	88,14	14.358.835.803,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	20.460.996.000,00	20.243.259.584,00	98,94	9.697.653.444,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.230.340.000,00	25.734.002.965,00	94,50	18.151.280.029,00
15	Dinas Sosial	85.055.549.000,00	83.849.265.414,00	98,58	63.710.530.463,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.072.242.000,00	18.366.056.300,00	87,16	9.197.437.022,00

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39.300.208.000,00	36.825.521.249,00	93,70	26.187.687.300,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	11.647.712.000,00	11.252.891.231,00	96,61	7.862.147.440,00
19	Dinas LH & Kehutanan	62.886.397.000,00	58.676.302.699,00	93,31	29.012.651.374,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	15.695.826.000,00	15.354.706.106,00	97,83	13.586.319.893,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil	24.794.307.000,00	23.296.765.965,00	93,96	16.594.347.409,00
22	Dinas Perhubungan	60.026.917.000,00	56.817.129.784,00	94,65	25.329.077.045,00
23	Dinas Kominfo	27.824.832.000,00	26.391.136.374,00	94,85	21.736.756.362,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	48.893.510.000,00	46.193.353.898,00	94,48	27.563.964.128,00
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	14.470.160.000,00	13.626.001.488,00	94,17	7.303.720.134,00
26	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	120.320.768.000,00	110.402.206.884,00	91,76	107.887.679.868,00
27	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	12.800.970.000,00	12.522.997.180,00	97,83	10.754.158.381,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	56.022.717.000,00	48.205.667.670,00	86,05	31.614.947.094,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	153.266.633.000,00	134.063.254.647,00	87,47	129.658.528.251,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	57.903.116.000,00	50.298.352.818,00	86,87	39.189.509.892,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	46.397.986.000,00	40.853.757.493,00	88,05	34.544.651.539,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	39.345.945.000,00	35.029.944.725,00	89,03	26.966.910.974,00
33	Sekretariat Daerah	115.889.009.000,00	107.909.401.790,00	93,11	80.938.910.623,00
34	Sekretariat DPRD	147.045.930.000,00	130.873.823.353,00	89,00	103.786.667.884,00
35	Inspektorat	24.130.522.000,00	22.273.952.576,00	92,31	18.577.710.602,00
36	Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	28.172.092.000,00	27.052.450.107,00	96,03	27.021.855.872,00
37	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	153.300.557.000,00	139.844.150.614,00	91,22	88.433.324.609,00
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	34.091.636.000,00	26.861.085.116,00	78,79	15.733.429.992,00
39	Badan Kepegawaian Daerah	27.159.319.000,00	23.214.417.822,00	85,47	14.061.166.899,00
40	Badan Pengembangan SDM	50.614.318.000,00	45.982.650.770,00	90,85	39.929.682.772,00
41	Badan Penghubung	13.447.405.000,00	12.603.949.765,00	93,73	11.509.514.212,00
	Jumlah	**4.481.751.474.000,00**	**4.042.705.957.394,00**	**90.20**	**3.381.260.846.633,00**

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 hanya terserap sebesar 90,20%, disebabkan adanya efisiensi dan realisasi mendasarkan kebutuhan riil.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah Rp5.150.000.983.920,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.150.000.983.920,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah	859.144.017.000,00	691.787.098.573,00	80,52	520.773.998.000,00
2	Belanja Hibah Kepada kelompok/Anggota Masyarakat	128.424.707.000,00	117.121.643.000,00	91,20	67.014.800.000,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	4.680.144.449.000,00	4.341.092.242.347,00	92,76	4.365.594.483.751,00
	Jumlah	**5.667.713.173.000,00**	**5.150.000.983.920,00**	**90,87**	**4.953.383.281.751,00**

5.1.2.1.3.1 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Rp691.787.098.573,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp691.787.098.573,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Badan Pengawas Pemilihan Umum	226.234.352.000	175.465.834.847	77,56	67.687.308.000,00
2	Komando Daerah Militer (KODAM) IV/Diponegoro	8.359.390.000	8.359.390.000	100,00	1.500.000.000,00
3	Kepolisian Daerah (Polda) Jateng	59.468.612.000	59.468.612.000	100,00	16.500.000.000,00
4	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah	558.666.388.000	442.727.987.476	79,25	433.575.404.000,00
5	Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo	500.000.000	500.000.000	100,00	250.000.000,00
6	Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Semarang	340.000.000	340.000.000	100,00	200.000.000,00
7	Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Cilacap	200.000.000	200.000.000	100,00	100.000.000,00
8	Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Tegal	264.000.000	264.000.000	100,00	100.000.000,00
9	Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan TNI AU Jend. Soedirman	184.275.000	184.274.250	100,00	200.000.000,00
10	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah	4.277.000.000,00	4.277.000.000,00	100,00	661.286.000,00
11	Kanwil Dirjen Bea & Cukai Jateng DIY	650.000.000	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**859.144.017.000,00**	**691.787.098.573,00**	**80,52**	**520.773.998.000,00**

5.1.2.1.3.2 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Rp117.121.643.000,00

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp117.121.643.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Hibah Bidang Perekonomian	9.226.560.000,00	5.049.600.000,00	54,73	307.500.000,00
2	Hibah Bidang Pendidikan	70.889.143.000,00	67.299.143.000,00	94,94	29.141.685.000,00
3	Hibah Bidang Kesehatan	22.200.000.000,00	22.000.000.000,00	99,10	0,00
4	Hibah Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Non Profesional	5.117.000.000,00	4.857.000.000,00	94,92	4.587.115.000,00
5	Hibah Bidang Kesenian dan Kebudayaan	2.620.754.000,00	2.480.000.000,00	94,63	1.906.000.000,00
6	Hibah Bidang Keagamaan	10.670.900.000,00	9.750.900.000,00	91,38	4.790.000.000,00
7	Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan	7.700.350.000,00	5.685.000.000,00	73,83	26.282.500.000,00
	Jumlah	**128.424.707.000,00**	**117.121.643.000,00**	**91,20**	**67.014.800.000,00**

Belanja hibah bidang perekonomian sebesar 54,73%, dan sosial kemasyarakatan hanya terserap 73,83% disebabkan karena masih kurangnya kelengkapan proposal serta persyaratan dari calon penerima hibah serta adanya calon penerima yang tidak mengajukan berkas pencairan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

5.1.2.1.3.3 Belanja Hibah Dana BOS — Rp4.341.092.242.347,00

Realisasi Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.341.092.242.347,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kab Semarang	119.332.451.000,00	111.802.208.798,00	93,69	111.378.429.500,00
2	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kab Kendal	133.961.385.000,00	127.752.449.462,00	95,37	126.952.160.000,00
3	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kab Demak	130.342.887.000,00	122.096.440.000,00	93,67	121.467.117.651,00
4	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kab Grobogan	189.150.174.000,00	175.913.960.000,00	93,00	175.901.120.000,00
5	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kab Pati	143.073.817.000,00	129.804.660.000,00	90,73	133.996.950.000,00
6	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kab Kudus	98.429.626.000,00	92.298.664.383,00	93,77	92.028.476.290,00
7	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Jepara	128.576.857.000,00	120.079.945.395,00	93,39	120.519.458.000,00
8	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Rembang	73.525.883.000,00	67.989.800.000,00	92,47	67.926.102.815,00
9	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Blora	122.395.650.000,00	112.600.960.000,00	92,00	114.007.240.900,00
10	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Pekalongan	117.808.405.000,00	86.513.800.000,00	73,44	109.365.600.000,00
11	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Batang	90.017.159.000,00	85.326.390.000,00	94,79	85.467.160.000,00
12	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Pemalang	214.404.706.000,00	195.903.780.000,00	91,37	198.945.666.847,00
13	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Tegal	200.013.324.000,00	188.022.308.241,00	94,00	188.536.427.948,00
14	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Brebes	244.083.479.000,00	226.168.314.972,00	92,66	229.159.100.000,00
15	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Banyumas	240.997.310.000,00	229.697.892.293,00	95,31	228.941.500.000,00
16	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Cilacap	268.642.076.000,00	242.584.815.953,00	90,30	246.333.640.000,00
17	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Purbalingga	115.821.546.000,00	106.644.660.000,00	92,08	107.757.827.000,00
18	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Banjarnegara	115.560.822.000,00	107.120.680.000,00	92,70	108.351.647.802,00
19	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Magelang	147.702.971.000,00	141.331.632.994,00	95,69	140.432.820.000,00
20	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Temanggung	88.726.031.000,00	83.888.850.000,00	94,55	83.640.960.000,00
21	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Wonosobo	107.471.337.000,00	100.002.800.000,00	93,05	100.349.038.137,00
22	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Purworejo	110.646.161.000,00	101.471.608.908,00	91,71	102.418.946.245,00
23	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Kebumen	190.733.255.000,00	175.063.015.000,00	91,78	177.687.140.000,00
24	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Klaten	159.906.209.000,00	154,109,633,081.00	96.38	150.391.491.376,00
25	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Boyolali	112.948.549.000,00	107.364.235.954,00	95,06	107.947.959.940,00
26	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Sragen	129.019.523.000,00	119.115.440.000,00	92,32	120.970.526.822,00
27	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Sukoharjo	109.384.250.000,00	101.954.700.307,00	93,21	102.149.535.497,00
28	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Karanganyar	115.348.053.000,00	108.293.240.000,00	93,88	108.511.945.647,00
29	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kab Wonogiri	130.845.393.000,00	118.671.985.276,00	90,70	120.859.960.000,00
30	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Semarang	251.960.340.000,00	224.830.881.028,00	89,23	225.740.333.919,00
31	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Pekalongan	41.481.657.000,00	59.207.800.000,00	142,73	37.414.760.000,00
32	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Surakarta	121.640.278.000,00	111.024.612.302,00	91,27	111.933.281.415,00
33	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Salatiga	35.464.260.000,00	33.022.198.000,00	93,11	33.032.360.000,00
34	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Tegal	48.276.994.000,00	44.222.700.000,00	91,60	45.429.280.000,00
35	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Magelang	32.451.631.000,00	29.195.180.000,00	89,97	29.648.520.000,00
	Jumlah	**4.680.144.449.000,00**	**4.341.092.242.347,00**	**92,76**	**4.365.594.483.751,00**

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial Rp41.442.950.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp41.442.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan Bidang Pendidikan	10.000.000.000,00	7.479.000.000,00	74,79	9.481.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan Bidang Pemugaran Perumahan Tidak Layak Huni	0,00	0,00	0,00	195.848.720.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan Bidang Perlindungan Sosial	35.211.750.000,00	33.963.950.000,00	96,46	32.938.500.000,00
	Jumlah	**45.211.750.000,00**	**41.442.950.000,00**	**91,66**	**238.268.220.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp41.442.950.000,00 tersebut, terdapat saldo Per 31 Desember 2018 pada *virtual account* di Bank Jateng untuk Belanja Bantuan Sosial yang terdiri dari saldo dana BSM sejumlah Rp843.000.000,00 (belum disetor) dan KJS sejumlah Rp1.775.450.000,00 (s/d 17 Mei 2019 dana KJS tersebut seluruhnya telah disetorkan ke Kas Daerah).

5.1.2.2 Belanja Modal Rp1.681.752.306.368,00

Realisasi Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.681.752.306.368,00 terdiri dari :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Tanah	60.063.027.000,00	25.931.283.415,00	43,17	21.650.743.424,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	661.926.405.000,00	578.372.832.490,00	87,38	321.441.003.601,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	408.317.262.000,00	349.657.564.473,00	85,63	308.934.759.265,00
4	Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	635.016.264.000,00	598.655.967.923,00	94,27	799.019.206.624,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	133.973.676.000,00	128.797.833.067,00	96,14	2.794.491.050,00
6	Belanja Aset Tidak Berwujud	836.250.000,00	336.825.000,00	40,28	757.880.500,00
	Jumlah	**1.900.132.884.000,00**	**1.681.752.306.368,00**	**88,51**	**1.454.598.084.464,00**

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah Rp25.931.283.415,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp25.931.283.415,00 atau 43,17% dari anggaran Rp60.063.027.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp21.650.743.424,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	3.160.000.000,00	2.762.537.680,00	87,42	3.141.800.000,00
2	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	51.550.027.000,00	19.424.022.705,00	37,68	9.858.994.776,00
3	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	5.053.000.000,00	3.455.263.530,00	68,38	6.756.238.648,00
4	Dinas Sosial	300.000.000,00	289.459.500,00	96,49	126.000.000,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.767.710.000,00
	Jumlah	**60.063.027.000,00**	**25.931.283.415,00**	**43,17**	**21.650.743.424,00**

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Bina Marga dan Ciptakarya hanya terserap 37,68 % karena sesuai dengan nilai kontrak atau lelang.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp578.372.832.490,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp578.372.832.490,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Alat-alat Berat	86.869.266.000,00	82.356.553.130.00	94,81	7.191.933.960,00
2	Belanja Alat-alat Angkut	36.113.975.850,00	33.704.384.063,00	93,33	10.427.816.145,00
3	Belanja Alat-alat Bengkel	6.088.029.800,00	5.547.864.301,00	91,13	5.371.178.368,00
4	Belanja Alat-alat Pertanian	6.761.735.000,00	6.021.333.618,00	89,05	3.349.404.700,00
5	Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	67.945.371.421,00	58.444.743.508,00	86,02	68.207.175.462,00
6	Belanja Alat-alat Studio	13.088.331.000,00	12.296.999.001,00	93,95	5.020.253.815,00
7	Belanja Alat-alat Kedokteran	232.812.764.529,00	190.581.796.754,00	81,86	203.046.191.751,00
8	Belanja Alat-alat Laboratorium	144.118.418.400,00	124.993.681.315,00	86,73	18.812.149.400,00
9	Belanja Alat-alat Keamanan	4.779.130.000,00	4.367.055.200,00	91,38	14.900.000,00
10	Alat-alat Komputer	63.334.383.000,00	60.043.421.600,00	94,80	0,00
11	Peralatan Olah Raga	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**661.926.405.000,00**	**578.372.832.490.00**	**87,38**	**321.441.003.601,00**

Dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp578.372.832.490,00 terdapat Belanja Modal dari Dana BOS dan BOP di SMA/SMK/SLB Negeri pada Belanja Alat-alat Berat sebesar Rp55.906.400.654,00.

5.1.2.2.2.1 Belanja Modal Alat-Alat Besar Rp82.356.553.130,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp82.356.553.130,00 atau 94,81% dari anggaran Rp86.869.266.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.191.933.960,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	58.461.765.000,00	56,229,195,854.00	96,18	158.430.000,00
2	Dinas Kesehatan	914.520.000,00	890.927.000,00	97,42	139.250.000,00
3	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	5.172.000.000,00	4.717.440.000,00	91,21	192.421.650,00
4	RSJD Surakarta	1.207.185.000,00	1.201.524.000,00	99,53	0,00
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.208.000.000,00	978.275.000,00	80,98	52.950.000,00
6	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	7.236.367.000,00	7.027.965.521,00	97,12	4.179.213.000,00
7	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	289.877.000,00
8	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	138.250.000,00

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
9	Dinas LH & Kehutanan	34.500.000,00	34.300.000,00	99,42	23.650.000,00
10	Dinas Perhubungan	151.500.000,00	147.259.000,00	97,20	74.958.000,00
11	Dinas Kominfo	550.000.000,00	447.710.500,00	81,40	39.483.400,00
12	Dinas Koperasi dan UKM	937.500.000,00	763.070.000,00	81,39	0,00
13	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	0,00	0,00	0,00	9.025.000,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	453.120.000,00	448.764.080,00	99,04	333.872.000,00
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.500.000.000,00	727.909.000,00	48,53	0,00
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	23.125.000,00
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	271.520.000,00	240.555.000,00	88,60	578.050.000,00
18	Sekretariat Daerah	5.922.289.000,00	5.876.610.595,00	99,23	856.002.500,00
19	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	103.376.410,00
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.050.000.000,00	1.832.907.000,00	89,41	0,00
21	Badan Pengembangan SDM	799.000.000,00	792.140.580,00	99,14	0,00
	Jumlah	**86.869.266.000,00**	**82.356.553.130,00**	**94,81**	**7.191.933.960,00**

Realisasi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp727.909.000,00 atau 48,53% dikarenakan nilai kontrak atau lelang lebih rendah daripada pagu yang dianggarkan.

5.1.2.2.2.2 Belanja Modal Alat-Alat Angkutan **Rp33.704.384.063,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp33.704.384.063,00 atau 93,33% dari anggaran Rp36.113.975.850,00dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp10.427.816.145,00dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Kesehatan	4.112.300.000,00	3.950.878.750,00	96,07	0,00
2	RSUD Moewardi Surakarta	624.000.000,00	555.000.000,00	88,94	0,00
3	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	367.819.850,00	347.931.350,00	94,59	0,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	26.000.000,00	25.500.000,00	98,08	0,00
5	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
6	RSJD Surakarta	82.106.000,00	36.640.000,00	44,63	16.000.000,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	5.500.000,00	4.785.000,00	87,00	350.530.000,00
8	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	3.909.000.000,00	3.771.002.000,00	96,47	0,00
9	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	300.000.000,00	275.616.000,00	91,87	1.232.356.045,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	550.000.000,00	534.110.500,00	97,11	496.320.000,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	577.300.000,00	577.027.500,00	99,95	0,00
12	Dinas Sosial	1.100.000.000,00	1.091.044.000,00	99,19	0,00
13	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.101.000.000,00	1.394.112.500,00	66,35	0,00
14	Dinas LH & Kehutanan	93.000.000,00	79.065.000,00	85,02	0,00
15	Dinas Perhubungan	1.190.000.000,00	1.150.599.550,00	96,69	0,00
16	Dinas Kominfo	695.800.000,00	694.561.000,00	99,82	0,00

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
17	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	552.500.000,00	493.190.750,00	89,27	0,00
18	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	405.000.000,00	403.089.500,00	99,53	0,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	20.900.000,00	20.435.000,00	97,78	3.161.410.600,00
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	478.866.000,00
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	153.755.000,00
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	375.000.000,00	356.756.000,00	95,13	0,00
23	Sekretariat Daerah	9.001.000.000,00	8.931.547.163,00	99,23	151.750.000,00
24	Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	1.855.000.000,00	1.777.664.000,00	95,83	0,00
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	8.120.750.000,00	7.183.928.500,00	88,46	3.856.173.500,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80	0,00
27	Badan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	30.655.000,00
	Jumlah	**36.113.975.850,00**	**33.704.384.063,00**	**93,33**	**10.427.816.145,00**

Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Tahun Anggaran 2018 pada RSJD Surakarta hanya terserap sebesar 44,63% dikarenakan Pendapatan BLUD Tidak Tercapai yang mempengaruhi Belanja BLUD.

5.1.2.2.2.3 Belanja Modal Alat-Alat Bengkel dan Ukur Rp5.547.864.301,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.547.864.301,00 atau 91,13% dari anggaran Rp6.088.029.800,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.371.178.368,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	157.475.000,00	156.575.000,00	99,43	3.041.516.500,00
2	Dinas Kesehatan	163.100.000,00	154.101.001,00	94,48	215.966.950,00
3	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	6.817.800,00	6.817.800,00	100,00	66.560.000,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	10.300.000,00	5.120.000,00	49,71	46.673.418,00
5	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	380.000.000,00	358.108.000,00	94,24	0,00
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	121.500.000,00	99.080.000,00	81,55	4.009.500,00
7	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	32.500.000,00	29.165.000,00	89,74	0,00
8	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	577.111.000,00	535.620.000,00	92,81	663.923.000,00
9	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	66.800.000,00	65.750.000,00	98,43	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00!	18.727.500,00
11	Dinas LH & Kehutanan	30.000.000,00	29.600.000,00	98,67	0,00
12	Dinas Perhubungan	17.500.000,00	17.325.000,00	99,00	0,00
13	Dinas Kominfo	970.700.000,00	966.280.000,00	99,54	0,00
14	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	1.479.760.000,00	1.441.950.000,00	97,44	1.080.450.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	185.600.000,00	184.960.000,00	99,66	0,00
16	Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00!	10.000.000,00
17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	27.500.000,00	26.500.000,00	96,36	162.120.000,00
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.798.366.000,00	1.409.232.500,00	78,36	37.800.000,00

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	59.000.000,00	57.780.000,00	97,93	15.000.000,00
20	Badan Pengembangan SDM	4.000.000,00	3.900.000,00	97,50	8.431.500,00
	Jumlah	**6.088.029.800,00**	**5.547.864.301,00**	**91,13**	**5.371.178.368,00**

Realisasi pada RSUD Tugurejo Semarang target sebesar Rp5.120.000,00 atau 49,71% dikarenakan pendapatan yang tidak tercapai karena klaim BPJS belum dibayar sehingga menyebabkan dilakukannya efisiensi belanja BLUD.

5.1.2.2.2.4 Belanja Modal Alat-Alat Pertanian Rp6.021.333.618,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6.021.333.618,00 atau 89,05% dari anggaran Rp6.761.735.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.349.404.700,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Kesehatan	10.000.000,00	8.362.162,00	83,62	0,00
2	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	0,00	0,00	0,00	990.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	379.040.000,00	357.475.000,00	94,31	0,00
4	Dinas LH & Kehutanan	355.750.000,00	346.690.000,00	97,45	19.000.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan	961.400.000,00	957.110.620,00	99,55	0,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	387.357.000,00	385.748.500,00	99,58	543.827.000,00
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.684.775.000,00	1.407.625.707,00	83,55	1.566.390.500,00
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.559.385.000,00	1.452.549.629,00	93,15	1.115.554.800,00
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.424.028.000,00	1.105.772.000,00	77,65	0,00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	98.700.000,00
11	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	4.942.400,00
	Jumlah	**6.761.735.000,00**	**6.021.333.618,00**	**89,05**	**3.349.404.700,00**

5.1.2.2.2.5 Belanja Modal Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp58.444.743.508,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp58.444.743.508,00 atau 86,02% dari anggaran Rp67.945.371.421,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp68.207.175.462,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	2.790.703.000,00	2.453.016.600,00	87,90	4.792.905.900,00
2	Dinas Kesehatan	3.134.300.000,00	2.381.923.248,00	76,00	2.005.738.258,00
3	RSUD Moewardi Surakarta	4.058.580.000,00	2.726.070.650,00	67,17	11.003.551.830,00
4	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	1.886.112.350,00	1.574.140.756,00	83,46	7.982.861.717,00

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
5	RSUD Tugurejo Semarang	471.300.000,00	449.151.950,00	95,30	745.827.386,00
6	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	1.812.090.671,00	1.299.548.450,00	71,72	471.762.255,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	1.438.293.400,00	1.290.074.400,00	89,69	1.847.831.750,00
8	RSJD Surakarta	784.000.000,00	571.959.950,00	72,95	1.901.531.120,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.170.000.000,00	846.193.415,00	72,32	1.919.662.700,00
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	154.250.000,00	132.825.000,00	86,11	393.135.000,00
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	768.958.000,00	686.030.000,00	89,22	2.634.750.300,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	63.000.000,00	62.800.000,00	99,68	161.760.000,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	177.000.000,00	175.025.000,00	98,88	258.200.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84.250.000,00	83.002.500,00	98,52	97.790.000,00
15	Dinas Sosial	4.807.164.000,00	4.678.291.500,00	97,32	251.850.000,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	438.500.000,00	434.989.000,00	99,20	0,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.567.410.000,00	1.531.260.400,00	97,69	686.646.893,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	17.100.000,00
19	Dinas LH & Kehutanan	2.265.865.000,00	2.173.473.500,00	95,92	426.309.110,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	102.250.000,00	101.735.000,00	99,50	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil	297.600.000,00	279.340.000,00	93,86	286.017.000,00
22	Dinas Perhubungan	915.150.000,00	864.650.000,00	94,48	2.239.784.500,00
23	Dinas Kominfo	603.296.000,00	594.995.000,00	98,62	2.954.472.200,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	1.823.900.000,00	1.462.591.000,00	80,19	187.014.000,00
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	990.780.000,00	530.229.500,00	53,52	1.246.580.780,00
26	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	718.487.000,00	699.123.199,00	97,30	432.545.350,00
27	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	298.730.000,00	296.179.400,00	99,15	336.153.500,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.074.880.000,00	1.055.652.000,00	98,21	498.519.000,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	573.200.000,00	553.607.750,00	96,58	1.467.335.500,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.217.204.000,00	1.082.915.750,00	88,97	1.233.301.580,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.541.437.000,00	1.488.722.000,00	96,58	1.437.273.000,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	818.300.000,00	783.067.075,00	95,69	353.245.000,00
33	Sekretariat Daerah	11.861.084.000,00	11.489.874.645,00	96,87	1.650.713.500,00
34	Sekretariat DPRD	3.032.235.000,00	2.988.952.000,00	98,57	3.176.830.500,00
35	Inspektorat	511.000.000,00	499.206.250,00	97,69	423.975.000,00
36	Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	292.521.000,00	256.934.500,00	87,83	433.810.200,00
37	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	8.698.056.000,00	5.450.394.540,00	62,66	7.154.248.883,00
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.416.035.000,00	1.345.377.600,00	95,01	1.043.566.500,00
39	Badan Kepegawaian Daerah	1.467.000.000,00	1.348.010.000,00	91,89	2.813.841.000,00
40	Badan Pengembangan SDM	1.336.750.000,00	1.267.902.980,00	94,85	762.314.250,00
41	Badan Penghubung	458.700.000,00	430.507.000,00	93,85	476.420.000,00
	Jumlah	**67.945.371.421,00**	**58.444.743.508,00**	**86,02**	**68.207.175.462,00**

5.1.2.2.2.6 Belanja Modal Alat-Alat Studio dan Komunikasi Rp12.296.999.001,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.296.999.001,00 atau 93,95% dari anggaran Rp13.088.331.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.020.253.815,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	489.743.000,00	481.302.000,00	98,28	169.378.000,00
2	Dinas Kesehatan	658.900.000,00	503.692.780,00	76,44	3.500.000,00
4	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	0,00	0,00	0,00	625.000.000,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	88.700.000,00	86.620.000,00	97,66	7.598.250,00
6	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	29.000.000,00	14.495.000,00	49,98	0,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	248.670.000,00	247.080.000,00	99,36	55.900.000,00
8	RSJD Surakarta	6.000.000,00	4.015.000,00	66,92	0,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	45.000.000,00	37.070.000,00	82,38	37.306.250,00
10	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	468.214.000,00	398.190.000,00	85,04	261.140.000,00
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	248.000.000,00	240.300.000,00	96,90	58.700.000,00
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	0,00
13	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	15.400.000,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	14.988.000,00
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	218.300.000,00	217.100.000,00	99,45	69.696.000,00
16	Dinas LH & Kehutanan	252.791.000,00	229.620.100,00	90,83	68.401.000,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil	90.800.000,00	88.300.000,00	97,25	144.319.000,00
18	Dinas Perhubungan	1.015.515.000,00	989.434.000,00	97,43	235.198.000,00
19	Dinas Kominfo	2.055.664.000,00	1.881.188.000,00	91,51	242.248.500,00
20	Dinas Koperasi dan UKM	271.600.000,00	265.893.000,00	97,90	12.270.000,00
21	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	319.280.000,00	284.795.000,00	89,20	28.311.125,00
22	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	43.180.000,00	42.420.000,00	98,24	100.260.000,00
23	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	144.050.000,00	142.710.000,00	99,07	70.460.000,00
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	717.460.000,00	713.476.800,00	99,44	38.800.000,00
25	Dinas Pertanian dan Perkebunan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	141.200.000,00
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	42.400.000,00	42.100.000,00	99,29	24.832.000,00
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	478.769.000,00	463.397.000,00	96,79	643.103.000,00
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	488.000.000,00	437.122.771,00	89,57	0,00
29	Sekretariat Daerah	2.449.063.000,00	2.345.167.600,00	95,76	280.850.000,00
30	Sekretariat DPRD	735.130.000,00	728.875.000,00	99,15	544.986.000,00
31	Inspektorat	206.000.000,00	192.868.750,00	93,63	379.800.000,00
32	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	198.798.900,00
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	646.852.000,00	595.271.500,00	92,03	0,00
34	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00	22.905.000,00
35	Badan Pengembangan SDM	600.750.000,00	593.994.700,00	98,88	472.554.790,00
36	Badan Penghubung	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	52.350.000,00
	Jumlah	**13.088.331.000,00**	**12.296.999.001,00**	**93,95**	**5.020.253.815,00**

5.1.2.2.2.7 Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran Rp190.581.796.754,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp190.581.796.754,00 atau 81,86% dari anggaran Rp232.812.764.529,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp203.046.191.751,00 dengan rincian sebagai berikut

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	5.861.282.000,00	4.957.139.667,00	84,57	1.056.260.077,00
3	RSUD Moewardi Surakarta	34.955.000.000,00	31.772.415.247,00	90,90	60.645.342.372,00
4	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	50.623.919.600,00	46.287.777.462,00	91,43	97.131.132.062,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	44.375.000.000,00	41.643.729.650,00	93,85	38.038.090.165,00
6	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	62.403.389.329,00	46.366.521.946,00	74,30	2.017.305.522,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	10.208.671.600,00	7.231.773.172,00	70,84	1.501.956.055,00
8	RSJD Surakarta	19.117.202.000,00	8.618.523.995,00	45,08	126.572.100,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	4.846.800.000,00	3.504.134.615,00	72,30	2.434.433.398,00
10	Dinas LH & Kehutanan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	3.000.000,00	2.056.000,00	68,53	0,00
12	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	198.500.000,00	197.725.000,00	99,61	0,00
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	20.000.000,00	0,00	0,00	60.100.000,00
	Jumlah	**232.812.764.529,00**	**190.581.796.754,00**	**81,86**	**203.046.191.751,00**

5.1.2.2.2.8 Belanja Modal Alat-Alat Laboratorium Rp124.993.681.315,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp124.993.681.315,00 atau 86,73% dari anggaran Rp144.118.418.400,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp18.812.149.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	133.037.593.000,00	115.220.237.106,00	86,61	9.935.893.240,00
2	Dinas Kesehatan	433.350.000,00	425.050.000,00	98,08	1.188.456.300,00
4	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	33.971.400,00	33.971.400,00	100,00	0,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	700.000.000,00	428.968.615,00	61,28	0,00
6	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	198.860.000,00	194.400.000,00	97,76	0,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	740.000.000,00	352.401.184,00	47,62	0,00
8	RSJD Surakarta	0,00	0,00	0,00	1.334.108.300,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	25.000.000,00	9.424.250,00	37,70	17.180.000,00
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	619.850.000,00	619.850.000,00	100,00	282.975.000,00
11	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	103.445.000,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	58.223.000,00
13	Dinas LH & Kehutanan	3.500.000,00	0,00	0,00	193.889.000,00

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	100.600.000,00	99.666.000,00	99,07	0,00
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.540.744.000,00	2.339.177.000,00	92,07	2.538.229.560,00
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	924.890.000,00	724.928.000,00	78,38	0,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.752.410.000,00	4.539.667.760,00	95,52	3.159.750.000,00
18	Badan Pengembangan SDM	7.650.000,00	5.940.000,00	77,65	0,00
	Jumlah	**144.118.418.400,00**	**124.993.681.315,00**	**86,73**	**18.812.149.400,00**

5.1.2.2.2.9 Belanja Modal Alat Keamanan — Rp4.367.055.200,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.367.055.200,00 atau 91,38% dari anggaran Rp4.779.130.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp14.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	50.000.000,00	48.400.000,00	96,80	0,00
2	Dinas LH & Kehutanan	77.350.000,00	77.250.000,00	99,87	0,00
3	Dinas Perhubungan	4.480.800.000,00	4.207.405.200,00	93,90	0,00
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	164.980.000,00	34.000.000,00	20,61	0,00
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00
	Jumlah	**4.779.130.000,00**	**4.367.055.200,00**	**91,38**	**14.900.000,00**

5.1.2.2.2.10 Belanja Modal Alat Komputer — Rp60.043.421.600,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp60.043.421.600,00 atau 94,80% dari anggaran Rp63.334.383.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	17.854.782.000,00	17.763.274.133,00	99,49	0,00
2	Dinas Kesehatan	936.698.000,00	901.338.615,00	96,23	0,00
3	RSUD Moewardi Surakarta	1.981.750.000,00	1.470.650.000,00	74,21	0,00
4	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	3.051.000.000,00	2.949.843.933,00	96,68	0,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	478.700.000,00	478.577.700,00	99,97	0,00
6	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	1.256.980.000,00	1.135.155.570,00	90,31	0,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	655.865.000,00	636.890.000,00	97,11	0,00
8	RSJD Surakarta	290.000.000,00	239.481.200,00	82,58	0,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	300.000.000,00	283.382.000,00	94,46	0,00
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	759.300.000,00	696.762.700,00	91,76	0,00
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	762.828.000,00	714.555.000,00	93,67	0,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	175.500.000,00	173.325.000,00	98,76	0,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	90.000.000,00	89.430.000,00	99,37	0,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	117.350.000,00	113.565.000,00	96,77	0,00
15	Dinas Sosial	461.812.000,00	435.902.840,00	94,39	0,00

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	282.900.000,00	280.046.000,00	98,99	0,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	249.170.000,00	247.016.000,00	99,14	0,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	8.472.000,00	8.472.000,00	100,00	0,00
19	Dinas LH & Kehutanan	826.185.000,00	763.242.329,00	92,38	0,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	100.000.000,00	88.000.000,00	88,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil	329.950.000,00	329.906.000,00	99,99	0,00
22	Dinas Perhubungan	253.500.000,00	252.010.000,00	99,41	0,00
23	Dinas Kominfo	12.353.347.000,00	12.135.052.400,00	98,23	0,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	473.000.000,00	466.449.000,00	98,62	0,00
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	425.530.000,00	377.854.000,00	88,80	0,00
26	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	650.650.000,00	642.914.940,00	98,81	0,00
27	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	449.550.000,00	435.634.000,00	96,90	0,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	555.000.000,00	541.468.000,00	97,56	0,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	230.426.000,00	228.845.600,00	99,31	0,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	432.143.000,00	415.164.000,00	96,07	0,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.185.996.000,00	1.108.315.140,00	93,45	0,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	281.950.000,00	271.980.000,00	96,46	0,00
33	Sekretariat Daerah	1.712.564.000,00	1.514.550.000,00	88,44	0,00
34	Sekretariat DPRD	812.450.000,00	775.400.000,00	95,44	0,00
35	Inspektorat	197.500.000,00	195.470.000,00	98,97	0,00
36	Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	332.686.000,00	295.013.100,00	88,68	0,00
37	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	9.108.387.000,00	7.906.565.900,00	86,81	0,00
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	891.923.000,00	826.154.500,00	92,63	0,00
39	Badan Kepegawaian Daerah	1.521.319.000,00	1.360.395.000,00	89,42	0,00
40	Badan Pengembangan SDM	443.220.000,00	442.170.000,00	99,76	0,00
41	Badan Penghubung	54.000.000,00	53.200.000,00	98,52	0,00
	Jumlah	**63.334.383.000,00**	**60.043.421.600,00**	**94,80**	**0,00**

5.1.2.2.2.11 Belanja Modal Peralatan Olah Raga Rp15.000.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp15.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran Rp15.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pertanian dan Perkebunan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**100,00**	**0,00**

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp349.657.564.473,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp349.657.564.473,00 atau 85,63% dari anggaran Rp408.317.262.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp308.934.759.265,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	30.180.024.000,00	29.552.506.400.00	97,92	100.347.681.900,00
2	Dinas Kesehatan	4.563.800.000,00	3.673.476.300,00	80,49	3.526.774.084,00
3	RSUD Moewardi Surakarta	68.552.201.000,00	56.425.030.589,00	82,31	35.831.838.510,00
4	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	48.200.000.000,00	43.234.579.000,00	89,70	0,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	3.670.592.000,00	3.459.665.420,00	94,25	18.989.731.700,00
6	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	3.300.300.000,00	2.042.688.000,00	61,89	13.448.082.160,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	16.399.000.000,00	13.156.835.327,00	80,23	17.981.779.750,00
8	RSJD Surakarta	23.167.115.000,00	4.745.636.000,00	20,48	12.285.912.000,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	2.500.000.000,00	924.551.000,00	36,98	2.320.569.140,00
10	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	1.300.000.000,00	1.229.154.000,00	94,55	2.575.967.000,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja	380.000.000,00	378.797.000,00	99,68	491.418.000,00
12	Dinas Sosial	2.300.000.000,00	2.289.492.500,00	99,54	0,00
13	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.647.858.000,00	1.646.086.000,00	99,89	0,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100.000.000,00	99.550.000,00	99,55	0,00
15	Dinas LH & Kehutanan	11.213.400.000,00	5.234.277.872,00	46,68	1.158.315.350,00
16	Dinas Ketahanan Pangan	1.665.066.000,00	1.660.623.000,00	99,73	0,00
17	Dinas Perhubungan	4.690.953.000,00	4.326.087.800,00	92,22	235.282.000,00
18	Dinas Kominfo	0,00	0,00	0,00	154.673.000,00
19	Dinas Koperasi dan UKM	1.863.730.000,00	1.648.729.000,00	88,46	235.926.000,00
20	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	1.676.000.000,00	1.546.945.950,00	92,30	77.545.000,00
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	155.117.378.000,00	149.148.322.572,00	96,15	81.304.697.316,00
22	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	198.990.000,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.325.204.000,00	3.259.459.984,00	98,02	2.325.402.550,00
24	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.824.660.000,00	3.283.128.000,00	85,84	408.633.000,00
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.372.445.000,00	7.020.699.850,00	83,85	8.974.315.505,00
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5.241.914.000,00	4.924.827.774,00	93,95	2.319.947.300,00
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.187.100.000,00	1.179.841.964,00	99,39	0,00
28	Sekretariat DPRD	533.000.000,00	531.451.996,00	99,71	918.790.000,00
29	Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	347.632.000,00	345.352.175,00	99,34	589.244.500,00
30	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	293.920.000,00	157.218.000,00	53,49	1.500.674.500,00
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.388.470.000,00	2.218.351.000,00	92,88	635.449.000,00
32	Badan Penghubung	315.500.000,00	314.200.000,00	99,59	97.120.000,00
	Jumlah	**408.317.262.000,00**	**349.657.564.473,00**	**85,63**	**308.934.759.265,00**

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp598.655.967.923,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 Rp598.655.967.923,00 atau 94,27% dari anggaran Rp635.016.264.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 Rp799.019.206.624,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Jalan dan Jembatan	478.212.025.000,00	465.731.146.672.00	97,39	640.661.327.541,00
2	Belanja Bangunan Air (Irigasi)	142.105.575.000,00	120.775.101.814,00	84,99	137.609.060.769,00
3	Belanja Instalansi dan Jaringan	14.698.664.000,00	12.149.719.437,00	82,66	20.748.818.314,00
	Jumlah	**635.016.264.000,00**	**598.655.967.923.00**	**94,27**	**799.019.206.624,00**

5.1.2.2.4.1 Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp465.731.146.672,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp465.731.146.672,00 atau 97,39% dari anggaran Rp478.212.025.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp640.661.327.541,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	158.000.000,00	481.551.831,00	304,78	0,00
2	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	200.000.000,00	172.474.000,00	86,24	0,00
3	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	476.947.765.000,00	464.178.316.841,00	97,32	639.855.874.541,00
4	Dinas LH & Kehutanan	419.100.000,00	415.852.000,00	99,23	56.300.000,00
5	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	25.000.000,00	24.980.000,00	99,92	0,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	224.000.000,00	220.974.000,00	98,65	0,00
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	749.153.000,00
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	238.160.000,00	236.998.000,00	99,51	0,00
	Jumlah	**478.212.025.000,00**	**465.731.146.672,00**	**97,39**	**640.661.327.541,00**

5.1.2.2.4.2 Belanja Modal Bangunan Air Rp120.775.101.814,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp120.775.101.814,00 atau 84,99% dari anggaran Rp142.105.575.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp137.609.060.769,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	176.500.000,00	176.000.000,00	99,72	0,00
2	Dinas Kesehatan	50.800.000,00	48.500.000,00	95,47	119.272.000,00
3	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	0,00	0,00	0,00!	196.653.000,00
4	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	127.014.252.000,00	109.328.769.374,00	86,08	129.434.611.769,00
5	Dinas LH & Kehutanan	3.257.500.000,00	2.267.900.400,00	69,62	84.023.000,00
6	Dinas Perhubungan	50.000.000,00	49.493.000,00	98,99	0,00
7	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	264.750.000,00	263.550.000,00	99,55	0,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.624.481.000,00	5.153.513.540,00	67,59	2.116.453.000,00
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan	575.000.000,00	565.382.000,00	98,33	3.105.123.600,00
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	765.400.000,00	757.327.500,00	98,95	259.213.400,00
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.326.892.000,00	2.164.666.000,00	93,03	2.293.711.000,00
	Jumlah	**142.105.575.000,00**	**120.775.101.814,00**	**84,99**	**137.609.060.769,00**

5.1.2.2.4.3 Belanja Modal Instalasi dan Jaringan Rp12.149.719.437,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.149.719.437,00 atau 82,66% dari anggaran Rp14.698.664.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp20.748.818.314,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Kesehatan	200.949.000,00	198.567.400,00	98,81	160.165.000,00
2	RSUD Moewardi Surakarta	4.764.185.000,00	2.649.426.700,00	55,61	1.921.700.000,00
3	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	500.000.000,00	368.292.000,00	73,66	1.619.262.000,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	5.000.000,00	0,00	0,00	7.004.079.750,00
5	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	240.000.000,00	214.297.000,00	89,29	17.774.664,00
6	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	49.790.000,00	28.594.000,00	57,43	21.516.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23.350.000,00	23.236.800,00	99,52	0,00
8	Dinas LH & Kehutanan	18.000.000,00	17.710.300,00	98,39	0,00
9	Dinas Perhubungan	6.628.290.000,00	6.447.544.000,00	97,27	5.195.247.500,00
10	Dinas Kominfo	85.500.000,00	84.250.000,00	98,54	0,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	648.220.000,00	621.353.987,00	95,86	0,00
12	Dinas Pertanian dan Perkebunan	54.000.000,00	53.935.000,00	99,88	0,00
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	115.000.000,00	114.300.000,00	99,39	636.193.400,00
14	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	957.380.000,00	925.309.000,00	96,65	4.172.880.000,00
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24.000.000,00	23.156.250,00	96,48	0,00
16	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	198.500.000,00	99,25	0,00
17	Badan Pengembangan SDM	185.000.000,00	181.247.000,00	97,97	0,00
	Jumlah	**14.698.664.000,00**	**12.149.719.437,00**	**82,66**	**20.748.818.314,00**

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp128.797.833.067,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp128.797.833.067,00 atau 96,14% dari anggaran Rp133.973.676.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.794.491.050,00 terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Buku Perpustakaan	126.265.639.000,00	122.073.148.467,00	96,68	1.015.675.050,00
2	Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	242.750.000,00	234.337.500,00	96,53	313.366.000,00
3	Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman	2.224.140.000,00	2.126.986.000,00	95,63	1.465.450.000,00
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	5.241.147.000,00	4.363.361.100,00	83,25	0,00
	Jumlah	**133.973.676.000,00**	**128.797.833.067,00**	**96,14**	**2.794.491.050,00**

5.1.2.2.5.1 Belanja Modal Buku Perpustakaan Rp122.073.148.467,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp122.073.148.467,00 atau 96,68% dari anggaran Rp126.265.639.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.015.675.050,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	124.743.278.000,00	120.664.526.757,00	96,73	4.560.000,00
3	RSUD Moewardi Surakarta	10.000.000,00	0,00	0,00	19.984.600,00
4	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	20.000.000,00	17.481.420,00	87,41	0,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	5.000.000,00	4.700.000,00	94,00	4.950.000,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25.100.000,00	25.100.000,00	100,00	19.202.000,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	22.204.000,00	22.200.000,00	99,98	0,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.000.000,00	1.661.000,00	27,68	0,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.440.000,00	6.161.150,00	95,67	0,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	776.000,00	771.000,00	99,36	776.000,00
19	Dinas LH & Kehutanan	19.000.000,00	18.558.000,00	97,67	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	1.340.000,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	10.000.000,00	9.980.000,00	99,80	9.970.000,00
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	0,00	0,00	0,00	23.009.000,00
26	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	51.240.000,00	49.452.000,00	96,51	0,00
27	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	1.148.000.000,00	1.110.189.840,00	96,71	838.709.000,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.660.000,00	368.100,00	22,17	5.520.000,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	20.080.000,00	20.080.000,00	100,00	4.380.000,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.000.000,00	8.484.000,00	94,27	9.908.350,00
36	Sekretariat Daerah	21.750.000,00	18.136.000,00	83,38	26.347.600,00
37	Sekretariat DPRD	27.000.000,00	26.997.000,00	99,99	0,00
38	Inspektorat	9.000.000,00	8.729.200,00	96,99	0,00
39	Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	13.695.000,00	13.695.000,00	100,00	8.844.000,00
41	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	59.384.000,00	9.078.000,00	15,29	0,00
42	Badan Kepegawaian Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	2.464.500,00
43	Badan Pengembangan SDM	29.732.000,00	29.500.000,00	99,22	35.710.000,00
	Jumlah	**126.265.639.000,00**	**122.073.148.467,00**	**96,68**	**1.015.675.050,00**

5.1.2.2.5.2 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Budaya Rp234.337.500,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp234.337.500,00 atau 96,53% dari anggaran Rp242.750.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp313.366.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	169.000.000,00	165.500.000,00	97,93	0,00
2	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	0,00	0,00	0,00	268.066.000,00
3	Dinas LH & Kehutanan	71.750.000,00	66.837.500,00	93,15	0,00
4	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
5	Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
6	Badan Penghubung	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	19.800.000,00
	Jumlah	**242.750.000,00**	**234.337.500,00**	**96,53**	**313.366.000,00**

5.1.2.2.5.3 Belanja Modal Hewan, Ternak dan Tanaman Rp2.126.986.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.126.986.000,00 atau 95,63% dari anggaran Rp2.224.140.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.465.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas LH & Kehutanan	16.000.000,00	15.750.000,00	98,44	0,00
2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.208.140.000,00	2.111.236.000,00	95,61	1.465.450.000,00
	Jumlah	**2.224.140.000,00**	**2.126.986.000,00**	**95,63**	**1.465.450.000,00**

5.1.2.2.5.4 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Rp 4.363.361.100,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp4.363.361.100,00 atau 83,25% dari anggaran Rp 5.241.147.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	322.110.000,00	264.144.000,00	82,00	0,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	328.750.000,00	261.471.800,00	79,54	0,00
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.590.287.000,00	3.837.745.300,00	83,61	0,00
	Jumlah	**5.241.147.000,00**	**4.363.361.100,00**	**83,25**	**0,00**

5.1.2.2.6 Belanja Aset Tak Berwujud Rp336.825.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp336.825.000,00 atau 40,28% dari anggaran Rp836.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Kesehatan	140.000.000,00	131.755.000,00	94,11	94.110.000,00
2	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	500.000.000,00	17.500.000,00	3,50	97.550.000,00
3	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	87.270.500,00
4	Dinas Koperasi dan UKM	25.550.000,00	25.190.000,00	98,59	0,00
5	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	140.950.000,00
6	Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	39.500.000,00
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	170.700.000,00	162.380.000,00	95,13	100.000.000,00
8	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	198.500.000,00
	Jumlah	**836.250.000,00**	**336.825.000,00**	**40,28**	**757.880.500,00**

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga **Rp13.118.505.530,00**

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup.

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Tak Terduga	18.000.000.000,00	13.118.505.530,00	72,88	1.130.950.000,00
	Jumlah	**18.000.000.000,00**	**13.118.505.530,00**	**72,88**	**1.130.950.000,00**

5.1.2.4 Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota **Rp7.081.350.590.555,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.081.350.590.555,00 atau 96,28 % dari anggaran Rp7.354.942.127.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.763.993.885.389,00 terdiri dari :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota	5.101.505.174.000,00	4.971.230.606.896,00	97,45	4.812.323.251.641,00
2	Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	1.296.147.828.000,00	1.187.190.486.179,00	91,59	1.440.905.070.748,00
3	Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa	928.930.766.000,00	894.607.765.980,00	96,31	501.416.075.000,00
4	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	19.466.159.000,00	19.466.159.000,00	100,00	2.271.055.000,00
5	Bantuan Keuangan kepada Pemda Lainnya	8.892.200.000,00	8.855.572.500,00	0,00	7.078.433.000,00
	Jumlah	**7.354.942.127.000,00**	**7.081.350.590.555,00**	**96,28**	**6.763.993.885.389,00**

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab/Kota Rp4.971.230.606.896,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.971.230.606.896,00 sedangkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp4.812.323.251.641,00 terdiri dari :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Bagi Hasil PKB	1.252.987.323.151,00	1.194.966.668.661,00
2	Bagi Hasil BBNKB	1.019.453.490.937,00	979.684.690.003,00
3	Bagi Hasil PBBKB	1.298.383.359.860,00	1.212.677.813.900,00
4	Bagi Hasil PAP	6.737.410.145,00	5.984.070.946,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	1.393.585.338.259,00	1.418.907.273.571,00
6	Bagi Hasil Retribusi Kapal Cepat	83.684.544,00	102.734.560,00
	Jumlah	**4.971.230.606.896,00**	**4.812.323.251.641,00**

5.1.2.4.1.1 Bagi Hasil PKB Rp1.252.987.323.151,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.252.987.323.151,00sedangkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.194.966.668.661,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Kabupaten Semarang	40.279.755.954,00	36.520.491.618,00
2	Kabupaten Kendal	31.052.962.473,00	30.916.270.966,00
3	Kabupaten Demak	30.664.047.904,00	28.755.098.504,00
4	Kabupaten Grobogan	35.465.157.798,00	34.470.350.568,00
5	Kabupaten Pati	44.812.230.616,00	42.611.195.236,00
6	Kabupaten Kudus	38.208.032.769,00	33.719.435.600,00
7	Kabupaten Jepara	35.157.228.202,00	34.366.161.798,00
8	Kabupaten Rembang	22.516.080.104,00	20.161.487.173,00
9	Kabupaten Blora	24.674.886.808,00	23.320.828.075,00
10	Kabupaten Pekalongan	22.227.037.926,00	19.408.687.958,00
11	Kabupaten Batang	20.700.008.329,00	17.869.228.485,00
12	Kabupaten Pemalang	31.368.555.611,00	30.936.102.824,00
13	Kabupaten Tegal	29.946.041.484,00	28.936.372.882,00
14	Kabupaten Brebes	40.590.454.919,00	41.272.482.188,00
15	Kabupaten Banyumas	52.017.591.450,00	52.474.723.621,00
16	Kabupaten Cilacap	50.525.644.974,00	50.166.221.540,00
17	Kabupaten Purbalingga	27.302.549.576,00	24.558.927.792,00
18	Kabupaten Banjarnegara	23.236.946.554,00	21.269.223.265,00
19	Kabupaten Magelang	33.469.575.207,00	31.453.228.151,00
20	Kabupaten Temanggung	21.774.456.117,00	20.157.319.977,00
21	Kabupaten Wonosobo	23.565.676.289,00	21.020.394.494,00
22	Kabupaten Purworejo	23.292.479.237,00	21.170.427.021,00

NO	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2017
23	Kabupaten Kebumen	31.236.672.478,00	30.269.837.549,00
24	Kabupaten Klaten	44.483.500.813,00	43.674.905.697,00
25	Kabupaten Boyolali	29.921.429.063,00	30.099.629.781,00
26	Kabupaten Sragen	35.577.335.009,00	35.419.887.800,00
27	Kabupaten Sukoharjo	32.957.561.081,00	32.877.042.969,00
28	Kabupaten Karanganyar	35.565.876.260,00	33.432.488.311,00
29	Kabupaten Wonogiri	30.260.165.320,00	29.397.685.959,00
30	Kota Semarang	178.268.200.088,00	180.056.598.027,00
31	Kota Pekalongan	21.731.714.363,00	15.647.122.299,00
32	Kota Surakarta	57.313.300.587,00	57.636.916.705,00
33	Kota Salatiga	16.446.741.061,00	12.492.100.508,00
34	Kota Tegal	19.604.707.874,00	13.510.120.748,00
35	Kota Magelang	16.772.718.853,00	14.917.672.572,00
	Jumlah	**1.252.987.323.151,00**	**1.194.966.668.661,00**

5.1.2.4.1.2 Bagi Hasil BBNKB — Rp1.019.453.490.937,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.019.453.490.937,00 sedangkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp979.684.690.003,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Kabupaten Semarang	32.445.593.951,00	31.758.123.237,00
2	Kabupaten Kendal	29.393.910.574,00	28.975.384.336,00
3	Kabupaten Demak	33.338.875.226,00	32.724.495.416,00
4	Kabupaten Grobogan	31.791.087.845,00	29.934.941.787,00
5	Kabupaten Pati	37.920.336.644,00	35.392.328.029,00
6	Kabupaten Kudus	30.726.106.004,00	27.187.490.065,00
7	Kabupaten Jepara	32.261.095.621,00	31.598.385.584,00
8	Kabupaten Rembang	19.623.766.626,00	15.359.389.745,00
9	Kabupaten Blora	17.281.819.479,00	16.583.843.289,00
10	Kabupaten Pekalongan	24.349.149.535,00	19.626.529.830,00
11	Kabupaten Batang	22.539.413.526,00	17.769.193.261,00
12	Kabupaten Pemalang	29.479.594.436,00	30.322.150.347,00
13	Kabupaten Tegal	33.957.373.172,00	35.539.387.135,00
14	Kabupaten Brebes	33.565.101.314,00	37.235.418.333,00
15	Kabupaten Banyumas	40.167.821.660,00	41.275.713.669,00
16	Kabupaten Cilacap	41.523.823.044,00	41.365.750.629,00
17	Kabupaten Purbalingga	18.436.482.448,00	18.832.751.700,00
18	Kabupaten Banjarnegara	17.959.861.854,00	17.632.851.554,00
19	Kabupaten Magelang	27.600.176.525,00	26.205.762.033,00
20	Kabupaten Temanggung	14.716.802.771,00	14.406.869.315,00

NO	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2017
21	Kabupaten Wonosobo	17.261.020.448,00	15.656.051.170,00
22	Kabupaten Purworejo	16.600.204.994,00	15.331.130.777,00
23	Kabupaten Kebumen	22.937.682.393,00	22.703.017.961,00
24	Kabupaten Klaten	35.505.847.764,00	35.472.386.398,00
25	Kabupaten Boyolali	25.393.525.570,00	26.129.123.038,00
26	Kabupaten Sragen	27.535.355.544,00	26.771.861.827,00
27	Kabupaten Sukoharjo	29.970.267.217,00	30.475.672.945,00
28	Kabupaten Karanganyar	28.478.967.886,00	25.871.585.415,00
29	Kabupaten Wonogiri	20.096.569.977,00	20.329.269.914,00
30	Kota Semarang	147.030.334.717,00	141.516.052.194,00
31	Kota Pekalongan	12.262.207.623,00	9.626.260.685,00
32	Kota Surakarta	37.050.948.996,00	35.920.648.195,00
33	Kota Salatiga	10.771.860.798,00	8.072.746.142,00
34	Kota Tegal	12.678.884.534,00	10.341.988.932,00
35	Kota Magelang	6.801.620.221,00	5.740.135.116,00
	Jumlah	**1.019.453.490.937,00**	**979.684.690.003,00**

5.1.2.4.1.3 Bagi Hasil PBBKB Rp1.298.383.359.860,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.298.383.359.860,00 dan untuk Tahun Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.212.677.813.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Kabupaten Semarang	44.847.150.922,00	42.400.962.203,00
2	Kabupaten Kendal	40.427.500.246,00	39.155.422.756,00
3	Kabupaten Demak	41.425.742.677,00	38.549.071.314,00
4	Kabupaten Grobogan	40.443.758.711,00	36.708.241.177,00
5	Kabupaten Pati	51.445.503.961,00	45.951.916.215,00
6	Kabupaten Kudus	38.646.974.974,00	37.028.147.877,00
7	Kabupaten Jepara	41.603.812.366,00	39.056.310.165,00
8	Kabupaten Rembang	33.112.721.400,00	26.830.199.341,00
9	Kabupaten Blora	24.190.252.482,00	23.449.235.946,00
10	Kabupaten Pekalongan	23.012.176.277,00	21.712.206.015,00
11	Kabupaten Batang	27.862.609.057,00	27.076.253.300,00
12	Kabupaten Pemalang	37.654.508.820,00	31.338.770.033,00
13	Kabupaten Tegal	48.270.727.814,00	45.507.297.546,00
14	Kabupaten Brebes	45.528.144.654,00	45.823.686.219,00
15	Kabupaten Banyumas	59.671.683.521,00	55.543.038.794,00
16	Kabupaten Cilacap	53.317.510.146,00	51.577.989.160,00
17	Kabupaten Purbalingga	23.813.386.480,00	23.458.342.178,00
18	Kabupaten Banjarnegara	24.239.528.212,00	21.208.329.236,00
19	Kabupaten Magelang	45.435.842.751,00	44.894.491.917,00

NO	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2017
20	Kabupaten Temanggung	24.344.553.871,00	23.946.328.998,00
21	Kabupaten Wonosobo	20.601.892.271,00	19.465.264.446,00
22	Kabupaten Purworejo	23.434.874.905,00	22.452.455.619,00
23	Kabupaten Kebumen	32.693.218.535,00	28.732.404.986,00
24	Kabupaten Klaten	50.301.162.390,00	45.452.800.034,00
25	Kabupaten Boyolali	32.576.485.387,00	27.003.572.793,00
26	Kabupaten Sragen	42.077.949.403,00	40.221.252.426,00
27	Kabupaten Sukoharjo	45.688.519.921,00	44.047.549.017,00
28	Kabupaten Karanganyar	39.158.754.719,00	37.212.827.082,00
29	Kabupaten Wonogiri	30.242.047.753,00	29.700.946.985,00
30	Kota Semarang	123.737.040.104,00	121.166.041.085,00
31	Kota Pekalongan	18.258.178.027,00	14.186.526.149,00
32	Kota Surakarta	34.373.474.994,00	32.908.129.365,00
33	Kota Salatiga	15.605.048.020,00	12.321.665.059,00
34	Kota Tegal	13.876.837.080,00	11.148.392.920,00
35	Kota Magelang	6.463.787.009,00	5.441.745.544,00
	Jumlah	**1.298.383.359.860,00**	**1.212.677.813.900,00**

5.1.2.4.1.4 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tanah Rp6.737.410.145,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6.737.410.145,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.984.070.946,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Kabupaten Semarang	595.943.494,00	618.499.413,00
2	Kabupaten Kendal	40.054.166,00	36.665.037,00
3	Kabupaten Demak	92.242.367,00	85.365.122,00
4	Kabupaten Grobogan	299.615.719,00	317.607.132,00
5	Kabupaten Pati	48.637.892,00	44.692.984,00
6	Kabupaten Kudus	22.827.347,00	19.804.993,00
7	Kabupaten Jepara	11.190.134,00	10.329.065,00
8	Kabupaten Rembang	71.239.776,00	31.258.258,00
9	Kabupaten Blora	44.870.578,00	40.817.968,00
10	Kabupaten Pekalongan	114.935.180,00	82.135.037,00
11	Kabupaten Batang	106.003.194,00	50.575.745,00
12	Kabupaten Pemalang	96.717.226,00	93.671.292,00
13	Kabupaten Tegal	115.275.429,00	83.187.511,00
14	Kabupaten Brebes	107.897.136,00	104.773.141,00
15	Kabupaten Banyumas	286.819.294,00	275.289.382,00
16	Kabupaten Cilacap	968.971.797,00	866.563.806,00
17	Kabupaten Purbalingga	94.109.970,00	36.067.160,00
18	Kabupaten Banjarnegara	1.330.193.393,00	1.513.542.450,00

NO	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2017
19	Kabupaten Magelang	210.278.374,00	47.575.511,00
20	Kabupaten Temanggung	121.624.462,00	56.317.786,00
21	Kabupaten Wonosobo	248.810.165,00	236.429.304,00
22	Kabupaten Purworejo	36.165.847,00	21.571.685,00
23	Kabupaten Kebumen	349.027.171,00	330.904.932,00
24	Kabupaten Klaten	233.340.064,00	149.650.645,00
25	Kabupaten Boyolali	100.226.510,00	74.605.749,00
26	Kabupaten Sragen	24.161.119,00	23.712.342,00
27	Kabupaten Sukoharjo	101.863.969,00	84.182.202,00
28	Kabupaten Karanganyar	206.257.498,00	149.001.549,00
29	Kabupaten Wonogiri	201.857.512,00	223.269.567,00
30	Kota Semarang	358.517.078,00	194.354.851,00
31	Kota Pekalongan	3.507.410,00	2.807.628,00
32	Kota Surakarta	32.962.331,00	35.023.340,00
33	Kota Salatiga	33.354.448,00	24.681.201,00
34	Kota Tegal	4.399.407,00	3.520.545,00
35	Kota Magelang	23.512.688,00	15.616.613,00
	Jumlah	**6.737.410.145,00**	**5.984.070.946,00**

5.1.2.4.1.5 Bagi Hasil Pajak Rokok — Rp1.393.585.338.259,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.393.585.338.259,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.418.907.273.571,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Kabupaten Semarang	41.097.720.872,00	41.665.775.329,00
2	Kabupaten Kendal	39.244.423.346,00	39.939.289.072,00
3	Kabupaten Demak	44.403.897.952,00	45.112.856.401,00
4	Kabupaten Grobogan	50.364.655.282,00	51.991.700.805,00
5	Kabupaten Pati	46.628.400.479,00	48.499.844.794,00
6	Kabupaten Kudus	36.137.019.034,00	36.670.129.465,00
7	Kabupaten Jepara	46.601.313.647,00	47.186.053.855,00
8	Kabupaten Rembang	29.892.337.043,00	30.421.374.483,00
9	Kabupaten Blora	36.541.171.175,00	37.283.133.713,00
10	Kabupaten Pekalongan	37.245.493.173,00	37.927.657.160,00
11	Kabupaten Batang	33.500.694.687,00	34.071.710.209,00
12	Kabupaten Pemalang	48.474.877.784,00	50.140.316.039,00
13	Kabupaten Tegal	53.023.799.600,00	54.155.626.421,00
14	Kabupaten Brebes	63.216.377.473,00	64.656.822.212,00
15	Kabupaten Banyumas	59.378.783.240,00	60.371.683.916,00
16	Kabupaten Cilacap	58.971.082.296,00	62.104.356.182,00
17	Kabupaten Purbalingga	38.033.115.897,00	38.646.118.170,00

NO	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2017
18	Kabupaten Banjarnegara	38.030.243.458,00	38.747.745.495,00
19	Kabupaten Magelang	48.075.449.248,00	48.871.300.035,00
20	Kabupaten Temanggung	33.580.261.241,00	34.152.422.924,00
21	Kabupaten Wonosobo	34.393.161.427,00	35.074.138.586,00
22	Kabupaten Purworejo	32.437.030.592,00	33.108.459.898,00
23	Kabupaten Kebumen	45.927.254.169,00	47.085.604.815,00
24	Kabupaten Klaten	45.378.229.196,00	46.317.361.146,00
25	Kabupaten Boyolali	39.488.857.575,00	40.569.967.639,00
26	Kabupaten Sragen	37.302.941.950,00	38.076.121.428,00
27	Kabupaten Sukoharjo	36.995.878.239,00	37.639.565.784,00
28	Kabupaten Karanganyar	36.783.892.254,00	37.403.613.643,00
29	Kabupaten Wonogiri	39.310.489.439,00	40.137.830.575,00
30	Kota Semarang	61.632.211.491,00	62.292.293.093,00
31	Kota Pekalongan	21.007.985.911,00	20.465.847.239,00
32	Kota Surakarta	26.734.665.050,00	27.271.221.945,00
33	Kota Salatiga	18.379.350.952,00	16.538.080.090,00
34	Kota Tegal	19.928.016.054,00	18.570.753.855,00
35	Kota Magelang	15.444.257.033,00	15.740.497.155,00
	Jumlah	**1.393.585.338.259,00**	**1.418.907.273.571,00**

Dari Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp1.392.585.338.259,00 tidak termasuk kontribusi BPJS (37,5%) dari kabupaten Kota pada tahun 2018 yang dananya langsung ditransfer ke BPJS Kesehatan tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp138.539.847.136,00.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan ke Kab/Kota — Rp1.187.190.486.179,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.187.190.486.179,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.440.905.070.748,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Kabupaten Semarang	15.107.190.000,00	13.568.289.000,00	89,81	20.635.643.000,00
2	Kabupaten Kendal	27.714.890.000,00	25.762.505.000,00	92,96	28.827.068.000,00
3	Kabupaten Demak	79.765.690.000,00	78.172.967.785,00	98,00	61.781.832.000,00
4	Kabupaten Grobogan	43.864.390.000,00	40.622.327.000,00	92,61	67.144.153.000,00
5	Kabupaten Pati	72.610.450.000,00	71.501.232.093,00	98,47	78.755.048.130,00
6	Kabupaten Kudus	19.694.260.000,00	19.014.445.000,00	96,55	52.057.300.000,00
7	Kabupaten Jepara	89.830.390.000,00	87.977.766.000,00	97,94	55.756.967.000,00
8	Kabupaten Rembang	30.186.490.000,00	26.825.167.000,00	88,86	24.358.539.000,00
9	Kabupaten Blora	106.503.350.000,00	103.314.166.000,00	97,01	62.170.199.000,00
10	Kabupaten Pekalongan	78.799.390.000,00	75.125.339.000,00	95,34	48.077.792.550,00

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
11	Kabupaten Batang	35.786.840.000,00	33.698.282.350,00	94,16	18.134.930.048,00
12	Kabupaten Pemalang	34.420.690.000,00	30.730.000.000,00	89,28	29.984.584.048,00
13	Kabupaten Tegal	12.869.390.000,00	10.472.690.000,00	81,38	17.648.608.000,00
14	Kabupaten Brebes	61.214.390.000,00	58.419.884.000,00	95,43	70.660.128.000,00
15	Kabupaten Banyumas	12.391.390.000,00	12.205.641.000,00	98,50	38.132.853.284,00
16	Kabupaten Cilacap	32.489.390.000,00	27.096.638.522,00	83,40	53.564.548.000,00
17	Kabupaten Purbalingga	23.387.190.000,00	12.061.559.000,00	51,57	55.404.387.000,00
18	Kabupaten Banjarnegara	60.898.470.000,00	40.370.750.350,00	66,29	79.442.001.000,00
19	Kabupaten Magelang	10.957.190.000,00	9.359.234.000,00	85,42	15.643.871.000,00
20	Kabupaten Temanggung	26.219.390.000,00	20.888.403.370,00	79,67	42.081.248.000,00
21	Kabupaten Wonosobo	105.874.390.000,00	104.517.169.260,00	98,72	50.966.543.000,00
22	Kabupaten Purworejo	11.129.750.000,00	10.860.374.100,00	97,58	35.279.908.542,00
23	Kabupaten Kebumen	24.874.750.000,00	23.874.757.000,00	95,98	11.868.380.000,00
24	Kabupaten Klaten	15.774.310.000,00	10.209.544.000,00	64,72	46.337.071.481,00
25	Kabupaten Boyolali	21.289.390.000,00	21.157.449.000,00	99,38	35.034.390.000,00
26	Kabupaten Sragen	67.939.488.000,00	65.440.858.000,00	96,32	72.352.981.067,00
27	Kabupaten Sukoharjo	13.810.950.000,00	11.780.790.341,00	85,30	31.934.457.881,00
28	Kabupaten Karanganyar	10.947.190.000,00	9.667.587.140,00	88,31	24.463.332.821,00
29	Kabupaten Wonogiri	43.962.190.000,00	42.971.440.000,00	97,75	90.035.824.000,00
30	Kota Semarang	46.541.600.000,00	34.937.506.000,00	75,07	26.484.299.746,00
31	Kota Pekalongan	7.826.600.000,00	7.324.841.000,00	93,59	27.216.854.000,00
32	Kota Surakarta	25.086.600.000,00	24.128.135.273,00	96,18	19.862.900.000,00
33	Kota Salatiga	2.791.600.000,00	2.668.788.000,00	95,60	19.684.897.050,00
34	Kota Tegal	19.511.600.000,00	16.547.670.595,00	84,81	19.420.368.600,00
35	Kota Magelang	4.076.600.000,00	3.916.290.000,00	96,07	9.701.162.500,00
	Jumlah	**1.296.147.828.000,00**	**1.187.190.486.179,00**	**91,59**	**1.440.905.070.748,00**

5.1.2.4.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa Rp894.607.765.980,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp894.607.765.980,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp501.416.075.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Kabupaten Semarang	34.314.790.000,00	34.174.790.000,00	99,59	16.030.200.000,00
2	Kabupaten Kendal	36.321.459.000,00	35.981.459.000,00	99,06	17.735.000.000,00
3	Kabupaten Demak	18.168.323.000,00	18.013.322.980,00	99,15	10.505.000.000,00
4	Kabupaten Grobogan	74.441.638.000,00	73.126.638.000,00	98,23	14.962.500.000,00
5	Kabupaten Pati	99.337.002.000,00	97.212.002.000,00	97,86	46.555.420.000,00
6	Kabupaten Kudus	11.415.000.000,00	9.565.000.000,00	83,79	7.190.000.000,00
7	Kabupaten Jepara	33.473.105.000,00	33.273.105.000,00	99,40	13.870.000.000,00

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
8	Kabupaten Rembang	18.360.000.000,00	18.310.000.000,00	99,73	11.035.000.000,00
9	Kabupaten Blora	21.958.000.000,00	21.958.000.000,00	100,00	12.785.000.000,00
10	Kabupaten Pekalongan	17.265.000.000,00	16.000.000.000,00	92,67	11.532.291.000,00
11	Kabupaten Batang	37.445.808.000,00	36.995.808.000,00	98,80	19.075.000.000,00
12	Kabupaten Pemalang	23.723.756.000,00	22.063.756.000,00	93,00	11.975.000.000,00
13	Kabupaten Tegal	15.705.000.000,00	12.535.000.000,00	79,82	9.275.000.000,00
14	Kabupaten Brebes	39.960.000.000,00	37.570.000.000,00	94,02	24.527.000.000,00
15	Kabupaten Banyumas	37.959.920.000,00	37.239.920.000,00	98,10	20.815.080.000,00
16	Kabupaten Cilacap	28.367.822.000,00	27.642.822.000,00	97,44	17.824.000.000,00
17	Kabupaten Purbalingga	16.280.000.000,00	15.340.000.000,00	94,23	9.840.000.000,00
18	Kabupaten Banjarnegara	27.368.671.000,00	25.928.671.000,00	94,74	13.897.281.000,00
19	Kabupaten Magelang	39.631.417.000,00	39.021.417.000,00	98,46	21.776.091.000,00
20	Kabupaten Temanggung	30.341.413.000,00	29.811.413.000,00	98,25	12.138.350.000,00
21	Kabupaten Wonosobo	35.197.500.000,00	34.837.500.000,00	98,98	17.972.000.000,00
22	Kabupaten Purworejo	28.215.000.000,00	27.955.000.000,00	99,08	23.507.187.000,00
23	Kabupaten Kebumen	29.120.000.000,00	23.025.000.000,00	79,07	18.460.000.000,00
24	Kabupaten Klaten	58.095.000.000,00	54.455.000.000,00	93,73	43.980.000.000,00
25	Kabupaten Boyolali	18.855.000.000,00	17.255.000.000,00	91,51	14.412.675.000,00
26	Kabupaten Sragen	29.146.142.000,00	28.826.142.000,00	98,90	20.465.000.000,00
27	Kabupaten Sukoharjo	10.875.000.000,00	10.665.000.000,00	98,07	9.516.000.000,00
28	Kabupaten Karanganyar	23.371.000.000,00	22.341.000.000,00	95,59	10.548.000.000,00
29	Kabupaten Wonogiri	34.218.000.000,00	33.485.000.000,00	97,86	19.212.000.000,00
	Jumlah	**928.930.766.000,00**	**894.607.765.980,00**	**96,31**	**501.416.075.000,00**

5.1.2.4.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp19.466.159.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp19.466.159.000,00 sedangkan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.271.055.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.611.096.000,00	5.611.096.000,00	100,00	654.628.000,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2.711.238.000,00	2.711.238.000,00	100,00	179.007.000,00
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.355.170.000,00	2.355.170.000,00	100,00	163.364.000,00
4	Partai Keadilan Sejahtera	1.377.056.000,00	1.377.056.000,00	100,00	160.657.000,00
5	Partai Golongan Karya	2.143.574.000,00	2.143.574.000,00	100,00	274.770.000,00
6	Partai Demokrat	1.534.343.000,00	1.534.343.000,00	100,00	316.312.000,00
7	Partai Amanat Nasional	1.400.262.000,00	1.400.262.000,00	100,00	250.084.000,00
8	Partai Persatuan Pembangunan	1.417.839.000,00	1.417.839.000,00	100,00	165.415.000,00
9	Partai Nasional Demokrat	915.581.000,00	915.581.000,00	100,00	106.818.000,00
	Jumlah	**19.466.159.000,00**	**19.466.159.000,00**	**100,00**	**2.271.055.000,00**

5.1.2.4.5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda Lainnya Rp8.855.572.500,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp8.855.572.500,00 atau 99,59%, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara	0,00	0,00	0,00	7.078.433.000,00
2	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sinjunjung Sumatera Barat	6.892.200.000,00	6.855.572.500,00	99,47	0,00
3	Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
4	Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Sulawei Tengah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**8.892.200.000,00**	**8.855.572.500,00**	**99,59**	**7.078.433.000,00**

5.1.3 SURPLUS/(DEFISIT) Rp223.685.633.243,34

Surplus/(Defisit) adalah selisih antara Total Pendapatan Daerah dikurangi Total Belanja dan Transfer dalam Tahun Anggaran yang sama. Surplus apabila Total Pendapatan Daerah lebih besar daripada Total Belanja dan Transfer serta Defisit apabila sebaliknya. dengan perhitungan sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan	24.815.550.076.000,00	24.702.318.190.582,34	99.54	23.703.174.631.507,00
2	Belanja dan transfer	26.186.587.329.000,00	24.478.632.557.339,00	93.48	22.884.713.018.754,00
	Jumlah	**(1.371.037.253.000,00)**	**223.685.633.243,34**	**16,32%**	**818.461.612.753,00**

5.1.4 PENJELASAN POS-POS PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. dengan perhitungan sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Penerimaan Pembiayaan	1.511.037.253.000,00	1.528.916.848.598,20	101,18	646.575.639.755,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	100,00	304.000.000.000,00
	Jumlah	**1.371.037.253.000,00**	**1.388.916.848.598,20**	**101,30**	**342.575.639.755,00**

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan Rp1.528.916.848.598,20

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.528.916.848.598,20 atau 101,18% dari anggaran Rp1.511.037.253.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp646.575.639.755,00 terdiri dari :

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Penggunaan SiLPA	1.161.037.253.000,00	1.156.338.690.485,20	99,60	646.122.875.159,00
2	Pencairan Dana Cadangan	350.000.000.000,00	350.000.000.000,00	100,00	0,00
3	Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan	0,00	0,00	0,00	2.727.273,00
4	Penerimaan Pokok Dana Bergulir	0,00	275.423.625,00	0,00	450.037.323,00
5	Pembiayaan dari sektor perbankan	0,00	22.302.734.488,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.511.037.253.000,00**	**1.528.916.848.598,20**	**101,18**	**646.575.639.755,00**

5.1.4.1.1 Pengunaan SiLPA Rp1.156.338.690.485,20

Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun anggaran sebelumnya untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.156.338.690.485,20 atau 99,60% dari anggaran Rp1.161.037.253.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp646.122.875.159,00.

5.1.4.1.2 Pencairan Dana Cadangan Rp350.000.000.000,00

Realisasi Pencairan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp350.000.000.000,00 atau 100% dari anggaran Rp350.000.000.000,00.

5.1.4.1.3 Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan Pengadaan Pangan Rp0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.727.273,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	
1	Kabupaten Cilacap	**0,00**	0,00	**2.727.273,00**
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**2.727.273,00**

5.1.4.1.4 Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Rp275.423.625,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp275.423.625,00 sedangkan untuk Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp450.037.323,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	
1	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Koperasi dan UKM)	0,00	101.358.325,00	80.950.000,00
2	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Biro Perkenomian)	0,00	109.245.000,00	247.780.000,00

NO	URAIAN	2018		Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	
3	Penerimaan Dana Bergulir untuk Peralatan/Bahan Baku bagi IKM (Disperindag)	0,00	53.320.300,00	110.007.323,00
4	Penerimaan Dana Bergulir Gerbang Mapan (Dinas Ketahanan Pangan)	0,00	11.500.000,00	11.300.000,00
	Jumlah	**0,00**	**275.423.625,00**	**450.037.323,00**

5.1.4.1.5 Pembiayaan dari Sektor Perbankan Rp22.302.734.488,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp22.302.734.488,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp22.302.734.488,00 terdiri dari :

NO	URAIAN	2018		Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi	
1	RSUD Moewardi	**0,00**	22.302.734.488,00	**0,00**
	Jumlah	**0,00**	**22.302.734.488,00**	**0,00**

Penerimaan Pembiayaan berupa pembiayaan dari sektor perbankan dalam rangka menutupi biaya operasional rumah sakit diakhir tahun 2018 dikarenakan pembayaran hasil klaim BPJS terhambat/tidak lancar.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Rp140.000.000.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp140.000.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp304.000.000.000,00 terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	100,00	154.000.000.000,00
2	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	150.000.000.000,00
	Jumlah	**140.000.000.000,00**	**140.000.000.000,00**	**100,00**	**304.000.000.000,00**

5.1.4.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp140.000.000.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp140.000.000.000,00 dan Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp154.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	BPR0,00BKK	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	100,00	99.000.000.000,00
2	PDAB Tirta Utama	53.280.000.000,00	53.280.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
3	PT. Asuransi Bangun Krida	6.720.000.000,00	6.720.000.000,00	100,00	0,00
4	PT. Jamkrida	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	50.000.000.000,00
	Jumlah	**140.000.000.000,00**	**140.000.000.000,00**	**100,00**	**154.000.000.000,00**

5.1.4.2.2. Pembentukan Dana Cadangan **Rp0,00**

Pembentukan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2018 tidak dianggarakan atau sebesar Rp0,00.

5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.612.602.481.841,00 SiLPA tersebut dalam bentuk sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018	
		Anggaran	Realisasi
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	0,00	423.326.975.483,00
2	Setara Kas RKUD (Deposito)	0,00	1.020.000.000.000,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	0,00	43.477.500,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	0,00	261.907.860,00
5	Kas di Bendahara BLUD	0,00	127.283.351.947,54
6	Kas di Bendahara Sekolah	0,00	41.686.769.051,00
	Jumlah	**0,00**	**1.612.602.481.841,54**

Penjelasan SiLPA tahun 2018 dimaksud termasuk di dalamnya :

Setara Kas RKUD (Deposito)

NO	URAIAN	2018	
		Anggaran	Realisasi
1	Bank Jateng	0,00	700.000.000.000,00
2	Bank BRI	0,00	200.000.000.000,00
3	Bank BTN	0,00	120.000.000.000,00
	Jumlah	**0,00**	**1.020.000.000.000,00**

Kas di Bendahara Penerimaan SKPD

NO	URAIAN	2018	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	19.505.000,00
2	Dinas Perhubungan	0,00	23.972.500,00
	Jumlah	**0,00**	**43.477.500,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD

NO	URAIAN	2018	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	0,00	4.676.360,00
2	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	0,00	100.500,00
3	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	0,00	57.131.000,00
4	KDH dan Wakil KDH	0,00	200.000.000,00
	Jumlah	**0,00**	**261.907.860,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD

NO	URAIAN	2018	
		Anggaran	Realisasi
1	RSUD Dr Moewardi	0,00	879.261.227,00
2	RSUD Dr Margono	0,00	94.036.603.321,00
3	RSUD Tugurejo	0,00	6.681.910.508,00
4	RSUD Kelet Donorejo	0,00	5.722.698.359,54
5	RSJD Dr Amino	0,00	9.866.402.901,00
6	RSJD Surakarta	0,00	4.382.447.320,00
7	RSJD Klaten	0,00	5.714.028.311,00
	Jumlah	**0,00**	**127.283.351.947,54**

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal **Rp1.161.037.252.508,00**

Saldo anggaran lebih awal tahun 2018 sebesar Rp1.161.037.252.508,00 merupakan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2017.

Saldo Anggaran Lebih Awal terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	1.001.596.763.923,00	502.823.976.126,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	51.854.287,00	3.919.427,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	385.508.164,90	3.552.954.854,68
4	Kas di BLUD	120.568.201.007,10	139.742.024.751,00
5	Kas di Bendahara Sekolah	38.434.925.126,00	0,00
	Jumlah	**1.161.037.252.508,00**	**646.122.875.158,68**

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan **Rp1.156.338.690.485,20**

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan sebesar Rp1.156.338.690.485,20 merupakan penggunaan atas bagian dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2017.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan **Rp1.612.602.481.841,54**

Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp1.612.602.481.841,54 terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Pendapatan Asli daerah	13.711.836.037.849,34	12.547.513.389.400,00
2	Pendapatan Transfer	10.968.474.152.733,00	11.117.984.434.093,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	22.008.000.000,00	37.676.808.014,00
	Jumlah	**24.702.318.190.582,34**	**23.703.174.631.507,00**

No	Uraian	2018	2017
1	Belanja Operasi	15.702.411.154.886,00	14.664.990.098.901,00
2	Belanja Modal	1.681.752.306.368,00	1.454.598.084.464,00
3	Belanja Tidak Terduga	13.118.505.530,00	1.130.950.000,00
4	Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendptan ke Kab/Kota	7.081.350.590.555,00	6.763.993.885.389,00
	Jumlah	**24.478.632.557.339,00**	**22.884.713.018.754,00**
1	Penerimaan Pembiayaan	1.528.916.848.598,20	646.575.639.755,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	140.000.000.000,00	304.000.000.000,00
	Jumlah	**1.388.916.848.598,20**	**342.575.639.755,00**
	SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	**1.612.602.481.841,54**	**1.161.037.252.508,00**

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (Rp4.698.562.022,80)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar (Rp4.698.562.022,80) merupakan koreksi kesalahan atas penyajian saldo kas di Bendahara Sekolah atas BOS dan BOP.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp1.612.602.481.841,54

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2018 sebesar Rp1.612.602.481.841,54 berasal dari:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Realisasi Pendapatan	24.702.318.190.582,34	23.703.174.631.507,00
2	Realisasi Belanja	24.478.632.557.339,00	22.884.713.018.754,00
3	Penerimaan Pembiayaan	1.528.916.848.598,20	646.575.639.755,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	140.000.000.000,00	304.000.000.000,00
	SiLPA Tahun 2018	**1.612.602.481.841,54**	**1.161.037.252.508,00**

Saldo ini terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah		
	- Giro di bank Jateng	423.326.975.483,00	541.596.763.923,00
	Setara Kas BUD		
	- Bank Jateng	700.000.000.000,00	300.000.000.000,00
	- Bank BTN	120.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	- Bank Mandiri	0,00	20.000.000.000,00
	- Bank Bukopin	0,00	5.000.000.000,00
	- Bank BNI	0,00	0,00
	- Bank BRI	200.000.000.000,00	25.000.000.000,00
	- Bank Muamalat	0,00	10.000.000.000,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran (sisa UP)		
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.676.360,00	3.531.774,00
	- Dinas PSDA	100.500,00	0,00

No	Uraian	2018	2017
	- Dinas Penanaman Modal dan PTSP	57.131.000,00	0,00
	- KDH/WKDH	200.000.000,00	0,00
	- Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	0,00	36.072.936,00
	- Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	33.000,00
	- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	2.100.000,00
	- inspektorat	0,00	2.449.174,00
	- Badan Pengelola Pendapatan Daerah	0,00	7.667.403,00
3	Kas di BLUD		
	Rekening Giro Kas Bendahara BLUD		
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta	462.472.390,00	427.096.501,00
	- RSUD Dr Margono Sukarjo Purwokerto	17.536.603.321,34	12.509.515.521,80
	- RSUD Tugurejo	6.657.982.958,00	4.916.679.840,00
	- RSJD Dr Amino Gondohutomo	8.842.092.232,00	9.766.257.752,00
	- RSUD Kelet Donorejo	5.702.866.008,00	5.002.249.678,30
	- RSJD Surakarta	4.276.498.595,00	4.023.707.742,00
	- RSJD RM Soedjarwadi Klaten	3.209.351.915,00	3.922.693.972,00
	Setara Kas BLUD		
	- RSUD Dr Margono Sukardjo (BNI)	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00
	- RSUD Dr Margono Sukardjo (Bank Jateng)	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00
	- RSJD Dr Amino Gondohutomo (Bank Mandiri)	500.000.000,00	500.000.000,00
	- RSJD Dr Amino Gondohutomo (BTN)	500.000.000,00	500.000.000,00
	- RSJD RM Soedjarwadi Klaten (Bank Jateng)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan		
	- Dinas Kesehatan	0,00	20.451.459,00
	- Dinas Perhubungan	23.972.500,00	17.920.000,00
	- Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	19.505.000,00	0,00
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta	416.788.837,00	157.151.895,00
	- RSUD Tugurejo	0,00	54.158.500,00
	- RSJD Dr Amino Gondohutomo	24.310.669,00	10.662.920,00
	- RSJD Tugurejo	23.927.550,00	0,00
	- RSUD Kelet Donorejo	19.832.351,00	62.127.194,90
	- RSJD Surakarta	105.948.725,00	13.197.378,00
	- RSJD RM Soedjarwadi Klaten	4.676.396,00	8.666.947,00
	- Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	0,00	13.295.000,00
	- Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	3.000.000,00
	- Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	1.846.871,00
	- Dinas Perindustrian dan perdagangan	0,00	21.130.000,00
	- Sekretariat DPRD	0,00	1.900.000,00
5	Kas di Bendahara Sekolah	41.686.769.051,20	38.434.925.126,00
	Jumlah	**1.612.602.481.841,54**	**1.161.037.252.508,00**

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2018 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember2017, dengan uraian sebagai berikut :

5.3.1 Aset Rp36.382.807.647.907,47

Total Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp36.382.807.647.907,47 naik sebesar Rp2.189.220.115.249,05atau 6,40% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp34.193.587.532.658,35. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Aset Lancar	4.075.221.853.382,43	3.131.058.914.994,59
2	Investasi Jangka Panjang	6.152.950.888.667,63	5.915.900.631.546,25
3	Aset Tetap	25.312.181.723.325,10	24.411.222.422.226,10
4	Dana Cadangan	0,00	382.861.505.239,00
5	Aset Lainnya	842.453.182.532,31	352.544.058.652,41
	Jumlah	**36.382.807.647.907,47**	**34.193.587.532.658,35**

5.3.1.1 Aset Lancar Rp4.075.221.853.382,43

Aset lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.075.221.853.382,43 naik sebesar Rp944.162.938.387,84 atau 30,15% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.131.058.914.994,58 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Kas dan Setara Kas	1.615.363.817.893,54	1.163.279.517.548,72
2	Piutang Pendapatan	2.094.834.454.476,64	1.744.590.456.608,65
3	Beban Dibayar Dimuka	4.974.828.071,56	4.330.424.760,08
4	Persediaan	360.048.752.940,69	218.858.516.077,14
	Jumlah	**4.075.221.853.382,43**	**3.131.058.914.994,59**

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas Rp1.615.363.817.893,54

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.615.363.817.893,54 naik sebesar Rp452.084.300.344,82 atau 38,86% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.163.279.517.548,72 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaandan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah(SKPD),dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	423.326.975.483,00	541.596.763.923,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	43.477.500,00	2.627.762.536,90
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	616.508.425,00	51.864.956,00

		2018	2017
4	Kas di Bendahara BLUD	129.690.087.434,34	40.568.201.006,82
5	Kas di Bendahara Sekolah	41.686.769.051,20	38.434.925.126,00
6	Setara Kas di Rekening Kas Umum Daerah	1.020.000.000.000,00	460.000.000.000,00
7	Setara Kas BLUD	0,00	80.000.000.000,00
	Jumlah	**1.615.363.817.893,54**	**1.163.279.517.548,72**

5.3.1.1.1.1 Kas di Rekening Kas Umum Daerah **Rp423.326.975.483,00**

Kasdi Rekening Kas Umum Daerahper 31 Desember 2018 sebesar Rp423.326.975.483,00 turun sebesar Rp118.269.788.440,00 atau 21,84% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp541.596.763.923,00. Saldo Kas Umum Daerah merupakan dana milik Provinsi Jawa Tengah pada PT. Bank Jateng dengan Nomor Rekening 1.034.01504.7, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2018	2017
Kas di Rekening Kas Umum Daerah (BUD)	**423.326.975.483,00**	**541.596.763.923,00**

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan **Rp43.477.500,00**

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp43.477.500,00 turun sebesar Rp36.065.830,00 atau 45,34% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp79.543.330,00. Saldo tahun 2018 merupakan saldo kas pada bendahara penerimaan SKPD yang belum disetor ke Rekening Kas UmumDaerah sampai dengan 31 Desember 2018 dan tidak termasuk saldo kas di bendahara penerimaan BLUD, dengan rincian sebagai berikut :

Kas di Bendahara Penerimaan (SiLPA)

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Dinas Kesehatan	0,00	20.451.459,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	0,00	13.295.000,00
3	Dinas Perhubungan	23.972.500,00	17.920.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.505.000,00	0,00
5	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	3.000.000,00
6	Dinas Perikanan dan Kelautan	0,00	1.846.871,00
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	21.130.000,00
8	Sekretariat DPRD	0,00	1.900.000,00
	Jumlah	**43.477.500,00**	**79.543.330,00**

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD (SiLPA)

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	0,00	157.151.895,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	0,00	0,00
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	0,00	10.662.920,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	0,00	54.158.500,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	0,00	62.127.194,90
6	RSJD Surakarta	0,00	13.197.378,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	0,00	8.666.947,00
	Jumlah	0,00	**305.964.834,90**

Kas di Bendahara Penerimaan - UM Titipan Pasien (Non SiLPA)

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	0,00	1.190.483.322,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	0,00	822.101.933,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	0,00	200.211.050,00
4	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	0,00	19.458.067,00
5	RSJD Surakarta	0,00	10.000.000,00
	Jumlah	0,00	**2.242.254.372,00**

Kas di Bendahara Penerimaan - UM Titipan Pasien (Non SiLPA) per 31 Desember 2018 disajikan sebagai bagian dari Kas di BLUD.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp616.508.425,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp616.508.425,00 naik sebesar Rp564.643.469,00 atau 1088,68% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp51.864.956,00 terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	308.239.613,00	3.531.774,00
2	Dinas Kesehatan	48.282.200,00	0,00
3	Dinas Bina Marga dan Tata Ruang	2.005.000,00	0,00
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	100.500,00	0,00
5	Dinas Sosial	740.000,00	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1,00	0,00
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	8.582,00
8	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	10.111,00	0,00
9	Sekretariat Daerah	0,00	2.087,00
10	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	0,00	36.072.936,00
11	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	57.131.000,00	0,00
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	33.000,00
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	2.100.000,00
14	KDH/WKDH	200.000.000,00	0,00
15	Inspektorat	0,00	2.449.174,00
16	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	0,00	7.667.403,00
	Jumlah	**616.508.425,00**	**51.864.956,00**

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran SKPD yang belum disetor ke Rekening Kas UmumDaerah sampai dengan 31 Desember 2018 terdiri dari kas di bendahara pengeluaran (SiLPA) dan Non SiLPA dengan rincian sebagai berikut :

a. Kas di Bendahara Pengeluaran–(SiLPA)

Saldo Kas ini merupakan sisa kas uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA. Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah :

(Dalam Rupiah)

		2018	No STS	Tanggal Penyetoran	2017
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.676.360,00	STS/DISDIK	29 Maret 2019	3.531.774,00
2	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	100.000,00	22/STS/PPT	22 Maret 2019	0,00
		500,00	23/STS/PPT	22 Maret 2019	
3	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	0,00			36.072.936,00
4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	57.131.000,00	001/STS	21 Maret 2019	0,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00			33.000,00
6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00			2.100.000,00
7	KDH/WKDH	200.000.000,00		8 Januari 2019	0,00
8	Inspektorat	0,00			2.449.174,00
9	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	0,00			7.667.403,00
	Jumlah	**261.907.860,00**			**51.854.287,00**

b. Kas di Bendahara Pengeluaran– Kewajiban pada Pihak Lain (Non Silpa)

Saldo Kas ini merupakan sisa kas pada bendahara pengeluaran yang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan pada pihak lain, sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	303.563.253,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	48.282.200,00	0,00
3	Dinas Bina Marga dan Tata Ruang	2.005.000,00	0,00
4	Dinas Sosial	740.000,00	0,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1,00	0,00
6	Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	8.582,00
7	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	10.111,00	0,00
8	Sekretariat Daerah	0,00	2.087,00
	Jumlah	**354.600.565,00**	**10.669,00**

Selain sisa kas di Bendahara Pengeluaran tersebut, masih terdapat saldo dana di rekening Bendahara Gaji sekolah dan Unit Kerja di Bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ditetapkan dalam SK BUD tentang Rekening Bendahara senilai Rp951.877.066,00 yang terdiri dari Dana Pihak Ketiga berupa potongan zakat, pinjaman Bank/BKK, Pinjaman Koperasi, Pinjaman ke Bendahara, Dana Sosial pada 48 rekening sebesar Rp379.869.003,00; BSM Prestasi dari Pemkot/Pemkab ke siswa miskin berprestasi pada satu rekening sebesar Rp19.200.000,00; Pendapatan dari Dana Non APBD pada dua rekening sebesar Rp136.210.000,00; Akumulasi bunga tabungan dan jasa giro pada 245 rekening sebesar Rp49.253.036,00; Saldo pembukaan rekening pada 157 rekening sebesar Rp14.878.328,00; Rekening pribadi Bendahara Gaji yang digunakan sebagai rekening penerimaan gaji dan TPP pegawai dan pensiunan pegawai pada tiga rekening sebesar Rp182.428.395,00; Insentif bendahara atas pengelolaan kredit dari bank sebesar Rp8.080.824,00; Saldo rekening pada satu rekening sebesar Rp134.922,00 dan belum terdapat penjelasan pada 76 rekening sebesar Rp161.822.558,00.

5.3.1.1.1.4 Kasdi Bendahara BLUD **Rp129.690.087.434,34**

Total Saldo Kas BLUD terdiri dari Kas yang berada di rekening BLUD, kas di bendahara BLUD, uang titipan pasiendan Setara Kas berupa deposito BLUDper 31 Desember 2018 sebesar Rp129.690.087.434,34 naik sebesar Rp89.121.886.427,52 atau 219,68% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp40.568.201.006,82 merupakan bagian dari SiLPA yang tidak disetor ke rekening kas daerah dan untuk operasional RSUD/RSJD, sedangkan uang muka titipan pasien yang berada di bendahara BLUD bukan merupakan bagian dari SiLPA, sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	2.095.599.877,00	427.096.501,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	95.055.396.012,34	12.509.515.521,82
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	9.898.564.397,00	9.766.257.752,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	6.821.353.158,00	4.916.679.840,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	5.722.698.359,00	5.002.249.678,00
6	RSJD Surakarta	4.382.447.320,00	4.023.707.742,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	5.714.028.311,00	3.922.693.972,00
	Jumlah	**129.690.087.434,34**	**40.568.201.006,82**

Total Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp129.690.087.434,34 berada di :

a. Kas BLUD

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	462.472.390,00	427.096.501,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	17.536.603.321,34	12.509.515.521,82
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	8.842.092.232,00	9.766.257.752,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	6.657.982.958,00	4.916.679.840,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	5.702.866.008,00	5.002.249.678,00
6	RSJD Surakarta	4.276.498.595,00	4.023.707.742,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	3.209.351.915,00	3.922.693.972,00
	Jumlah	**46.687.867.419,34**	**40.568.201.006,82**

b. Kas di Bendahara Penerimaan BLUD (SiLPA) Bagian dr Kas BLUD

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	416.788.837,00	0,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	0,00	0,00
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	24.310.669,00	0,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	23.927.550,00	0,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	19.832.351,00	0,00
6	RSJD Surakarta	105.948.725,00	0,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	4.676.396,00	0,00
	Jumlah	**595.484.528,00**	**0,00**

(Dalam Rupiah)

c. Kas di Bendahara Penerimaan UM Titipan Pasien (Non SiLPA) Bagian dr Kas BLUD

		2018	2017
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.216.338.650,00	**0,00**
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	1.018.792.691,00	**0,00**
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	32.161.496,00	**0,00**
4	RSUD Tugurejo Semarang	139.442.650,00	**0,00**
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	0,00	**0,00**
6	RSJD Surakarta	0,00	**0,00**
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	0,00	**0,00**
	Jumlah	**2.406.735.487,00**	**0,00**

(Dalam Rupiah)

d. Setara Kas BLUD

		2018	2017
1	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	76.500.000.000,00	0,00
2	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	1.000.000.000,00	0,00
3	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	2.500.000.000,00	0,00
	Jumlah	**80.000.000.000,00**	**0,00**

Saldo Setara Kas BLUD sebesar Rp80.000.000.000,00 berada di :

	SKPD	Bank	Nomor Bilyet	Tgl Pembukaan Deposito	Bunga Deposito	Nilai
1	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	BNI	453300666	01/07/2017	6,75%	15.000.000.000
		BNI	453297347	01/07/2017	6,75%	6.500.000.000
		Bank Jateng	A135334	25/10/2017	6,25%	15.000.000.000
		Bank Jateng	A135524	20/03/2017	6,25%	20.000.000.000
		Bank Jateng	A135525	20/03/2017	6,25%	20.000.000.000
2	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	Mandiri	AD835853	11/09/2015	4,25%	500.000.000
		BTN	A1561366	10/04/2015	7%	500.000.000
3	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	Bank Jateng	158560	05/02/2015	9%	2.500.000.000
	Jumlah					80.000.000.000

5.3.1.1.1.5 Kas Di Bendahara Sekolah **Rp41.686.769.051,20**

Saldo Kas di Bendahara Sekolah per 31 Desember 2018 sebesar Rp41.686.769.051,20 naik sebesar Rp3.251.843.925,20 atau 8,46% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp38.434.925.126,00 merupakan saldo Kas di bendahara BOS dan BOP pada SMAN, SMK dan SLB dilingkungan Provinsi Jawa Tengah.

(Dalam Rupiah)

Kas Sekolah (Non SiLPA)

		2018	2017
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	41.686.769.051,20	38.434.925.126,00
	Jumlah	41.686.769.051,20	**38.434.925.126,00**

Saldo Kas di bendahara sekolah sebesar Rp41.686.769.051,20 merupakan sisa dana BOS dan BOP pada SMAN sebesar Rp13,171,934,874.00, SMKN sebesar Rp59.973.012.572,00 dan SLB sebesar Rp1.525.631.104,00. Selain sisa kas di bendahara sekolah tersebut, masih terdapat dana selain sisa dana BOS dan BOP (Non SiLPA Tahun 2018) sebesar Rp679.850.621,00 yang terdiri dari Bunga sebesar Rp591.157.088,00, Pajak sebesar Rp76.401.204,00 dan Lain-Lain (pembukaan rekening dan administrasi bank) sebesar Rp12.292.329,00. Dana tersebut belum termasuk dana Peran Serta Masyarakat (PSM) yang dikelola oleh SMAN dan SMKN dikarenakan belum ada dukungan dan mekanisme pengakuan serta pengelolaan kas dana PSM.

5.3.1.1.1.6 Setara Kas **Rp1.020.000.000.000,00**

Setara Kasdi Rekening Kas Umum Daerahper 31 Desember 2018 sebesar Rp1.020.000.000.000,00 naik sebesar Rp480.000.000.000,00 atau 88,89% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp540.000.000.000,00. Saldo Setara Kas merupakan dana milik Provinsi Jawa Tengah berupa deposito dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Bank Jateng	700.000.000.000,00	300.000.000.000,00
2	Bank BTN	120.000.000.000,00	100.000.000.000,00
3	Bank Mandiri	0,00	20.000.000.000,00
4	Bank Bukopin	0,00	5.000.000.000,00
5	Bank BRI	200.000.000.000,00	25.000.000.000,00
6	Bank Muamalat	0,00	10.000.000.000,00
		1.020.000.000.000,00	**460.000.000.000,00**

Saldo setara kas di BLUD Tahun 2018 berupa deposito bank merupakan bagian dari kas BLUD Tahun 2018 yaitu pada:

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	0,00	76.500.000.000,00
2	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	0,00	1.000.000.000,00
3	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	0,00	2.500.000.000,00
	Jumlah	**0,00**	**80.000.000.000,00**

5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan Rp2.094.834.454.476,64

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.094.834.454.476,64 naik sebesar Rp350.243.997.867,99 atau 20,08% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.744.590.456.608,65. Saldo piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, sesuai dengan kebijakan penyisihan piutang untuk memperhitungkan potensi piutang tak tertagih sehingga piutang yang disajikan diharapkan lebih mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, dengan rincian secagai berikut:

Dalam rupiah)

		2018	2017
1	Piutang Pendapatan	2.735.729.165.425,50	2.302.962.373.898,07
2	Penyisihan Piutang Pendapatan	(640.894.710.948,86)	(558.371.917.289,42)
	Piutang Pendapatan Netto	**2.094.834.454.476,64**	**1.744.590.456.608,65**

Saldo Piutang sebesar Rp2.094.834.454.476,64 dirinci sebagai berikut :

(Dalam rupiah)

		2018	2017
1	Piutang Pajak	2.247.206.403.016,38	2.077.339.542.094,11
	Penyisihan Piutang Pajak	(620.288.202.683,83)	(542.270.038.419,72)
	Piutang Pajak Netto	**1.626.918.200.332,55**	**1.535.069.503.674,39**

		2018	2017
2	Piutang Retribusi	3.298.869.930,00	2.799.924.395,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(45.769.441,65)	(60.603.573,97)
	Piutang Retribusi Netto	**3.253.100.488,35**	**2.739.320.821,03**

		2018	2017
3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	419.760.304.574,12	2.656.345.957,08
	Penyisihan Piutang Lainnya	(15.784.836.496,27)	(387.235.292,93)
	Piutang Lainnya Netto	**403.975.468.077,85**	**2.269.110.664,15**

		2018	2017
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	58.993.328.822,00	0,00
	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	(294.966.644,11)	0,00
	Piutang Lainnya Netto	**58.698.362.177,89**	0,00

		2018	2017
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	1.999.320.000,00	1.197.321.036,00
	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(9.996.600,00)	(5.986.605,18)
	Piutang Lainnya Netto	**1.989.323.400,00**	**1.191.334.430,82**

		2018	2017
6	Piutang Pendapatan Lainnya	4.470.939.083,00	218.969.240.415,88
	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(4.470.939.083,00)	(15.648.053.397,62)
	Piutang Lainnya Netto	0,00	**203.321.187.018,26**

Piutang Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut, belum termasuk di dalamnya piutang atas sisa pengembalian uang muka penghentian dan pemutusan kontrak PT Sinar Intan Papua Permai (berdasarkan SPK Nomor 027.2/GDG0,00IBS/IV/2015 tanggal 23 April 2015) atas pekerjaan perluasan dan rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodialisa, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar dan Penataan Taman pada RSUD Tugurejo Semarang sebesar Rp1.962.929.100,00. Penghentian pekerjaan tersebut dilakukan karena hingga tanggal 23 Desember 2015 PT. Sinar Intan Papua Permai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan progres yang dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dan Pejabat Teknis Lapangan bersama Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tanggal 23 Desember 2015.

Atas permasalahan tersebut, RSUD Tugurejo sudah menindaklanjuti perintah Gubernur Jawa Tengah untuk mengupayakan pengembalian sisa jaminan uang muka ke Kas Daerah dengan tindakan sebagai berikut:

a. Surat Tagihan kepada PT Asuransi Recapital sebanyak 7 (tujuh) kali
b. Surat Pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 5 (lima) kali
c. Pertemuan mediasi di OJK Perwakilan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 5 Desember 2017 dan 2 Februari 2017.

Gugatan atas putus kontrak yang diajukan oleh PT Sinar Intan Papua Permai (SIPP) telah ditolak oleh Mahkamah Agung, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65.PK/TUN/2017 tanggal 8 Juni 2017 dan Nomor 159.PK/TUN/2017 tanggal 2 November 2017. Implikasi dari penolakan gugatan atas putus kontrak ini mengharuskan PT Asuransi Recapital selaku penjamin uang muka pekerjaan untuk mengembalikan uang muka.Namun, sampai saat ini PT Asuransi Recapital belum mencairkan sisa jaminan uang muka dimaksud.

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak **Rp2.247.206.403.016,38**

Piutang pajak timbul akibat adanya Pendapatan Pajak Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang pajak terdiri dari PKB, PBBKB, BBNKB, APT dan Pajak Rokok yang dikelola BadanPengelola Pendapatan Daerah. Saldo piutang pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.247.206.403.016,38 naik sebesarRp169.866.860.922,27atau8,18% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.077.339.542.094,11 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Pajak PKB	2.246.909.648.827,38	2.076.161.368.392,11
2	Pajak PBBKB	0,00	0,00
3	Pajak BBNKB	0,00	0,00
4	Pajak APT	296.754.189,00	1.178.173.702,00
5	Pajak Rokok	0,00	0,00
	Jumlah	**2.247.206.403.016,38**	**2.077.339.542.094,11**

Mutasi Piutang PKB selama tahun 2018:

(Dalam Rupiah)

No	Tahun	2017	Koreksi	Mutasi		2018
				Penambahan	Pengurangan	
1	sd 2011	0,00				0,00
2	2013	231.720.619.084,29			231.720.619.084,00	0,29
3	2014	325.158.287.717,68			11.118.841.900,00	314.039.445.817,68
4	2015	422.949.882.666,14			21.099.262.924,73	401.850.619.741,41
5	2016	493.348.314.974,00			59.899.025.725,00	433.449.289.249,00
6	2017	602.984.263.950,00			180.571.737.225,00	422.412.526.725,00
7	2018	0,00		675.157.767.294,00		675.157.767.294,00
	Jumlah	**2.076.161.368.392,11**	**0,00**	**675.157.767.294,00**	**504.409.486.858,73**	**2.246.909.648.827,38**

Mutasi Piutang APT selama tahun 2018:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2017	Koreksi	Mutasi		2018
				Penambahan	Pengurangan	
1	BPPD	1.178.173.702,00		296.754.189	1.178.173.702,00	296.754.189,00
	Jumlah	**1.178.173.702,00**		**296.754.189,00**	**1.178.173.702,00**	**296.754.189,00**

5.3.1.1.2.1.1Penyisihan Piutang Pajak (Rp620.288.202.683,83)

Penyisihan piutang atas pajak per 31 Desember 2018 sebesar (Rp620.288.202.683,83) naik sebesar Rp78.018.164.264,11 atau 14,39% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar (Rp542.270.038.419,72) dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Piutang PKB	620.286.718.912,88	542.264.147.551,21
2	Piutang BBNKB	0,00	0,00
3	Piutang PBBKB	0,00	0,00
4	Piutang APT	1.483.770,95	5.890.868,51
5	Piutang Pajak Rokok	0,00	0,00
		620.288.202.683,83	**542.270.038.419,72**

a) Piutang Tak Tertagih – PKB

(Dalam Rupiah)

Kategori	2018		2017	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
lancar	675.157.767.294,00	3.375.788.836,47	602.984.263.950,00	3.014.921.319,75
kurang lancar	422.412.526.725,00	42.241.252.672,50	493.348.314.974,00	49.334.831.497,40
Diragukan tertagih	1.149.339.354.807,82	574.669.677.403,91	979.828.789.468,11	489.914.394.734,06
macet		0,00		0,00
Jumlah	**2.246.909.648.826,82**	**620.286.718.912,88**	**2.076.161.368.392,11**	**542.264.147.551,21**

b) Piutang Tak Tertagih APT

(Dalam Rupiah)

Kategori	2018		2017	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar	296.754.189,00	1.483.770,95	1.178.173.702,00	5.890.868,51
- kurang lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**296.754.189,00**	**1.483.770,95**	**1.178.173.702,00**	**5.890.868,51**

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Rp3.298.869.930,00

Piutang retribusi timbul akibat adanya Pendapatan Retribusi Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Saldo piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.298.869.930,00 naik sebesar Rp498.945.535,00 atau 17,82% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.799.924.395,00 dengan rincian saldo sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.210.348.250,00	2.629.419.795,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	88.521.680,00	170.504.600,00
	Jumlah	**3.298.869.930,00**	**2.799.924.395,00**

a) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Asuransi Kesehatan Rp.3.210.348.250,00

Saldo sebesarRp3.210.348.250,00 merupakan hak atas klaim jaminan kesehatan yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum diterima oleh Balai Kesehatan sedangkan Piutang Askes rumah sakit direklasifikasi ke Piutang Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Dinas Kesehatan	3.210.348.250,00	2.629.419.795,00
	Jumlah	**3.210.348.250,00**	**2.629.419.795,00**

b) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Retribusi Jasa Usaha Rp88.521.680,00

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp88.521.680,00 merupakan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerahpada SKPD di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya	7.275.000,00	0,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	7.350.000,00
3	Dinas Perhubungan	22.105.080,00	43.113.000,00
4	Dinas Koperasi dan UMKM	27.100.000,00	88.000.000,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.041.600,00	32.041.600,00
	Jumlah	**88.521.680,00**	**170.504.600,00**

5.3.1.1.2.2.1 Penyisihan Piutang Retribusi (Rp45.769.441,65)

Penyisihan piutang atas retribusi per 31 Desember 2018 sebesar (45.769.441,65) mengalami penurunan sebesar (Rp14.834.132,32) atau 24,48% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar (Rp60.603.573,97) dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.051.741,25	13.147.098,97
2	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	29.717.700,40	47.456.475,00
		45.769.441,65	**60.603.573,97**

a. **Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan**

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Dinas Kesehatan	16.051.741,25	13.147.098,97
		16.051.741	**13.147.098,97**

b. **Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya	36.375,00	-
2	Satuan Polisi Pamong Praja	-	36.750,00
3	Dinas Perhubungan	110.525,40	215.565,00
4	Dinas Koperasi dan UMKM	13.550.000,00	44.000.000,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16.020.800,00	3.204.160,00
		29.717.700,40	**47.456.475,00**

5.3.1.1.2.3 Piutang Lain - lain PAD Yang Sah Rp419.760.304.574,12

Piutang lain-lain PAD Yang Sah timbul akibat adanya pendapatan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Saldo piutanglain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2018 sebesar Rp419.760.304.574,12 naik sebesar Rp417.103.958.617,04 atau 15.702,17% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.656.345.957,08 terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Piutang Bunga Deposito	4.100.403.545,07	1.939.719.178,08
2	Piutang Denda keterlambatan	553.562.900,00	0,00
3	Piutang Denda Retribusi	873.560,00	873.560,00
4	Piutang Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	612.598.993,67	715.753.219,00
5	Piutang Pendapatan BLUD	414.492.865.575,38	0,00
	Jumlah	**419.760.304.574,12**	**2.656.345.957,08**

a. Piutang Bunga Deposito **Rp4.100.403.545,07**

Saldo sebesar Rp4.100.403.545,07 merupakan hak dari bunga deposito yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum diterima, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	SKPKD	3.787.979.452,05	1.730.856.164,38
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	303.356.164,38	196.780.821,92
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	3.023.972,60	3.178.082,19
4	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	6.043.956,04	8.904.109,59
	Jumlah	**4.100.403.545,07**	**1.939.719.178,08**

b. Piutang Denda Keterlambatan **Rp553.562.900,00**

Saldo sebesar Rp553.562.900,00 merupakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	RSUD Margono Soekarjo Purwokerto	553.562.900,00	0,00
	Jumlah	**553.562.900,00**	**0,00**

c. Piutang Denda Retribusi **Rp873.560,00**

Saldo sebesar Rp873.560,00 merupakan piutang denda retribusi per 31 Desember 2018 atas retribusi sewa kios dan lahan Terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Dinas Perhubungan	873.560,00	873.560,00
	Jumlah	**873.560,00**	**873.560,00**

d. Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah **Rp612.598.993,67**

Saldo sebesar Rp612.598.993,6**7** merupakan piutang per 31 Desember 2018 atas retribusi sewa lahan dan ruangan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	370.051.571,00	370.051.571,00
2	RSUD Moewardi (Parkir dan Ruangan)	130.016.666,67	163.250.000,00
3	RSUD Dr Margono Soekarjo (sewa)	0,00	18.000.000,00
4	RSUD Kelet Donorojo (Lahan)	104.963.660,00	104.670.494,00
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten (IPWL)	7.567.096,00	59.781.154,00
	Jumlah	**612.598.993,67**	**715.753.219,00**

e. Piutang Pasien BLUD **Rp16.217.695.200,3**

Saldo sebesar Rp16.217.695.200,38 merupakan piutang pasien BLUDdan piutang jasa pelayanan BLUD per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	6.015.247.195,00	0,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	6.027.467.286,91	0,00
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	869.839.953,00	0,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	2.268.651.843,60	0,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	84.621.670,87	0,00
6	RSJD Surakarta	751.318.439,00	0,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	200.548.812,00	0,00
	Jumlah	**16.217.695.200,38**	**0,00**

(Dalam Rupiah)

Piutang Jasa Pelayanan BLUD

		2018	2017
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	292.667.550.120,00	0,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	48.091.205.289,00	0,00
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	6.214.517.277,00	0,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	32.741.041.179,00	0,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	7.733.562.334,00	0,00
6	RSJD Surakarta	3.862.002.176,00	0,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	6.965.292.000,00	0,00
	Jumlah	**398.275.170.375,00**	**0,00**

5.3.1.1.2.3.1 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah (Rp15.784.836.496,27)

Saldo sebesar (Rp15.784.836.496,27) merupakan saldo penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam rupiah)

PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

		2018	2017
1	Penyisihan Piutang Bunga Deposito	20.502.017,72	9.698.595,89
2	Penyisihan Piutang Denda Keterlambatan	2.767.814,50	0,00
3	Penyisihan Piutang Denda Retribusi	4.367,80	4.367,80
4	Penyisihan Piutang Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	389.532.632,95	377.532.329,24
5	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	15.372.029.663,30	0,00
	Jumlah	**15.784.836.496,27**	**387.235.292,93**

(Dalam rupiah)

a. Penyisihan Piutang Bunga Deposito

		2018	2017
1	SKPKD	18.939.897,26	8.654.280,82
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	1.516.780,82	983.904,11
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	15.119,86	15.890,41
4	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	30.219,78	44.520,55
	Jumlah	**20.502.017,72**	**9.698.595,89**

(Dalam rupiah)

b. Penyisihan Piutang Denda Keterlambatan

		2018	2017
1	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	2.767.814,50	0,00
	Jumlah	**2.767.814,50**	**0,00**

(Dalam rupiah)

c. Penyisihan Piutang Denda Retribusi

		2018	2017
1	Dinas Perhubungan	4.367,80	4.367,80
	Jumlah	**4.367,80**	**4.367,80**

(Dalam rupiah)

d. Penyisihan Piutang Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

		2018	2017
1	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	370.051.571,00	370.051.571,00
2	RSUD Moewardi (Parkir dan Ruangan)	2.233.416,67	3.310.000,00
3	RSUD Dr Margono Soekarjo (sewa)	0,00	90.000,00
4	RSUD Kelet Donorojo (Lahan)	17.209.809,80	3.781.852,47
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten (IPWL)	37.835,48	298.905,77
	Jumlah	**389.532.632,95**	**377.532.329,24**

(Dalam rupiah)

e. Penyisihan Piutang Pasien BLUD

		2018	2017
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	2.867.872.791,63	0,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	4.569.053.791,11	0,00
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	557.208.389,00	0,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	937.415.617,75	0,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	64.078.132,56	0,00
6	RSJD Surakarta	655.130.242,22	0,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	166.002.054,99	0,00
	Jumlah	**9.816.761.019,26**	**0,00**

(Dalam rupiah)

f. Penyisihan Piutang Jasa Pelayanan BLUD

		2018	2017
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	3.158.360.207,98	0,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	1.205.103.643,38	0,00
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	403.312.292,88	0,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	564.155.485,75	0,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	38.667.811,67	0,00
6	RSJD Surakarta	19.310.010,88	0,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	166.359.191,50	0,00
	Jumlah	**5.555.268.644,04**	**0,00**

Piutang Lain-lain PAD yang sah tersebut tidak termasuk piutang denda keterlambatan PKB. Dimana denda keterlambatan pembayaran tunggakan PKB diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

5.3.1.1.2.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Rp58.993.328.822,00

Saldo sebesar Rp58.993.328.822,00 merupakan saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sesuai dengan PMK Nomor 103/07/2018 tanggal 28 Agustus 2018 merupakan penertapan kurang salur atas bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dan bagi hasil migas sampai dengan 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam rupiah)

		2018	2017
1	SKPKD	58.993.328.822,00	0,00
	Jumlah	**58.993.328.822,00**	**0,00**

5.3.1.1.2.4.1 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Rp294.966.644,11

Saldo penyisihan piutang transfer pemerintah daerah lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp294.966.644,11.

(Dalam rupiah)

		2018	2017
1	SKPKD	294.966.644,11	0,00
	Jumlah	**294.966.644,11**	**0,00**

5.3.1.1.2.5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp1.999.320.000,00

Saldo sebesar Rp1.999.320.000,00 merupakan saldo Piutang Transfer Bagi Hasil Retribusi dari Pemerintah Daerah Lainnya (Ketep Pass) sampai dengan 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam rupiah)

		2018	2017
1	SKPKD	1.999.320.000,00	1.197.321.036,00
	Jumlah	**1.999.320.000,00**	**1.197.321.036,00**

5.3.1.1.2.5.1 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp9.996.600,00

Saldo penyisihan piutang transfer pemerintah daerah lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.996.600,00.

(Dalam rupiah)

		2018	2017
1	SKPKD	9.996.600,00	5.986.605,18
	Jumlah	**9.996.600,00**	**5.986.605,18**

5.3.1.1.2.6 Piutang Pendapatan Lainnya Rp4.470.939.083,00

Saldo piutang pendapatan lainnya sebesar Rp4.470.939.083,00 terdiri dari piutang pasien Rumah Sakit BLUD, piutang retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit BLUD, Piutang Dana Talangan dan Piutang Tempat Pelelangan Ikan per tanggal 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam rupiah)

		2018	2017
1	Piutang Pasien Rumah Sakit BLUD	0,00	16.672.814.328,38
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD	0,00	197.716.268.277,50
3	Piutang Dana Talangan	365.636.365,00	397.909.092,00
4	Piutang Tempat Pelelangan Ikan	4.105.302.718,00	4.182.248.718,00
	Jumlah	**4.470.939.083,00**	**218.969.240.415,88**

5.3.1.1.2.6.1 Piutang Pasien Rumah Sakit BLUD Rp0,00

Saldo piutang pasien pada 7 (tujuh) rumah sakit BLUD yang belum diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 diakui sebagai piutang lain-lain PAD yang sah, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam rupiah)

		2018	2017
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	0,00	7.412.655.494,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	0,00	5.645.603.411,91
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	0,00	768.344.554,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	0,00	1.828.870.945,60
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	0,00	84.621.670,87
6	RSJD Surakarta	0,00	742.770.364,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	0,00	189.947.888,00
	Jumlah	0,00	**16.672.814.328,38**

Piutang pasien Rumah sakit BLUD tahun 2018 disajikan pada Piutang Lain-lain PAD yang sah.

5.3.1.1.2.6.2 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD Rp0,00

Saldo piutang retribusi pelayanan kesehatan pada 7 (tujuh) rumah sakit BLUD yang belum diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 diakui sebagai piutang lain-lain PAD yang sah, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam rupiah)

		2018	2017
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	0,00	74.918.994.173,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	0,00	73.399.717.644,50
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	0,00	854.671.878,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	0,00	33.979.707.606,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	0,00	4.621.181.554,00
6	RSJD Surakarta	0,00	3.994.614.001,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	0,00	5.947.381.421,00
	Jumlah	**0,00**	**197.716.268.277,50**

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD tahun 2018 disajikan pada Piutang Lain-lain PAD yang sah

5.3.1.1.2.6.3 Piutang Dana Talangan Rp365.636.365,00

Saldo sebesar Rp365.636.365,00 merupakan hak atasdana talangan yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam rupiah)

		2018	2017
1	Kabupaten Cilacap	365.636.365,00	397.909.092,00
	Jumlah	**365.636.365,00**	**397.909.092,00**

5.3.1.1.2.6.4 Piutang Tempat Pelelangan Ikan Rp4.105.302.718,00

Saldo sebesar Rp4.105.302.718,00 turun sebesar Rp76.946.000,00 atau 1,84% dari saldo tahun 2017 sebesar Rp4.182.248.718,00 merupakan hak atas pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sampai dengan 31 Desember 2018 dan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Sejak 1 Januari 2010 kewenangan pengelolaan TPI telah diserahkan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

(Dalam rupiah)

		2018	2017
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.105.302.718,00	4.182.248.718,00
	Jumlah	**4.105.302.718,00**	**4.182.248.718,00**

5.3.1.1.2.7 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya (Rp4.470.939.083,00)

Penyisihan piutang pendapatan lainnya per 31 Desember 2018 sebesar (Rp4.470.939.083,00**)** naik sebesar Rp11.177.114.314,62 atau 71,43% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar (Rp15.648.053.397,62) dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Penyisihan Piutang Pasien Rumah Sakit BLUD	0,00	8.944.507.457,48
2	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD	0,00	2.123.388.130,14
3	Penyisihan Piutang Dana Talangan	365.636.365,00	397.909.092,00
4	Penyisihan Piutang Tempat Pelelangan Ikan	4.105.302.718,00	4.182.248.718,00
	Jumlah	**4.470.939.083,00**	**15.648.053.397,62**

a. Penyisihan Piutang Pasien Rumah Sakit BLUD

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	0,00	2.822.919.972,89
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	0,00	4.061.811.333,26
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	0,00	455.273.130,18
4	RSUD Tugurejo Semarang	0,00	775.957.424,60
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	0,00	62.319.801,35

6	RSJD Surakarta	0,00	623.411.988,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	0,00	142.813.807,21
	Jumlah	**0,00**	**8.944.507.457,48**

Penyisihan Piutang pasien Rumah sakit BLUD tahun 2018 disajikan pada Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah.

b. Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	0,00	375.006.027,28
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	0,00	839.026.235,14
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	0,00	190.036.202,27
4	RSUD Tugurejo Semarang	0,00	514.971.049,07
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	0,00	23.105.907,77
6	RSJD Surakarta	0,00	19.973.070,01
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	0,00	161.269.638,61
	Jumlah	0,00	**2.123.388.130,14**

Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD tahun 2018 disajikan pada Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah.

c. Penyisihan Piutang Dana Talangan

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Kabupaten Cilacap	365.636.365,00	397.909.092,00
	Jumlah	**365.636.365,00**	**397.909.092,00**

d. Penyisihan Piutang Tempat Pelelangan Ikan

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.105.302.718,00	4.182.248.718,00
	Jumlah	**4.105.302.718,00**	**4.182.248.718,00**

5.3.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka Rp4.974.828.071,56

Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.974.828.071,56 naik sebesar Rp644.403.311,48 atau 14,88% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.330.424.760,08 merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2019 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2018 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa belanjaAsuransi Barang Milik Daerah danAsuransi Pegawai Non PNS dan Belanja Sewa dengan masa pertanggungan berlaku sampai Tahun 2019.

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	304.837.117,97	168.903.117,00
2	Dinas Kesehatan	444.617.436,73	433.581.800,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	533.231.711,59	569.104.001,67
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	378.226.869,87	387.558.833,33
5	RSUD Tugurejo Semarang	71.461.181,73	61.196.750,00
6	RSJD Surakarta	14.986.121,92	0,00
7	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	74.296.225,00	90.504.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya	887.780,14	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	77.659.462,02	70.721.667,00
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	65.715.140,74	60.592.000,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja	69.716.595,87	41.776.000,00
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.943.071,50	13.316.266,67
13	Dinas Sosial	12.075.412,33	26.956.416,67
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	118.063.851,88	49.205.937,00
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	57.107.809,60	41.617.500,00
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	19.750.786,28	22.267.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	208.274.761,51	121.938.916,58
18	Dinas Ketahanan Pangan	59.626.485,57	60.406.250,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77.502.110,40	76.155.000,00
20	Dinas Perhubungan	204.650.391,51	202.537.630,67
21	Dinas Koperasi dan UKM	46.497.164,88	46.452.087,33
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.000.347,52	0,00
23	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	151.076.661,11	159.833.332,00
24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.421.079,44	10.397.583,33
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	63.792.411,55	0,00
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	211.215.741,76	208.931.688,33
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	107.860.462,99	0,00
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	165.574.297,06	146.482.910,83
29	Sekretariat Daerah	364.926.322,03	318.089.250,00
30	Sekretariat DPRD	194.184.301,61	319.628.653,00
31	Inspektorat	88.886.458,91	78.648.542,00
32	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	493.227.847,88	450.210.742,00
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	176.079.045,59	0,00
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	9.590.209,20	9.818.799,00
35	Badan Penghubung	82.865.395,87	83.592.085,67
	Jumlah	**4.974.828.071,56**	**4.330.424.760,08**

5.3.1.1.4 Persediaan Rp360.048.752.940,69

Persediaan merupakan barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional serta barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan terdiri dari persediaan bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan barang untuk dijual/diserahkan, serta persediaan natura dan pakan. Pengelompokan jenis persediaan sesuai dengan Permendagri nomor 108 tahun 2016 tentang kodefikasi Barang Milik Daerah. Berdasarkan hasil stock opnameper 31 Desember 2018 saldo

persediaan sebesar Rp360.048.752.940,69 naik sebesar Rp141.190.236.863,55 atau 64,51% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp218.858.516.077,14 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Persediaan Bahan	24.789.718.586,56	19.617.150.369,90
2	Persediaan Suku Cadang	0,00	0,00
3	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	118.480.512.307,26	77.371.590.737,18
4	Persediaan Obat-Obat	211.611.062.739,58	115.490.974.568,02
5	Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan	1.640.020.700,00	4.340.399.724,00
6	Persediaan Natura dan Pakan	3.527.438.607,29	2.038.400.678,04
	Jumlah	**360.048.752.940,69**	**218.858.516.077,14**

Persediaan kadaluarsa per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.210.058.376,75 pada SKPD dan Unit Kesehatan yang masih menunggu proses pemusnahan dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	Alat Tulis kantor	Obat-Obatan dan Alkes
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	853.960.880,00	0,00
2	RSUD Tugurejo	0,00	52.373.554,00
3	RSJD Surakarta	0,00	74.796.550,77
4	RSUD Dr Margono Soekardjo	0,00	440.287.126,00
5	RSJD Dr Soedjarwadi Klaten	0,00	13.589.629,00
6	RSUD Dr Moewardi Surakarta	0,00	457.422.680,45
7	Dinas Kesehatan	0,00	18.156.750,00
8	Balkesmas Ambarawa	0,00	30.658.357,00
9	Balkesmas Magelang	0,00	49.224.856,00
10	Balkesmas Klaten	0,00	28.434.997,00
11	Balkesmas Semarang	0,00	38.462.972,00
12	Balkesmas Pati	0,00	56.006.764,00
13	BKIM	0,00	2.823.860,53
14	Laboratorium Kesehatan	0,00	93.859.400,00
Jumlah		**853.960.880,00**	**1.356.097.496,75**

5.3.1.1.4.1 Persediaan Bahan Rp24.789.718.586,56

Saldo sebesar Rp24.789.718.586,56 merupakan persediaan bahan antara lain bahan kimia, bahan laboratorium, bahan bibit, bahan penelitian, dan lain-lainpada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	10.101.327.135,00	11.226.055.605,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	1.686.983.080,76	1.111.717.812,68
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	2.023.906.784,00	0,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	343.931.989,80	337.837.663,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	77.955.051,00	41.529.011,60

		2018	2017
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	4.680.000,00	105.584.250,62
8	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	170.294.848,00	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	653.666.377,00	1.322.155.613,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.431.204.219,00	879.345.879,00
11	Dinas Sosial	0,00	1.205.000,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	16.698.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	463.372.365,00	490.703.492,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.221.531.682,00	1.754.221.794,00
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.381.115.000,00	411.652.322,00
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.229.750.055,00	1.843.508.227,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	74.935.700,00
	Jumlah	**24.789.718.586,56**	**19.617.150.369,90**

5.3.1.1.4.2 Persediaan Suku Cadang Rp0,00

Tidak terdapat persediaan suku cadangpada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018.

5.3.1.1.4.3 Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Rp118.480.512.307,26

Saldo sebesar Rp118.480.512.307,26 merupakan persediaan alat tulis kantor, benda pos, dokumen, alat listrik, dan lain-lain pada SKPD di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	22.505.829.302,50	607.463.100,00
2	Dinas Kesehatan	56.547.652.744,00	37.583.572.554,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	12.160.641.070,44	12.856.016.344,13
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	5.585.299.327,00	6.306.641.663,20
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	1.805.048.207,31	2.036.189.367,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	3.997.770.354,78	3.220.629.886,79
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	4.400.424.667,00	3.675.691.133,06
8	RSJD Surakarta	94.438.635,00	144.888.480,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.842.041.773,23	763.105.983,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.329.061.510,00	136.757.630,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	68.849.500,00	59.677.650,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.732.000,00	6.162.200,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	124.127.830,00	26.218.115,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.115.100,00	25.021.100,00
15	Dinas Sosial	6.545.500,00	4.773.000,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.943.230,00	10.711.235,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	46.833.600,00	20.259.581,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	983.000,00	871.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	44.764.850,00	4.162.250,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.240.000,00	2.235.000,00
21	Dinas Ketahanan Pangan	9.303.500,00	12.493.000,00
22	Dinas Perhubungan	146.978.690,00	106.723.050,00
23	Dinas Koperasi dan UKM	11.266.734,00	8.385.100,00
24	Dinas Komunikasi dan Informasi	38.283.700,00	28.926.500,00
25	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	834.000,00	28.444.200,00

		2018	2017
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	18.580.000,00	15.861.400,00
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	171.000,00	62.272.650,00
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan	134.432.812,00	41.790.200,00
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	243.630.850,00	63.876.930,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	23.208.150,00	23.906.000,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	170.806.340,00	74.538.030,00
32	Sekretariat Daerah	40.088.100,00	49.825.915,00
33	Sekretariat DPRD	6.250.000,00	25.989.280,00
34	Inspektorat	2.803.450,00	1.114.500,00
35	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	55.562.600,00	70.246.265,00
36	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	6.412.501.675,00	8.709.967.960,00
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	40.735.500,00	11.518.750,00
38	Badan Kepegawaian Daerah	369.967.200,00	408.856.025,00
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	150.887.805,00	132.562.710,00
40	Badan Penghubung	4.878.000,00	3.245.000,00
	Jumlah	**118.480.512.307,26**	**77.371.590.737,18**

5.3.1.1.4.4 Persediaan Obat-obatan Rp211.611.062.739,58

Saldo sebesar Rp211.611.062.739,58 Persediaan obat-obatan pada SKPD di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Dinas Kesehatan	155.399.234.840,00	65.054.741.109,00
2	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	23.639.639.285,87	16.661.354.469,15
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	19.406.795.082,52	21.850.751.252,62
4	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	1.126.775.344,30	733.667.185,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	4.415.102.872,89	2.519.442.016,54
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	3.379.153.247,00	2.853.518.424,71
7	RSJD Surakarta	1.730.769.338,00	2.332.943.582,00
8	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.765.938.872,00	3.441.332.706,00
9	Dinas Sosial	583.479,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.169.975,00	0,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	99.312.850,00	0,00
12	Dinas Pertanian dan Perkebunan	113.725.375,00	0,00
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	444.881.977,00	0,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.522.049,00	0,00
15	Sekretariat Daerah	5.745.497,00	12.532.438,00
16	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	46.712.655,00	30.691.385,00
	Jumlah	**211.611.062.739,58**	**115.490.974.568,02**

5.3.1.1.4.5 Persediaan Barang Untuk Dijual/diserahkan Rp1.640.020.700,00

Saldo sebesar Rp1.640.020.700,00 merupakan Persediaan Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga pada SKPD di Provinsi Jawa Tengah yang belum diserahkan per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	2.700.379.024,00
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.640.020.700,00	1.640.020.700,00
	Jumlah	**1.640.020.700,00**	**4.340.399.724,00**

5.3.1.1.4.6 Persediaan Natura dan Pakan Rp3.527.438.607,29

Saldo sebesar Rp3.527.438.607,29 merupakan persediaan bahan pangan/ makanan pokok, makanan dan minuman serta pakan sampai dengan 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Dinas Kesehatan	95.313.625,00	63.617.950,00
2	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	233.527.392,50	310.459.722,50
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	88.630.390,00	80.942.851,00
4	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	120.608.680,00	32.379.045,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	76.076.252,79	62.335.204,07
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	60.859.068,00	55.242.202,39
7	RSJD Surakarta	74.517.600,00	604.067.498,08
8	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	110.418.660,00	35.827.669,00
9	Dinas Sosial	0,00	904.600,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.610.000,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	1.820.574.689,00	762.524.235,00
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	59.859.000,00	0,00
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	785.443.250,00	0,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	30.099.701,00
	Jumlah	**3.527.438.607,29**	**2.038.400.678,04**

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang Rp6.152.950.888.667,63

Saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.152.950.888.667,63 naik sebesar Rp237.050.257.121,38 atau 4,01% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.915.900.631.546,25 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	6.152.950.888.667,63	5.915.900.631.546,25
	Jumlah	**6.152.950.888.667,63**	**5.915.900.631.546,25**

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen Rp0,00

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan yang terdiri dari investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir dan investasi non permanen lainnyadiragukan tertagih, dengan rincian saldo sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Dana Bergulir	11.941.427.347,00	12.317.184.307,00
2	Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yg Sah	(11.941.427.347,00)	(12.317.184.307,00)
	Jumlah	**0.00**	**0.00**

5.3.1.2.1.1. Investasi Non Permanen Lain - Dana Bergulir Rp11.941.427.292,00

Saldo sebesar Rp11.941.427.292,00 turun sebesar Rp375.756.015,00 atau 3,05% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.317.184.307,00 merupakan saldo Investasi Non Permanen Lainnya Dana Bergulir yang dikelola oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per31 Desember 2018, dengan rincian saldo sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Biro Perekonomian-UMKM	1.777.411.376,00	1.986.989.766,00
2	Dinas Koperasi dan UKM	1.939.620.795,00	2.040.979.120,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.403.855.800,00	1.403.855.800,00
4	Dinas Ketahanan Pangan	48.700.000,00	60.200.000,00
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.234.833.401,00	2.234.833.401,00
6	Dinas Kehutanan	2.882.500.000,00	2.882.500.000,00
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.654.505.920,00	1.707.826.220,00
	Jumlah	**11.941.427.292,00**	**12.317.184.307,00**

5.3.1.2.1.2 Investasi Non Permanen – Diragukan Tertagih (Rp11.941.427.292,00)

Saldo sebesar (Rp11.941.427.292,00) turun sebesar Rp375.756.960,00 atau 3.05% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar (Rp12.317.184.307,00) merupakan saldo Investasi Non Permanen– Diragukan Tertagih yang dikelola oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018. Kebijakan pencadangan ini sesuai dengan kebijakan Cadangan Piutang Tidak Tertagih pada Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Rincian saldo tersebut adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Biro Perekonomian-UMKM		
	- menunggak 3-5 tahun	0.00	0.00
	- menunggak lebih dari 5 tahun	1.777.411.376,00	1.986.989.766,00
2	Dinas Koperasi dan UMKM		
	- menunggak 3-5 tahun	0.00	0.00
	- menunggak lebih dari 5 tahun	1.939.620.795,00	2.040.979.120,00

		2018	2017
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
	- menunggak lebih dari 5 tahun	1.403.855.800,00	1.403.855.800,00
4	Dinas Ketahanan Pangan		
	- menunggak lebih dari 5 tahun	48.700.000,00	60.200.000,00
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	- menunggak 2-3 tahun	0.00	0.00
	- menunggak lebih dari 5 tahun	2.234.833.401,00	2.234.833.401,00
5	Dinas Kehutanan		
	- menunggak lebih dari 5 tahun	2.882.500.000,00	2.882.500.000,00
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	- menunggak lebih dari 5 tahun	1.654.505.920,00	1.707.826.220,00
	Jumlah	**11.941.427.292,00**	**12.317.184.307,00**

5.3.1.2.2 Investasi Permanen Rp6.152.950.888.667,63

Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada beberapa perusahaan daerah. Saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.152.950.888.667,63 naik sebesar Rp237.050.257.121,38 atau 4,01% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.915.900.631.546,25, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	PT. Bank Jateng	3.638.197.461.366,95	3.752.155.263.620,40
2	PD BPR BKK	798.205.743.934,97	693.075.829.432,23
3	PT. Asuransi Bangun Askrida	19.960.000.000,00	13.240.000.000,00
4	PT. PRPP	38.400.300.747,56	36.833.459.858,40
5	PDAB Slawi Tegal	116.083.605.163,00	57.526.049.885,00
6	Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah	185.601.403.658,00	158.020.412.948,00
7	PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	99.408.715.565,97	10.300.000.000,00
8	PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	1.043.775.379.693,14	1.021.855.668.334,35
9	PT. Sarana Patra Hulu Cepu	65.156.539.643,44	45.766.601.225,70
10	PT. Jamkrida	148.161.738.894,60	127.127.346.242,17
	Jumlah	**6.152.950.888.667,63**	**5.915.900.631.546,25**

Metode penilaian investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 6 Paragraf 36 dan 37. Seluruh Investasi Permanen disajikan dengan menggunakan metode ekuitas kecuali penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida yang menggunakan metode biaya. Berikut di bawah ini perhitungan nilai investasi dengan menggunakan metode ekuitas :

(Dalam Rupiah)

No	Nama BUMD	Kepemilikan	2018	Bertambah	Berkurang	2017
1	PDAB Slawi	100,00%	116.083.605.163,00	58.557.555.278,00	0,00	57.526.049.885,00
2	PT Sarana Patra Hulu Cepu	90,50%	65.156.539.643,44	19.389.938.417,74	0,00	45.766.601.225,70
3	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (persero)	40,39%	99.408.715.565,97	89.108.715.565,97	0,00	10.300.000.000,00
4	PT PRPP Jawa Tengah	78,50%	38.400.300.747,56	1.566.840.889,16	0,00	36.833.459.858,40

No	Nama BUMD	Kepemilikan	2018	Bertambah	Berkurang	2017
5	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah dan entitas anak	99,93%	1.043.775.379.693,14	21.919.711.358,79	0,00	1.021.855.668.334,35
6	PT BPD Jawa Tengah	50,70%	3.638.197.461.366,95	0,00	113.957.802.253,45	3.752.155.263.620,40
7	PT Citra Mandiri Jawa Tengah	100,00%	185.601.403.658,00	27.580.990.710,00	0,00	158.020.412.948,00
8	Jamkrida	99,17%	148.161.738.894,60	21.034.392.652,43	0,00	127.127.346.242,17
9	Bangun Askrida	6,65%	19.960.000.000,00	6.720.000.000,00	0,00	13.240.000.000,00
10	**BPR BKK**	**50,93%**	**798.205.743.934,97**	**119.375.528.131,37**	**14.245.613.628,63**	**693.075.829.432,23**
1)	BPR BKK BLORA	51,00%	24.628.374.819,18	1.232.539.209,48	0,00	23.395.835.609,70
2)	BKK MOJOSONGO	51,00%	3.445.223.132,76	379.553.487,51	0,00	3.065.669.645,25
3)	BPR BKK KAB. TEGAL	50,10%	10.929.704.959,48	203.096.459,68	0,00	10.726.608.499,80
4)	BPR BKK BANJARHARJO	61,47%	12.066.149.062,85	302.828.736,85	0,00	11.763.320.326,00
5)	BKK SUSUKAN	34,70%	1.867.278.778,85	0,00	647.056.842,72	2.514.335.621,57
6)	BPR BKK KOTA TEGAL	67,93%	4.494.445.399,73	0,00	187.502.329,49	4.681.947.729,22
7)	BPR BKK PURBALINGGA	57,88%	34.002.988.276,52	1.402.029.841,84	0,00	32.600.958.434,68
8)	BPR BKK MUNTILAN	49,48%	13.627.951.587,46	325.196.036,31	0,00	13.302.755.551,15
9)	BPR BKK GROGOL	35,03%	8.099.407.787,60	965.660.424,46	0,00	7.133.747.363,14
10)	BKK SUKOHARJO	41,74%	10.729.938.339,97	662.643.363,49	0,00	10.067.294.976,48
11)	BKK PASAR KLIWON	28,50%	3.032.556.672,02	262.048.792,51	0,00	2.770.507.879,51
12)	BKK TAYU	60,68%	0,00	780.362.651,25	0,00	(780.362.651,25)
13)	BKK TEGAL BARAT	54,34%	3.562.859.213,73	287.349.118,99	0,00	3.275.510.094,74
14)	BPR BKK KEBUMEN	51,00%	25.374.543.787,77	995.956.277,18	0,00	24.378.587.510,59
15)	BPR BKK KOTA PEKALONGAN	54,34%	4.515.671.296,61	139.880.985,27	0,00	4.375.790.311,34
16)	BKK KESUGIHAN	48,61%	9.560.027.471,78	2.266.487.700,41	0,00	7.293.539.771,37
17)	BPR BKK KOTA SEMARANG	51,00%	18.663.458.687,91	702.992.056,88	0,00	17.960.466.631,03
18)	BPR BKK WONOGIRI	50,60%	27.724.000.813,52	1.018.591.595,03	0,00	26.705.409.218,49
19)	BPR BKK BOYOLALI	51,00%	15.923.578.170,96	594.937.917,87	0,00	15.328.640.253,09
20)	BKK KALIORI	72,24%	7.782.510.687,88	1.506.021.762,45	0,00	6.276.488.925,43
21)	BPR BKK CILACAP	51,00%	29.079.075.700,92	1.165.336.908,81	0,00	27.913.738.792,11
22)	BPR BKK TASIKMADU	51,24%	12.619.485.479,31	205.903.420,22	0,00	12.413.582.059,09
23)	BPR BKK KENDAL	58,39%	22.105.286.148,57	1.407.269.645,49	0,00	20.698.016.503,08
24)	BKK EROMOKO	45,96%	12.487.699.943,23	4.263.518.271,84	0,00	8.224.181.671,39
25)	BPR BKK TAMAN	51,00%	11.836.575.364,02	657.466.080,78	0,00	11.179.109.283,24
26)	BKK PRINGSURAT	42,37%	0,00	31.649.917.096,79	0,00	(31.649.917.096,79)
27)	BKK KENDAL KOTA	40,60%	0,00	0,00	298.378.840,70	298.378.840,70
28)	BPR BKK PURWOKERTO	44,29%	46.844.570.555,87	3.562.439.488,19	0,00	43.282.131.067,68
29)	BPR BKK JEPARA	51,00%	17.722.354.170,09	1.222.080.492,44	0,00	16.500.273.677,65
30)	BKK DEMPET	47,66%	13.621.219.039,82	4.472.948.304,17	0,00	9.148.270.735,65
31)	BPR BKK LASEM	51,00%	31.930.596.430,08	963.366.805,71	0,00	30.967.229.624,37
32)	BPR BKK PATI	53,12%	17.313.642.610,66	3.788.721.761,59	0,00	13.524.920.849,07
33)	BKK SIDOREJO	38,25%	2.870.432.749,39	374.539.522,28	0,00	2.495.893.227,11
34)	BPR BKK BATANG	49,61%	9.626.694.312,69	262.125.683,90	0,00	9.364.568.628,79
35)	BPR BKK KUDUS	69,06%	12.438.960.314,85	649.590.878,83	0,00	11.789.369.436,02
36)	BPR BKK DEMAK	44,59%	18.860.136.120,99	1.199.959.638,27	0,00	17.660.176.482,72
37)	BKK BUTUH	54,15%	2.964.123.333,57	576.715.328,36	0,00	2.387.408.005,21
38)	BPR BKK TEMANGGUNG	44,92%	13.385.876.724,10	1.648.899.764,58	0,00	11.736.976.959,52
39)	BKK TANON	68,39%	16.362.450.209,89	5.108.986.859,64	0,00	11.253.463.350,25
40)	BKK KARANGANYAR	36,60%	3.087.246.793,29	0,00	2.840.902.627,31	5.928.149.420,60

No	Nama BUMD	Kepemilikan	2018	Bertambah	Berkurang	2017
41)	BPR BKK KAB. PEKALONGAN	51,00%	2.161.274.255,83	512.186.039,01	0,00	21.649.088.216,82
42)	BPR BKK TULUNG	68,21%	9.024.256.226,85	291.908.084,72	0,00	8.732.348.142,13
43)	BKK KLATEN	64,41%	0,00	15.835.569.972,30	0,00	(15.835.569.972,30)
44)	BPR BKK KARANGMALANG	59,77%	41.891.627.851,97	2.266.265.765,64	0,00	39.625.362.086,33
45)	BKK SRUWENG	41,64%	150.320.005,31	0,00	614.835.010,39	765.155.015,70
46)	BPR BKK PURWOREJO	50,90%	6.279.747.254,24	808.170.047,28	0,00	5.471.577.206,96
47)	BPR BKK PURWODADI	49,42%	52.046.030.838,12	4.063.310.708,64	0,00	47.982.720.129,48
48)	BPR BKK KOTA MAGELANG	54,14%	4.558.651.863,84	53.082.683,91	0,00	4.505.569.179,93
49)	BKK KAJEN	51,00%	4.389.661.100,28	0,00	890.480.819,73	5.280.141.920,01
50)	BKK PEKALONGAN UTARA	55,43%	8.963.013.587,28	2.318.303.260,01	0,00	6.644.710.327,27
51)	BPR BKK UNGARAN	80,57%	26.638.340.827,34	1.124.194.152,07	0,00	25.514.146.675,27
52)	BKK SLAWI	51,00%	13.966.260.315,48	3.834.659.263,12	0,00	10.131.601.052,36
53)	BKK PEMALANG	24,56%	0,00	0,00	306.589.832,25	306.589.832,25
54)	BKK TEMPURAN	51,00%	5.606.706.445,50	1.043.842.796,45	0,00	4.562.863.649,05
55)	BKK KARANGMONCOL	39,29%	0,00	0,00	297.958.135,42	297.958.135,42
56)	BPR BKK MANDIRAJA	44,82%	22.509.774.643,31	0,00	2.246.846.374,72	24.756.621.018,03
57)	BKK BANJARNEGARA	66,06%	1.313.508.146,56	0,00	5.681.599.630,30	6.995.107.776,86
58)	BKK BREBES	56,94%	12.344.272.546,90	2.722.704.723,46	0,00	9.621.567.823,44
59)	BKK PURWOKERTO SELATAN	51,00%	13.741.316.384,67	6.879.161.872,62	0,00	6.862.154.512,05
60)	BPR BKK WONOSOBO	39,57%	10.702.301.786,91	414.206.392,76	0,00	10.288.095.394,15
61)	BKK KERTEK	46,23%	4.853.259.074,66	0,00	52.196.295,81	4.905.455.370,47
62)	BKK BANDAR	40,00%	1.878.325.832,00	0,00	181.266.889,79	2.059.592.721,79
	Jumlah		**6.152.950.888.667,63**	**365.253.673.003,46**	**128.203.415.882,08**	**5.915.900.631.546,25**

Dengan menggunakan metode biaya (*Cost Method*) penyertaan modal kepada BUMD maupun non BUMD disajikan sebagai berikut :

(*Cost Method*) *(Dalam Rupiah)*

		2018	2017
1	PT. Bank Jateng	1.670.289.000.000,00	995.721.000.000,00
2	PD BPR BKK	546.801.085.818,00	490.707.718.716,00
3	PT. Asuransi Bangun Askrida	19.960.000.000,00	13.240.000.000,00
4	PT. PRPP	39.245.000.000,00	39.252.200.004,00
5	PDAB Tirta Utama	87.085.000.000,00	33.805.000.000,00
6	PD CMJT	31.861.846.791,00	31.861.846.791,00
7	PT. KIW	10.446.000.000,00	10.300.000.000,00
8	PT. SPJT	849.392.000.000,00	689.442.000.000,00
9	PT Jamkrida	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00
10	PT SPHC	10.223.766.000,00	10.223.766.000,00
	Jumlah	**3.385.303.698.609,00**	**2.434.553.531.511,00**

5.3.1.3 Aset Tetap **Rp36.724.980.242.059,00**

Saldo sebesar Rp36.724.980.242.059,00 naik sebesar Rp1.292.404.299.489,00 atau 3,65% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp35.432.575.942.570,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	TANAH	10.713	13.839.048.105.337,00	386.018.230.801,00	629.375.784.585,00	10.570	14.082.405.659.121,00
2	PERALATAN DAN MESIN	841.921	5.193.997.948.248,00	1.360.944.286.442,00	717.291.361.291,00	815.365	4.550.345.023.097,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	21.327	6.684.529.796.498,00	1.439.089.810.035,00	485.365.819.719,00	19.764	5.730.805.806.182,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	13.879	9.493.846.459.345,00	966.587.841.619,00	1.208.148.287.080,00	13.251	9.735.406.904.806,00
5	ASET TETAP LAINNYA	16.969.357	1.140.360.927.708,00	205.584.315.675,00	45.760.298.406,00	12.828.768	980.536.910.439,00
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	148	373.197.004.923,00	213.538.392.589,00	193.417.026.591,00	117	353.075.638.925,00
	Jumlah	**17.857.345**	**36.724.980.242.059,00**	**4.571.762.877.161,00**	**3.279.358.577.672,00**	**13.687.835**	**35.432.575.942.570,00**

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	35.432.575.942.570,00
Penambahan	
Belanja Modal	1.681.742.935.346,00
Belanja Barang/Jasa	21.211.874.030,00
Hibah	967.986.280.962,00
Mutasi Masuk	199.566.217.581,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	147.264.149.142,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	1.396.993.356,00
Koreksi	1.552.594.426.744,00
Jumlah	**4.571.762.877.161,00**
Berkurang	
Ekstrakomptable	37.128.574.810,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	147.264.149.142,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	791.314.737.022,00
Mutasi Keluar	199.566.217.581,00
Koreksi	2.104.084.899.117,00
Jumlah	**3.279.358.577.672,00**
Grand Total	**36.724.980.242.059,00**

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

a. Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2018
b. Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2018 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

c. Penerimaan Hibah Aset Tetap adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk tahun 2018 masih ada penerimaan hibah sehubungan adanya pelimpahan kewenangan beberapa urusan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru diserahkan di tahun 2018.
d. Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2018.
e. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
f. Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
g. Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

a. Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
b. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
c. Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
d. Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
e. Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2018.
f. Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

5.3.1.3.1 Tanah Rp13.839.048.105.337,00

Saldo Aset Tanah pada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.839.048.105.337,00 turun sebesar Rp243.357.553.784,00 atau 1,73% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp14.082.405.659.121,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	915	1.903.819.481.313,00	125.632.687.635,00	53.065.702.400,00	850	1.831.252.496.078,00
2	DINAS KESEHATAN	25	61.324.740.000,00	0,00	0,00	25	61.324.740.000,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	12	105.667.750.000,00	0,00	0,00	12	105.667.750.000,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	14	104.730.000.000,00	0,00	1.008.750.000,00	15	105.738.750.000,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	9	45.948.850.675,00	0,00	0,00	9	45.948.850.675,00
6	RSUD KELET DONOROJO	2	656.775.000.000,00	0,00	0,00	2	656.775.000.000,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	2	90.572.000.000,00	0,00	0,00	2	90.572.000.000,00
8	RSJD SURAKARTA	3	50.269.000.000,00	0,00	0,00	3	50.269.000.000,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	4	14.192.500.000,00	0,00	0,00	4	14.192.500.000,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	4.689	2.830.753.950.951,00	122.852.369.672,00	520.655.025.435,00	4.670	3.228.556.606.714,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	4.220	5.365.779.524.339,00	124.582.443.530,00	8.494.720.000,00	4.134	5.249.691.800.809,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	1.513.941.740,00	0,00	0,00	1	1.513.941.740,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	3.076.000.000,00	0,00	0,00	1	3.076.000.000,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2	11.786.143.000,00	0,00	0,00	2	11.786.143.000,00
15	DINAS SOSIAL	99	133.753.599.940,00	289.459.500,00	0,00	97	133.464.140.440,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	2	3.100.000.000,00	0,00	0,00	2	3.100.000.000,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	24	90.352.753.000,00	0,00	0,00	24	90.352.753.000,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2	3.969.078.750,00	0,00	0,00	2	3.969.078.750,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	15	19.473.150.000,00	838.850.000,00	0,00	13	18.634.300.000,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	1	599.040.000,00	0,00	0,00	1	599.040.000,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2	7.849.500.000,00	0,00	0,00	2	7.849.500.000,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	85	119.866.465.653,00	2.149.835.964,00	2.786.350.000,00	84	120.502.979.689,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	6.977.000.000,00	0,00	0,00	3	6.977.000.000,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6	7.764.500.000,00	0,00	0,00	6	7.764.500.000,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	8.300.000.000,00	0,00	0,00	1	8.300.000.000,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	23	71.578.531.000,00	208.090.500,00	3.896.250.000,00	25	75.266.690.500,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1	4.546.500.000,00	0,00	0,00	1	4.546.500.000,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	83	114.984.794.150,00	0,00	0,00	83	114.984.794.150,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	184	836.678.681.363,00	6.578.640.000,00	0,00	183	830.100.041.363,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	56	292.483.342.500,00	0,00	0,00	56	292.483.342.500,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6	3.444.550.000,00	0,00	0,00	6	3.444.550.000,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	16	22.444.664.587,00	0,00	2.753.900.000,00	18	25.198.564.587,00
33	SKPKD	65	228.662.369.794,00	2.520.354.000,00	35.356.586.750,00	92	261.498.602.544,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	17	166.611.640.000,00	0,00	993.000.000,00	18	167.604.640.000,00
35	SEKRETARIAT DPRD	5	12.678.250.000,00	0,00	0,00	5	12.678.250.000,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2	120.185.000.000,00	0,00	0,00	2	120.185.000.000,00
37	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	104	108.872.812.582,00	365.500.000,00	365.500.000,00	104	108.872.812.582,00
38	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	70.152.500.000,00	0,00	0,00	7	70.152.500.000,00
39	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	6.421.500.000,00	0,00	0,00	1	6.421.500.000,00
40	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	1	124.074.000.000,00	0,00	0,00	1	124.074.000.000,00
41	BADAN PENGHUBUNG	3	7.015.000.000,00	0,00	0,00	3	7.015.000.000,00
	Jumlah	10.713	13.839.048.105.337,00	386.018.230.801,00	629.375.784.585,00	10.570	14.082.405.659.121,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap tanah pada Tahun 2018 sebagai berikut :

Saldo Awal	Tanah14.082.405.659.121,00
Penambahan	
Belanja Modal	25.931.283.415,00
Belanja Barang/Jasa	141.150.000,00
Hibah	52.153.416.760,00
Mutasi Masuk	3.419.170.000,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	304.373.210.626,00
Jumlah	**386.018.230.801,00**
Berkurang	
Ekstrakomtable	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	504.693.368.710,00
Mutasi Keluar	3.419.170.000,00
Koreksi	121.263.245.875,00
Jumlah	**629.375.784.585,00**
Grand Total	**13.839.048.105.337,00**

Saldo aset tanah sebesar Rp13.839.048.105.337,00 termasuk didalamnya:

a. Tanah jalan akses Bandara A. Yani Semarang pada Dinas Bina Marga seluas 11.888 m² senilai Rp4.160.800.000,00. Tanah tersebut merupakan pembebasan tanah milik PT.PRPP pada tahun 2008. Berdasarkan surat klaim PT PRPP nomor 33/DIR/PRPP/E/IV/13 perihal Kepastian Kekurangan Pembayaran Aset Tanah PT.PRPP Jateng bahwa total luas tanah yang digunakan untuk jalan akses Bandara A. Yani Semarang seluas 42.730 m² sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran seluas 30.852 m². Dinas Bina Marga belum dapat melakukan pencatatan atas tanah seluas 30.852 m² dan belum dapat mengakui hutang sebesar nilai tanah tersebut karena sampai akhir Mei 2017 PT PRPP belum dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah

tersebut. Selain itu atas seluruh tanah PRPP pada saat ini masih dalam sengketa dengan PT. Indo Perkasa Usahatama (PT IPU). Pencatatan tanah tersebut akan dilakukan setelah diperoleh kepastian status hukum tanah dimaksud. Terhadap sengketa tersebut telah ada putusan Peninjauan Kembali (PK) tanggal 29 Januari 2019 yang memenangkan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah namun berkas salinan putusan belum diperoleh dari Mahkamah Agung.

b. Aset Tanah di Jalan Pleburan Nomor 5 Semarang yang tercatat di KIB Sekretariat Daerah sebesar Rp37.019.000,00 saat ini dalam kondisi tidak dimanfaatkan karena masih dalam sengketa. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 37/PK/TUN/2006 tanggal 4 Mei 2007 menetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan jual beli aset tanah tersebut. Putusan tersebut belum dilaksanakan karena Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih akan melakukan upaya hukum untuk mempertahankan aset tanah tersebut.

c. Tanah di Jalan Yosodipuro Nomor 138 RT 003/RW 006 Mangkubumen Surakarta berada dalam penguasaan pihak lain, d.h.i. Sdr. Sumarjoko. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Skt, dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 68/Pdt/2018/PT SMG, yang menggugat adalah Titi Sumarsih, Sumarsono, Sumarmadi, dan Sumarjoko melawan Gubernur Jawa Tengah, Direktur Rumah Sakit Dr. Moewardi, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Surakarta menetapkan "menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima". Meskipun telah terdapat putusan pengadilan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa tengah melalalui RSUD Dr. Moewardi belum melakukan pengosongan rumah dinas tersebut. Berdasarkan Surat Nomor 017/3492/2019 bulan April 2019 perihal Kronologi permasalahan tanah sengketa Yosodipuro pada poin 14 menyatkan bahwa "pada tingkat banding Pengadilan Tinggi No. 68/Pdt/2018/PT SMG dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan keluarga Sumarjoko mengajukan ke tingkat kasasi.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin **Rp5.193.997.948.248,00**

Saldo Aset Peralatan dan Mesin pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.193.997.948.248,00 naik sebesar Rp643.652.925.151,00 atau 14,15% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.550.345.023.097,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.3.2.1 Alat-alat Berat **Rp292.153.105.403,00**

Saldo Aset Alat Berat pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp292.153.105.403,00 naik sebesar Rp28.622.794.767,00 atau 10,86% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp263.530.310.636,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.379	13.828.573.945,00	3.349.344.003,00	1.273.432.988,00	973	11.752.662.930,00
2	DINAS KESEHATAN	44	6.229.254.750,00	890.927.000,00	66.728.000,00	46	5.405.055.750,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	64	18.236.654.070,00	4.108.311.491,00	0,00	58	14.128.342.579,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	67	23.720.112.704,00	4.737.440.000,00	549.821.429,00	61	19.532.494.133,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	14	8.614.541.989,00	0,00	3.698.378,00	18	8.618.240.367,00
6	RSUD KELET DONOROJO	14	3.366.243.889,00	0,00	0,00	14	3.366.243.889,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	8	3.555.696.000,00	508.175.000,00	542.000.000,00	7	3.589.521.000,00
8	RSJD SURAKARTA	10	2.773.025.000,00	2.091.524.000,00	414.309.000,00	6	1.095.810.000,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	16	1.543.063.049,00	978.275.000,00	3.509.000,00	10	568.297.049,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	562	109.738.738.186,00	7.046.775.521,00	3.552.187.270,00	496	106.244.149.935,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	38	21.304.428.615,00	28.455.000,00	1.114.516.000,00	45	22.390.489.615,00
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	640.150.000,00	0,00	0,00	1	640.150.000,00
13	DINAS SOSIAL	54	1.153.387.500,00	0,00	33.829.000,00	66	1.187.216.500,00
14	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	35	2.972.653.000,00	0,00	0,00	35	2.972.653.000,00
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	30	317.786.664,00	0,00	49.835.482,00	58	367.622.146,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11	637.400.000,00	0,00	0,00	11	637.400.000,00
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	26	494.398.000,00	34.300.000,00	1.550.000,00	26	461.648.000,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3	1.258.167.018,00	0,00	0,00	3	1.258.167.018,00
19	DINAS PERHUBUNGAN	15	1.722.270.500,00	294.518.000,00	147.259.000,00	13	1.575.011.500,00
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	1.567.224.500,00	1.413.990.500,00	142.225.000,00	2	295.459.000,00
21	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5	1.355.770.000,00	763.070.000,00	0,00	3	592.700.000,00
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3	189.025.000,00	0,00	500.000,00	4	189.525.000,00
23	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	29	3.232.745.000,00	0,00	295.700.000,00	30	3.528.445.000,00
24	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	10	4.065.823.260,00	0,00	0,00	10	4.065.823.260,00
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	74	2.485.413.690,00	846.769.080,00	131.111.880,00	49	1.769.756.490,00
26	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	43	5.406.269.526,00	727.909.000,00	0,00	32	4.678.360.526,00
27	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	30	394.782.262,00	118.521.000,00	293.987.000,00	45	570.248.262,00
28	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	33	3.209.427.000,00	240.555.000,00	32.187.500,00	33	3.001.059.500,00
29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	19	5.807.666.768,00	0,00	387.618.333,00	32	6.195.285.101,00
30	SKPKD	12	665.815.500,00	0,00	0,00	12	665.815.500,00
31	SEKRETARIAT DAERAH	44	12.923.620.218,00	5.876.610.595,00	0,00	39	7.047.009.623,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
32	SEKRETARIAT DPRD	15	1.410.845.100,00	198.000.000,00	0,00	14	1.212.845.100,00
33	INSPEKTORAT	6	169.042.000,00	0,00	0,00	6	169.042.000,00
34	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	12	2.935.250.500,00	0,00	87.849.000,00	14	3.023.099.500,00
35	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	217	17.034.046.260,00	2.981.561.300,00	1.925.610.043,00	222	15.978.095.003,00
36	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	57	3.731.205.360,00	1.832.907.000,00	45.100.000,00	55	1.943.398.360,00
37	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3	810.245.000,00	0,00	0,00	3	810.245.000,00
38	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	19	2.453.917.580,00	792.140.580,00	142.720.000,00	23	1.804.497.000,00
39	BADAN PENGHUBUNG	33	198.426.000,00	0,00	0,00	33	198.426.000,00
	Jumlah	3.058	292.153.105.403,00	39.860.079.070,00	11.237.284.303,00	2.608	263.530.310.636,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Berat pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Alat Berat
Saldo Awal	263.530.310.636,00
Penambahan	
Belanja Modal	26.450.152.476,00
Belanja Barang/Jasa	111.930.000,00
Hibah	1.867.383.689,00
Mutasi Masuk	1.624.639.650,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	4.683.721.650,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	5.122.251.605,00
Jumlah	39.860.079.070,00
Berkurang	
Ekstrakomtable	57.109.288,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	464.194.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	7.821.024.785,00
Mutasi Keluar	1.624.639.650,00
Koreksi	1.270.316.580,00
Jumlah	**11.237.284.303,00**
Grand Total	**292.153.105.403,00**

5.3.1.3.2.2 Alat Angkut **Rp474.848.141.914,00**

Saldo Alat Angkut pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp474.848.141.914,00 naik sebesar Rp34.692.291.315,00 atau 7,88% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp440.155.850.599,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.745	85.014.323.318,00	20.143.151.836,00	5.971.933.400,00	1.439	70.843.104.882,00
2	DINAS KESEHATAN	86	11.353.789.269,00	3.950.878.750,00	761.303.000,00	93	8.164.213.519,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
3	RSUD Dr. MOEWARDI	41	7.626.796.984,00	555.000.000,00	498.450.625,00	41	7.570.247.609,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	53	6.738.558.313,00	841.381.350,00	2.620.000,00	49	5.899.796.963,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	27	4.479.317.553,00	25.500.000,00	592.280.000,00	33	5.046.097.553,00
6	RSUD KELET DONOROJO	39	5.934.512.235,00	0,00	98.977.000,00	44	6.033.489.235,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	81	3.942.614.750,00	0,00	0,00	81	3.942.614.750,00
8	RSJD SURAKARTA	97	4.990.846.373,00	416.339.500,00	15.397.000,00	103	4.589.903.873,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	39	3.242.806.623,00	4.785.000,00	990.000,00	37	3.239.011.623,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	174	12.355.878.674,00	3.771.002.000,00	1.016.471.664,00	162	9.601.348.338,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	104	7.245.757.116,00	1.098.893.314,00	15.000.000,00	91	6.161.863.802,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	31	4.156.418.720,00	327.034.314,00	271.600.000,00	31	4.100.984.406,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	30	4.712.803.947,00	534.110.500,00	0,00	27	4.178.693.447,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	20	3.084.658.400,00	577.027.500,00	403.751.000,00	28	2.911.381.900,00
15	DINAS SOSIAL	275	12.463.147.729,00	3.093.561.046,00	357.725.833,00	374	9.727.312.516,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	127	14.436.497.543,00	1.394.112.500,00	0,00	124	13.042.385.043,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	76	3.818.240.235,00	0,00	324.745.169,00	145	4.142.985.404,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	23	2.452.661.768,00	0,00	0,00	23	2.452.661.768,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	419	16.207.482.810,00	518.149.250,00	367.921.751,00	423	16.057.255.311,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	719	6.887.231.514,00	327.034.314,00	0,00	718	6.560.197.200,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	28	2.922.028.223,00	0,00	0,00	28	2.922.028.223,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	103	30.092.198.421,00	1.166.399.550,00	2.519.965.000,00	102	31.445.763.871,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	31	7.311.321.288,00	2.081.045.500,00	695.950.000,00	28	5.926.225.788,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	22	2.731.000.626,00	0,00	0,00	22	2.731.000.626,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	23	3.190.289.830,00	907.868.750,00	7.500.000,00	22	2.289.921.080,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN	26	3.821.227.489,00	509.618.338,00	2.367.786.246,00	50	5.679.395.397,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
	PARIWISATA						
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	34	4.536.082.345,00	403.089.500,00	2.349.999,00	39	4.135.342.844,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	131	13.812.689.233,00	387.592.750,00	2.850.532.000,00	131	16.275.628.483,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	173	9.467.723.363,00	348.266.021,00	0,00	171	9.119.457.342,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	46	4.005.114.043,00	653.469.643,00	493.784.972,00	101	3.845.429.372,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	42	5.252.904.478,00	683.790.314,00	0,00	29	4.569.114.164,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	38	5.685.873.245,00	307.437.023,00	172.574.245,00	40	5.551.010.467,00
33	SKPKD	80	21.349.353.299,00	2.402.080.600,00	12.146.484.104,00	105	31.093.756.803,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	358	58.395.039.250,00	12.689.491.608,00	4.079.768.444,00	327	49.785.316.086,00
35	SEKRETARIAT DPRD	92	18.533.497.023,00	907.096.337,00	0,00	89	17.626.400.686,00
36	INSPEKTORAT	28	2.805.343.456,00	257.210.000,00	0,00	27	2.548.133.456,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	50	5.357.563.793,00	2.115.264.000,00	1.559.416.300,00	51	4.801.716.093,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	518	31.208.132.336,00	12.647.722.250,00	6.561.572.300,00	500	25.121.982.386,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	127	7.464.396.302,00	888.535.500,00	1.380.933.441,00	131	7.956.794.243,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	26	3.222.313.268,00	354.068.500,00	0,00	25	2.868.244.768,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	26	2.633.029.838,00	732.795.000,00	605.564.300,00	28	2.505.799.138,00
42	BADAN PENGHUBUNG	49	9.906.676.891,00	3.217.836.750,00	403.000.000,00	40	7.091.840.141,00
	Jumlah	6.257	474.848.141.914,00	81.238.639.108,00	46.546.347.793,00	6.152	440.155.850.599,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Angkut pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Alat Angkut
Saldo Awal	440.155.850.599,00
Penambahan	
Belanja Modal	33.768.909.263,00
Belanja Barang/Jasa	3.737.150,00
Hibah	14.659.840.440,00
Mutasi Masuk	25.937.474.864,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	727.366.536,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	1.396.993.356,00
Koreksi	4.744.317.499,00
Jumlah	**81.238.639.108,00**
Berkurang	
Ekstrakomtable	7.940.200,00

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	14.636.939.529,00
Mutasi Keluar	25.937.474.864,00
Koreksi	5.963.993.200,00
Jumlah	**46.546.347.793,00**
Grand Total	**474.848.141.914,00**

5.3.1.3.2.3 Alat Bengkel dan Ukur **Rp250.207.964.873,00**

Saldo Aset Alat Bengkel dan Ukur pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp250.207.964.873,00 turun sebesar Rp48.097.929.599,00 atau 16,12% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp298.305.894.472,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	32.368	202.457.905.952,00	40.250.773.247,00	91.217.435.114,00	30.240	253.424.567.819,00
2	DINAS KESEHATAN	11	97.600.000,00	198.761.001,00	135.261.001,00	3	34.100.000,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	70	1.648.961.868,00	3.100.000,00	1.240.000,00	74	1.647.101.868,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	70	1.487.624.499,00	8.680.300,00	1.090.762.001,00	106	2.569.706.200,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	238	532.310.407,00	5.120.000,00	15.396.452,00	291	542.586.859,00
6	RSUD KELET DONOROJO	44	564.889.750,00	358.108.000,00	0,00	41	206.781.750,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	27	20.205.500,00	0,00	0,00	27	20.205.500,00
8	RSJD SURAKARTA	11	32.204.500,00	0,00	1.696.000,00	14	33.900.500,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	19	110.865.000,00	99.080.000,00	6.703.200,00	22	18.488.200,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	23	88.018.800,00	79.165.000,00	751.400,00	20	9.605.200,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	170	2.001.813.002,00	550.675.002,00	46.114.000,00	145	1.497.252.000,00
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	0,00	0,00	85.700.000,00	17	85.700.000,00
13	DINAS SOSIAL	240	438.576.600,00	0,00	82.096.750,00	505	520.673.350,00
14	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	11	374.850.000,00	65.750.000,00	0,00	6	309.100.000,00
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.774	3.795.013.548,00	0,00	556.217.999,00	3.214	4.351.231.547,00
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	423	4.202.759.674,00	29.600.000,00	60.700.000,00	424	4.233.859.674,00
17	DINAS PERHUBUNGAN	59	4.686.658.200,00	127.825.000,00	1.558.064.000,00	36	6.116.897.200,00
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4	21.050.000,00	966.280.000,00	976.805.000,00	6	31.575.000,00
19	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	7	45.300.000,00	0,00	0,00	7	45.300.000,00
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	107	2.056.479.956,00	1.441.950.000,00	578.419.044,00	55	1.192.949.000,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	139	1.082.138.295,00	188.645.000,00	38.372.305,00	160	931.865.600,00
22	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	643	2.975.005.300,00	0,00	0,00	643	2.975.005.300,00
23	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	52	675.277.606,00	89.494.700,00	85.610.426,00	74	671.393.332,00
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	420	6.983.693.950,00	1.422.185.000,00	191.259.500,00	320	5.752.768.450,00
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.124	13.519.957.966,00	6.644.800.000,00	3.875.867.657,00	605	10.751.025.623,00
26	SEKRETARIAT DAERAH	2	98.898.000,00	0,00	0,00	2	98.898.000,00
27	INSPEKTORAT	24	71.400.000,00	0,00	0,00	24	71.400.000,00
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	0,00	0,00	5.850.000,00	1	5.850.000,00
29	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	24	116.525.000,00	0,00	21.500.000,00	27	138.025.000,00
30	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2	12.331.500,00	3.900.000,00	0,00	1	8.431.500,00
31	BADAN PENGHUBUNG	6	9.650.000,00	0,00	0,00	6	9.650.000,00
	Jumlah	**39.112**	**250.207.964.873,00**	**52.533.892.250,00**	**100.631.821.849,00**	**37.116**	**298.305.894.472,00**

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Bengkel dan Ukur pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Alat Bengkel dan Ukur
Saldo Awal	298.305.894.472,00
Penambahan	
Belanja Modal	7.133.606.034,00
Belanja Barang/Jasa	84.591.250,00
Hibah	29.025.994.652,00
Mutasi Masuk	210.850.000,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	2.835.482.202,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	13.243.368.112,00
Jumlah	**52.533.892.250,00**
Berkurang	
Ekstrakomtable	798.479.518,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	1.707.316.044,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	7.219.470.692,00
Mutasi Keluar	210.850.000,00
Koreksi	90.695.705.595,00
Jumlah	**100.631.821.849,00**
Grand Total	**250.207.964.873,00**

5.3.1.3.2.4 Alat Pertanian **Rp49.443.738.239,00**

Saldo Alat Pertanian pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp49.443.738.239,00 naik sebesar Rp1.839.034.990,00 atau 3,86% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp47.604.703.249,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.731	11.424.790.692,00	2.402.059.272,00	1.462.958.689,00	2.628	10.485.690.109,00
2	DINAS KESEHATAN	-	0,00	8.362.162,00	8.362.162,00	-	0,00
3	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	2	26.410.500,00	0,00	0,00	2	26.410.500,00
4	RSUD TUGUREJO SEMARANG	12	292.492.795,00	0,00	0,00	12	292.492.795,00
5	RSUD KELET DONOROJO	18	125.925.630,00	0,00	66.717.500,00	33	192.643.130,00
6	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	2	4.448.000,00	0,00	0,00	2	4.448.000,00
7	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	8	38.000.000,00	0,00	108.548.000,00	28	146.548.000,00
8	DINAS SOSIAL	4	35.985.000,00	0,00	235.000,00	12	36.220.000,00
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	399	2.114.340.000,00	357.475.000,00	584.250.993,00	2.640	2.341.115.993,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	17	474.839.500,00	346.690.000,00	0,00	14	128.149.500,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	6	1.255.404.070,00	957.110.620,00	9.731.550,00	2	308.025.000,00
12	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	0,00	0,00	3.148.000,00	9	3.148.000,00
13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	148	1.191.358.500,00	385.748.500,00	32.120.000,00	116	837.730.000,00
14	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	2.663	28.430.087.898,00	1.407.625.707,00	50.716.707,00	2.546	27.073.178.898,00
15	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	331	3.954.575.654,00	1.455.549.629,00	3.045.172.299,00	827	5.544.198.324,00
16	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	0,00	1.105.772.000,00	1.105.772.000,00	-	0,00
17	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2	31.000.000,00	0,00	109.625.000,00	5	140.625.000,00
18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	28.280.000,00	0,00	0,00	3	28.280.000,00
19	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2	15.800.000,00	0,00	0,00	2	15.800.000,00
	Jumlah	6.348	49.443.738.239,00	8.426.392.890,00	6.587.357.900,00	8.881	47.604.703.249,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Pertanian pada Tahun 2018 sebagai berikut

	Alat Pertanian
Saldo Awal	47.604.703.249,00
Penambahan	
Belanja Modal	6.125.301.018,00
Belanja Barang/Jasa	0,00
Hibah	1.680.924.640,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	3.000.000,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	617.167.232,00
Jumlah	**8.426.392.890,00**
Berkurang	
Ekstrakomtable	74.242.390,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	2.724.802.048,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	2.369.172.163,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	1.419.141.299,00
Jumlah	**6.587.357.900,00**
Grand Total	**49.443.738.239,00**

5.3.1.3.2.5 Alat Kantor dan Rumah Tangga **Rp1.114.659.589.783,00**

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.114.659.589.783,00 naik sebesar Rp113.412.401.251,00 atau 11,33% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.001.247.188.532,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	228.234	524.611.735.808,00	156.747.255.767,00	52.277.036.579,00	191.709	420.141.516.620,00
2	DINAS KESEHATAN	14.640	32.839.464.167,00	2.390.285.410,00	919.867.686,00	15.603	31.369.046.443,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	8.285	41.631.110.587,00	5.302.724.150,00	1.170.647.402,00	9.619	37.499.033.839,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	7.771	37.081.884.756,00	4.924.109.756,00	8.982.132.537,00	13.798	41.139.907.537,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	6.857	31.517.993.973,00	2.572.172.116,00	1.258.368.144,00	7.865	30.204.190.001,00
6	RSUD KELET DONOROJO	3.935	12.596.672.307,00	1.937.101.150,00	42.795.699,00	3.470	10.702.366.856,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	3.577	14.595.322.650,00	5.546.195.816,00	464.429.450,00	3.463	9.513.556.284,00
8	RSJD SURAKARTA	5.709	17.485.554.354,00	986.268.950,00	1.215.197.747,00	7.514	17.714.483.151,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	3.634	11.988.118.584,00	846.193.415,00	568.399.442,00	4.006	11.710.324.611,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	4.045	2.791.361.800,00	206.625.000,00	756.247.496,00	5.702	3.340.984.296,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	3.531	8.437.542.959,00	828.415.000,00	635.946.843,00	3.647	8.245.074.802,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	1.476	2.913.514.512,00	241.000.000,00	0,00	1.451	2.672.514.512,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
	PERMUKIMAN						
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	796	2.063.084.774,00	175.025.000,00	348.283.750,00	895	2.236.343.524,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.046	2.689.243.703,00	83.002.500,00	1.284.532.125,00	1.684	3.890.773.328,00
15	DINAS SOSIAL	22.131	20.395.500.386,00	4.845.604.742,00	2.815.115.478,00	26.284	18.365.011.122,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	2.133	4.658.085.079,00	434.989.000,00	41.724.000,00	1.904	4.264.820.079,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	9.575	13.661.072.347,00	1.531.260.400,00	3.216.924.426,00	14.952	15.346.736.373,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.012	1.693.032.700,00	25.000.000,00	20.659.000,00	1.032	1.688.691.700,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5.020	13.252.849.033,00	2.230.673.500,00	1.212.909.739,00	5.184	12.235.085.272,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	1.682	3.931.499.199,00	157.210.886,00	58.837.336,00	1.661	3.833.125.649,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.283	5.188.054.969,00	279.340.000,00	120.318.884,00	2.436	5.029.033.853,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	3.334	6.024.427.155,00	1.173.215.100,00	382.006.215,00	3.329	5.233.218.270,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.882	5.615.731.653,00	806.370.000,00	1.105.706.177,00	2.186	5.915.067.830,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.409	7.226.336.501,00	1.492.512.000,00	642.393.949,00	2.197	6.376.218.450,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.288	3.236.406.103,00	551.224.500,00	317.418.022,00	1.600	3.002.599.625,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1.884	8.197.619.117,00	773.539.292,00	5.108.458.838,00	5.389	12.532.538.663,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.478	12.763.935.394,00	296.179.400,00	457.748.962,00	3.476	12.925.504.956,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.959	6.921.210.122,00	1.227.119.500,00	1.670.694.735,00	3.967	7.364.785.357,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	8.572	17.093.011.122,00	608.032.750,00	138.710.000,00	8.164	16.623.688.372,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.113	5.620.737.657,00	1.245.020.350,00	4.331.479.316,00	3.926	8.707.196.623,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.720	10.084.920.914,00	1.632.975.440,00	342.953.896,00	3.480	8.794.899.370,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.243	18.990.692.329,00	1.364.260.275,00	5.013.950.516,00	6.748	22.640.382.570,00
33	SKPKD	4.110	5.111.395.703,00	0,00	0,00	4.110	5.111.395.703,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	12.034	44.064.677.750,00	11.489.874.645,00	8.729.745.284,00	17.370	41.304.548.389,00
35	SEKRETARIAT DPRD	7.216	33.365.149.178,00	2.988.952.000,00	1.964.909.320,00	7.373	32.341.106.498,00
36	INSPEKTORAT	1.669	4.121.314.313,00	499.206.250,00	280.369.384,00	1.659	3.902.477.447,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.694	6.566.916.091,00	363.824.699,00	1.063.828.032,00	2.763	7.266.919.424,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	30.070	57.175.610.519,00	8.387.823.784,00	7.018.591.618,00	30.933	55.806.378.353,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	28.669	26.867.899.642,00	1.707.847.600,00	917.527.416,00	28.864	26.077.579.458,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2.510	6.024.291.328,00	1.513.705.000,00	152.336.682,00	2.506	4.662.923.010,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	8.082	17.391.181.122,00	1.267.902.980,00	1.365.809.395,00	10.702	17.489.087.537,00
42	BADAN PENGHUBUNG	1.522	6.173.427.423,00	430.507.000,00	283.132.352,00	1.487	6.026.052.775,00
	Jumlah	**472.830**	**1.114.659.589.783,00**	**232.110.545.123,00**	**118.698.143.872,00**	**476.108**	**1.001.247.188.532,00**

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Tahun 2018 sebagai berikut *:*

	Alat Kantor & RT
Saldo Awal	1.001.247.188.532,00
Penambahan	
Belanja Modal	86.720.791.076,00
Belanja Barang/Jasa	1.269.330.250,00
Hibah	80.681.563.862,00
Mutasi Masuk	7.219.683.960,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	12.943.785.105,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	43.275.390.870,00
Jumlah	**232.110.545.123,00**
Berkurang	
Ekstrakomtable	28.530.389.213,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	5.788.951.158,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	57.923.348.806,00
Mutasi Keluar	7.219.683.960,00
Koreksi	19.235.770.735,00
Jumlah	**118.698.143.872,00**
Grand Total	**1.114.659.589.783,00**

5.3.1.3.2.6 Alat-Alat Studio dan Komunikasi **Rp199.246.595.549,00**

Saldo Alat Studio dan Komunikasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp199.246.595.549,00 naik sebesar Rp17.586.583.242,00 atau 9,68% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp181.660.012.307,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21.472	107.573.687.320,00	22.189.682.654,00	4.516.133.581,00	18.895	89.900.138.247,00
2	DINAS KESEHATAN	642	4.013.000.235,00	503.692.780,00	322.596.001,00	613	3.831.903.456,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	429	3.866.538.974,00	34.056.000,00	14.396.000,00	491	3.846.878.974,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	52	892.210.400,00	0,00	422.979.349,00	127	1.315.189.749,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	776	3.262.981.500,00	140.695.000,00	26.565.030,00	773	3.148.851.530,00
6	RSUD KELET DONOROJO	222	1.609.816.538,00	47.735.000,00	0,00	199	1.562.081.538,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	238	1.038.559.455,00	251.950.000,00	1.155.500,00	209	787.764.955,00
8	RSJD SURAKARTA	88	965.495.137,00	4.015.000,00	93.358.931,00	147	1.054.839.068,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	102	367.323.700,00	37.070.000,00	8.322.800,00	103	338.576.500,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	110	370.299.100,00	35.530.000,00	29.225.000,00	163	363.994.100,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	154	1.859.604.650,00	398.190.000,00	850.698.550,00	197	2.312.113.200,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	103	571.422.496,00	240.300.000,00	178.200.000,00	99	509.322.496,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	59	427.790.000,00	0,00	119.055.000,00	82	546.845.000,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	72	416.925.000,00	8.500.000,00	1.502.480.000,00	178	1.910.905.000,00
15	DINAS SOSIAL	198	530.729.784,00	36.447.784,00	107.046.000,00	253	601.328.000,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	576	1.625.556.949,00	0,00	0,00	576	1.625.556.949,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	273	1.657.716.018,00	350.490.000,00	678.123.583,00	496	1.985.349.601,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	50	301.780.000,00	0,00	0,00	50	301.780.000,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	469	2.969.129.616,00	272.040.100,00	165.201.292,00	517	2.862.290.808,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	70	615.762.500,00	7.502.000,00	0,00	67	608.260.500,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	130	1.523.752.983,00	88.300.000,00	65.734.500,00	135	1.501.187.483,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	333	2.076.953.626,00	1.008.394.000,00	1.026.827.380,00	377	2.095.387.006,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	429	3.670.800.361,00	1.953.188.000,00	927.572.094,00	317	2.645.184.455,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	89	1.114.174.500,00	265.893.000,00	0,00	64	848.281.500,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	94	761.321.691,00	287.411.400,00	144.728.393,00	93	618.638.684,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	288	1.927.345.178,00	42.420.000,00	2.012.986.406,00	643	3.897.911.584,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	225	4.552.372.354,00	584.818.044,00	45.736.300,00	223	4.013.290.610,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	156	1.562.369.550,00	716.336.800,00	287.860.250,00	128	1.133.893.000,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	338	3.760.020.710,00	15.000.000,00	0,00	337	3.745.020.710,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	65	452.758.700,00	63.150.000,00	588.629.300,00	119	978.238.000,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	694	3.724.559.828,00	463.397.000,00	587.166.471,00	683	3.848.329.299,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	240	1.337.554.127,00	1.196.887.057,00	859.661.579,00	338	1.000.328.649,00
33	SKPKD	28	112.961.000,00	0,00	0,00	28	112.961.000,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	1.826	19.398.675.063,00	2.345.167.600,00	2.341.224.315,00	2.057	19.394.731.778,00
35	SEKRETARIAT DPRD	422	3.057.123.250,00	728.875.000,00	548.150,00	386	2.328.796.400,00
36	INSPEKTORAT	68	825.840.665,00	192.868.750,00	11.294.250,00	67	644.266.165,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	212	1.329.871.494,00	943.000,00	117.657.001,00	222	1.446.585.495,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	880	5.379.993.458,00	397.300.000,00	147.221.756,00	862	5.129.915.214,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	299	2.574.128.709,00	595.271.500,00	266.967.065,00	298	2.245.824.274,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	137	344.766.656,00	0,00	0,00	137	344.766.656,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	484	3.468.607.784,00	593.994.700,00	19.000.000,00	435	2.893.613.084,00
42	BADAN PENGHUBUNG	174	1.354.314.490,00	7.000.000,00	31.577.100,00	173	1.378.891.590,00
	Jumlah	33.766	199.246.595.549,00	36.104.512.169,00	18.517.928.927,00	32.357	181.660.012.307,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Studio dan Komunikasi pada Tahun 2018 sebagai berikut

	Alat Studio dan Komunikasi
Saldo Awal	181.660.012.307,00
Penambahan	
Belanja Modal	14.433.867.891,00
Belanja Barang/Jasa	137.403.750,00
Hibah	13.176.191.821,00
Mutasi Masuk	1.085.000.784,00

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	2.431.944.044,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	4.840.103.879,00
Jumlah	**36.104.512.169,00**
Berkurang	
Ekstrakomtable	675.839.662,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	2.332.561.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	11.570.617.312,00
Mutasi Keluar	1.085.000.784,00
Koreksi	2.853.910.169,00
Jumlah	**18.517.928.927,00**
Grand Total	**199.246.595.549,00**

5.3.1.3.2.7 Alat-Alat Kedokteran **Rp1.473.919.943.478,00**

Saldo Alat Kedokteran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.473.919.943.478,00 naik sebesar Rp195.024.009.278,00 atau 15,25% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.278.895.934.200,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.205	5.833.387.831,00	1.378.257.118,00	365.853.384,00	1.922	4.820.984.097,00
2	DINAS KESEHATAN	2.172	36.746.387.454,00	4.962.078.167,00	453.958.595,00	2.217	32.238.267.882,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	9.546	439.926.306.786,00	32.869.096.334,00	7.505.393.848,00	10.987	414.562.604.300,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	6.091	450.229.065.644,00	107.325.506.262,00	103.481.123.068,00	13.302	446.384.682.450,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	5.093	271.672.767.602,00	109.511.414.615,00	8.231.275.735,00	3.662	170.392.628.722,00
6	RSUD KELET DONOROJO	3.434	126.104.795.151,00	46.366.521.946,00	953.419.014,00	2.825	80.691.692.219,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	1.492	46.181.555.425,00	9.103.498.612,00	4.296.547.652,00	1.860	41.374.604.465,00
8	RSJD SURAKARTA	342	38.118.565.109,00	8.618.523.995,00	1.417.799.333,00	305	30.917.840.447,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	806	57.033.811.092,00	3.504.134.615,00	1.399.926.450,00	837	54.929.602.927,00
15	DINAS SOSIAL	278	644.317.429,00	0,00	17.074.700,00	317	661.392.129,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	173	550.242.305,00	1.500.000,00	89.161.607,00	413	637.903.912,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	1.875.000,00	2.056.000,00	181.000,00	-	0,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	0,00	0,00	197.725.000,00	197.725.000,00	-	0,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	1	7.100.000,00	0,00	0,00	1	7.100.000,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN	16	145.813.000,00	1.490.000,00	259.969.000,00	28	404.292.000,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
	HEWAN						
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	65	77.835.000,00	0,00	400.000,00	66	78.235.000,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	12	103.690.000,00	0,00	153.925.000,00	46	257.615.000,00
35	SEKRETARIAT DPRD	52	295.495.000,00	0,00	0,00	52	295.495.000,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	16	460.000,00	0,00	0,00	16	460.000,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	68	56.498.650,00	0,00	0,00	68	56.498.650,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	52	189.975.000,00	5.940.000,00	0,00	48	184.035.000,00
	Jumlah	**31.915**	**1.473.919.943.478,00**	**323.847.742.664,00**	**128.823.733.386,00**	**38.972**	**1.278.895.934.200,00**

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Kedokteran pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Alat Kedokteran
Saldo Awal	1.278.895.934.200,00
Penambahan	
Belanja Modal	190.727.234.746,00
Belanja Barang/Jasa	55.531.150,00
Hibah	130.808.755.560,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	1.949.853.840,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	306.367.368,00
Jumlah	**323.847.742.664,00**
Berkurang	
Ekstrakomtable	95.896.685,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	8.192.843.200,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	120.137.862.001,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	397.131.500,00
Jumlah	**128.823.733.386,00**
Grand Total	**1.473.919.943.478,00**

5.3.1.3.2.8 Alat Laboratorium **Rp387.334.470.246,00**

Saldo Alat Laboratorium pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp387.334.470.246,00 naik sebesar Rp36.235.836.076,00 atau 10,32% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp351.098.634.170,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	69.172	235.188.164.391,00	42.443.855.737,00	9.013.295.073,00	63.299	201.757.603.727,00
2	DINAS KESEHATAN	827	19.453.880.714,00	569.150.000,00	222.784.150,00	1.138	19.107.514.864,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	128	13.447.588.752,00	3.046.514.700,00	0,00	120	10.401.074.052,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	7	1.075.671.400,00	894.171.400,00	2.072.808.866,00	137	2.254.308.866,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	408	20.044.065.987,00	3.381.797.615,00	75.017.101,00	398	16.737.285.473,00
6	RSUD KELET DONOROJO	36	1.839.025.888,00	194.400.000,00	479.239.286,00	38	2.123.865.174,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	139	3.055.394.184,00	369.341.184,00	123.000.000,00	135	2.809.053.000,00
8	RSJD SURAKARTA	41	1.982.269.000,00	0,00	495.499.600,00	46	2.477.768.600,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	68	1.993.934.905,00	351.750.250,00	250.299.200,00	62	1.892.483.855,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	639	7.814.519.400,00	834.147.000,00	50.000.000,00	613	7.030.372.400,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	364	2.438.358.155,00	55.655.000,00	93.791.200,00	388	2.476.494.355,00
12	DINAS SOSIAL	19	58.600.000,00	0,00	53.690.000,00	43	112.290.000,00
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	629	7.420.529.740,00	357.475.000,00	1.100.017.822,00	3.601	8.163.072.562,00
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	320	13.265.989.931,00	0,00	1.112.969.477,00	973	14.378.959.408,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	4	163.343.000,00	0,00	0,00	4	163.343.000,00
16	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	7	90.230.000,00	0,00	5.190.359,00	21	95.420.359,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.432	8.251.311.735,00	228.915.000,00	929.122.930,00	1.744	8.951.519.665,00
18	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	866	14.502.069.564,00	0,00	0,00	866	14.502.069.564,00
19	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	716	12.428.615.659,00	2.968.748.000,00	5.400.660.346,00	1.929	14.860.528.005,00
20	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	417	4.761.422.890,00	1.830.700.000,00	613.048.910,00	427	3.543.771.800,00
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.681	17.430.152.351,00	4.539.667.760,00	3.740.018.250,00	2.322	16.630.502.841,00
22	INSPEKTORAT	14	122.022.000,00	0,00	0,00	14	122.022.000,00
23	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2	507.310.600,00	0,00	0,00	2	507.310.600,00
	Jumlah	**77.936**	**387.334.470.246,00**	**62.066.288.646,00**	**25.830.452.570,00**	**78.320**	**351.098.634.170,00**

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Laboratorium pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Alat Laboratorium
Saldo Awal	351.098.634.170,00
Penambahan	
Belanja Modal	11.460.449.839,00
Belanja Barang/Jasa	283.029.750,00
Hibah	33.687.000.550,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	5.915.476.700,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	10.720.331.807,00
Jumlah	**62.066.288.646,00**
Berkurang	
Ekstrakomtable	1.683.492.281,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	2.383.655.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	14.370.030.587,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	7.393.274.702,00
Jumlah	**25.830.452.570,00**
Grand Total	**387.334.470.246,00**

5.3.1.3.2.9 Alat-Alat Persenjataan **Rp6.210.802.640,00**

Saldo Alat Persenjataan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.210.802.640,00 naik sebesar Rp826.545.654,00 atau 15,35% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.384.256.986,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	804	2.551.338.807,00	778.545.919,00	245.968.365,00	677	2.018.761.253,00
2	RSUD KELET DONOROJO	3	187.829.055,00	0,00	0,00	3	187.829.055,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	5	6.175.000,00	48.400.000,00	48.400.000,00	5	6.175.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	2	5.953.500,00	0,00	1.381.900,00	45	7.335.400,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17	2.400.000,00	0,00	0,00	17	2.400.000,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	40	179.710.000,00	0,00	0,00	40	179.710.000,00
7	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	289	1.561.776.003,00	0,00	0,00	289	1.561.776.003,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	32	144.900.000,00	77.250.000,00	0,00	28	67.650.000,00
9	DINAS PERHUBUNGAN	18	31.204.725,00	4.207.405.200,00	4.207.405.200,00	18	31.204.725,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
10	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2	175.600.000,00	175.600.000,00	0,00	-	0,00
11	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	25	52.000.000,00	34.000.000,00	0,00	8	18.000.000,00
12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11	14.734.000,00	0,00	0,00	11	14.734.000,00
13	SEKRETARIAT DAERAH	10	1.265.031.550,00	0,00	0,00	10	1.265.031.550,00
14	INSPEKTORAT	1	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	-	0,00
15	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	23.650.000,00	0,00	0,00	4	23.650.000,00
	Jumlah	**1.263**	**6.210.802.640,00**	**5.329.701.119,00**	**4.503.155.465,00**	**1.155**	**5.384.256.986,00**

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Persenjataan pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Alat Persenjataan
Saldo Awal	5.384.256.986,00
Penambahan	
Belanja Modal	4.441.097.700,00
Belanja Barang/Jasa	10.370.640,00
Hibah	363.411.890,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	184.100.000,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	330.720.889,00
Jumlah	**5.329.701.119,00**
Berkurang	
Ekstrakomtable	89.083.365,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	4.255.805.200,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	1.381.900,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	156.885.000,00
Jumlah	**4.503.155.465,00**
Grand Total	**6.210.802.640,00**

5.3.1.3.2.10 Alat Komputer **Rp873.977.732.532,00**

Saldo Alat Komputer pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp873.977.732.532,00 naik sebesar Rp191.515.494.586,00 atau 28,06% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp682.462.237.946,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	132.876	634.101.674.003,00	277.752.355.529,00	107.618.921.023,00	102.598	463.968.239.497,00
2	DINAS KESEHATAN	1.621	11.386.678.746,00	926.891.895,00	711.971.725,00	1.682	11.171.758.576,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	2.099	15.070.399.746,00	4.702.819.000,00	245.394.250,00	1.862	10.612.974.996,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	1.782	14.406.456.232,00	2.949.843.933,00	1.590.505.763,00	1.902	13.047.118.062,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	914	4.623.498.447,00	481.717.700,00	184.878.688,00	847	4.326.659.435,00
6	RSUD KELET DONOROJO	402	3.171.938.587,00	1.145.655.570,00	29.687.000,00	294	2.055.970.017,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	653	3.318.112.250,00	678.140.000,00	393.475.000,00	597	3.033.447.250,00
8	RSJD SURAKARTA	411	3.219.986.431,00	239.481.200,00	343.892.890,00	425	3.324.398.121,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	370	2.240.625.652,00	283.382.000,00	40.440.918,00	321	1.997.684.570,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	461	2.439.332.715,00	696.762.700,00	319.290.500,00	553	2.061.860.515,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	603	5.072.203.840,00	714.555.000,00	595.457.871,00	630	4.953.106.711,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	190	1.203.394.489,00	173.325.000,00	0,00	142	1.030.069.489,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	111	1.438.935.500,00	89.430.000,00	137.031.044,00	119	1.486.536.544,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	127	998.518.690,00	120.940.000,00	365.852.191,00	181	1.243.430.881,00
15	DINAS SOSIAL	553	3.903.470.230,00	435.902.840,00	547.285.598,00	643	4.014.852.988,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	297	1.943.784.892,00	280.046.000,00	450.000,00	276	1.664.188.892,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	726	5.195.845.085,00	286.631.000,00	1.869.921.242,00	1.069	6.779.135.327,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	102	734.253.300,00	8.472.000,00	0,00	98	725.781.300,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.115	7.865.356.783,00	850.802.329,00	729.532.329,00	1.270	7.744.086.783,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	232	1.676.675.800,00	101.991.000,00	27.650.000,00	220	1.602.334.800,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	255	2.670.639.847,00	329.906.000,00	152.518.417,00	222	2.493.252.264,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	588	5.070.400.594,00	408.076.200,00	458.761.282,00	620	5.121.085.676,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	732	24.465.264.743,00	12.683.240.400,00	1.116.416.402,00	662	12.898.440.745,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.712	4.179.589.474,00	466.449.000,00	161.781.000,00	2.162	3.874.921.474,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	368	3.314.996.440,00	433.074.972,00	771.895.473,00	393	3.653.816.941,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	525	3.235.950.586,00	827.094.940,00	968.636.912,00	668	3.377.492.558,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	457	4.787.914.976,00	565.334.000,00	977.244.204,00	606	5.199.825.180,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	360	3.126.572.984,00	549.663.000,00	1.054.212.893,00	459	3.631.122.877,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	713	5.258.258.176,00	228.845.600,00	0,00	667	5.029.412.576,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	137	1.161.098.200,00	431.664.000,00	1.484.713.782,00	255	2.214.147.982,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	678	4.658.459.809,00	1.108.315.140,00	2.105.080.251,00	764	5.655.224.920,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	580	6.562.342.807,00	3.202.292.714,00	1.328.223.447,00	662	4.688.273.540,00
33	SKPKD	46	344.055.995,00	0,00	0,00	46	344.055.995,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	1.570	11.168.650.477,00	1.514.550.000,00	3.130.324.384,00	1.898	12.784.424.861,00
35	SEKRETARIAT DPRD	557	6.339.379.999,00	775.400.000,00	934.148.000,00	576	6.498.127.999,00
36	INSPEKTORAT	309	1.820.342.514,00	195.470.000,00	232.631.590,00	317	1.857.504.104,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	572	3.965.233.661,00	390.145.600,00	148.541.400,00	527	3.723.629.461,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	4.735	39.190.642.825,00	11.246.425.099,00	6.746.851.165,00	4.588	34.691.068.891,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	600	6.496.657.338,00	826.154.500,00	1.486.195.499,00	701	7.156.698.337,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	592	6.316.567.890,00	1.360.395.000,00	409.201.000,00	515	5.365.373.890,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	624	4.379.341.812,00	442.170.000,00	1.340.000,00	518	3.938.511.812,00
42	BADAN PENGHUBUNG	140	1.454.229.967,00	53.200.000,00	21.161.142,00	141	1.422.191.109,00
	Jumlah	162.495	873.977.732.532,00	330.957.010.861,00	139.441.516.275,00	133.696	682.462.237.946,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Komputer pada Tahun 2018 sebagai berikut

	Alat Komputer
Saldo Awal	682.462.237.946,00
Penambahan	
Belanja Modal	87.133.967.816,00
Belanja Barang/Jasa	227.779.250,00
Hibah	115.570.468.614,00
Mutasi Masuk	55.325.946.220,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	41.993.709.488,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00

Koreksi	30.705.139.473,00
Jumlah	**330.957.010.861,00**
Berkurang	
Ekstrakomtable	639.260.188,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	2.620.464.981,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	26.633.309.943,00
Mutasi Keluar	55.325.946.220,00
Koreksi	54.222.534.943,00
Jumlah	**139.441.516.275,00**
Grand Total	**873.977.732.532,00**

5.3.1.3.2.11 Alat-Alat Eksplorasi **Rp137.466.622,00**

Saldo Alat Eksplorasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp137.466.622,00 naik sebesar Rp137.466.622,00 dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	41	137.466.622,00	139.453.812,00	1.987.190,00	-	0,00
	Jumlah	**41**	**137.466.622,00**	**139.453.812,00**	**1.987.190,00**	**-**	**0,00**

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Eksplorasi pada Tahun 2018 sebagai berikut

	Alat Eksplorasi
Saldo Awal	0,00
Penambahan	
Belanja Modal	13.366.000,00
Belanja Barang/Jasa	8.425.000,00
Hibah	117.492.812,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	170.000,00
Jumlah	**139.453.812,00**
Berkurang	
Ekstrakomtable	1.987.190,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	0,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	0,00
Jumlah	**1.987.190,00**
Grand Total	**137.466.622,00**

5.3.1.3.2.12 Alat-Alat Pengeboran **Rp0,00**

Saldo Alat Pengeboran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 naik sebesar Rp0,00 atau 0% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00	-	0,00
	Jumlah	**-**	**0,00**	**2.525.000,00**	**2.525.000,00**	**-**	**0,00**

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Pengeboran pada Tahun 2018 sebagai berikut

	Alat Pengeboran
Saldo Awal	0,00
Penambahan	
Belanja Modal	2.125.000,00
Belanja Barang/Jasa	0,00
Hibah	400.000,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	0,00
Jumlah	**2.525.000,00**
Berkurang	
Ekstrakomtable	2.525.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	0,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	0,00
Jumlah	**2.525.000,00**
Grand Total	**0,00**

5.3.1.3.2.13 Alat-Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian **Rp21.877.250,00**

Saldo Alat-Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp21.877.250,00 naik sebesar Rp21.877.250,00 dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3	21.877.250,00	21.877.250,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	3	21.877.250,00	21.877.250,00	0,00	-	0,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Produksi, pengolahan dan pemurnian pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian
Saldo Awal	0,00
Penambahan	
Belanja Modal	13.767.250,00
Belanja Barang/Jasa	0,00
Hibah	8.110.000,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	0,00
Jumlah	**21.877.250,00**
Berkurang	
Ekstrakomtable	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	0,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	0,00
Jumlah	**0,00**
Grand Total	**21.877.250,00**

5.3.1.3.2.14 Alat Bantu Eksplorasi Rp0,00

Saldo Alat Bantu Eksplorasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 naik sebesar Rp0,00atau 0% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

5.3.1.3.2.15 Alat-Alat Keselamatan Kerja Rp1.171.940.107,00

Saldo Alat-alat Keselamatan Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.171.940.107,00 naik sebesar Rp1.171.940.107,00dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	264	1.171.940.107,00	1.204.234.682,00	32.294.575,00	-	0,00
	Jumlah	264	1.171.940.107,00	1.204.234.682,00	32.294.575,00	-	0,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Keselamatan Kerja pada Tahun 2018 sebagai berikut:

	Alat Keselamatan Kerja
Saldo Awal	0,00
Penambahan	
Belanja Modal	202.961.500,00
Belanja Barang/Jasa	19.170.500,00
Hibah	550.417.775,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	431.684.907,00
Jumlah	**1.204.234.682,00**
Berkurang	
Ekstrakomptable	32.294.575,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	0,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	0,00
Jumlah	**32.294.575,00**
Grand Total	**1.171.940.107,00**

5.3.1.3.2.16 Alat-Alat Peraga **Rp64.233.934.980,00**

Saldo Alat-alat Peraga pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp64.233.934.980,00 naik sebesar Rp64.233.934.980,00 dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6.273	64.231.598.580,00	180.472.488.146,00	116.240.889.566,00	-	0,00
2	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	2.336.400,00	2.336.400,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	6.274	64.233.934.980,00	180.474.824.546,00	116.240.889.566,00	-	0,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Peraga pada Tahun 2018 sebagai berikut

	Alat Peraga
Saldo Awal	0,00
Penambahan	
Belanja Modal	114.670.738.006,00
Belanja Barang/Jasa	0,00
Hibah	193.309.520,00
Mutasi Masuk	65.406.598.570,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	2.336.400,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	201.842.050,00
Jumlah	**180.474.824.546,00**

Berkurang	
Ekstrakomptable	1.591.835.060,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	42.638.001.744,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	6.604.454.192,00
Mutasi Keluar	65.406.598.570,00
Koreksi	0,00
Jumlah	**116.240.889.566,00**
Grand Total	**64.233.934.980,00**

5.3.1.3.2.17 Peralatan Proses/Produksi **Rp545.393.550,00**

Saldo Alat Komputer pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp545.393.550,00 naik sebesar Rp545.393.550,00 dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	53	498.945.550,00	502.169.550,00	3.224.000,00	-	0,00
2	RSUD TUGUREJO SEMARANG	1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-	0,00
3	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1	44.948.000,00	44.948.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	55	545.393.550,00	548.617.550,00	3.224.000,00	-	0,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Peralatan Proses/Produksi pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Perltan Proses/Produksi
Saldo Awal	0,00
Penambahan	
Belanja Modal	10.914.000,00
Belanja Barang/Jasa	0,00
Hibah	361.275.550,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	44.948.000,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	131.480.000,00
Jumlah	**548.617.550,00**
Berkurang	
Ekstrakomtable	3.224.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	0,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	0,00
Jumlah	**3.224.000,00**
Grand Total	**545.393.550,00**

5.3.1.3.2.18 Rambu-rambu **Rp4.726.962.634,00**

Saldo Alat Rambu-rambu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.726.962.634,00 naik sebesar Rp4.726.962.634,00 dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8	21.281.200,00	21.281.200,00	0,00	-	0,00
2	DINAS PERHUBUNGAN	9	4.705.681.434,00	4.705.681.434,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**17**	**4.726.962.634,00**	**4.726.962.634,00**	**0,00**	**-**	**0,00**

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Rambu-Rambu pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Rambu-Rambu
Saldo Awal	0,00
Penambahan	
Belanja Modal	7.483.000,00
Belanja Barang/Jasa	0,00
Hibah	13.798.200,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	4.705.681.434,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	0,00
Jumlah	**4.726.962.634,00**
Berkurang	
Ekstrakomtable	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	0,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	0,00
Jumlah	**0,00**
Grand Total	**4.726.962.634,00**

5.3.1.3.2.19 Peralatan Olah Raga **Rp1.158.288.448,00**

Saldo Alat Peralatan Olah Raga pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.158.288.448,00 naik sebesar Rp1.158.288.448,00dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	230	600.773.448,00	756.272.068,00	155.498.620,00	0,00	0,00
2	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	55	160.525.000,00	197.725.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00
3	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	2	396.990.000,00	396.990.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	287	1.158.288.448,00	1.350.987.068,00	192.698.620,00	0,00	0,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Olahraga pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Alat Olahraga
Saldo Awal	0,00
Penambahan	
Belanja Modal	101.707.000,00
Belanja Barang/Jasa	45.279.500,00
Hibah	520.110.385,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	594.715.000,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	89.175.183,00
Jumlah	**1.350.987.068,00**
Berkurang	
Ekstrakomptable	192.698.620,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	0,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	0,00
Jumlah	**192.698.620,00**
Grand Total	**1.158.288.448,00**

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan **Rp6.684.529.796.498,00**

Saldo Gedung dan Bangunan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.684.529.796.498,00 naik sebesar Rp953.723.990.316,00 atau 16,64% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.730.805.806.182,00, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.3.3.1 Gedung **Rp6.574.378.499.506,00**

Saldo Gedung pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.574.378.499.506,00 naik sebesar Rp941.059.903.606,00 atau 16,71% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.633.318.595.900,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	16715	3.763.427.198.480,00	867.772.013.955,00	276.821.094.846,00	15347	3.172.476.279.371,00
2	DINAS KESEHATAN	75	93.077.926.954,00	3.673.476.300,00	2.399.377.300,00	76	91.803.827.954,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	44	300.848.979.108,00	198.038.128.908,00	24.993.620.000,00	44	127.804.470.200,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	23	237.819.272.800,00	45.099.032.000,00	1.347.403.200,00	24	194.067.644.000,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	33	136.191.669.464,00	4.954.001.420,00	2.997.900.420,00	33	134.235.568.464,00
6	RSUD KELET DONOROJO	192	88.703.841.773,00	14.724.160.960,00	10.808.021.280,00	190	84.787.702.093,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	52	78.143.075.965,00	56.291.494.012,00	2.434.362.790,00	49	24.285.944.743,00
8	RSJD SURAKARTA	66	34.125.436.102,00	4.745.636.000,00	4.553.423.000,00	64	33.933.223.102,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	47	45.780.742.980,00	836.132.000,00	0,00	47	44.944.610.980,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	150	19.213.729.366,00	0,00	570.942.600,00	152	19.784.671.966,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	66	19.888.240.000,00	1.606.390.000,00	0,00	54	18.281.850.000,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8	10.177.034.550,00	0,00	0,00	8	10.177.034.550,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	18.452.315.000,00	378.797.000,00	0,00	1	18.073.518.000,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	5.563.661.875,00	0,00	0,00	5	5.563.661.875,00
15	DINAS SOSIAL	767	178.493.759.281,00	7.741.550.500,00	0,00	761	170.752.208.781,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	4	8.523.869.968,00	1.646.086.000,00	0,00	3	6.877.783.968,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	117	52.562.783.646,00	99.550.000,00	159.780.000,00	121	52.623.013.646,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5	21.069.203.665,00	0,00	0,00	5	21.069.203.665,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	187	34.823.495.762,00	5.181.831.905,00	126.956.300,00	152	29.768.620.157,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	12	10.880.153.900,00	1.660.623.000,00	0,00	9	9.219.530.900,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12	9.141.365.037,00	0,00	0,00	12	9.141.365.037,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	351	87.060.349.467,00	7.392.179.916,00	2.738.008.706,00	298	82.406.178.257,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11	5.343.961.874,00	0,00	0,00	11	5.343.961.874,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5	32.218.147.577,00	2.192.274.000,00	543.545.000,00	5	30.569.418.577,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5	7.235.225.985,00	1.546.945.950,00	0,00	3	5.688.280.035,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	90	128.136.867.813,00	149.198.082.572,00	132.607.278.795,00	90	111.546.064.036,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	27	22.594.659.647,00	264.144.000,00	0,00	27	22.330.515.647,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	300	70.762.546.284,00	8.269.280.806,00	2.334.678.795,00	310	64.827.944.273,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	526	126.925.689.057,00	3.283.128.000,00	0,00	524	123.642.561.057,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	417	70.540.068.798,00	10.858.445.150,00	4.910.025.340,00	423	64.591.648.988,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	19	32.875.561.163,00	5.211.418.964,00	0,00	16	27.664.142.199,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	28	83.321.355.473,00	1.179.841.964,00	677.836.379,00	29	82.819.349.888,00
33	SKPKD	86	184.220.138.038,00	0,00	445.254.600,00	87	184.665.392.638,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	43	100.482.406.070,00	0,00	400.729.100,00	44	100.883.135.170,00
35	SEKRETARIAT DPRD	36	31.184.509.665,00	0,00	0,00	36	31.184.509.665,00
36	INSPEKTORAT	3	12.508.329.700,00	0,00	0,00	3	12.508.329.700,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9	19.856.029.483,00	345.352.175,00	0,00	7	19.510.677.308,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	101	231.017.552.595,00	7.368.610.000,00	406.292.000,00	101	224.055.234.595,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	42	86.145.817.783,00	1.463.626.600,00	0,00	39	84.682.191.183,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8	7.566.703.700,00	0,00	0,00	8	7.566.703.700,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	46	55.130.827.632,00	0,00	0,00	46	55.130.827.632,00
42	BADAN PENGHUBUNG	19	12.343.996.026,00	314.200.000,00	0,00	19	12.029.796.026,00
	Jumlah	**20753**	**6.574.378.499.506,00**	**1.413.336.434.057,00**	**472.276.530.451,00**	**19283**	**5.633.318.595.900,00**

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Gedung pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Gedung
Saldo Awal	5.633.318.595.900,00
Penambahan	
Belanja Modal	347.608.023.877,00
Belanja Barang/Jasa	15.304.482.690,00
Hibah	428.918.136.488,00
Mutasi Masuk	27.476.491.533,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	5.302.401.146,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	588.726.898.323,00
Jumlah	**1.413.336.434.057,00**
Berkurang	
Ekstrakomptable	2.431.976.024,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	13.739.448.841,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	11.890.341.957,00
Mutasi Keluar	27.476.491.533,00
Koreksi	416.738.272.096,00
Jumlah	**472.276.530.451,00**
Grand Total	**6.574.378.499.506,00**

5.3.1.3.3.2 Monumen **Rp33.238.553.193,00**

Saldo Aset Monumen pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp33.238.553.193,00 naik sebesar Rp2.299.444.996,00 atau 7,43% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp30.939.108.197,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	69	8.306.086.264,00	1.545.570.000,00	39.478.000,00	60	6.799.994.264,00
2	DINAS KESEHATAN	2	144.162.000,00	0,00	0,00	2	144.162.000,00
3	RSUD KELET DONOROJO	2	223.611.000,00	42.300.000,00	0,00	1	181.311.000,00
4	RSJD SURAKARTA	1	814.052.600,00	0,00	0,00	1	814.052.600,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	1	1.500.000,00	0,00	0,00	1	1.500.000,00
6	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	2	286.009.000,00	0,00	0,00	2	286.009.000,00
7	DINAS SOSIAL	2	32.619.000,00	0,00	0,00	2	32.619.000,00
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2	70.000.000,00	0,00	0,00	2	70.000.000,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2	371.780.000,00	0,00	0,00	2	371.780.000,00
10	DINAS PERHUBUNGAN	51	14.405.571.873,00	0,00	0,00	51	14.405.571.873,00
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	55.937.000,00	0,00	0,00	1	55.937.000,00
12	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	2	3.457.129.820,00	219.601.000,00	0,00	1	3.237.528.820,00
13	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1	7.800.000,00	0,00	0,00	1	7.800.000,00
14	SEKRETARIAT DPRD	32	2.159.601.996,00	531.451.996,00	0,00	27	1.628.150.000,00
15	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	846.935.000,00	0,00	0,00	1	846.935.000,00
16	BADAN PENGHUBUNG	1	2.055.757.640,00	0,00	0,00	1	2.055.757.640,00
	Jumlah	172	33.238.553.193,00	2.338.922.996,00	39.478.000,00	156	30.939.108.197,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Monumen pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Monumen
Saldo Awal	30.939.108.197,00
Penambahan	
Belanja Modal	42.300.000,00
Belanja Barang/Jasa	21.089.000,00
Hibah	1.301.003.000,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	751.052.996,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	223.478.000,00
Jumlah	**2.338.922.996,00**
Berkurang	
Ekstrakomptable	39.478.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	0,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	0,00
Jumlah	**39.478.000,00**
Grand Total	**33.238.553.193,00**

5.3.1.3.3.3 Menara **Rp5.586.043.372,00**

Saldo Aset Menara pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.586.043.372,00 naik sebesar Rp116.000.000,00 atau 2,12% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.470.043.372,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	230	600.773.448,00	756.272.068,00	155.498.620,00	-	0,00
2	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	55	160.525.000,00	197.725.000,00	37.200.000,00	-	0,00
3	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	2	396.990.000,00	396.990.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	287	1.158.288.448,00	1.350.987.068,00	192.698.620,00	-	0,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Menara pada Tahun 2018 sebagai berikut :

Saldo Awal	5.470.043.372,00
Penambahan	
Belanja Modal	0,00
Belanja Barang/Jasa	0,00
Hibah	102.316.551,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	25.000.000,00
Jumlah	**127.316.551,00**

Berkurang	
Ekstrakomptable	11.316.551,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	0,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	0,00
Jumlah	**11.316.551,00**
Grand Total	**5.586.043.372,00**

5.3.1.3.3.4 Tugu Titik Kontrol/Pasti **Rp71.326.700.427,00**

Saldo Aset Tugu Titik Kontrol/Pasti pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp71.326.700.427,00 naik sebesar Rp10.248.641.714,00 atau 16,78% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp61.078.058.713,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	147	18.112.576.588,00	9.320.671.435,00	275.907.000,00	83	9.067.812.153,00
2	DINAS KESEHATAN	4	4.970.666.040,00	0,00	0,00	4	4.970.666.040,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	2	709.981.000,00	0,00	0,00	2	709.981.000,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	1	508.200.000,00	0,00	0,00	1	508.200.000,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	4	423.613.269,00	0,00	0,00	4	423.613.269,00
6	RSUD KELET DONOROJO	13	4.467.220.000,00	0,00	0,00	13	4.467.220.000,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	1	175.858.000,00	0,00	0,00	1	175.858.000,00
8	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	5	1.157.030.081,00	88.419.000,00	0,00	5	1.068.611.081,00
9	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	8	723.130.375,00	0,00	0,00	8	723.130.375,00
10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	0,00	0,00	1.153.018.000,00	1	1.153.018.000,00
11	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2	101.650.000,00	0,00	0,00	2	101.650.000,00
12	DINAS SOSIAL	3	270.480.000,00	0,00	0,00	3	270.480.000,00
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	459.123.000,00	0,00	0,00	1	459.123.000,00
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6	547.222.000,00	198.900.000,00	8.700.000,00	5	357.022.000,00
15	DINAS KETAHANAN PANGAN	2	367.060.000,00	0,00	0,00	2	367.060.000,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	1	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	-	0,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	1	110.020.000,00	0,00	0,00	1	110.020.000,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
	TERPADU SATU PINTU						
18	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	5	662.949.591,00	0,00	0,00	5	662.949.591,00
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4	342.880.670,00	0,00	0,00	4	342.880.670,00
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	16	2.094.647.000,00	253.353.000,00	69.800.000,00	15	1.911.094.000,00
21	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	59	12.449.691.812,00	0,00	0,00	59	12.449.691.812,00
22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	26	3.665.602.957,00	0,00	433.873.721,00	30	4.099.476.678,00
23	SKPKD	13	1.812.804.200,00	0,00	0,00	13	1.812.804.200,00
24	SEKRETARIAT DPRD	3	184.865.000,00	531.451.996,00	531.451.996,00	3	184.865.000,00
25	INSPEKTORAT	1	14.310.000,00	0,00	0,00	1	14.310.000,00
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1	94.220.000,00	0,00	0,00	1	94.220.000,00
27	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	2	1.012.590.510,00	0,00	10.520.844.000,00	9	11.533.434.510,00
28	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	36	14.333.520.184,00	12.873.841.000,00	44.900.000,00	17	1.504.579.184,00
29	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	3	1.534.288.150,00	0,00	0,00	3	1.534.288.150,00
	Jumlah	**370**	**71.326.700.427,00**	**23.287.136.431,00**	**13.038.494.717,00**	**296**	**61.078.058.713,00**

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti
Saldo Awal	61.078.058.713,00
Penambahan	
Belanja Modal	2.018.749.996,00
Belanja Barang/Jasa	268.737.900,00
Hibah	5.857.659.735,00
Mutasi Masuk	11.673.862.000,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	3.468.126.800,00
Jumlah	**23.287.136.431,00**

Berkurang	
Ekstrakomptable	169.507.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	531.451.996,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	478.273.721,00
Mutasi Keluar	11.673.862.000,00
Koreksi	185.400.000,00
Jumlah	**13.038.494.717,00**
Grand Total	**71.326.700.427,00**

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp9.493.846.459.345,00

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.493.846.459.345,00 turun sebesar Rp241.560.445.461,00 atau 2,48% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.735.406.904.806,00, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.3.4.1. Jalan dan Jembatan Rp8.198.942.527.533,00

Saldo Jalan dan Jembatan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.198.942.527.533,00 turun sebesar Rp392.936.295.694,00 atau 4,57% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp8.591.878.823.227,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	191	15.192.543.526,00	4.805.919.004,00	102.465.000,00	158	10.489.089.522,00
2	DINAS KESEHATAN	2	117.825.000,00	0,00	0,00	2	117.825.000,00
3	RSUD TUGUREJO SEMARANG	2	121.968.158,00	0,00	0,00	2	121.968.158,00
4	RSUD KELET DONOROJO	16	3.792.813.625,00	172.474.000,00	0,00	15	3.620.339.625,00
5	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	5	2.895.101.000,00	0,00	0,00	5	2.895.101.000,00
6	RSJD SURAKARTA	6	2.053.018.611,00	0,00	0,00	6	2.053.018.611,00
7	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	1	96.997.000,00	0,00	0,00	1	96.997.000,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	2.019	8.112.746.844.672,00	800.301.104.524,00	1.201.092.027.030,00	2.136	8.513.537.767.178,00
9	DINAS SOSIAL	3	52.859.000,00	0,00	0,00	3	52.859.000,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	14	6.034.458.500,00	415.852.000,00	0,00	11	5.618.606.500,00
11	DINAS PERHUBUNGAN	26	15.210.305.903,00	2.273.327.808,00	0,00	22	12.936.978.095,00
12	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	3	817.042.818,00	0,00	0,00	3	817.042.818,00
13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8	3.009.251.500,00	220.974.000,00	82.893.000,00	9	2.871.170.500,00
14	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	16	4.357.656.500,00	0,00	0,00	16	4.357.656.500,00

15	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	15	2.852.914.250,00	236.998.000,00	85.560.000,00	13	2.701.476.250,00
16	SKPKD	1	26.900.626.970,00	0,00	0,00	1	26.900.626.970,00
17	SEKRETARIAT DPRD	1	387.415.000,00	0,00	0,00	1	387.415.000,00
18	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2	2.302.885.500,00	0,00	0,00	2	2.302.885.500,00
	Jumlah	**2.331**	**8.198.942.527.533,00**	**808.426.649.336,00**	**1.201.362.945.030,00**	**2.406**	**8.591.878.823.227,00**

Saldo Akhir sebesar Rp8.198.942.527.533,00 termasuk didalamnya Jalan akses menuju Bandara A Yani Semarang seluas 11.878m^2 yang diklaim berada di atas tanah milik PT PRPP seluas 42.730m$^{2.}$

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Peralatan Proses/Produksi pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Jalan dan Jembatan
Saldo Awal	8.591.878.823.227,00
Penambahan	
Belanja Modal	465.381.884.841,00
Belanja Barang/Jasa	73.357.750,00
Hibah	2.088.381.854,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	1.804.154.208,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	339.078.870.683,00
Jumlah	**808.426.649.336,00**
Berkurang	
Ekstrakomtable	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	52.741.823.050,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	667.203.000,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	1.147.953.918.980,00
Jumlah	**1.201.362.945.030,00**
Grand Total	**8.198.942.527.533,00**

5.3.1.3.4.2. Bangunan Air/Irigasi — Rp1.098.559.172.915,00

Saldo Bangunan Air/Irigasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.098.559.172.915,00naik sebesar Rp133.401.316.446,00 atau 13,82% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp965.157.856.469,00**,** dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	324	12.319.487.468,00	3.760.305.253,00	221.300.000,00	264	8.780.482.215,00
2	DINAS KESEHATAN	8	666.935.000,00	48.500.000,00	0,00	7	618.435.000,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	7	2.224.866.415,00	393.514.000,00	0,00	7	1.831.352.415,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	1	175.000.000,00	0,00	0,00	1	175.000.000,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	18	1.346.355.625,00	0,00	0,00	18	1.346.355.625,00
6	RSUD KELET DONOROJO	25	4.019.596.500,00	0,00	0,00	25	4.019.596.500,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	1	98.529.000,00	0,00	0,00	1	98.529.000,00
8	RSJD SURAKARTA	2	100.621.000,00	0,00	0,00	2	100.621.000,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	7	1.180.539.500,00	0,00	0,00	7	1.180.539.500,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	2.695	141.155.393.430,00	9.167.970.477,00	1.654.000.000,00	2.690	133.641.422.953,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	699	781.195.238.541,00	109.328.769.374,00	377.236.000,00	660	672.243.705.167,00
12	DINAS SOSIAL	30	2.187.433.069,00	738.097.000,00	0,00	26	1.449.336.069,00
13	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	7	89.000.000,00	0,00	0,00	7	89.000.000,00
14	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	4.317.600,00	0,00	0,00	1	4.317.600,00
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	34	3.574.787.654,00	2.267.900.400,00	0,00	11	1.306.887.254,00
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	2	164.387.000,00	0,00	0,00	2	164.387.000,00
17	DINAS PERHUBUNGAN	17	15.186.490.630,00	160.991.600,00	0,00	15	15.025.499.030,00
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4	223.370.000,00	0,00	0,00	4	223.370.000,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	85.794.000,00	0,00	0,00	1	85.794.000,00
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	4	314.630.091,00	263.550.000,00	0,00	2	51.080.091,00
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2	190.275.000,00	0,00	0,00	2	190.275.000,00
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	78	94.637.898.964,00	6.420.606.542,00	373.727.700,00	68	88.591.020.122,00
23	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	102	14.728.726.744,00	565.382.000,00	0,00	95	14.163.344.744,00
24	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	28	1.763.093.900,00	757.327.500,00	10.000.000,00	22	1.015.766.400,00
25	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	135	19.649.785.784,00	2.164.666.000,00	0,00	121	17.485.119.784,00
26	SEKRETARIAT DPRD	14	1.173.201.000,00	0,00	0,00	14	1.173.201.000,00
27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	10.150.000,00	0,00	0,00	1	10.150.000,00
28	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	1	93.269.000,00	0,00	0,00	1	93.269.000,00
	Jumlah	4.248	1.098.559.172.915,00	136.037.580.146,00	2.636.263.700,00	4.075	965.157.856.469,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Bangunan Air pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Bangunan Air
Saldo Awal	965.157.856.469,00
Penambahan	
Belanja Modal	120.725.608.814,00
Belanja Barang/Jasa	751.681.500,00
Hibah	4.005.866.353,00
Mutasi Masuk	176.000.000,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	9.962.457.477,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	415.966.002,00
Jumlah	**136.037.580.146,00**
Berkurang	
Ekstrakomtable	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	377.236.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	383.727.700,00
Mutasi Keluar	176.000.000,00
Koreksi	1.699.300.000,00
Jumlah	**2.636.263.700,00**
Grand Total	**1.098.559.172.915,00**

5.3.1.3.4.3. Instalasi — Rp119.351.735.676,00

Saldo Instalasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp119.351.735.676,00 naik sebesar Rp6.699.274.129,00 atau 5,95% dibandingkan per31 Desember 2017 sebesar Rp112.652.461.547,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	565	10.487.355.995,00	2.099.247.719,00	198.889.200,00	487	8.586.997.476,00
2	DINAS KESEHATAN	29	3.655.115.800,00	188.267.000,00	0,00	28	3.466.848.800,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	6	1.257.179.700,00	2.649.426.700,00	1.685.286.000,00	1	293.039.000,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	65	15.520.702.735,00	0,00	0,00	65	15.520.702.735,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	20	23.421.906.495,00	0,00	0,00	20	23.421.906.495,00
6	RSUD KELET DONOROJO	26	3.017.002.965,00	0,00	0,00	26	3.017.002.965,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	1	44.538.000,00	0,00	0,00	1	44.538.000,00
8	RSJD SURAKARTA	7	3.345.218.391,00	0,00	813.041.900,00	8	4.158.260.291,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	2	3.592.316.129,00	0,00	0,00	2	3.592.316.129,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	2	137.554.120,00	214.297.000,00	214.297.000,00	2	137.554.120,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	13	464.561.567,00	28.594.000,00	0,00	13	435.967.567,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2	111.870.000,00	0,00	0,00	2	111.870.000,00
13	DINAS SOSIAL	2	25.000.000,00	0,00	0,00	2	25.000.000,00
14	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	1	91.433.000,00	0,00	0,00	1	91.433.000,00
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	13	664.890.192,00	99.550.000,00	0,00	12	565.340.192,00
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	17	1.253.926.013,00	17.710.300,00	0,00	14	1.236.215.713,00
17	DINAS KETAHANAN PANGAN	1	25.900.000,00	0,00	0,00	1	25.900.000,00
18	DINAS PERHUBUNGAN	256	5.841.730.878,00	57.024.000,00	0,00	253	5.784.706.878,00
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14	349.662.000,00	84.250.000,00	0,00	13	265.412.000,00
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	3	225.454.455,00	0,00	0,00	3	225.454.455,00
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	20	1.810.451.000,00	777.531.000,00	566.251.000,00	19	1.599.171.000,00
22	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	18	277.957.086,00	53.935.000,00	0,00	17	224.022.086,00
23	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	28	1.970.720.975,00	0,00	87.978.500,00	31	2.058.699.475,00
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.005	37.253.896.814,00	3.773.528.760,00	0,00	1.003	33.480.368.054,00
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2	50.751.450,00	23.156.250,00	0,00	1	27.595.200,00
26	SEKRETARIAT DAERAH	59	1.867.950.925,00	198.500.000,00	0,00	58	1.669.450.925,00
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2	647.598.000,00	0,00	0,00	2	647.598.000,00
28	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	3	233.186.880,00	0,00	0,00	3	233.186.880,00
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	416.219.083,00	0,00	0,00	6	416.219.083,00
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3	799.998.000,00	0,00	0,00	3	799.998.000,00
31	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	5	444.025.550,00	0,00	0,00	5	444.025.550,00
32	BADAN PENGHUBUNG	65	45.661.478,00	0,00	0,00	65	45.661.478,00
	Jumlah	**2.261**	**119.351.735.676,00**	**10.265.017.729,00**	**3.565.743.600,00**	**2.167**	**112.652.461.547,00**

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Instalasi pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Instalasi
Saldo Awal	112.652.461.547,00
Penambahan	
Belanja Modal	4.105.008.350,00
Belanja Barang/Jasa	251.128.700,00
Hibah	4.634.281.729,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	103.350.000,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	1.171.248.950,00
Jumlah	**10.265.017.729,00**
Berkurang	
Ekstrakomptable	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	2.045.417.500,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	901.020.400,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	619.305.700,00
Jumlah	**3.565.743.600,00**
Grand Total	**119.351.735.676,00**

5.3.1.3.4.4. Jaringan — Rp76.993.023.221,00

Saldo Aset Jaringan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp76.993.023.221,00 naik sebesar Rp11.275.259.658,00 atau 17,16% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp65.717.763.563,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	921	14.899.778.991,00	3.591.067.221,00	461.664.750,00	831	11.770.376.520,00
2	DINAS KESEHATAN	17	884.845.050,00	10.300.400,00	0,00	16	874.544.650,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	1	138.715.000,00	138.715.000,00	0,00	-	0,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	9	4.211.762.949,00	368.292.000,00	0,00	7	3.843.470.949,00
5	RSUD KELET DONOROJO	7	1.520.825.550,00	0,00	0,00	7	1.520.825.550,00
6	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	7	1.369.161.390,00	0,00	0,00	7	1.369.161.390,00
7	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	1	17.774.664,00	0,00	0,00	1	17.774.664,00
8	DINAS SOSIAL	5	82.834.000,00	0,00	0,00	5	82.834.000,00
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	107.706.800,00	23.236.800,00	0,00	2	84.470.000,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	13	1.245.760.100,00	0,00	0,00	13	1.245.760.100,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	6	98.208.800,00	0,00	0,00	6	98.208.800,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
12	DINAS PERHUBUNGAN	863	16.519.429.940,00	6.447.544.000,00	0,00	528	10.071.885.940,00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	113.983.400,00	0,00	0,00	3	113.983.400,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	5.744.873,00	0,00	0,00	1	5.744.873,00
15	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	4	613.286.177,00	24.980.000,00	0,00	3	588.306.177,00
16	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1	16.700.000,00	0,00	0,00	1	16.700.000,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	17	461.532.987,00	33.602.987,00	0,00	16	427.930.000,00
18	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	18	1.238.625.000,00	0,00	0,00	18	1.238.625.000,00
19	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	26	1.019.793.000,00	114.300.000,00	6.950.000,00	25	912.443.000,00
20	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.086	31.308.655.100,00	925.309.000,00	0,00	3.085	30.383.346.100,00
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5	291.919.700,00	0,00	0,00	5	291.919.700,00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	617.647.750,00	0,00	114.720.000,00	5	732.367.750,00
23	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	17	12.400.000,00	0,00	0,00	17	12.400.000,00
24	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2	195.932.000,00	181.247.000,00	0,00	1	14.685.000,00
	Jumlah	**5.039**	**76.993.023.221,00**	**11.858.594.408,00**	**583.334.750,00**	**4.603**	**65.717.763.563,00**

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Jaringan pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Jaringan
Saldo Awal	65.717.763.563,00
Penambahan	
Belanja Modal	8.186.201.087,00
Belanja Barang/Jasa	357.050.200,00
Hibah	2.009.366.126,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	138.715.000,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	1.167.261.995,00
Jumlah	**11.858.594.408,00**

Berkurang	
Ekstrakomptable	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	121.670.000,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	461.664.750,00
Jumlah	**583.334.750,00**
Grand Total	**76.993.023.221,00**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya — Rp1.140.360.927.708,00

Saldo Aset Tetap Lainnya pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.140.360.927.708,00 naik sebesar Rp159.824.017.269,00 atau 16,30% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp980.536.910.439,00,dengan rincian sebagai berikut :

5.3.1.3.5.1. Buku Perpustakaan — Rp1.084.526.012.901,00

Saldo Buku Perpustakaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.084.526.012.901,00 naik sebesar Rp157.979.481.752,00 atau 17,05% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp926.546.531.149,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	16.447.299	1.064.554.803.550,00	193.487.287.209,00	36.663.229.035,00	12.317.887	907.730.745.376,00
2	DINAS KESEHATAN	935	152.321.050,00	0,00	0,00	935	152.321.050,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	5.316	388.670.790,00	0,00	0,00	5.316	388.670.790,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	1.246	175.990.606,00	17.481.420,00	133.105.810,00	2.479	291.614.996,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	785	290.669.831,00	4.700.000,00	0,00	784	285.969.831,00
6	RSUD KELET DONOROJO	3.995	337.390.600,00	0,00	0,00	3.995	337.390.600,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	292	37.495.350,00	0,00	0,00	292	37.495.350,00
8	RSJD SURAKARTA	783	12.632.230,00	0,00	0,00	783	12.632.230,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	1.621	64.377.830,00	705.000,00	0,00	1.616	63.672.830,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	2.088	279.267.300,00	0,00	0,00	2.088	279.267.300,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	811	86.412.066,00	0,00	1.560.800,00	843	87.972.866,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	535	101.429.400,00	25.100.000,00	0,00	361	76.329.400,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	109	23.700.000,00	22.200.000,00	14.704.000,00	188	16.204.000,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.061	80.619.400,00	0,00	0,00	1.061	80.619.400,00
15	DINAS SOSIAL	8.328	449.299.800,00	0,00	900.000,00	8.334	450.199.800,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	503	55.083.955,00	1.661.000,00	0,00	484	53.422.955,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.697	129.988.870,00	6.161.150,00	0,00	1.633	123.827.720,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	665	51.144.000,00	771.000,00	0,00	642	50.373.000,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.502	857.750.765,00	18.558.000,00	0,00	3.499	839.192.765,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.329	103.501.200,00	0,00	0,00	2.329	103.501.200,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	791	106.340.000,00	3.300.000,00	0,00	768	103.040.000,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	136	26.090.000,00	0,00	0,00	136	26.090.000,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.372	241.590.185,00	9.980.000,00	0,00	3.212	231.610.185,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.642	135.443.600,00	0,00	0,00	1.642	135.443.600,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	3.393	237.609.500,00	49.452.000,00	0,00	2.787	188.157.500,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	355.946	11.606.259.479,00	1.110.189.840,00	0,00	338.346	10.496.069.639,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.920	512.347.698,00	0,00	86.383.972,00	12.038	598.731.670,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	2.511	171.418.131,00	368.100,00	0,00	2.505	171.050.031,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3.230	129.624.250,00	19.950.000,00	0,00	3.229	109.674.250,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.431	316.956.000,00	20.080.000,00	7.781.000,00	2.505	304.657.000,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.578	194.922.390,00	8.484.000,00	783.500,00	1.546	187.221.890,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	14.205	1.340.094.620,00	18.136.000,00	0,00	14.084	1.321.958.620,00
35	SEKRETARIAT DPRD	1.616	280.939.983,00	26.997.000,00	0,00	1.456	253.942.983,00
36	INSPEKTORAT	102	12.156.200,00	8.729.200,00	28.634.050,00	2.819	32.061.050,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.148	341.304.950,00	13.695.000,00	0,00	2.063	327.609.950,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	452	55.984.000,00	0,00	0,00	452	55.984.000,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.700	86.748.872,00	9.078.000,00	0,00	1.658	77.670.872,00
40	ADAN KEPEGAWAIAN AERAH	891	31.993.100,00	4.000.000,00	0,00	805	27.993.100,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2.927	465.641.350,00	29.500.000,00	0,00	2.657	436.141.350,00
	Jumlah	**16.891.891**	**1.084.526.012.901,00**	**194.916.563.919,00**	**36.937.082.167,00**	**12.750.257**	**926.546.531.149,00**

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Buku Perpustakaan pada Tahun 2018 sebagai berikut:

	Buku Perpustakaan
Saldo Awal	926.546.531.149,00
Penambahan	
Belanja Modal	117.033.346.567,00
Belanja Barang/Jasa	110.007.100,00
Hibah	38.298.734.429,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	20.655.000,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	39.453.820.823,00
Jumlah	**194.916.563.919,00**
Berkurang	
Ekstrakomptable	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	273.853.132,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	36.663.229.035,00
Jumlah	**36.937.082.167,00**
Grand Total	**1.084.526.012.901,00**

5.3.1.3.5.2. Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan **Rp45.126.247.229,00**

Saldo Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp45.126.247.229,00 naik sebesar Rp1.932.720.107,00 atau 4,47% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp43.193.527.122,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	61.528	34.073.947.188,00	3.789.050.556,00	1.659.291.797,00	54.411	31.944.188.429,00
2	DINAS KESEHATAN	159	195.101.000,00	0,00	0,00	159	195.101.000,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	9	38.409.000,00	0,00	0,00	9	38.409.000,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	10	241.178.500,00	0,00	0,00	10	241.178.500,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	102	109.355.500,00	0,00	0,00	102	109.355.500,00
6	RSUD KELET DONOROJO	137	739.760.250,00	0,00	0,00	137	739.760.250,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	5	224.335.750,00	0,00	0,00	5	224.335.750,00
8	RSJD SURAKARTA	213	91.390.000,00	0,00	46.525.000,00	220	137.915.000,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	17	117.295.000,00	0,00	0,00	17	117.295.000,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	14	2.150.635,00	0,00	46.365,00	26	2.197.000,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3	170.000,00	0,00	0,00	3	170.000,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	0,00	0,00	350.000,00	3	350.000,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	0,00	0,00	1.550.000,00	4	1.550.000,00
15	DINAS SOSIAL	391	664.956.300,00	0,00	96.977.801,00	453	761.934.101,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	7	875.000,00	0,00	0,00	7	875.000,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	31	79.613.505,00	0,00	0,00	31	79.613.505,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	22.215.000,00	0,00	0,00	4	22.215.000,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	93	432.822.000,00	66.837.500,00	0,00	88	365.984.500,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	8	3.481.000,00	0,00	0,00	8	3.481.000,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9	171.000,00	0,00	0,00	9	171.000,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	28	396.311.440,00	0,00	0,00	28	396.311.440,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	233	1.731.871.990,00	10.500.000,00	0,00	232	1.721.371.990,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5	10.688.571,00	0,00	0,00	5	10.688.571,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8	200.484.000,00	0,00	0,00	8	200.484.000,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	32	119.582.850,00	15.000.000,00	8.633.625,00	97	113.216.475,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	4	23.750.000,00	0,00	0,00	4	23.750.000,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	35	154.311.000,00	0,00	0,00	35	154.311.000,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	84	314.814.486,00	0,00	17.280.294,00	110	332.094.780,00
33	SKPKD	1	13.985.000,00	0,00	0,00	1	13.985.000,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	72	406.659.342,00	0,00	10.500.000,00	73	417.159.342,00
35	SEKRETARIAT DPRD	244	518.273.000,00	0,00	0,00	244	518.273.000,00
36	INSPEKTORAT	1	2.000.000,00	0,00	0,00	1	2.000.000,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3	24.600.000,00	0,00	200.000,00	5	24.800.000,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	180	418.395.000,00	49.000.000,00	0,00	178	369.395.000,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	16	94.347.290,00	0,00	550.000,00	24	94.897.290,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	20	160.500.000,00	0,00	0,00	20	160.500.000,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	58	439.635.970,00	0,00	0,00	58	439.635.970,00
42	BADAN PENGHUBUNG	600	3.058.810.662,00	2.000.000,00	157.763.067,00	622	3.214.573.729,00
	Jumlah	64.364	45.126.247.229,00	3.932.388.056,00	1.999.667.949,00	57.451	43.193.527.122,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Corak Budaya pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Corak Budaya
Saldo Awal	43.193.527.122,00
Penambahan	
Belanja Modal	618.584.684,00
Belanja Barang/Jasa	16.250.000,00
Hibah	2.749.320.377,00
Mutasi Masuk	10.500.000,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	49.000.000,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	488.732.995,00
Jumlah	**3.932.388.056,00**
Berkurang	
Ekstrakomptable	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	329.876.152,00
Mutasi Keluar	10.500.000,00
Koreksi	1.659.291.797,00
Jumlah	**1.999.667.949,00**
Grand Total	**45.126.247.229,00**

5.3.1.3.5.3. Hewan Ternak **Rp9.692.801.655,00**

Saldo Hewan Ternak pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.692.801.655,00 turun sebesar Rp279.896.465,00 atau 2,81% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.972.698.120,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.120	142.645.560,00	52.785.200,00	100.927.325,00	1.952	190.787.685,00
2	DINAS KESEHATAN	4	3.300.000,00	0,00	0,00	4	3.300.000,00
3	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6	9.500.000,00	0,00	0,00	6	9.500.000,00
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	27	164.572.000,00	15.750.000,00	0,00	26	148.822.000,00
5	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	-	0,00	0,00	70.950.000,00	30	70.950.000,00
6	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	8.204	9.372.784.095,00	2.111.236.000,00	2.287.790.340,00	15.998	9.549.338.435,00
	Jumlah	**9.361**	**9.692.801.655,00**	**2.179.771.200,00**	**2.459.667.665,00**	**18.016**	**9.972.698.120,00**

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Hewan pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Hewan
Saldo Awal	9.972.698.120,00
Penambahan	
Belanja Modal	2.178.623.000,00
Belanja Barang/Jasa	0,00
Hibah	50.200,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	1.098.000,00
Jumlah	**2.179.771.200,00**
Berkurang	
Ekstrakomptable	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	2.287.790.340,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	171.877.325,00
Jumlah	**2.459.667.665,00**
Grand Total	**9.692.801.655,00**

5.3.1.3.5.4. Biota Perairan **Rp1.155.200,00**

Saldo Biota Perairan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.155.200,00 naik sebesar Rp1.005.200,00 atau 670,13% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp150.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	20	1.155.200,00	1.005.200,00	0,00	7	150.000,00
	Jumlah	**20**	**1.155.200,00**	**1.005.200,00**	**0,00**	**7**	**150.000,00**

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Biota Perairan pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Biota Perairan
Saldo Awal	150.000,00
Penambahan	
Belanja Modal	0,00
Belanja Barang/Jasa	0,00
Hibah	9.200,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	996.000,00
Jumlah	**1.005.200,00**
Berkurang	
Ekstrakomtable	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	0,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	0,00
Jumlah	**0,00**
Grand Total	**1.155.200,00**

5.3.1.3.5.5. Tanaman **Rp1.005.710.723,00**

Saldo Tanaman pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.005.710.723,00 naik sebesar Rp181.706.675,00 atau 22,05% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp824.004.048,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.552	594.190.890,00	182.226.200,00	519.525,00	2.988	412.484.215,00
2	DINAS KESEHATAN	1	34.650.000,00	0,00	0,00	1	34.650.000,00
3	RSUD TUGUREJO SEMARANG	5	295.101.633,00	0,00	0,00	5	295.101.633,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	42	39.465.000,00	0,00	0,00	42	39.465.000,00
5	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	1	42.303.200,00	0,00	0,00	1	42.303.200,00
	Jumlah	3.601	1.005.710.723,00	182.226.200,00	519.525,00	3.037	824.004.048,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Tanaman pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Tanaman
Saldo Awal	824.004.048,00
Penambahan	
Belanja Modal	122.520.000,00
Belanja Barang/Jasa	0,00
Hibah	44.337.200,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	15.369.000,00
Jumlah	**182.226.200,00**
Berkurang	
Ekstrakomtable	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	0,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	519.525,00
Jumlah	**519.525,00**
Grand Total	**1.005.710.723,00**

5.3.1.3.5.6. Barang Koleksi/ Non Budaya **Rp9.000.000,00**

Saldo Barang Koleksi/ Non Budaya pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.000.000,00 naik sebesar Rp9.000.000,00 dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	120	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	120	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	-	0,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Barang Koleksi Non Budaya pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Barang Koleksi Non Budaya
Saldo Awal	0,00
Penambahan	
Belanja Modal	9.000.000,00
Belanja Barang/Jasa	0,00
Hibah	0,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	0,00
Jumlah	**9.000.000,00**

Berkurang	
Ekstrakomtable	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	0,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	0,00
Jumlah	**0,00**
Grand Total	**9.000.000,00**

5.3.1.3.5.7Aset Tetap Dalam Renovasi **Rp0,00**

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 naik sebesar Rp0,00 atau 0% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	0,00	264.144.000,00	264.144.000,00	-	0,00
2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	0,00	261.471.800,00	261.471.800,00	-	0,00
3	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	0,00	3.837.745.300,00	3.837.745.300,00	-	0,00
	Jumlah	**-**	**0,00**	**4.363.361.100,00**	**4.363.361.100,00**	**-**	**0,00**

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Aset Tetap Renovasi pada Tahun 2018 sebagai berikut:

	Aset Tetap Renovasi
Saldo Awal	0,00
Penambahan	
Belanja Modal	4.363.361.100,00
Belanja Barang/Jasa	0,00
Hibah	0,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	0,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	0,00
Jumlah	**4.363.361.100,00**
Berkurang	
Ekstrakomptable	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	2.073.578.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	0,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	2.289.783.100,00
Jumlah	**4.363.361.100,00**
Grand Total	**0,00**

5.3.1.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan **Rp373.197.004.923,00**

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp373.197.004.923,00 naik sebesar Rp20.121.365.998,00 atau 5,70%dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp353.075.638.925,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	62	37.577.146.041,00	5.081.379.570,00	4.136.079.400,00	65	36.631.845.871,00
2	RSUD Dr. MOEWARDI	2	24.181.838.248,00	23.087.344.848,00	139.167.921.710,00	4	140.262.415.110,00
3	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	2	592.322.000,00	592.322.000,00	0,00	-	0,00
4	RSUD TUGUREJO SEMARANG	1	6.970.409.120,00	2.997.900.420,00	0,00	1	3.972.508.700,00
5	RSUD KELET DONOROJO	-	0,00	0,00	2.597.044.380,00	1	2.597.044.380,00
6	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	1	99.231.000,00	99.231.000,00	47.367.485.101,00	3	47.367.485.101,00
7	RSJD SURAKARTA	4	17.553.906.333,00	5.481.374.083,00	0,00	2	12.072.532.250,00
8	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	1	40.911.600,00	0,00	0,00	1	40.911.600,00
9	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	33	47.841.636.573,00	43.573.852.573,00	0,00	17	4.267.784.000,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	3	2.579.936.373,00	0,00	0,00	3	2.579.936.373,00
11	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	70.086.000,00	0,00	0,00	1	70.086.000,00
12	DINAS SOSIAL	2	109.144.000,00	109.144.000,00	0,00	-	0,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2	275.026.500,00	0,00	0,00	2	275.026.500,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	10	1.097.851.800,00	352.104.300,00	0,00	4	745.747.500,00
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	0,00	0,00	98.736.000,00	2	98.736.000,00
16	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	18	233.486.420.335,00	132.022.197.795,00	49.760.000,00	7	101.513.982.540,00
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1	133.276.000,00	0,00	0,00	1	133.276.000,00
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	100.250.000,00	100.250.000,00	0,00	-	0,00
19	SEKRETARIAT DPRD	1	180.000.000,00	0,00	0,00	1	180.000.000,00
20	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN	1	41.292.000,00	41.292.000,00	0,00	-	0,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
	DAERAH						
21	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	1	229.773.000,00	0,00	0,00	1	229.773.000,00
22	BADAN PENGHUBUNG	1	36.548.000,00	0,00	0,00	1	36.548.000,00
	Jumlah	**148**	**373.197.004.923,00**	**213.538.392.589,00**	**193.417.026.591,00**	**117**	**353.075.638.925,00**

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2018 sebagai berikut :

	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Saldo Awal	353.075.638.925,00
Penambahan	
Belanja Modal	0,00
Belanja Barang/Jasa	1.660.361.000,00
Hibah	2.536.951.000,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	50.116.242.916,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	159.224.837.673,00
Jumlah	**213.538.392.589,00**
Berkurang	
Ekstrakomtable	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	2.646.599.380,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	0,00
Mutasi Keluar	0,00
Koreksi	190.770.427.211,00
Jumlah	**193.417.026.591,00**
Grand Total	**373.197.004.923,00**

Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp373.197.004.923,00 termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan pada RSJD Surakarta untuk pembangunan Gedung Rawat Inap Lima Lantai Tahap II dilaksanakan oleh PT Pilar Cadas Putra berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 027/5985/09/2018 tanggal 3 September 2018 senilai Rp22.767.115.000,00 yang mengalami putus kontrak.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan (Rp11.412.798.518.733,90)

Saldo Akumulasi Penyusutan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar (Rp11.412.798.518.733,90) naik sebesar (Rp391.877.848.634,73) atau 3,55% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar (Rp11.021.353.520.343,90). Rincian akumulasi penyusutan per jenis aset sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BESAR	173.815.560.607,34	155.517.191.726,60
2	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN	341.879.486.702,15	313.462.681.724,89
3	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	184.704.976.277,00	235.840.064.057,80
4	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERTANIAN	43.134.653.725,50	40.609.316.602,25
5	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	910.179.304.787,80	833.276.826.024,00
6	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	164.186.251.902,90	152.500.820.362,80
7	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1.078.027.534.908,30	870.801.380.250,60
8	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT LABORATORIUM	276.254.449.664,85	247.933.254.688,42
9	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERSENJATAAN	5.362.663.695,75	4.551.473.236,50
10	AKUMULASI PENYUSUTAN KOMPUTER	660.939.406.574,00	541.705.653.173,75
11	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT EKSPLORASI	29.881.086,60	0,00
12	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PENGEBORAN	0,00	0,00
13	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PEMURNIAN	2.584.725,00	0,00
14	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00	0,00
15	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KESELAMATAN KERJA	586.710.852,00	0,00
16	AKUMULASI PENYUSUTAN PERAGA	6.452.958.778,00	0,00
17	AKUMULASI PENYUSUTAN PROSES/PRODUKSI	105.859.193,75	0,00
18	AKUMULASI PENYUSUTAN RAMBU - RAMBU	590.870.329,26	0,00
19	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN OLAH RAGA	443.217.881,50	0,00
20	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG	1.663.601.444.961,69	1.497.699.662.340,49
21	AKUMULASI PENYUSUTAN MONUMEN	5.970.287.261,22	4.747.894.073,88
22	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN MENARA	783.561.742,98	659.359.534,78
23	AKUMULASI PENYUSUTAN TUGU TITIK KONTROL/PASTI	9.769.824.055,33	7.832.744.755,31
24	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN	5.624.510.869.088,55	5.901.795.404.188,20
25	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR	230.065.428.015,83	187.167.993.299,69
26	AKUMULASI PENYUSUTAN AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI	20.029.603.666,26	16.552.603.723,88
27	AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN	10.943.935.554,40	8.699.196.580,06
28	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	427.192.696,00	0,00
	Jumlah	**11.412.798.518.733,90**	**11.021.353.520.343,90**

a. Alat Besar

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9.045.010.886,01	7.520.932.775,00
2	DINAS KESEHATAN	3.636.745.125,00	3.099.602.100,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	8.259.993.935,63	5.703.951.829,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	13.867.568.197,76	11.716.028.278,76
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	5.481.427.446,50	4.639.512.846,38
6	RSUD KELET DONOROJO	2.499.222.514,00	2.250.114.420,25
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	1.863.292.875,00	1.963.012.125,00
8	RSJD SURAKARTA	1.274.536.875,00	1.049.422.500,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	682.526.674,00	562.483.549,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	61.015.994.958,93	55.826.072.198,32
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	14.382.847.334,50	14.361.146.348,00
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	320.075.000,00	240.056.250,00
13	DINAS SOSIAL	709.470.125,00	612.960.000,00
14	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	2.369.279.775,00	2.225.157.612,50
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	223.566.664,00	244.634.646,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	635.525.000,00	630.318.750,00
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	361.984.125,00	325.210.125,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	995.374.143,00	907.776.518,00
19	DINAS PERHUBUNGAN	1.501.806.000,00	1.453.214.300,00

No	SKPD	2018	2017
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	248.363.062,50	147.729.500,00
21	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	397.783.750,00	228.312.500,00
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	182.256.250,00	181.628.125,00
23	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1.697.523.875,00	1.589.505.750,00
24	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.680.123.260,00	3.583.698.260,00
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.597.980.941,25	1.257.069.430,00
26	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	4.033.448.602,88	3.712.638.183,50
27	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	270.946.737,00	468.460.962,00
28	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.953.797.275,00	1.659.301.887,50
29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.913.787.768,00	4.693.845.961,00
30	SKPKD	661.331.125,00	615.018.187,50
31	SEKRETARIAT DAERAH	6.330.842.822,38	5.167.880.435,50
32	SEKRETARIAT DPRD	1.014.776.350,00	941.920.100,00
33	INSPEKTORAT	169.042.000,00	169.042.000,00
34	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.727.728.625,00	2.745.990.250,00
35	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	10.763.431.201,50	9.454.042.562,62
36	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.044.383.735,00	1.770.495.023,27
37	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	390.617.500,00	290.267.000,00
38	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	1.433.970.197,50	1.347.379.937,50
39	BADAN PENGHUBUNG	177.177.875,00	161.358.500,00
	Jumlah	**173.815.560.607,34**	**155.517.191.726,60**

b. Alat Angkutan

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	58.977.141.637,64	47.413.212.259,02
2	DINAS KESEHATAN	6.089.686.828,25	5.618.851.682,13
3	RSUD Dr. MOEWARDI	5.847.652.109,00	5.725.348.530,89
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	4.076.985.612,00	3.453.250.086,76
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	3.224.969.646,75	3.443.861.224,88
6	RSUD KELET DONOROJO	4.464.560.285,00	3.992.481.766,25
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	3.398.743.000,00	3.173.315.750,00
8	RSJD SURAKARTA	3.620.283.362,25	3.249.617.950,63
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	2.227.342.879,25	1.975.276.080,50
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	5.750.411.824,00	5.467.673.238,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	4.772.703.888,13	3.429.022.873,15
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.670.584.970,00	3.480.078.406,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.351.622.008,76	3.028.108.696,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.854.399.525,00	1.988.577.025,00
15	DINAS SOSIAL	10.451.003.104,00	8.602.484.766,07
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	11.642.312.391,13	10.956.059.676,75
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.987.652.235,00	3.069.488.866,50
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.714.693.918,00	1.531.867.093,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	13.385.424.807,57	12.056.865.958,06
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	6.330.596.514,00	5.815.030.387,50
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.215.258.535,50	1.999.823.973,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	27.282.397.314,75	29.156.445.206,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.754.718.600,50	5.285.929.163,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.240.342.213,00	2.025.007.734,75
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.022.395.371,25	1.623.439.642,52
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	2.800.683.932,38	4.279.382.207,50
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.343.082.907,50	3.023.934.406,50
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.500.548.610,51	7.431.100.179,67
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	6.689.474.994,38	5.619.375.654,50
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3.237.186.942,63	3.180.368.872,00

No	SKPD	2018	2017
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.637.699.228,00	2.920.077.851,50
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.527.163.476,25	2.839.659.029,50
33	SKPKD	19.395.887.299,00	23.966.260.053,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	41.261.375.300,76	37.283.471.990,50
35	SEKRETARIAT DPRD	12.820.488.210,50	10.453.931.436,00
36	INSPEKTORAT	2.031.891.456,00	1.646.308.456,01
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.581.838.541,63	3.451.696.880,75
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	19.733.731.876,63	15.427.375.303,60
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.232.278.817,00	5.143.654.345,50
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2.474.252.205,50	2.164.282.268,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	1.702.935.900,50	1.533.935.888,00
42	BADAN PENGHUBUNG	6.555.084.422,25	5.536.748.866,00
	Jumlah	**341.879.486.702,15**	**313.462.681.724,89**

c. Alat Bengkel

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	148.429.596.612,90	200.314.261.116,30
2	DINAS KESEHATAN	22.930.000,00	6.820.000,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	812.130.075,60	661.966.583,20
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	1.276.007.149,10	2.268.214.080,20
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	457.379.295,60	426.402.745,90
6	RSUD KELET DONOROJO	214.445.100,00	128.915.450,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	12.009.500,00	10.161.500,00
8	RSJD SURAKARTA	31.248.000,00	31.987.500,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	26.035.000,00	13.568.450,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	21.770.300,00	9.605.200,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	991.391.699,40	667.362.999,40
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	85.700.000,00
13	DINAS SOSIAL	371.679.600,00	430.869.860,00
14	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	322.250.000,00	278.190.000,00
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.351.477.348,00	3.770.430.377,00
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.983.735.560,40	3.737.686.995,60
17	DINAS PERHUBUNGAN	4.485.743.920,00	5.866.503.780,00
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21.050.000,00	25.260.000,00
19	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	13.590.000,00	9.060.000,00
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	425.871.735,50	164.426.300,00
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	634.743.073,50	553.941.020,00
22	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	2.307.740.300,00	1.890.220.300,00
23	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	348.922.646,00	336.500.932,00
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.566.490.500,00	5.041.320.050,00
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10.311.259.561,00	8.837.732.668,20
26	SEKRETARIAT DAERAH	98.898.000,00	98.898.000,00
27	INSPEKTORAT	42.840.000,00	28.560.000,00
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	2.925.000,00
29	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	116.525.000,00	138.025.000,00
30	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2.076.300,00	843.150,00
31	BADAN PENGHUBUNG	5.140.000,00	3.705.000,00
	Jumlah	**184.704.976.277,00**	**235.840.064.057,80**

d. Alat Pertanian

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	10.277.118.081,00	8.809.388.789,75

No	SKPD	2018	2017
2	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	26.410.500,00	26.410.500,00
3	RSUD TUGUREJO SEMARANG	292.492.795,00	292.492.795,00
4	RSUD KELET DONOROJO	113.494.255,00	160.782.222,50
5	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	3.953.000,00	3.705.500,00
6	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	38.000.000,00	146.548.000,00
7	DINAS SOSIAL	35.985.000,00	36.220.000,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.108.958.750,00	2.192.573.493,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	206.222.000,00	112.287.125,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	515.219.767,50	248.725.000,00
11	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	3.148.000,00
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	614.157.875,00	397.908.250,00
13	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	25.467.610.948,00	23.219.947.953,00
14	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3.359.950.754,00	4.774.473.974,00
15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	31.000.000,00	140.625.000,00
16	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	28.280.000,00	28.280.000,00
17	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	15.800.000,00	15.800.000,00
	Jumlah	**43.134.653.725,50**	**40.609.316.602,25**

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	419.491.925.959,00	341.882.625.729,60
2	DINAS KESEHATAN	27.769.501.768,60	25.845.039.908,60
3	RSUD Dr. MOEWARDI	33.172.837.651,60	29.651.036.721,80
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	29.676.512.754,40	32.254.787.919,80
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	27.492.988.362,20	24.391.513.595,40
6	RSUD KELET DONOROJO	9.896.667.829,00	8.264.606.049,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	9.449.017.063,80	8.013.543.304,40
8	RSJD SURAKARTA	14.478.581.275,40	13.736.274.486,20
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	10.073.092.333,40	9.246.913.309,60
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	2.348.220.840,00	2.848.128.576,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	6.241.031.460,80	5.844.147.260,60
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.616.982.104,00	2.444.887.800,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.544.623.064,40	1.614.321.959,60
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.304.166.703,00	3.275.366.328,00
15	DINAS SOSIAL	16.405.294.936,40	17.254.689.127,60
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	4.191.315.469,40	3.982.449.484,60
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11.989.703.807,00	14.137.079.722,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.644.871.900,00	1.620.425.500,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	10.383.471.532,40	9.851.032.452,20
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.805.294.549,40	3.725.131.934,60
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.678.011.142,60	4.303.616.903,40
22	DINAS PERHUBUNGAN	4.520.457.112,60	4.154.668.541,40
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.264.609.112,80	4.787.837.786,20
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.744.715.994,80	5.706.146.638,60
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.631.305.518,00	2.619.960.938,60
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	6.727.299.477,00	10.373.939.524,60
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	12.226.261.791,40	12.407.234.613,80
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.438.987.666,00	5.997.067.419,80
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	15.103.668.483,60	13.576.040.214,40
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	4.101.216.649,40	7.203.482.924,60
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.486.714.607,20	6.614.814.708,80
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	17.898.890.536,00	21.971.345.624,00
33	SKPKD	5.100.145.703,00	5.075.561.103,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	31.834.245.762,80	35.787.534.628,80
35	SEKRETARIAT DPRD	28.852.753.138,00	28.208.747.638,00

No	SKPD	2018	2017
36	INSPEKTORAT	3.194.124.313,00	3.020.680.047,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.898.072.729,80	6.323.466.744,40
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	50.921.568.286,20	48.093.829.635,80
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	23.922.779.009,60	23.350.845.616,80
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3.888.498.458,60	3.330.266.336,80
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	15.367.166.228,00	15.304.940.717,00
42	BADAN PENGHUBUNG	5.401.711.703,20	5.180.796.548,60
	Jumlah	**910.179.304.787,80**	**833.276.826.024,00**

f. Alat Studio dan Komunikasi

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	90.000.608.426,60	76.151.837.755,40
2	DINAS KESEHATAN	3.412.729.991,00	3.388.615.626,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	3.232.051.034,00	2.855.631.024,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	491.605.160,00	780.614.269,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	3.041.075.130,50	2.816.060.045,00
6	RSUD KELET DONOROJO	1.418.416.338,00	1.217.828.338,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	732.644.508,00	563.544.061,00
8	RSJD SURAKARTA	859.891.737,00	854.669.268,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	295.134.850,00	264.291.700,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	266.021.600,00	245.239.100,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	1.218.170.350,00	1.767.634.200,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	486.522.496,00	457.595.096,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	350.917.000,00	393.299.000,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	320.281.000,00	1.723.361.000,00
15	DINAS SOSIAL	529.889.784,00	565.869.000,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	1.506.837.349,00	1.414.865.149,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.286.748.618,00	1.769.140.701,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	290.044.000,00	266.008.000,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.397.947.556,00	2.205.815.841,20
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	609.760.900,00	607.670.500,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.298.284.803,00	1.210.158.723,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	1.670.368.376,00	1.762.425.706,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.408.661.536,80	2.111.331.203,80
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	860.640.100,00	760.824.300,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	459.951.162,00	480.647.184,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1.676.403.726,60	3.449.529.780,80
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.993.266.653,00	2.357.089.658,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	880.510.610,00	889.085.600,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	3.361.926.044,20	3.005.693.988,40
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	345.427.260,00	753.243.800,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.893.999.428,00	3.092.613.699,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	801.870.938,60	975.063.649,00
33	SKPKD	112.961.000,00	112.961.000,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	17.018.701.143,00	18.311.338.298,00
35	SEKRETARIAT DPRD	2.249.467.450,00	1.920.903.400,00
36	INSPEKTORAT	472.768.265,00	324.535.165,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.208.985.094,00	1.187.091.895,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	4.552.731.791,60	3.970.508.620,40
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.082.338.197,00	1.994.184.590,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	304.882.456,00	264.720.104,80
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2.477.798.550,00	2.036.524.452,00
42	BADAN PENGHUBUNG	1.307.009.490,00	1.220.755.872,00

No	SKPD	2018	2017
	Jumlah	**164.186.251.902,90**	**152.500.820.362,80**

g. Alat Kedokteran

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.646.402.169,20	3.899.628.738,20
2	DINAS KESEHATAN	30.448.214.969,20	27.407.377.475,80
3	RSUD Dr. MOEWARDI	338.938.689.413,40	280.288.824.157,80
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	316.946.775.865,00	297.015.654.581,60
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	199.630.304.224,20	110.323.468.740,60
6	RSUD KELET DONOROJO	82.133.795.700,40	62.889.826.573,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	34.350.171.155,50	32.709.063.816,20
8	RSJD SURAKARTA	24.790.657.497,00	18.527.797.012,80
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	44.183.104.530,40	35.405.898.463,60
10	DINAS SOSIAL	609.117.429,00	612.872.129,00
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	549.042.305,00	600.493.912,00
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	375.000,00	0,00
13	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	7.100.000,00	7.100.000,00
14	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	108.561.000,00	324.626.000,00
15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	77.835.000,00	78.235.000,00
16	SEKRETARIAT DAERAH	101.512.000,00	247.529.000,00
17	SEKRETARIAT DPRD	263.695.000,00	241.135.000,00
18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	460.000,00	460.000,00
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	56.498.650,00	55.098.650,00
20	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	185.223.000,00	166.291.000,00
	Jumlah	**1.078.027.534.908,30**	**870.801.380.250,60**

h. Alat Laboratorium

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	175.242.193.165,12	150.976.107.918,88
2	DINAS KESEHATAN	14.824.031.615,17	13.448.279.112,38
3	RSUD Dr. MOEWARDI	8.320.881.162,13	7.407.847.942,01
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	763.646.425,00	2.169.408.866,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	12.948.188.575,79	8.719.180.482,31
6	RSUD KELET DONOROJO	1.611.647.189,25	1.782.152.034,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	2.253.898.302,19	2.106.830.787,50
8	RSJD SURAKARTA	1.044.583.150,00	1.371.571.993,75
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	1.118.297.136,25	1.105.710.679,38
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	5.593.223.275,00	5.064.518.650,04
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	1.246.419.040,54	1.064.282.903,37
12	DINAS SOSIAL	58.600.000,00	112.290.000,00
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6.087.939.208,24	6.557.090.037,90
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	7.785.233.773,25	7.271.579.674,45
15	DINAS PERHUBUNGAN	163.343.000,00	161.849.250,00
16	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	88.605.000,00	87.745.359,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.285.498.963,16	5.327.050.096,76
18	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	11.650.613.241,86	10.058.571.948,42
19	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	5.937.024.194,83	8.892.677.188,75
20	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.992.176.960,84	3.193.761.850,00
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10.672.974.436,23	10.561.579.888,52
22	INSPEKTORAT	77.772.000,00	68.922.000,00
23	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	487.659.850,00	424.246.025,00
	Jumlah	**276.254.449.664,85**	**247.933.254.688,42**

i. Alat Keamanan

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.192.478.362,75	1.708.709.517,25
2	RSUD KELET DONOROJO	187.829.055,00	140.871.791,25
3	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	6.175.000,00	6.175.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	5.953.500,00	7.335.400,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.400.000,00	2.400.000,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	121.890.000,00	89.352.500,00
7	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	1.384.073.503,00	1.233.805.753,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	69.802.500,00	34.670.000,00
9	DINAS PERHUBUNGAN	31.204.725,00	31.204.725,00
10	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	43.900.000,00	0,00
11	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	26.500.000,00	18.000.000,00
12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11.050.500,00	7.367.000,00
13	SEKRETARIAT DAERAH	1.253.631.550,00	1.247.931.550,00
14	INSPEKTORAT	2.125.000,00	0,00
15	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	23.650.000,00	23.650.000,00
	Jumlah	**5.362.663.695,75**	**4.551.473.236,50**

j. Alat Komputer

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	470.684.260.339,75	355.481.991.452,50
2	DINAS KESEHATAN	10.263.315.980,00	10.051.290.746,50
3	RSUD Dr. MOEWARDI	10.717.257.076,00	8.659.404.741,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	10.766.838.148,00	9.034.568.457,75
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	4.088.300.792,00	3.848.483.327,50
6	RSUD KELET DONOROJO	2.055.687.580,00	1.579.060.824,75
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	2.943.721.250,00	2.735.902.250,00
8	RSJD SURAKARTA	2.932.836.781,00	3.050.483.621,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	1.849.614.027,00	1.613.773.039,75
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	1.843.683.940,00	1.834.712.890,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	3.970.802.982,00	3.773.103.143,25
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	990.165.739,00	861.451.989,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.230.800.500,00	1.186.164.044,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	833.618.690,00	1.061.968.381,00
15	DINAS SOSIAL	3.474.156.350,00	3.709.459.488,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	1.691.861.642,00	1.579.736.392,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.831.580.585,00	6.389.252.804,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	701.068.925,00	645.134.050,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6.913.746.692,25	7.015.922.056,75
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	1.618.745.050,00	1.571.959.800,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.307.872.886,25	2.136.311.115,50
22	DINAS PERHUBUNGAN	4.080.636.306,50	3.840.753.601,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.501.395.525,00	9.967.301.936,50
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.735.560.901,50	3.623.204.614,75
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.323.741.371,00	2.497.689.917,25
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	2.499.777.331,00	2.858.429.703,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.250.849.129,00	4.936.084.402,75
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.560.761.451,50	3.205.569.455,75
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	4.762.389.507,00	4.300.581.088,00

No	SKPD	2018	2017
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	749.675.700,00	1.975.469.332,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.748.225.013,50	5.197.488.301,50
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.038.598.534,00	4.494.823.290,00
33	SKPKD	344.055.995,00	344.055.995,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	9.619.975.677,00	11.687.546.411,50
35	SEKRETARIAT DPRD	5.225.662.499,00	5.429.240.499,00
36	INSPEKTORAT	1.537.202.514,00	1.596.614.104,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.539.012.353,75	3.147.157.296,50
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	31.097.415.028,00	29.623.381.602,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.705.202.713,00	6.536.003.098,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4.685.039.290,00	4.041.947.490,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	3.851.718.812,00	3.303.580.312,00
42	BADAN PENGHUBUNG	1.372.574.967,00	1.278.596.109,00
	Jumlah	**660.939.406.574,00**	**541.705.653.173,75**

k. Alat Eksplorasi

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	29.881.086,60	0,00
	Jumlah	29.881.086,60	0,00

l. Alat Pemurnian

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.584.725,00	0,00
	Jumlah	2.584.725,00	0,00

m. Alat-alat Keselamatan Kerja

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	586.710.852,00	0,00
	Jumlah	586.710.852,00	0,00

n. Alat-alat Peraga

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6.452.725.138,00	0,00
2	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	233.640,00	0,00
	Jumlah	6.452.958.778,00	0,00

o. Alat Peralatan Proses/ Produksi

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	98.740.693,75	0,00
2	RSUD TUGUREJO SEMARANG	1.500.000,00	0,00
3	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	5.618.500,00	0,00

No	SKPD	2018	2017
	Jumlah	105.859.193,75	0,00

p. Alat Rambu-rambu

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.660.150,00	0,00
2	DINAS PERHUBUNGAN	588.210.179,26	0,00
	Jumlah	590.870.329,26	0,00

q. Alat Olah Raga

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	303.839.131,50	0,00
2	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	40.131.250,00	0,00
3	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	99.247.500,00	0,00
	Jumlah	443.217.881,50	0,00

r. Gedung

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	902.358.856.167,50	791.402.141.028,72
2	DINAS KESEHATAN	16.982.401.679,91	15.594.939.637,32
3	RSUD Dr. MOEWARDI	45.727.321.602,50	39.552.883.321,55
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	45.229.340.983,28	40.298.950.501,09
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	23.380.585.620,65	20.692.828.817,65
6	RSUD KELET DONOROJO	12.155.242.030,73	10.417.311.799,22
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	9.462.647.283,97	7.905.209.034,34
8	RSJD SURAKARTA	11.372.274.443,24	10.679.229.868,09
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	10.146.698.445,83	9.040.848.516,86
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	10.597.679.670,90	10.239.469.561,57
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	8.423.995.143,43	7.970.920.787,92
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.490.786.926,36	2.290.318.151,27
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.196.653.627,33	2.824.564.325,57
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.762.037.880,00	1.650.764.642,50
15	DINAS SOSIAL	73.948.758.217,09	70.310.982.973,77
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	1.169.321.134,50	998.226.290,79
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	14.560.436.313,85	13.515.366.608,20
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.676.454.228,00	8.255.070.154,70
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	7.726.305.863,05	6.927.791.978,08
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	1.754.063.844,36	1.534.490.727,40
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.804.295.266,85	2.617.597.819,87
22	DINAS PERHUBUNGAN	26.041.792.611,50	23.865.766.022,88
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.610.443.420,67	2.458.100.807,17
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	9.357.089.917,41	8.633.731.464,03
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.822.445.795,03	2.653.089.759,81
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	13.726.350.438,84	11.184.697.193,35
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	9.731.347.456,42	9.264.213.075,83
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	19.280.373.654,66	17.954.948.963,35

No	SKPD	2018	2017
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	42.041.595.546,48	39.385.410.971,88
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	16.551.977.084,02	16.218.213.709,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.216.273.149,31	5.501.289.964,02
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	20.875.798.203,08	19.451.333.960,31
33	SKPKD	67.798.404.300,61	64.257.981.748,81
34	SEKRETARIAT DAERAH	48.948.481.398,41	47.327.551.590,70
35	SEKRETARIAT DPRD	15.302.880.595,91	14.634.120.061,53
36	INSPEKTORAT	5.102.481.496,24	4.782.757.922,17
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.159.535.662,77	10.597.357.241,15
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	53.771.225.972,97	49.170.977.557,11
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	40.011.158.938,31	38.450.849.481,88
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3.609.222.510,02	3.454.538.590,90
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	28.475.743.292,77	27.359.766.383,91
42	BADAN PENGHUBUNG	6.240.667.142,93	5.946.614.681,28
	Jumlah	1.663.601.444.961,69	1.497.273.217.697,55

s. Monumen

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.150.186.227,04	912.062.381,76
2	DINAS KESEHATAN	11.532.960,00	8.649.720,00
3	RSUD KELET DONOROJO	12.570.660,00	7.252.440,00
4	RSJD SURAKARTA	81.405.260,00	65.124.208,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	480.000,00	450.000,00
6	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	47.591.660,00	41.871.480,00
7	DINAS SOSIAL	12.395.220,00	11.742.840,00
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.400.000,00	12.600.000,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	45.309.000,00	31.202.000,00
10	DINAS PERHUBUNGAN	3.673.816.687,94	2.953.872.796,92
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.593.700,00	2.796.850,00
12	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	133.893.172,80	64.750.576,40
13	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.340.000,00	2.184.000,00
14	SEKRETARIAT DPRD	216.636.079,84	130.252.000,00
15	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	67.754.800,00	50.816.100,00
16	BADAN PENGHUBUNG	493.381.833,60	452.266.680,80
	Jumlah	5.970.287.261,22	4.747.894.073,88

t. Bangunan Menara

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	170.844.572,00	137.408.105,60
2	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	6.120.000,00	3.060.000,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.191.120,00	893.340,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	23.804.160,00	20.828.640,00
5	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	3.460.680,00	2.307.120,00
6	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	89.326.220,80	75.808.354,50
7	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	487.785.390,18	418.047.774,68
8	SKPKD	1.029.600,00	1.006.200,00
	Jumlah	783.561.742,98	659.359.534,78

u. Bangunan Tugu Titik Kontrol/ Pasti

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.447.930.222,67	1.456.655.383,96
2	DINAS KESEHATAN	499.545.604,00	400.132.283,20
3	RSUD Dr. MOEWARDI	139.873.840,00	125.674.220,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	132.132.000,00	121.968.000,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	52.906.986,90	44.434.721,52
6	RSUD KELET DONOROJO	560.368.332,00	472.146.414,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	21.102.960,00	17.585.800,00
8	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	369.085.819,55	350.411.982,17
9	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	165.837.160,00	151.374.552,50
10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	46.120.720,00
11	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30.495.000,00	28.462.000,00
12	DINAS SOSIAL	116.793.600,00	111.384.000,00
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	79.446.296,00	70.817.280,00
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	67.765.080,00	56.820.640,00
15	DINAS KETAHANAN PANGAN	43.936.800,00	36.595.600,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	11.890.000,00	0,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.801.600,00	6.601.200,00
18	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	52.140.435,46	38.891.463,64
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	63.638.360,85	56.506.625,19
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	200.652.582,40	140.954.271,20
21	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	1.914.946.151,97	1.666.288.262,53
22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	493.495.123,47	560.671.540,22
23	SKPKD	131.974.016,00	95.717.932,00
24	SEKRETARIAT DPRD	39.979.516,00	36.307.760,00
25	INSPEKTORAT	2.003.400,00	1.717.200,00
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	18.844.000,00	16.959.600,00
27	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	99.542.348,76	1.165.678.250,56
28	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.542.718.402,30	123.539.566,62
29	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	461.978.417,00	432.327.486,00
	Jumlah	9.769.824.055,33	7.832.744.755,31

v. Jalan dan Jembatan

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8.891.136.456,20	6.774.940.357,00
2	DINAS KESEHATAN	117.825.000,00	117.825.000,00
3	RSUD TUGUREJO SEMARANG	57.151.815,80	55.711.452,64
4	RSUD KELET DONOROJO	2.160.006.125,00	1.794.180.762,50
5	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	1.582.070.400,00	1.319.714.300,00
6	RSJD SURAKARTA	991.657.661,00	799.121.111,00
7	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	67.897.900,00	58.198.200,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	5.561.022.688.230,42	5.843.706.498.670,46
9	DINAS SOSIAL	52.859.000,00	52.859.000,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.609.903.594,00	2.042.648.218,00
11	DINAS PERHUBUNGAN	12.828.225.545,73	11.971.433.103,00
12	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	166.336.865,40	107.570.743,60
13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.300.622.100,00	1.053.892.450,00
14	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	2.285.496.700,00	1.860.990.900,00
15	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	906.750.975,00	672.795.550,00
16	SKPKD	26.900.626.970,00	26.900.626.970,00
17	SEKRETARIAT DPRD	387.415.000,00	348.336.000,00
18	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2.182.198.750,00	2.158.061.400,00
	Jumlah	5.624.510.869.088,55	5.901.795.404.188,20

w. Bangunan Air

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.487.224.019,26	1.948.176.324,89
2	DINAS KESEHATAN	116.947.176,67	101.458.070,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	234.340.607,23	184.966.405,30
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	175.000.000,00	175.000.000,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	163.111.597,50	131.685.395,00
6	RSUD KELET DONOROJO	781.515.776,67	674.327.670,01
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	26.274.400,00	22.990.100,00
8	RSJD SURAKARTA	32.387.325,00	29.196.800,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	167.481.595,83	132.049.425,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	34.284.460.155,60	31.958.759.230,53
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	167.629.877.939,77	132.358.646.979,95
12	DINAS SOSIAL	1.072.992.030,64	1.030.854.884,58
13	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	31.150.000,00	28.925.000,00
14	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.741.920,00	3.598.000,00
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	375.799.802,28	120.333.875,80
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	95.731.000,00	85.728.800,00
17	DINAS PERHUBUNGAN	2.744.931.057,01	2.340.827.178,21
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	39.598.420,00	34.455.165,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14.299.000,00	11.439.200,00
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	14.218.065,16	4.812.554,55
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	66.994.354,84	61.162.903,23
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.837.972.035,36	11.039.781.587,16
23	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	2.489.189.484,97	2.146.836.137,02
24	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	128.017.076,25	89.128.999,38
25	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.573.946.467,45	2.030.534.324,54
26	SEKRETARIAT DPRD	459.874.633,34	400.323.074,99
27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.030.000,00	1.776.250,00
28	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	16.322.075,00	13.990.350,00
	Jumlah	230.065.428.015,83	187.161.764.685,14

x. Instalasi

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.241.103.585,98	1.732.292.100,07
2	DINAS KESEHATAN	682.794.236,67	561.792.310,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	276.217.990,00	146.519.500,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	3.191.718.295,81	2.803.561.457,25
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	3.594.800.256,14	2.940.136.585,58
6	RSUD KELET DONOROJO	707.588.918,66	595.293.651,09
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	22.269.000,00	20.784.400,00
8	RSJD SURAKARTA	792.085.158,00	783.464.450,30
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	765.560.141,68	661.869.267,17
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	20.633.118,00	17.194.265,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	111.022.293,67	99.124.738,87
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	45.935.000,00	43.039.333,33
13	DINAS SOSIAL	20.333.333,33	20.000.000,00
14	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	18.286.600,00	16.000.775,00
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	114.223.644,41	94.036.285,92
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	368.812.987,19	333.103.996,87
17	DINAS KETAHANAN PANGAN	6.906.666,67	6.043.333,33
18	DINAS PERHUBUNGAN	902.255.610,27	753.929.196,77

No	SKPD	2018	2017
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	55.744.200,00	46.450.983,34
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	23.764.845,50	16.249.697,00
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	507.365.569,45	451.742.108,34
22	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	63.098.617,46	55.012.290,32
23	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	233.135.617,30	176.248.775,01
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.931.099.502,31	2.960.534.998,88
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9.436.372,50	7.588.680,00
26	SEKRETARIAT DAERAH	500.794.477,50	455.010.704,39
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	144.550.860,00	127.734.607,50
28	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	61.312.406,93	54.914.067,07
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	122.104.200,08	110.346.143,25
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	299.892.600,00	279.892.650,00
31	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	154.803.767,50	143.703.128,75
32	BADAN PENGHUBUNG	39.953.793,25	38.812.256,30
	Jumlah	20.029.603.666,26	16.552.426.736,70

y. Jaringan

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.269.110.858,95	2.577.806.670,61
2	DINAS KESEHATAN	147.862.737,51	125.317.730,42
3	RSUD Dr. MOEWARDI	3.467.875,00	0,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	368.455.485,63	243.892.017,13
5	RSUD KELET DONOROJO	416.712.480,63	386.484.853,75
6	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	233.035.326,50	194.598.051,00
7	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	888.733,20	444.366,60
8	DINAS SOSIAL	24.008.700,00	21.247.566,67
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	29.910.753,33	26.800.000,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	183.631.267,50	147.042.773,33
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	29.024.341,67	26.548.288,33
12	DINAS PERHUBUNGAN	1.148.876.702,24	728.804.606,23
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.424.170,00	6.574.585,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.297.949,20	2.154.327,38
15	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	59.719.057,48	44.366.521,65
16	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	10.020.000,00	9.602.500,00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	48.232.624,59	36.414.275,00
18	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	107.268.124,98	76.100.416,68
19	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	155.391.791,66	124.062.841,67
20	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.448.383.637,30	3.665.207.646,05
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	80.366.226,67	72.705.734,17
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	153.645.368,75	174.253.475,00
23	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.306.666,61	2.893.333,39
24	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	10.894.675,00	5.874.000,00
	Jumlah	10.943.935.554,40	8.699.196.580,06

z. Aset Tetap lainnya

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	427.192.696,00	0,00
	Jumlah	427.192.696,00	0,00

5.3.1.4. Dana Cadangan **Rp00,00**

Saldo Dana Cadangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp00,00. Saldo Dana Cadangan 31 Desember 2017 sebesar Rp382.861.505.239,00 telah digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2018.

5.3.1.5. Aset Lainnya **Rp842.453.182.532,31**

Saldo Aset Lainnya sebesar Rp842.453.182.532,31 naik sebesar Rp489.909.123.879,90 atau 138,96% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp352.544.058.652,41 dengan rincian sebagai berikut :

5.3.1.5.1. Aset Lainnya - Kemitraan Pihak Ketiga **Rp338.257.331.006,00**

Saldosebesar Rp338.257.331.006,00 naik Rp33.465.585.350,00 atau 10,98% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp304.791.745.656,00 merupakan aset yang dikerjasamakan dan aset yang disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak keriga dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	5	4.339.850.000,00	3.896.250.000,00	0,00	2	443.600.000,00
2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	24	758.166.000,00	758.166.000,00	0,00	-	0,00
3	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1	1.841.848.000,00	0,00	0,00	1	1.841.848.000,00
4	SKPKD	29	329.158.056.906,00	26.651.759.250,00	0,00	3	302.506.297.656,00
5	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	5	2.892.657.000,00	2.892.657.000,00	0,00	-	0,00
6	AKUMULASI PENYUSUTAN		(733.246.900,00)	(733.246.900,00)	0,00	-	0,00
	Jumlah	**64**	**338.257.331.006,00**	**33.465.585.350,00**	**0,00**	**6**	**304.791.745.656,00**

5.3.1.5.1.1 Sewa **Rp25.715.747.406,00**

Saldo sebesar Rp25.715.747.406,00 merupakan saldo aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 yang disewakan kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	SKPKD	24.320.747.406,00	0,00
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.395.000.000,00	0,00
	Jumlah	25.715.747.406,00	0,00

5.3.1.5.1.2 Kerjasama Pemanfaatan **Rp307.275.698.000,00**

Saldo sebesar Rp307.275.698.000,00 merupakan saldo aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 yang dikerjasamakan kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	SKPKD	302.489.000.000,00	302.506.297.656,00
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.944.850.000,00	443.600.000,00
3	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.841.848.000,00	1.841.848.000,00
	Jumlah	307.275.698.000,00	304.791.745.656,00

5.3.1.5.1.3 Pinjam Pakai **Rp5.999.132.500,00**

Saldo sebesar Rp5.999.132.500,00 merupakan saldo aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	Dinas Kelautan dan perikanan	758.166.000,00	0,00
2	BPPD	2.892.657.000,00	0,00
3	SKPKD	2.348.309.500,00	0,00
	Jumlah	**5.999.132.500,00**	**0,00**

5.3.1.5.1.3.1 Akumulasi Penyusutan Pinjam Pakai **Rp733.246.900,00**

Akumulasi Penyusutan aset pinjam pakai per 31 Desember 2018 sebesar Rp733.246.900,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	Dinas Kelautan dan perikanan	207.495.150,00	0,00
2	BPPD	525.751.750,00	0,00
3	SKPKD	0,00	0,00
	Jumlah	**733.246.900,00**	**0,00**

5.3.1.5.2. Aset Lainnya – Barang Tidak Berwujud **Rp20.068.541.806,00**

Saldo sebesar Rp20.068.541.806,00 merupakan saldo aset lainnya netto, naik sebesar Rp2.707.891.233,00 atau 15,60% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp17.360.650.573,00 merupakan aplikasi atau software yang digunakan untuk aktivitas operasional SKPD per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	99	1.609.295.991,00	721.750.000,00	0,00	89	887.545.991,00
2	DINAS KESEHATAN	38	1.268.782.200,00	131.755.000,00	0,00	35	1.137.027.200,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	3	3.295.626.378,00	0,00	0,00	3	3.295.626.378,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	3	798.154.233,00	502.404.233,00	0,00	1	295.750.000,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	4	1.320.090.000,00	0,00	0,00	4	1.320.090.000,00
6	RSUD KELET DONOROJO	22	1.830.421.000,00	211.900.000,00	0,00	19	1.618.521.000,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	1	1.211.000.000,00	451.000.000,00	0,00	1	760.000.000,00
8	RSJD SURAKARTA	9	496.235.000,00	0,00	0,00	9	496.235.000,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	3	1.406.042.169,00	160.000.000,00	0,00	3	1.246.042.169,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	39.700.000,00	0,00	0,00	1	39.700.000,00
15	DINAS SOSIAL	5	474.700.500,00	0,00	0,00	5	474.700.500,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	191.445.000,00	0,00	0,00	3	191.445.000,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	2	195.580.000,00	0,00	0,00	2	195.580.000,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	50.941.000,00	0,00	0,00	1	50.941.000,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	1	43.457.500,00	0,00	0,00	1	43.457.500,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12	1.206.030.000,00	0,00	0,00	12	1.206.030.000,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	25.190.000,00	25.190.000,00	0,00	-	0,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	474.592.500,00	0,00	0,00	7	474.592.500,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	5	220.570.000,00	220.570.000,00	0,00	-	0,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1	140.950.000,00	0,00	0,00	1	140.950.000,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	1.081.344.220,00	0,00	0,00	5	1.081.344.220,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	1	39.500.000,00	0,00	0,00	1	39.500.000,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	5	310.230.000,00	162.380.000,00	0,00	2	147.850.000,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3	189.150.000,00	0,00	0,00	3	189.150.000,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	47.740.000,00	0,00	0,00	1	47.740.000,00
36	INSPEKTORAT	4	97.480.865,00	0,00	0,00	4	97.480.865,00
37	BAPPEDA	6	479.757.000,00	120.942.000,00	0,00	5	358.815.000,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	7	501.362.000,00	0,00	0,00	7	501.362.000,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	578.200.000,00	0,00	0,00	3	578.200.000,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	151.539.500,00	0,00	0,00	1	151.539.500,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	35	293.434.750,00	0,00	0,00	35	293.434.750,00
	Jumlah	**292**	**20.068.541.806,00**	**2.707.891.233,00**	**0,00**	**264**	**17.360.650.573,00**

5.3.1.5.2.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Barang Tak Berwujud Rp14.069.964.732,03

Saldo sebesar Rp14.069.964.732,03 merupakan saldo akumulasi aset tak berwujud, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.230.067.790,60	643.016.930,40
2	DINAS KESEHATAN	1.004.415.760,00	848.931.320,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	2.769.701.367,25	2.243.776.356,50
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	218.780.846,60	59.150.000,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	1.202.490.000,00	1.113.690.000,00
6	RSUD KELET DONOROJO	1.358.171.000,00	992.086.800,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	438.680.000,00	245.600.000,00
8	RSJD SURAKARTA	252.248.000,00	153.001.000,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	702.642.824,25	452.506.376,04
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	39.700.000,00	31.760.000,00
11	DINAS SOSIAL	341.393.133,33	254.985.166,67
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	191.445.000,00	191.445.000,00
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	195.580.000,00	195.580.000,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	30.564.600,00	20.376.400,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	17.383.000,00	8.691.500,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	482.412.000,00	241.206.000,00
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.038.000,00	0,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	389.574.500,00	292.533.000,00
19	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	44.114.000,00	0,00
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	56.380.000,00	28.190.000,00
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.081.344.220,00	1.068.144.220,00
22	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	15.800.000,00	7.900.000,00
23	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	101.186.000,00	39.140.000,00
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	121.490.000,00	87.660.000,00
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	28.644.000,00	19.096.000,00
26	INSPEKTORAT	97.480.865,00	97.480.865,00
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	370.988.525,00	270.470.200,00
28	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	372.812.000,00	287.339.600,00
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	518.200.000,00	498.200.000,00
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	151.539.500,00	151.539.500,00
31	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	239.697.800,00	185.960.850,00
	Jumlah	**14.069.964.732,03**	**10.729.457.084,61**

5.3.1.5.3. Aset Lain-lain Rp793.294.480.999,00

Saldo sebesar Rp793.294.480.999,00 merupakan saldo aset lain-lain, naik sebesar Rp649.736.520.610,00 atau 452,60% dibandingkan per31 Desember 2017 sebesar Rp143.557.960.389,00 merupakan barang rusak dan tidak digunakan untuk aktifitas operasional SKPD serta dalam proses penghapusan dan aset yang akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat tetapi belum ada Berita Acara Serah Terima Barangnya, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	99.846	24.871.181.239,00	6.700.602.192,00	6.700.602.192,00	99.846	24.871.181.239,00
2	DINAS KESEHATAN	4.237	7.345.800.322,00	5.496.461.817,00	0,00	2.071	1.849.338.505,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	3.454	2.766.538.375,00	2.766.538.375,00	8.213.053.524,00	9.809	8.213.053.524,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	22.691	113.020.148.018,00	117.996.055.990,00	17.707.962.800,00	6.268	12.732.054.828,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	1.789	9.599.831.527,00	9.599.831.527,00	2.986.501.449,00	1.136	2.986.501.449,00
6	RSUD KELET DONOROJO	381	1.474.679.299,00	1.474.679.299,00	577.956.009,00	218	577.956.009,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	1.104	6.260.860.052,00	5.305.747.602,00	0,00	192	955.112.450,00
8	RSJD SURAKARTA	2.083	4.152.112.501,00	3.152.815.901,00	531.151.530,00	464	1.530.448.130,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	657	1.684.124.410,00	1.684.124.410,00	1.062.596.048,00	404	1.062.596.048,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	4.108	471.503.635.340,00	469.470.752.255,00	0,00	1.898	2.032.883.085,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	3.109	4.575.511.369,00	3.112.917.162,00	73.928.000,00	2.433	1.536.522.207,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	545	448.882.432,00	0,00	0,00	545	448.882.432,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	337	619.423.794,00	619.423.794,00	15.244.000,00	1	15.244.000,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	863	3.636.490.316,00	3.636.490.316,00	0,00	-	0,00
15	DINAS SOSIAL	7.034	4.073.673.660,00	4.026.836.660,00	1.849.434.905,00	3.830	1.896.271.905,00
16	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	13.039	7.935.532.721,00	7.935.530.323,00	0,00	800	2.398,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	30	20.659.000,00	20.659.000,00	168.850.000,00	54	168.850.000,00
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.337	3.202.714.041,00	3.187.914.041,00	0,00	1	14.800.000,00
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	348	369.908.212,00	265.071.801,00	0,00	143	104.836.411,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	828	12.902.618.154,00	5.053.952.492,00	53.015.478.670,00	1.396	60.864.144.332,00
21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	641	2.919.289.674,00	2.919.289.673,00	0,00	1	1,00
22	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	703	658.081.049,00	615.518.549,00	0,00	9	42.562.500,00
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	561	1.220.798.888,00	1.220.798.888,00	0,00	-	0,00
24	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	4.526	10.317.462.824,00	14.086.162.424,00	3.896.250.000,00	195	127.550.400,00
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.318	1.498.028.824,00	1.498.028.824,00	807.787.333,00	831	807.787.333,00
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.205	8.864.991.103,00	9.571.834.558,00	1.782.706.268,00	42	1.075.862.813,00
27	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	36.186	2.991.440.127,00	8.633.625,00	16.000.000,00	36.120	2.998.806.502,00
28	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN	17.399	26.249.526.227,00	22.112.196.713,00	412.283.750,00	3.396	4.549.613.264,00

No	SKPD	2018		Bertambah	Berkurang	2017	
	HEWAN						
29	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	897	3.747.413.588,00	3.694.290.588,00	0,00	11	53.123.000,00
30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.981	9.799.311.511,00	15.833.024.292,00	6.335.172.781,00	3	301.460.000,00
31	SKPKD	170	9.166.718.501,00	35.356.586.750,00	26.651.759.250,00	165	461.891.001,00
32	SEKRETARIAT DAERAH	7.408	16.101.718.983,00	14.355.218.983,00	1.332.993.356,00	50	3.079.493.356,00
33	SEKRETARIAT DPRD	864	2.701.605.470,00	2.701.605.470,00	0,00	-	0,00
34	INSPEKTORAT	2.953	538.523.024,00	538.523.024,00	182.511.987,00	42	182.511.987,00
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.275	1.880.693.183,00	1.490.190.483,00	0,00	70	390.502.700,00
36	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	5.430	6.553.631.591,00	8.498.303.863,00	6.079.585.847,00	4.904	4.134.913.575,00
37	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.125	2.768.657.216,00	2.229.919.387,00	203.282.445,00	8.303	742.020.274,00
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	136	395.842.682,00	395.842.682,00	253.760.035,00	201	253.760.035,00
39	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	8.692	3.882.132.305,00	1.470.615.395,00	0,00	5.823	2.411.516.910,00
40	BADAN PENGHUBUNG	180	574.289.447,00	490.383.661,00	0,00	43	83.905.786,00
	Jumlah	**267.470**	**793.294.480.999,00**	**790.593.372.789,00**	**140.856.852.179,00**	**191.718**	**143.557.960.389,00**

5.3.1.5.3.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp295.097.206.546,66

Saldo sebesar Rp295.097.206.546,66 merupakan saldo akumulasi aset lain-lain, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam rupiah)

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19.499.785.341,87	19.403.302.062,08
2	DINAS KESEHATAN	4.746.684.694,87	1.127.925.000,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	2.364.553.955,00	8.063.754.324,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	112.822.998.608,00	12.498.245.448,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	9.589.183.527,00	2.986.501.449,00
6	RSUD KELET DONOROJO	1.437.562.924,00	391.598.140,89
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	6.260.628.952,00	955.112.450,00
8	RSJD SURAKARTA	2.766.320.790,00	863.301.102,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	1.680.999.410,00	1.056.753.548,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	7.894.617.732,00	2.032.883.085,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	4.535.744.788,00	1.536.522.207,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	446.500.032,00	444.937.632,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	602.949.794,00	9.527.500,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.607.182.316,00	0,00
15	DINAS SOSIAL	3.966.102.909,00	1.789.385.905,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7.884.830.646,00	2.398,00

No	SKPD	2018	2017
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	20.659.000,00	168.850.000,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.175.977.041,78	0,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	369.908.212,00	104.836.411,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	10.687.299.500,00	31.465.776.849,53
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.849.870.386,20	1,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	658.081.049,00	42.562.500,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.208.998.012,40	0,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	10.210.481.824,00	126.709.400,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.498.028.824,00	807.787.333,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.352.264.511,92	405.925.585,40
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	2.498.960.502,00	2.514.711.168,67
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	16.676.901.274,64	1.896.121.241,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.717.771.475,50	53.123.000,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9.529.134.686,00	199.834.000,00
33	SKPKD	459.083.000,68	458.907.500,66
34	SEKRETARIAT DAERAH	16.084.773.503,00	3.079.493.356,00
35	SEKRETARIAT DPRD	2.701.605.470,00	0,00
36	INSPEKTORAT	509.261.374,00	182.511.987,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.803.585.183,00	390.502.700,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	6.530.660.513,80	4.132.219.412,50
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.764.587.216,00	738.180.274,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	395.042.682,00	253.760.035,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	3.882.132.305,00	2.411.516.910,00
42	BADAN PENGHUBUNG	405.492.580,00	83.905.786,00
	Jumlah	**295,097.206.546,66**	**102.676.987.701,73**

5.3.2. Kewajiban **Rp470.345.881.167,59**

Total Kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp470.345.881.167,59 naik sebesar Rp100.887.380.687,97 atau 27,31 % dibandingkan per31 Desember 2017 sebesar Rp369.458.500.479,62 termasuk didalamnya klaim PT PRPP atas tanah jalan akses Bandara A. Yani Semarang seluas 30.852 m2 (reff 5.3.2.2 Kewajiban Kontijensi). Rincian Kewajiban sebesar adalah sebagai berikut :

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek **Rp470.345.881.167,59**

Saldo Rp470.345.881.167,59 naik sebesar Rp100.887.380.687,97 atau 27,31 % dibandingkan per31 Desember 2017 sebesar Rp369.458.500.479,62 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam rupiah)

		2018	2017
1	Utang Bunga	17.191.692,00	-
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	22.302.734.488,00	-
3	Pendapatan Dibayar Dimuka	40.570.216.611,70	29.298.716.441,33
4	Utang Belanja	407.455.738.375,89	92.824.636.399,00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	247.335.147.639,29
	Jumlah	**470.345.881.167,59**	**369.458.500.479,62**

5.3.2.1.1. Utang Bunga **Rp17.191.692,00**

Saldo utang bunga per 31 desember 2018 sebesar Rp17.191.692,00 merupakan bunga atas utang sektor perbankan pada RSUD Dr Moewardi Surakarta.

5.3.2.1.2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang **Rp22.302.734.488,00**

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 desember 2018 sebesar Rp22.302.734.488,00 merupakan utang sektor perbankan pada RSUD Dr Moewardi Surakarta.

5.3.2.1.3. Pendapatan Dibayar Dimuka **Rp40.570.216.611,70**

Saldo pendapatan dibayar dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp40.570.216.611,70 naik sebesar Rp11.271.500.170,37 atau 38,47% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp29.298.716.441,33 merupakan penerimaan yang sesungguhnya belum menjadi hak SKPD pada periode bersangkutan, tetapi pembayarannya telah terlebih dahulu diterima oleh SKPD pada Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam rupiah)

		2018	2017
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.393.463.650,00	1.243.816.655,33
2	RSUD Dr Margono Soekarjo Purwokerto	1.162.942.691,00	1.046.251.933,00
3	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	56.305.874,00	34.907.575,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	151.442.650,00	248.051.050,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	50.658.334,00	4.641.061,00
6	RSJD Surakarta	0,00	10.000.000,00
7	Dinas Koperasi dan UMKM	2.475.000,00	158.826.667,00
8	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	37.752.928.412,70	26.552.221.500,00
	Jumlah	**40.570.216.611,70**	**29.298.716.441,33**

5.3.2.1.4. Utang Belanja **Rp407.455.738.375,89**

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2018 sebesar Rp407.455.738.375,89 naik sebesar Rp314.631.101.976,89 atau 40,35% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp92.824.636.399,00 merupakan kewajiban belanja SKPD pada periode bersangkutan, tetapi belum dilakukan pembayarannyasampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2018		2017
1	Utang Belanja Pegawai	3.256.109.764,00		2.111.850.603,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	127.314.369.399,89		90.712.785.796,00
3	Utang Belanja Modal	6.106.836.600,00	0,00	
4	Utang Belanja Transfer	270.778.422.612,00	0,00	
	Jumlah	**407.455.738.375,89**		**92.824.636.399,00**

5.3.2.1.2.1 Utang Belanja Pegawai Rp3.256.109.764,00

SaldoRp3.256.109.764,00 merupakan kewajiban belanja pegawai yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam rupiah)

		2018	2017
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	303.563.253,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	48.282.200,00	0,00
3	RSUD Moewardi Surakarta	390.600.000,00	0,00
4	RSUD Margono Soekarjo	2.398.233.377,00	2.111.848.516,00
5	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	80.175.823,00	0,00
6	RSJD Amino Gondohutomo	32.500.000,00	0,00
7	Dinas Bina Marga	2.005.000,00	0,00
8	Dinas Sosial	740.000,00	0,00
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	2.087,00
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.111,00	0,00
	Jumlah	**3.256.109.764,00**	**2.111.850.603,00**

5.3.2.1.2.2 Utang Belanja Barang Jasa Rp127.134.369.399,89

Saldo Rp127.134.369.399,89 merupakan kewajiban belanja belanja barang dan jasa yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

(*Dalam rupiah)*

		2018	2017
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	3.012.464.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.476.073.829,00	3.266.435.872,00
4	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	89.714.682.873,00	45.026.711.118,00
5	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	27.804.108.485,00	28.104.426.522,00
6	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	423.543.920,00	2.349.644.890,00
7	RSUD Tugurejo Semarang	2.392.256.785,00	354.979.057,00
8	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	2.483.949.283,89	3.287.834.062,00
9	RSJD Surakarta	969.824.733,00	319.054.961,00
10	RSJD RM Soedjarwadi Klaten	2.049.929.490,00	4.991.226.732,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1,00	0,00
13	Sekretariat Daerah	0,00	8.582,00
	Jumlah	**127.314.369.399,89**	**90.712.785.796,00**

5.3.2.1.2.3 Utang Modal Rp6.106.836.600,00

Saldo Rp6.106.836.600,00 merupakan kewajiban belanja belanja barang dan jasa yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

(*Dalam rupiah)*

		2018	2017
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	6.042.585.600,00	-
2	RSJ Surakarta	64.251.000,00	-
	Jumlah	**6.106.836.600,00**	**-**

5.3.2.1.2.4 Utang Transfer **Rp270.778.422.612,00**

Saldo Rp270.778.422.612,00 merupakan kewajiban belanja belanja barang dan jasa yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

(*Dalam rupiah)*

Utang Bagi Hasil Pajak Kpd Kab/Kota

		2018	2017
1	Pajak Kendaraan Bermotor	94.137.257.861,00	
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	56.283.850.399,00	
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	117.250.914.415,00	
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah	378.269.936,00	
5	Pajak Rokok	2.695.000.001,00	
	Jumlah	**270.745.292.612,00**	**-**

Utang Bagi Hasil Retribusi Kpd Kab/Kota

		2018	2017
1	Kapal Cepat Kartini I kepada Kabupaten Jepara	33.130.000,00	
	Jumlah	**33.130.000,00**	**-**

5.3.2.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya **Rp0,00**

Saldo utang jangka pendek lainnya sebesar Rp0,00

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Utang Bagi Hasil Pajak kpd Pemerintah Kab/Kota	0,00	247.251.463.095,29
2	Utang Bagi Hasil Retribusi kpd Pemerintah Kab/Kota	0,00	83.684.544,00
	Jumlah	**0,00**	**247.335.147.639,29**

5.3.2.2 Kewajiban Kontijensi

Kewajiban Kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:

a. Aset tanah di kawasan PRPP yang dikerjasamakan dan tercatat pada DPPAD digugat oleh PT IPU melalui Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 September 2014, dengan tergugat Gubernur Jawa Tengah, Yayasan PRPP, PT PRPP, BPN, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Pertanahan Kota Semarang. Atas Gugatan tersebut, PT IPU meminta tertugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp789.181.000.000,00 dan immateriil sebesar Rp873.213.350.000,00. Saat ini Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jateng yang bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah telah mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal

22 Maret 2017 dan memori kontra kasasi telah disampaikan tanggal 23 Mei 2017. Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinyatakan kalah, sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya Hukum Luar Biasa melalui Peninjauan Kembali Perkara dimaksud.

b. Aset Tanah Batursari Mranggen Demak yang tercatat pada KIB DPPAD digugat diajukan oleh Ang Budi Santoso dkk melalui Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Februari 2015, dengan tergugat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, PT Perum Perumnas, CV Megah Perkasa Utama dan TVRI Jawa Tengah. Obyek sengketa adalah tanah bekas Hak Erpacht seluas ± 423.000 m^2. Atas Gugatan tersebut, Ang Budi Santoso dkk meminta tertugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp635.602.000,00 dan immateriil sebesar Rp250.000.000,00. Pada tanggal 29 September 2015 berdasarkan putusan perdata no 75/Pdt.G/2015/Pn. Smg dengan amar putusan menyatakan Gugatan para penggugat tidak diterima. Ang Budi Santoso saat ini telah mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Semarang. Putusan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan kurang pihak dan terhadap Aset tersebut diajukan kembali dengan gugatan perkara. Nomor perkara 133/pdt.G/2017/PN.Smg yang boleh diputus tgl 20 April 2017. Atas putusan perkara tersebut ditengah upaya hukum banding.

c. Aset tanah Durian Raya Banyumanik Kota Semarang yang tercatat pada KIB PSDA digugat diajukan oleh Yosef Soewarto dengan tergugat Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Obyek sengketa tersebut adalah : Tanah SHM Nomor 5334/Srondol Wetan seluas 2.257 m^2; tanah SHM Nomor 5335/Srondol Wetan seluas 762 m^2; dan tanah SHM Nomor 5336/Srondol Wetan seluas 1.500 m^2. Berdasarkan putusan banding penggungat pada Pengadilan Tinggi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinyatakan kalah. Upaya hukum selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan kasasi.

5.3.3. Ekuitas **Rp35.912.461.766.739,88**

Total Ekuitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebesar Rp35.912.461.766.739,88 naik sebesar Rp2.088.332.734.561,18 atau 6,17% dibandingkan per31 Desember 2017 sebesar Rp33.824.129.032.178,70.

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari Laporan Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1	Pendapatan	26.740.296.197.300,14	25.144.782.615.441,90	1.595.513.581.858,20	6,35
2	Beban	24.826.628.352.419,18	22.633.928.232.052,20	2.192.700.120.366,90	9,69
	Surplus/(Defisit) Operasional	**1.913.667.844.880,96**	**2.510.854.383.389,74**	**(597.186.538.508,78)**	**(23,78)**
3	Kegiatan Non Operasional	(35.066.901.024,94)	347.556.825,80	(35.414.457.850,74)	(10.189,54)
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	1.878.600.943.856,02	2.511.201.940.215,54	(632.600.996.359,52)	(25,19)
4	Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	**1.878.600.943.856,02**	**2.511.201.940.215,54**	**(632.600.996.359,52)**	(25,19)

5.4.1. PENDAPATAN LO Rp26.740.296.197.300,14

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Pendapatan Asli daerah - LO	14.626.974.517.772,47	13.553.066.373.226,90	1.073.908.144.545,57	7,92
2	Pendapatan Transfer - LO	11.028.269.480.519,00	11.118.722.318.263,00	(90.452.837.744,00)	(0,81)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah - LO	1.085.052.199.008,67	472.993.923.952,00	612.058.275.056,67	129,40
	Jumlah	**26.740.296.197.300,14**	**25.144.782.615.441,90**	**1.595.513.581.858,24**	**6,35**

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp14.626.974.517.772,47

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2018. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp14.626.974.517.772,47,dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	11.879.809.222.424,00	10.623.601.257.149,00	1.256.207.965.275,00	11,82
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	105.523.118.837,33	106.570.603.817,00	(1.047.484.979,67)	(0,98)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO	948.971.460.898,60	1.194.438.135.141,92	(245.466.674.243,32)	(20,55)
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	1.692.670.715.612,54	1.628.456.377.118,98	64.214.338.493,56	3,94
	Jumlah	**14.626.974.517.772,47**	**13.553.066.373.226,90**	**1.073.908.144.545,57**	**7,92**

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Rp11.879.809.222.424,00

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatandan Pengelolaan Aset Daerah. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual. Pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2018, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2018 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2017. Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp11.879.809.222.424,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	4.407.682.703.235,00	3.895.837.692.337,00	511.845.010.898,00	13,14
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	3.423.363.674.275,00	3.031.219.174.000,00	392.144.500.275,00	12,94
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	1.846.840.170.007,00	1.653.549.702.810,00	193.290.467.197,00	11,69
4	Pajak Air Permukaan - LO	12.705.761.336,00	12.600.945.901,00	104.815.435,00	0,83
5	Pajak Rokok - LO	2.189.216.913.571,00	2.030.393.742.101,00	158.823.171.470,00	7,82
	Jumlah	**11.879.809.222.424,00**	**10.623.601.257.149,00**	**1.256.207.965.275,00**	**11,82**

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Rp105.523.118.837,33

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp105.523.118.837,33dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	23.723.636.208,00	0,00	23.723.636.208,00	0,00
2	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	513.150.000,00	665.450.000,00	(152.300.000,00)	(22,89)
3	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	904.645.000,00	0,00	904.645.000,00	0,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	48.678.142.106,33	98.926.840.217,00	(50.248.698.110,67)	(50,79)
5	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	978.635.225,00	0,00	978.635.225,00	0,00
6	Retribusi Terminal - LO	0,00	0,00	-	0,00
7	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	7.934.477.320,00	0,00	7.934.477.320,00	0,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	1.400.000,00	1.400.000,00	-	0,00
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	18.146.102.378,00	1.921.721.800,00	16.224.380.578,00	844,26
10	Retribusi Izin Trayek - LO	699.400.000,00	0,00	699.400.000,00	0,00
11	Retribusi Izin Perikanan - LO	3.159.968.200,00	5.055.191.800,00	(1.895.223.600,00)	(37,49)
12	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	783.562.400,00	0,00	783.562.400,00	0,00
	Jumlah	**105.523.118.837,33**	**106.570.603.817,00**	**(1.047.484.979,67)**	**(0,98)**

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Kekaayaan Daerah yang Dipisahkan Rp948.971.460.898,60

Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan diterima oleh PPKD pada Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp948.971.460.898,60 merupakan pendapatan deviden dari penyertaan modal BUMD dan selisih nilai metode ekuitas dan metode cost yang digunakan dalam perhitungan penyertaan modal, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah - LO	34.431.465.342,00	0,00	34.431.465.342,00	0,00
2	Bagian Laba pada PT. Bank Jateng - LO	665.695.462.067,84	1.194.438.135.141,92	(528.742.673.074,08)	(44,27)
3	Bagian Laba pada BPR - BKK - LO	120.647.923.269,31	0,00	120.647.923.269,31	0,00
4	Bagian Laba PDAB Tirta Utama - LO	9.391.072.628,00	0,00	9.391.072.628,00	0,00
5	Bagian Laba PT Wijaya Kusuma (KIW) - LO	21.846.839.121,84	0,00	21.846.839.121,84	0,00
6	Bagian Laba PT. Asuransi Bangun Askrida - LO	6.360.924.248,00	0,00	6.360.924.248,00	0,00
7	Bagian Laba PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah - LO	46.422.262.942,48	0,00	46.422.262.942,48	0,00
8	Bagian Laba PT. Sarana Patra Hulu Cepu - LO	34.340.947.662,44	0,00	34.340.947.662,44	0,00
9	Bagian Laba PT. Jamkrida - LO	8.260.966.391,36	0,00	8.260.966.391,36	0,00
10	Bagian Laba PT. PRPP Jateng	1.573.597.225,33	0,00	1.573.597.225,33	0,00
	Jumlah	**948.971.460.898,60**	**1.194.438.135.141,92**	**(245.466.674.243,32)**	(20,55)

5.4.1.1.4 Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang SahRp1.692.670.715.612,54

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diterima oleh SKPD pada Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp1.692.670.715.612,54 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	2.303.698.128,00	0,00	2.303.698.128,00	0,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro - LO	66.077.362.541,00	0,00	66.077.362.541,00	0,00
4	Pendapatan Bunga - LO (SKPKD)	142.243.749.248,67	0,00	142.243.749.248,67	0,00
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO (SKPKD)	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	0,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO (SKPKD)	2.281.614.797,00	0,00	2.281.614.797,00	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak - LO	147.065.780.931,00	0,00	147.065.780.931,00	0,00
8	Pendapatan Denda Retribusi - LO	89.478.463,00	0,00	89.478.463,00	0,00
9	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian - LO (SKPKD)	7.707.961.885,00	0,00	7.707.961.885,00	0,00
12	Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum - LO	13.065.141.000,00	0,00	13.065.141.000,00	0,00
13	Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO	16.884.628.386,00	18.337.828.260,00	(1.453.199.874,00)	(7,92)
14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pendapatan BLUD - LO	1.292.698.293.738,86	1.254.927.449.967,43	37.770.843.771,43	3,01

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
16	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LO	2.232.685.244,00	355.191.098.891,55	(352.958.413.647,55)	(99,37)
17	Hasil Dari Pengelolaan Dana Bergulir - LO	7.621.250,00	0,00	7.621.250,00	0,00
18	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.692.670.715.612,54**	**1.628.456.377.118,98**	**64.214.338.493,56**	**3,94**

5.4.1.2 PENDAPATANTRANSFER Rp11.028.269.480.519,00

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp11.028.269.480.519,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	4.748.605.117.505,00	11.067.786.491.093,00	(6.319.181.373.588,00)	(57,10)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	6.277.665.043.013,00	50.197.943.000,00	6.227.467.100.013,00	12.405,82
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	1.999.320.001,00	737.884.170,00	1.261.435.831,00	170,95
	Jumlah	**11.028.269.480.519,00**	**11.118.722.318.263,00**	**(90.452.837.744,00)**	**(0,81)**

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Rp4.748.605.117.505,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.748.605.117.505,00dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dana Bagi Hasil Pajak - LO	816.847.402.267,00	834.422.861.130,00	(17.575.458.863,00)	(2,11)
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LO	11.595.847.579,00	13.887.050.263,00	(2.291.202.684,00)	(16,50)
3	Dana Alokasi Umum - LO	3.652.586.431.000,00	3.652.586.431.000,00	0,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus - LO	267.575.436.659,00	6.566.890.148.700,00	(6.299.314.712.041,00)	(95,93)
	Jumlah	**4.748.605.117.505,00**	**11.067.786.491.093,00**	**(6.319.181.373.588,00)**	**(57,10)**

5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Rp6.277.665.043.013,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6.277.665.043.013,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	1.028.894.671.500,00	0,00	1.028.894.671.500,00	0,00
2	Dana Insentif Daerah	33.500.000.000,00	50.197.943.000,00	(16.697.943.000,00)	(33,26)
3	Bantuan Operasional Sekolah - LO	5.204.476.040.000,00	0,00	5.204.476.040.000,00	0,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB) - LO	3.640.458.000,00	0,00	3.640.458.000,00	0,00
5	Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan – LO	2.975.310.100,00	0,00	2.975.310.100,00	0,00
6	Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil - LO	4.178.563.413,00	0,00	4.178.563.413,00	0,00
	Jumlah	**6.277.665.043.013,00**	**50.197.943.000,00**	**6.227.467.100.013,00**	**12.405,82**

5.4.1.2.4 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya **Rp1.999.320.001,00**

Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.999.320.001,00. Jumlah tersebut merupakan pendapatan bagi hasil Ketep Pass Kabupaten Magelang.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	1.999.320.001,00	737.884.170,00	1.261.435.831,00	170,95
	Jumlah	**1.999.320.001,00**	**737.884.170,00**	**1.261.435.831,00**	**170,95**

5.4.1.3 LAIN- LAIN PENDAPATANYANG SAH **Rp1.085.052.199.008,67**

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.085.052.199.008,67 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	1.060.727.819.878,67	472.993.923.952,00	587.733.895.926,67	124,26
2	Pendapatan Lainnya - LO	24.324.379.130,00	0,00	24.324.379.130,00	0,00
	Jumlah	**1.085.052.199.008,67**	**472.993.923.952,00**	**612.058.275.056,67**	**129,40**

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah **Rp1.060.727.819.878,67**

Realisasi Pendapatan Hibah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.060.727.819.878,67 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Hibah Uang	0,00	36.938.923.844,00	(36.938.923.844,00)	(100,00)
2	Hibah Barang/Jasa	1.060.727.819.878,67	436.055.000.108,00	624.672.819.770,67	143,26
	Jumlah	**1.060.727.819.878,67**	**472.993.925.969,00**	**587.733.893.909,67**	124,26

5.4.1.3.1.1. Hibah Uang **Rp0,00**

Tidak ada hibah uang pada Tahun Anggaran 2018. Hibah Uang merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat pada SKPKD.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Hibah Uang	0,00	36.938.923.844,00	(36.938.923.844,00)	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**36.938.923.844,00**	**(36.938.923.844,00)**	**(100,00)**

5.4.1.3.1.2. Hibah Barang / Jasa **Rp1.060.727.819.878,67**

Realisasi Hibah Barang /Jasa pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.060.727.819.878,67 merupakan hibah aset dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	708.921.924.099,77	271.024.470.195,00	437.897.453.904,77	161,571
2	Dinas Kesehatan	326.851.881.081,00	121.645.756.804,00	205.206.124.277,00	168,69
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	0,00	16.707.633.730,00	(16.707.633.730,00)	(100,00)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	6.662.455.373,00	0,00	6.662.455.373,00	0,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	8.256.957.108,00	336.067.338,00	7.920.889.770,00	2.356,94
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	0,00	4.596.052.752,00	(4.596.052.752,00)	(100,00)
7	RSJD Surakarta	0,00	2.389.995.000,00	(2.389.995.000,00)	(100,00)
8	Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	0,00	7,00	(7,00)	(100,00)
9	Dinas Sosial	0,00	1.306.373.036,00	(1.306.373.036,00)	(100,00)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	3.954.008.370,00	(3.954.008.370,00)	(100,00)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	37.842.000,00	(37.842.000,00)	(100,00)
12	Dinas Perhubungan	2.659.160.727,00	3.549.473.211,00	(890.312.484,00)	(25,08)
13	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	50.655.372,00	0,00	50.655.372,00	0,00
14	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	8.309.078.665,00	(8.309.078.665,00)	(100,00)
15	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.042.924.478,60	0,00	4.042.924.478,60	0,00
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.171.776.514,30	0,00	3.171.776.514,30	0,00
17	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	110.085.125,00	1.280.249.000,00	(1.170.163.875,00)	(91,40)
18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	918.000.000,00	(918.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**1.060.727.819.878,67**	**436.055.000.108,00**	**624.672.819.770,67**	**143,26**

5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya Rp24.324.379.130,00

Realisasi Pendapatan Lainnya pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp24.324.379.130,00merupakan pendapatan sumbangan dari pihak ketiga.

5.4.2. BEBAN LO Rp24.826.628.352.419,18

Beban LO merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Beban Operasional	17.583.294.639.755,47	16.034.502.481.572,90	1.548.792.158.182,57	9,66
2	Beban Transfer	7.243.333.712.663,71	6.599.425.750.479,29	643.907.962.184,42	9,76
	Jumlah	**24.826.628.352.419,18**	**22.633.928.232.052,20**	**2.192.700.120.366,73**	**9,69**

5.4.2.1. BEBAN OPERASIONAL Rp17.583.294.639.755,47

Realisasi Beban Operasional pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp17.583.294.639.755,47 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Beban Pegawai	6.466.019.810.256,00	6.120.397.772.800,00	345.622.037.456,00	5,65
2	Beban Persediaan	1.457.830.343.901,44	1.159.304.252.796,95	298.526.091.104,50	25,75
3	Beban Jasa	1.824.660.171.886,78	1.567.256.021.526,93	257.404.150.359,86	16,42
4	Beban Pemeliharaan	587.528.328.374,00	311.393.352.455,00	276.134.975.919,00	88,68
5	Beban Perjalanan Dinas	383.325.447.770,00	286.252.574.896,00	97.072.872.874,00	33,91
6	Beban Bunga	17.191.692,00	0,00	17.191.692,00	0,00
7	Bunga Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Hibah	5.228.848.201.627,70	4.953.383.231.751,00	275.464.969.876,70	0,00
9	Beban Bantuan Sosial	78.099.142.638,00	238.268.220.000,00	(160.169.077.362,00)	0,00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.398.308.773.837,83	1.367.763.205.123,53	30.545.568.714,30	2,23
11	Beban Penyisihan Piutang	82.300.514.286,50	2.092.196.273,47	80.208.318.013,03	3.833,69
12	Beban Lainnya	76.356.713.484,92	28.391.653.950,00	47.965.059.534,92	168,94
	Jumlah	**17.583.294.639.755,47**	**16.034.502.481.572,90**	**1.548.792.158.182,57**	**9,66**

5.4.2.1.1 Beban Pegawai Rp6.466.019.810.256,00

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang terealisasi sebesar Rp6.466.019.810.256,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Gaji dan Tunjangan	2.829.011.278.273,00	2.880.332.696.063,00	(51.321.417.790,00)	(1,78)
2	Tambahan Penghasilan PNS	2.840.062.426.934,00	2.678.230.711.148,00	161.831.715.786,00	6,04
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	39.739.333.000,00	29.995.000.000,00	9.744.333.000,00	32,49
4	Belanja insentif Pemungut Pajak	48.437.215.082,00	47.611.944.759,00	825.270.323,00	0,00
5	Honorarium PNS	54.034.058.500,00	43.729.989.500,00	10.304.069.000,00	23,56
6	Honorarium Non PNS	650.025.102.484,00	384.412.625.377,00	265.612.477.107,00	69,10
7	Beban Pegawai BOS	4.710.395.983,00	56.084.805.953,00	(51.374.409.970,00)	0,00
	Jumlah	**6.466.019.810.256,00**	**6.120.397.772.800,00**	**345.622.037.456,00**	**5,65**

Dan dengan rincian per SKPD sebagai berikut :

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.074.093.575.287,00	3.792.526.864.391,00	281.566.710.896,00	7,42
2	Dinas Kesehatan	104.422.409.971,00	103.591.619.013,00	830.790.958,00	0,80
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	176.617.419.951,00	166.890.341.351,00	9.727.078.600,00	5,83
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	123.900.612.934,00	118.177.957.153,00	5.722.655.781,00	4,84
5	RSUD Tugurejo Semarang	92.249.642.558,00	86.997.613.718,00	5.252.028.840,00	6,04
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	54.740.894.552,00	54.978.227.329,00	(237.332.777,00)	(0,43)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	32.540.597.122,00	29.301.616.705,00	3.238.980.417,00	11,05
8	RSJD Surakarta	63.378.650.593,00	62.316.563.241,00	1.062.087.352,00	1,70
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	38.068.636.238,00	37.270.657.495,00	797.978.743,00	2,14
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	110.081.620.927,00	115.041.350.380,00	(4.959.729.453,00)	(4,31)
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	99.197.653.573,00	97.044.015.230,00	2.153.638.343,00	2,22

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16.512.936.096,00	16.404.273.903,00	108.662.193,00	0,66
13	Satuan Polisi Pamong Praja	29.459.651.237,00	15.224.939.167,00	14.234.712.070,00	93,50
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.919.781.071,00	16.433.017.881,00	3.486.763.190,00	21,22
15	Dinas Sosial	128.368.444.077,00	127.763.720.348,00	604.723.729,00	0,47
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.995.652.871,00	9.255.074.770,00	1.740.578.101,00	18,81
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	74.565.079.495,00	74.862.473.724,00	(297.394.229,00)	(0,40)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	18.000.684.400,00	15.479.218.682,00	2.521.465.718,00	16,29
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	128.889.500.028,00	125.835.727.760,00	3.053.772.268,00	2,43
20	Dinas Ketahanan Pangan	15.869.143.796,00	14.800.041.411,00	1.069.102.385,00	7,22
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	20.133.279.637,00	19.172.153.745,00	961.125.892,00	5,01
22	Dinas Perhubungan	46.128.130.408,00	53.584.358.273,00	(7.456.227.865,00)	(13,91)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	23.407.534.167,00	23.521.396.963,00	(113.862.796,00)	(0,48)
24	Dinas Koperasi dan UMKM	23.013.493.628,00	21.462.070.796,00	1.551.422.832,00	7,23
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	12.766.310.844,00	14.516.274.287,00	(1.749.963.443,00)	(12,06)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	44.927.045.126,00	46.450.409.194,00	(1.523.364.068,00)	(3,28)
27	Badan Arsip dan Perpustakaan	26.052.115.632,00	25.658.492.647,00	393.622.985,00	1,53
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	53.570.485.951,00	53.745.308.910,00	(174.822.959,00)	(0,33)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	150.918.937.732,00	155.673.470.553,00	(4.754.532.821,00)	(3,05)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	38.442.184.910,00	37.650.346.307,00	791.838.603,00	2,10
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	27.897.945.241,00	26.598.966.750,00	1.298.978.491,00	4,88
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	47.888.836.090,00	48.378.896.853,00	(490.060.763,00)	(1,01)
33	KDH dan Wakil KDH	15.025.625.526,00	14.709.657.315,00	315.968.211,00	2,15
34	DPRD	78.928.893.019,00	55.475.495.474,00	23.453.397.545,00	42,28
35	Sekretariat Daerah	98.808.534.150,00	100.407.404.174,00	(1.598.870.024,00)	(1,59)
36	Sekretariat DPRD	24.844.803.152,00	24.374.391.762,00	470.411.390,00	1,93
37	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	32.318.874.375,00	31.086.598.101,00	1.232.276.274,00	3,96
38	Inspektorat	18.427.293.550,00	18.060.477.759,00	366.815.791,00	2,03
39	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	169.187.584.727,00	169.272.158.796,00	(84.574.069,00)	(0,05)
40	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	34.248.419.713,00	34.571.971.050,00	(323.551.337,00)	(0,94)
41	Badan Kepegawaian Daerah	24.265.912.357,00	24.406.721.860,00	(140.809.503,00)	(0,58)
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32.285.379.617,00	31.239.589.230,00	1.045.790.387,00	3,35
43	Badan Penghubung	10.659.603.927,00	10.185.848.349,00	473.755.578,00	4,65
	Jumlah	**6.466.019.810.256,00**	**6.120.397.772.800,00**	**345.622.037.456,00**	**5,65**

5.4.2.1.2 Beban Persediaan Rp1.457.830.343.901,44

Beban Persediaan merupakan pemakaian persediaan (*use of goods*) periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Beban persediaan selama tahun 2018 adalah sebesar Rp1.457.830.343.901,44 dan termasuk sebagai Beban Barang dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	375.758.059.882,42	28.647.614.887,00	347.110.444.995,42	1.211,66
2	Dinas Kesehatan	254.504.898.096,00	135.155.811.521,00	119.349.086.575,00	88,30
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	302.379.328.004,90	328.830.677.350,67	(26.451.349.345,77)	(8,04)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	136.428.848.989,30	128.606.795.798,02	7.822.053.191,28	6,08
5	RSUD Tugurejo Semarang	51.518.456.649,64	58.166.914.568,26	(6.648.457.918,62)	(11,43)
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	14.686.934.839,59	13.052.290.847,00	1.634.643.992,59	12,52
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	17.751.493.567,78	17.374.867.048,49	376.626.519,29	2,17
8	RSJD Surakarta	10.431.142.048,08	12.949.302.990,33	(2.518.160.942,25)	(19,45)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	13.230.860.339,73	12.283.704.270,72	947.156.069,01	7,71
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	11.038.048.383,00	12.987.629.497,00	(1.949.581.114,00)	(15,01)
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	12.035.612.705,00	13.984.651.159,00	(1.949.038.454,00)	(13,94)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.093.415.681,00	2.411.972.500,00	681.443.181,00	28,25
13	Satuan Polisi Pamong Praja	1.868.119.285,00	1.958.880.433,00	(90.761.148,00)	(4,63)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.137.203.700,00	3.741.899.050,00	(604.695.350,00)	(16,16)
15	Dinas Sosial	43.185.067.352,00	46.846.601.256,00	(3.661.533.904,00)	(7,82)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.158.998.156,00	3.340.944.366,00	3.818.053.790,00	114,28
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.214.973.856,00	8.176.629.385,00	(2.961.655.529,00)	(36,22)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	982.775.200,00	2.475.879.950,00	(1.493.104.750,00)	(60,31)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20.056.643.549,00	13.222.313.626,52	6.834.329.922,48	51,69
20	Dinas Ketahanan Pangan	5.922.949.744,00	8.516.694.913,00	(2.593.745.169,00)	(30,45)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	2.470.080.200,00	3.635.521.300,00	(1.165.441.100,00)	(32,06)
22	Dinas Perhubungan	7.416.920.603,00	5.404.129.475,00	2.012.791.128,00	37,25
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.629.050.680,00	3.648.807.467,00	(2.019.756.787,00)	(55,35)
24	Dinas Koperasi dan UMKM	7.932.476.916,00	5.775.623.264,00	2.156.853.652,00	37,34
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	642.236.045,00	2.007.974.705,00	(1.365.738.660,00)	(68,02)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	14.023.123.024,00	24.701.073.267,00	(10.677.950.243,00)	(43,23)
27	Badan Arsip dan Perpustakaan	1.637.907.250,00	3.950.387.460,00	(2.312.480.210,00)	(58,54)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	19.410.840.533,00	11.306.344.817,00	8.104.495.716,00	71,68
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	41.720.608.280,00	96.517.890.177,00	(54.797.281.897,00)	(56,77)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	19.329.429.510,00	27.129.902.066,00	(7.800.472.556,00)	(28,75)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.536.864.500,00	18.285.430.650,00	(15.748.566.150,00)	(86,13)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.283.692.640,00	8.937.231.175,43	(1.653.538.535,43)	(18,50)
33	Sekretariat Daerah	9.777.117.619,00	23.182.716.005,00	(13.405.598.386,00)	(57,83)
34	Sekretariat DPRD	2.897.437.530,00	12.881.859.914,00	(9.984.422.384,00)	(77,51)
35	Inspektorat	1.175.811.000,00	2.328.910.501,00	(1.153.099.501,00)	(49,51)
36	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.003.614.165,00	7.982.717.204,00	(4.979.103.039,00)	(62,37)
37	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	13.329.693.076,00	24.158.076.287,00	(10.828.383.211,00)	(44,82)
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.067.027.275,00	6.291.315.312,00	(1.224.288.037,00)	(19,46)
39	Badan Kepegawaian Daerah	1.871.621.850,00	3.576.624.343,00	(1.705.002.493,00)	(47,67)
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.514.461.177,00	12.320.351.724,00	(8.805.890.547,00)	(71,47)
41	Badan Penghubung	776.500.000,00	2.018.043.601,00	(1.241.543.601,00)	(61,52)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
42	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	33.710.000,00	(33.710.000,00)	(100,00)
43	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	194.800,00	(194.800,00)	(100,00)
44	Sekretariat Komita Penyiaran Indonesia Daerah	0,00	1.356.000,00	(1.356.000,00)	(100,00)
45	Dinas Perkebunan	0,00	393.105.940,00	(393.105.940,00)	(100,00)
46	Dinas Kehutanan	0,00	102.879.925,50	(102.879.925,50)	(100,00)
	Jumlah	**1.457.830.343.901,44**	**1.159.304.252.796,95**	**298.526.091.104,50**	**25,75**

5.4.2.1.3 Beban Jasa Rp1.824.660.171.886,78

Beban Jasa merupakan beban jasa yang meliputi antara lain beban jasa kantor (air, telepon, listrik), beban sewa, beban jasa konsultasi dan lain-lain yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.824.660.171.886,78dan termasuk sebagai Beban Barang dan Jasa SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Beban Jasa Kantor	755.612.832.979,19	653.525.351.411,46	102.087.481.567,73	15,62
2	Beban Premi Asuransi	179.914.478.795,22	73.586.923.742,53	106.327.555.052,69	144,49
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	83.989.374.317,67	46.284.520.150,67	37.704.854.167,00	81,46
4	Beban Sewa Sarana Mobilitas	29.533.450.524,00	18.407.030.636,00	11.126.419.888,00	60,45
5	Beban Sewa Alat Berat	462.083.000,00	525.189.250,00	(63.106.250,00)	(12,02)
6	Beban Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	23.890.604.954,00	15.875.988.201,00	8.014.616.753,00	50,48
7	Beban Jasa Konsultansi	42.748.403.970,00	45.027.311.795,00	(2.278.907.825,00)	(5,06)
8	Beban Pengadaan Jasa Lainnya	5.511.518.000,00	7.285.598.015,00	(1.774.080.015,00)	(24,35)
9	Beban Cetak Dan Penggandaan	56.925.983.670,90	11.722.042.542,77	45.203.941.128,13	385,63
10	Beban Makanan Dan Minuman	123.845.981.504,00	27.692.200.173,00	96.153.781.331,00	347,22
11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	2.439.000.000,00	449.416.953,00	1.989.583.047,00	442,70
12	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Pns	18.564.317.652,00	12.737.272.549,16	5.827.045.102,84	45,75
13	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	29.001.221.000,00	17.401.929.083,67	11.599.291.916,33	66,66
14	Beban Barang Dana BOS	472.220.921.519,80	636.735.247.023,67	(164.514.325.503,87)	(25,84)
	Jumlah	**1.824.660.171.886,78**	**1.567.256.021.526,93**	**257.404.150.359,85**	**16,42**

Dengan rincian belanja jasa per SKPD sebagai berikut :

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	538.622.069.166,85	688.776.460.387,00	(150.154.391.220,15)	(21,80)
2	Dinas Kesehatan	208.024.316.162,27	87.544.981.867,00	120.479.334.295,27	137,62
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	225.447.612.486,09	197.394.024.532,00	28.053.587.954,09	14,21
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	122.513.622.871,46	129.301.373.537,13	(6.787.750.665,67)	(5,25)
5	RSUD Tugurejo Semarang	55.156.467.172,17	50.818.528.954,33	4.337.938.217,84	8,54
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	19.443.847.367,00	15.886.825.752,00	3.557.021.615,00	22,39
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	16.679.983.443,19	14.484.122.267,00	2.195.861.176,19	15,16
8	RSJD Surakarta	20.927.344.225,08	19.651.337.383,67	1.276.006.841,41	6,49

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	19.200.352.003,00	18.852.763.301,34	347.588.701,66	1,84
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	22.197.492.477,86	19.512.541.708,00	2.684.950.769,86	13,76
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	11.192.507.558,98	7.305.270.087,33	3.887.237.471,65	53,21
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.123.988.533,26	9.441.367.989,00	(2.317.379.455,74)	(24,54)
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.657.559.667,17	7.686.537.552,66	5.971.022.114,51	77,68
14	Satuan Polisi Pamong Praja	10.221.661.705,13	2.040.245.074,00	8.181.416.631,13	401,00
15	Dinas Sosial	14.043.399.065,34	8.936.026.537,00	5.107.372.528,34	57,15
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.575.741.815,04	2.560.271.254,50	3.015.470.560,54	117,78
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.044.932.120,40	7.866.847.609,00	7.178.084.511,40	91,24
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	7.023.884.417,72	2.982.794.026,33	4.041.090.391,39	135,48
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.233.525.000,07	5.464.693.100,59	8.768.831.899,49	160,46
20	Dinas Ketahanan Pangan	3.960.412.446,43	2.737.051.655,00	1.223.360.791,43	44,70
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	11.012.399.951,60	6.023.321.760,00	4.989.078.191,60	82,83
22	Dinas Perhubungan	37.373.953.836,16	11.594.305.816,67	25.779.648.019,49	222,35
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.888.877.914,00	12.305.636.875,00	5.583.241.039,00	45,37
24	Dinas Koperasi dan UMKM	22.295.359.283,45	11.023.487.882,53	11.271.871.400,93	102,25
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	7.213.760.716,48	2.031.420.941,70	5.182.339.774,78	255,11
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	83.745.581.153,89	67.595.083.051,33	16.150.498.102,56	23,89
27	Badan Arsip dan Perpustakaan	6.289.663.192,89	4.218.914.871,01	2.070.748.321,88	49,08
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.206.156.991,45	5.125.742.564,00	6.080.414.427,45	118,63
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	18.030.070.977,57	11.957.290.270,67	6.072.780.706,91	50,79
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12.849.177.692,00	7.202.750.441,00	5.646.427.251,00	78,39
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.863.993.091,01	7.450.439.378,00	3.413.553.713,01	45,82
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.496.791.154,77	13.091.917.802,17	4.404.873.352,60	33,65
33	Sekretariat Daerah	41.533.889.194,97	21.518.133.620,83	20.015.755.574,14	93,02
34	Sekretariat DPRD	39.792.055.042,39	20.112.126.426,17	19.679.928.616,22	97,85
35	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.063.098.480,00	6.970.638.872,00	4.092.459.608,00	58,71
36	Inspektorat	3.511.932.618,76	1.827.052.595,66	1.684.880.023,09	92,22
37	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	66.013.033.963,12	26.919.175.014,50	39.093.858.948,62	145,23
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.762.003.977,41	2.547.390.935,00	7.214.613.042,41	283,22
39	Badan Kepegawaian Daerah	13.331.571.386,00	4.794.618.639,00	8.536.952.747,00	178,05
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.871.446.719,56	18.218.317.312,24	7.653.129.407,32	42,01
41	Badan Penghubung	7.224.634.844,79	5.225.646.512,58	1.998.988.332,21	38,25
42	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	31.949.750,00	(31.949.750,00)	(100,00)
43	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	24.750.000,00	(24.750.000,00)	(100,00)
44	Badan Koordinasi Wilayah III	0,00	42.340.000,00	(42.340.000,00)	(100,00)
45	Sekretariat Komita Penyiaran Indonesia Daerah	0,00	8.255.525,00	(8.255.525,00)	(100,00)
46	Dinas Perkebunan	0,00	45.180.166,67	(45.180.166,67)	(100,00)
47	Dinas Kehutanan	0,00	106.069.928,33	(106.069.928,33)	(100,00)
	Jumlah	**1.824.660.171.886,78**	**1.567.256.021.526,93**	**257.404.150.359,86**	**16,42**

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan Rp587.528.328.374,00

Beban Pemeliharaan merupakan Beban Pemeliharaan Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp587.528.328.374,00 dan termasuk sebagai Beban Barang dan Jasa SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	236.722.830.919,00	5.783.219.640,00	230.939.611.279,00	3.993,27
2	Dinas Kesehatan	6.492.004.311,00	4.679.607.360,00	1.812.396.951,00	38,73
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	23.598.907.233,00	21.541.347.702,00	2.057.559.531,00	9,55
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	21.216.999.093,00	18.141.581.139,00	3.075.417.954,00	16,95
5	RSUD Tugurejo Semarang	4.606.057.137,00	2.945.989.562,00	1.660.067.575,00	56,35
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	2.902.919.510,00	2.599.383.900,00	303.535.610,00	11,68
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	1.739.579.890,00	1.750.351.876,00	(10.771.986,00)	(0,62)
8	RSJD Surakarta	2.843.966.947,00	3.142.406.471,00	(298.439.524,00)	(9,50)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	908.174.492,00	1.119.037.716,00	(210.863.224,00)	(18,84)
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	109.201.655.157,00	107.097.088.561,00	2.104.566.596,00	1,97
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	36.958.339.816,00	38.382.307.123,00	(1.423.967.307,00)	(3,71)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	859.430.280,00	856.355.550,00	3.074.730,00	0,36
13	Satuan Polisi Pamong Praja	2.250.914.158,00	1.442.521.405,00	808.392.753,00	56,04
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	961.951.811,00	1.041.564.471,00	(79.612.660,00)	(7,64)
15	Dinas Sosial	3.561.335.925,00	3.733.561.876,00	(172.225.951,00)	(4,61)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	764.730.897,00	556.596.339,00	208.134.558,00	37,39
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.504.848.956,00	2.305.361.223,00	3.199.487.733,00	138,78
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	738.580.695,00	482.357.725,00	256.222.970,00	53,12
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.506.403.302,00	1.425.034.716,00	4.081.368.586,00	286,40
20	Dinas Ketahanan Pangan	626.106.117,00	426.119.722,00	199.986.395,00	46,93
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	1.724.398.779,00	2.118.799.547,00	(394.400.768,00)	(18,61)
22	Dinas Perhubungan	5.160.604.114,00	3.796.818.874,00	1.363.785.240,00	35,92
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.532.539.747,00	1.274.925.051,00	257.614.696,00	20,21
24	Dinas Koperasi dan UMKM	1.639.155.553,00	1.180.290.707,00	458.864.846,00	38,88
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	1.115.592.854,00	737.977.346,00	377.615.508,00	51,17
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.390.992.591,00	2.290.556.157,00	100.436.434,00	4,38
27	Badan Arsip dan Perpustakaan	1.881.625.325,00	1.061.292.800,00	820.332.525,00	77,30
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.023.231.907,00	11.426.215.092,00	(9.402.983.185,00)	(82,29)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	9.272.551.597,00	7.002.799.755,00	2.269.751.842,00	32,41
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.719.034.651,00	1.418.912.483,00	300.122.168,00	21,15
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.467.446.725,00	1.883.936.775,00	583.509.950,00	30,97
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.216.236.665,00	1.308.832.490,00	1.907.404.175,00	145,73
33	Sekretariat Daerah	20.298.234.234,00	8.470.486.790,00	11.827.747.444,00	139,63
34	Sekretariat DPRD	8.938.540.070,00	11.354.671.528,00	(2.416.131.458,00)	(21,28)
35	Inspektorat	2.261.309.530,00	1.285.356.354,00	975.953.176,00	75,93
36	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.227.438.214,00	1.658.902.585,00	568.535.629,00	34,27
37	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	33.790.723.047,00	22.425.171.087,00	11.365.551.960,00	50,68

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.793.581.292,00	2.306.601.436,00	2.486.979.856,00	107,82
39	Badan Kepegawaian Daerah	1.664.584.433,00	1.723.815.772,00	(59.231.339,00)	(3,44)
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.506.639.925,00	4.426.884.119,00	4.079.755.806,00	92,16
41	Badan Penghubung	2.938.130.475,00	2.788.311.630,00	149.818.845,00	5,37
	Jumlah	**587.528.328.374,00**	**311.393.352.455,00**	**276.134.975.919,00**	**88,68**

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas Rp383.325.447.770,00

Beban Perjalanan Dinas merupakan Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp383.325.447.770,00 dan termasuk sebagai Beban Barang dan Jasa SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.358.947.645,00	9.225.056.522,00	3.133.891.123,00	33,97
2	Dinas Kesehatan	10.785.181.079,00	8.481.535.935,00	2.303.645.144,00	27,16
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	853.901.045,00	933.119.690,00	(79.218.645,00)	(8,49)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	1.131.154.024,00	1.335.900.639,00	(204.746.615,00)	(15,33)
5	RSUD Tugurejo Semarang	350.125.505,00	235.027.526,00	115.097.979,00	48,97
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	307.101.619,00	456.526.791,00	(149.425.172,00)	(32,73)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	692.352.954,00	809.199.820,00	(116.846.866,00)	(14,44)
8	RSJD Surakarta	633.176.320,00	558.423.583,00	74.752.737,00	13,39
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.582.733.786,00	769.133.960,00	813.599.826,00	105,78
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	3.975.234.188,00	3.261.279.186,00	713.955.002,00	21,89
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	11.877.535.199,00	12.185.387.247,00	(307.852.048,00)	(2,53)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.607.210.455,00	1.643.147.264,00	2.964.063.191,00	180,39
13	Satuan Polisi Pamong Praja	5.776.714.125,00	4.314.175.517,00	1.462.538.608,00	33,90
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.977.566.982,00	5.618.882.572,00	2.358.684.410,00	41,98
15	Dinas Sosial	6.082.638.622,00	4.190.390.944,00	1.892.247.678,00	45,16
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.800.495.522,00	2.739.815.591,00	2.060.679.931,00	75,21
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.021.435.013,00	7.724.047.340,00	3.297.387.673,00	42,69
18	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	2.510.055.132,00	1.936.361.022,00	573.694.110,00	29,63
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.774.819.830,00	8.673.591.011,00	5.101.228.819,00	58,81
20	Dinas Ketahanan Pangan	1.515.194.109,00	1.539.483.362,00	(24.289.253,00)	(1,58)
21	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.331.898.924,00	4.785.580.052,00	2.546.318.872,00	53,21
22	Dinas Perhubungan	6.823.282.830,00	4.465.033.647,00	2.358.249.183,00	52,82
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.331.310.833,00	4.280.510.469,00	1.050.800.364,00	24,55
24	Dinas Koperasi dan UMKM	14.323.435.434,00	9.801.413.410,00	4.522.022.024,00	46,14
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	4.645.521.525,00	2.577.377.808,00	2.068.143.717,00	80,24
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	12.318.401.660,00	10.452.719.870,00	1.865.681.790,00	17,85
27	Badan Arsip dan Perpustakaan	2.710.059.316,00	1.518.011.000,00	1.192.048.316,00	78,53
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.864.136.439,00	3.603.434.896,00	2.260.701.543,00	62,74
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	15.550.516.733,00	14.542.650.918,00	1.007.865.815,00	6,93
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.254.509.490,00	4.032.052.040,00	222.457.450,00	5,52

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.971.270.501,00	7.034.878.319,00	936.392.182,00	13,31
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.679.907.921,00	3.795.213.407,00	2.884.694.514,00	76,01
33	Sekretariat Daerah	36.269.848.426,00	27.755.343.078,00	8.514.505.348,00	30,68
34	Sekretariat DPRD	79.390.974.342,00	59.470.990.160,00	19.919.984.182,00	33,50
35	Inspektorat	15.312.972.560,00	13.120.225.228,00	2.192.747.332,00	16,71
36	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.676.600.913,00	10.401.516.466,00	275.084.447,00	2,64
37	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	22.118.757.707,00	13.015.274.954,00	9.103.482.753,00	69,94
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.033.176.776,00	4.576.603.559,00	2.456.573.217,00	53,68
39	Badan Kepegawaian Daerah	6.385.528.978,00	3.924.998.870,00	2.460.530.108,00	62,69
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.055.985.173,00	5.005.992.680,00	3.049.992.493,00	60,93
41	Badan Penghubung	1.663.778.135,00	1.462.268.543,00	201.509.592,00	13,78
	Jumlah	**383.325.447.770,00**	**286.252.574.896,00**	**97.072.872.874,00**	**33,91**

5.4.2.1.6 Beban Bunga Rp17.191.692,00

Beban Bunga merupakan Beban Bunga periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018sebesar Rp17.191.692,00, merupakan beban bunga RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

5.4.2.1.7 Beban Subsidi Rp0,00

Beban Subsidi merupakan Beban Subsidi periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018bernilai Nihil.

5.4.2.1.8 Beban Hibah Rp5.228.848.201.627,70

Beban Hibah merupakan Beban Hibah periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesarRp5.228.848.201.627,70, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.655.506.000,00	0,00	2.655.506.000,00	0,00
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	253.232.151,00	0,00	253.232.151,00	0,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.005.303.700,00	0,00	5.005.303.700,00	0,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	753.636.000,00	0,00	753.636.000,00	0,00
5	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	440.284.350,00	0,00	440.284.350,00	0,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.011.719.180,00	0,00	8.011.719.180,00	0,00
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan	49.483.926.341,00	0,00	49.483.926.341,00	0,00
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.159.635.500,00	0,00	6.159.635.500,00	0,00
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	968.547.000,00	0,00	968.547.000,00	0,00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.115.427.485,70	0,00	5.115.427.485,70	0,00
11	SKPKD	5.150.000.983.920,00	4.953.383.231.751,00	196.617.752.169,00	3,97
	Jumlah	**5.228.848.201.627,70**	**4.953.383.231.751,00**	**275.464.969.876,70**	**5,56**

5.4.2.1.9 Beban Bantuan Sosial Rp78.099.142.638,00

Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018sebesar Rp78.099.142.638,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Kesehatan	2.605.517.000,00	0,00	2.605.517.000,00	0,00
2	Dinas Sosial	10.692.160.075,00	0,00	10.692.160.075,00	0,00
3	Dinas Ketahanan Pangan	2.275.962.500,00	0,00	2.275.962.500,00	0,00
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.144.080.000,00	0,00	5.144.080.000,00	0,00
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	15.938.473.063,00	0,00	15.938.473.063,00	0,00
6	SKPKD	41.442.950.000,00	238.268.220.000,00	(196.825.270.000,00)	(82,61)
	Jumlah	**78.099.142.638,00**	**238.268.220.000,00**	**(160.169.077.362,00)**	**(67,22)**

5.4.2.1.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1.398.308.773.837,83

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang menjadi Beban pada tahun 2018 sebesar Rp1.398.308.773.837,83, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Beban Penyusutan Aset Tetap	1.361.787.529.805,27	1.364.006.489.764,53	(2.218.959.959,26)	(0,16)
2	Beban Amortisasi	2.917.187.647,42	2.671.291.304,19	245.896.343,23	9,21
3	Beban Penyusutan Aset Lainnya	33.604.056.385,14	1.085.424.054,81	32.518.632.330,33	2.995,94
	Jumlah	**1.398.308.773.837,83**	**1.367.763.205.123,53**	**30.545.568.714,30**	**2,23**

5.4.2.1.10.1 Beban Penyusutan Aset Tetap Rp1.361.787.529.805,27

Beban Penyusutan Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.361.787.529.805,27 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	280.961.526.558,35	210.121.870.335,14	70.839.656.223,21	33,71
2	Dinas Kesehatan	12.932.669.534,02	12.693.139.388,07	239.530.145,95	1,89
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	78.521.308.296,71	70.440.309.366,21	8.080.998.930,50	11,47
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	83.263.823.061,97	74.736.153.921,68	8.527.669.140,29	11,41
5	RSUD Tugurejo Semarang	45.243.905.333,77	37.184.909.476,31	8.058.995.857,46	21,67
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	10.821.229.664,32	9.205.303.561,63	1.615.926.102,69	17,55
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	25.967.972.272,77	18.385.233.370,73	7.582.738.902,04	41,24
8	RSJD Surakarta	10.450.636.993,62	9.283.419.926,78	1.167.217.066,84	12,57
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	13.191.568.330,16	13.223.200.294,59	(31.631.964,43)	(0,24)
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	611.129.569.930,02	735.719.628.966,03	(124.590.059.036,01)	(16,93)
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	39.883.726.521,23	33.680.473.655,38	6.203.252.865,85	18,42
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	665.276.479,09	929.832.706,57	(264.556.227,48)	(28,45)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	1.262.225.469,32	1.238.107.180,61	24.118.288,71	1,95
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	946.606.320,92	906.519.416,66	40.086.904,26	4,42

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
15	Dinas Sosial	6.324.504.536,15	5.446.413.196,83	878.091.339,32	16,12
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.613.271.730,39	1.779.731.332,13	(166.459.601,74)	(9,35)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.572.336.488,55	3.702.755.422,98	(130.418.934,43)	(3,52)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	737.293.423,30	797.625.323,30	(60.331.900,00)	(7,56)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7.659.902.242,69	7.662.447.594,65	(2.545.351,96)	(0,03)
20	Dinas Ketahanan Pangan	824.320.748,44	646.523.073,42	177.797.675,02	27,50
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	1.388.883.525,43	1.605.393.975,44	(216.510.450,01)	(13,49)
22	Dinas Perhubungan	6.759.735.738,62	5.602.808.189,90	1.156.927.548,72	20,65
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.266.191.802,66	3.081.424.905,74	3.184.766.896,92	103,35
24	Dinas Koperasi dan UMKM	2.098.442.574,92	1.859.921.177,70	238.521.397,22	12,82
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	1.481.531.902,52	1.288.535.584,81	192.996.317,71	14,98
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	5.577.419.298,53	5.319.112.128,21	258.307.170,32	4,86
27	Badan Arsip dan Perpustakaan	2.422.763.368,21	2.387.977.785,98	34.785.582,23	1,46
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.706.763.476,39	8.306.219.223,73	400.544.252,66	4,82
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	11.447.461.740,63	12.040.813.051,98	(593.351.311,35)	(4,93)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.957.693.909,46	5.459.222.868,28	(501.528.958,82)	(9,19)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6.862.095.877,22	5.867.158.945,18	994.936.932,04	16,96
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.346.420.116,42	6.781.187.644,75	565.232.471,67	8,34
33	SKPKD	4.589.558.012,30	5.833.119.564,29	(1.243.561.551,99)	(21,32)
34	Sekretariat Daerah	14.180.520.021,96	10.929.927.643,07	3.250.592.378,89	29,74
35	Sekretariat DPRD	5.985.155.011,07	5.921.897.436,16	63.257.574,91	1,07
36	Inspektorat	1.340.991.074,06	1.297.958.149,09	43.032.924,97	3,32
37	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.341.155.279,40	2.107.692.622,34	233.462.657,06	11,08
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	19.136.513.185,41	19.037.550.455,21	98.962.730,20	0,52
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.812.374.855,19	4.193.104.434,91	619.270.420,28	14,77
40	Badan Kepegawaian Daerah	2.133.446.449,22	1.722.952.492,61	410.493.956,61	23,83
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.054.159.030,11	3.930.112.959,11	124.046.071,00	3,16
42	Badan Penghubung	1.924.579.619,75	1.648.801.016,34	275.778.603,41	16,73
	Jumlah	**1.361.787.529.805,27**	**1.364.006.489.764,53**	**(2.218.959.959,26)**	**(0,16)**

5.4.2.1.10.2 Beban Amortisasi Rp2.917.187.647,42

Beban Amortisasi pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.917.187.647,42 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	163.730.860,20	152.832.228,80	10.898.631,40	7,13
2	Dinas Kesehatan	155.484.440,00	129.133.440,00	26.351.000,00	20,41
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	525.925.010,75	448.973.845,48	76.951.165,27	17,14
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	159.630.846,60	59.150.000,00	100.480.846,60	169,87
5	RSUD Tugurejo Semarang	88.800.000,00	138.200.000,00	(49.400.000,00)	(35,75)
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	193.080.000,00	128.600.000,00	64.480.000,00	50,14
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	366.084.200,00	323.704.200,00	42.380.000,00	13,09

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
8	RSJD Surakarta	99.247.000,00	99.247.000,00	0,00	0,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	250.136.448,21	214.136.448,24	35.999.999,97	16,81
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Sosial	86.407.966,66	86.407.966,67	(0,01)	(0,00)
12	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	39.116.000,00	(39.116.000,00)	(100,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	10.188.200,00	10.188.200,00	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	8.691.500,00	43.457.500,00	(34.766.000,00)	(80,00)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	241.206.000,00	241.206.000,00	0,00	0,00
16	Dinas Koperasi dan UMKM	5.038.000,00	0,00	5.038.000,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	97.041.500,00	97.041.500,00	0,00	0,00
18	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	44.114.000,00	0,00	44.114.000,00	0,00
19	Badan Arsip dan Perpustakaan	28.190.000,00	28.190.000,00	0,00	0,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	62.046.000,00	29.570.000,00	32.476.000,00	109,83
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	33.830.000,00	37.830.000,00	(4.000.000,00)	(10,57)
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.548.000,00	9.548.000,00	0,00	0,00
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	100.518.325,00	74.379.625,00	26.138.700,00	35,14
26	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	85.472.400,00	100.272.400,00	(14.800.000,00)	(14,76)
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.000.000,00	92.380.000,00	(72.380.000,00)	(78,35)
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.736.950,00	58.686.950,00	(4.950.000,00)	(8,43)
	Jumlah	**2.917.187.647,42**	**2.671.291.304,19**	**245.896.343,23**	**9,21**

5.4.2.1.10.3 Beban Penyusutan Aset Lainnya Rp33.604.056.385,14

Beban Amortisasi pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp33.604.056.385,14dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	96.483.279,79	176.543.953,06	(80.060.673,27)	(45,35)
2	Dinas Kesehatan	63.789.430,48	12.000.000,00	51.789.430,48	431,58
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	70.859.188,12	5.529.600,00	65.329.588,12	1.181,45
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	66.168.600,00	7.220.268,00	58.948.332,00	816,43
5	RSUD Tugurejo Semarang	16.797.941,80	0,00	16.797.941,80	0,00
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	231.100,00	3.088.000,00	(2.856.900,00)	(92,52)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	12.372.125,00	4.235.406,09	8.136.718,91	192,11
8	RSJD Surakarta	58.001.979,50	20.848.332,00	37.153.647,50	178,21
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	30.257.250,00	5.794.538,80	24.462.711,20	422,17
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	30.765.035.239,11	0,00	30.765.035.239,11	0,00
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	40.877.531,00	0,00	40.877.531,00	0,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.562.400,00	1.952.400,00	(390.000,00)	(19,98)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	1.420.000,00	1.905.500,00	(485.500,00)	(25,48)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.289.833,25	0,00	34.289.833,25	0,00
15	Dinas Sosial	32.761.594,62	1.776.000,00	30.985.594,62	1.744,68

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	76.351.113,76	0,00	76.351.113,76	0,00
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.003.600,28	0,00	18.003.600,28	0,00
18	Dinas Perhubungan	332.309.365,44	805.827.631,64	(473.518.266,20)	(58,76)
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	42.444.470,80	0,00	42.444.470,80	0,00
20	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	15.015.331,80	0,00	15.015.331,80	0,00
21	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	4.941.500,00	0,00	4.941.500,00	0,00
22	Badan Arsip dan Perpustakaan	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	435.719.036,61	20.689.149,36	415.029.887,25	2.006,03
24	Dinas Pertanian dan Perkebunan	249.333,33	5.169.333,34	(4.920.000,01)	(95,18)
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	762.824.461,11	3.999.330,00	758.825.131,11	18.973,81
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	38.839.300,00	0,00	38.839.300,00	0,00
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	127.612.337,60	5.978.000,00	121.634.337,60	2.034,70
28	SKPKD	175.500,02	175.500,02	0,00	0,00
29	Sekretariat Daerah	16.652.740,00	0,00	16.652.740,00	0,00
30	Inspektorat	627.600,00	0,00	627.600,00	0,00
31	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.453.000,00	0,00	3.453.000,00	0,00
32	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	429.429.564,32	1.224.112,50	428.205.451,82	34.980,89
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	320.000,00	620.000,00	(300.000,00)	(48,39)
34	Badan Kepegawaian Daerah	969.687,40	847.000,00	122.687,40	14,48
35	Badan Penghubung	6.730.950,00	0,00	6.730.950,00	0,00
	Jumlah	**33.604.056.385,14**	**1.085.424.054,81**	**32.518.632.330,33**	**2.995,94**

5.4.2.1.11 Beban Penyisihan Piutang Rp82.300.514.286,50

Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp82.300.514.286,50dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Kesehatan	2.904.642,28	0,00	2.904.642,28	100,00
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	2.423.892.513,21	1.200.501.379,05	1.223.391.134,17	101,91
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	878.723.892,81	774.065.091,35	104.658.801,46	13,52
4	RSUD Tugurejo Semarang	240.691.536,83	81.796.065,23	158.895.471,61	194,26
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	315.210.579,02	27.052.978,91	288.157.600,11	1.065,16
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	30.748.192,52	12.481.826,00	18.266.366,52	146,34
7	RSJD Surakarta	31.055.195,10	41.747.230,23	(10.692.035,13)	(25,61)
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	28.002.429,35	5.720.862,12	22.281.567,23	389,48
9	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	36.750,00	(36.750,00)	(100,00)
11	Dinas Perhubungan	0,00	219.932,80	(219.932,80)	(100,00)
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	(3.000.000,00)	3.000.000,00	0,00
14	SKPKD	315.248.860,55	10.722.724,57	304.526.135,98	2.840,01
15	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	78.021.183.429,84	(432.404.297,77)	78.453.587.727,61	100,00
16	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	370.051.571,00	(370.051.571,00)	(100,00)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
17	Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	36.375,00	0,00	0,00	0,00
18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12.816.640,00	3.204.160,00	9.612.480,00	300,00
	Jumlah	**82.300.514.286,50**	**2.092.196.273,47**	**80.208.318.013,03**	**3.833,69**

5.4.2.1.12 Beban Lain-Lain Rp76.356.713.484,92

Beban Lain-Lain merupakan Beban Lain-Lain periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp76.356.713.484,92dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.423.733.360,45	24.558.149.732,00	5.865.583.628,45	23,88
2	Dinas Kesehatan	39.791.361,00	105.323.800,00	(65.532.439,00)	(62,22)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	38.790.000,00	283.795.000,00	(245.005.000,00)	(86,33)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	85.700.000,00	137.505.000,00	(51.805.000,00)	(37,67)
5	RSUD Tugurejo Semarang	6.559.001,00	75.503.888,00	(68.944.887,00)	(91,31)
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	63.860.000,00	82.242.909,00	(18.382.909,00)	(22,35)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	1.756.200,00	0,00	1.756.200,00	0,00
8	RSJD Surakarta	19.893.000,00	68.992.200,00	(49.099.200,00)	(71,17)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	91.435.600,00	44.500.000,00	46.935.600,00	105,47
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	0,00	48.400.000,00	(48.400.000,00)	(100,00)
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	0,00	192.660.000,00	(192.660.000,00)	(100,00)
12	Dinas Sosial	85.139.500,00	39.150.000,00	45.989.500,00	117,47
13	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42.174.000,00	7.840.000,00	34.334.000,00	437,93
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	52.766.600,00	179.039.400,00	(126.272.800,00)	(70,53)
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	139.436.300,00	27.396.500,00	112.039.800,00	408,96
16	Dinas Ketahanan Pangan	19.250.000,00	0,00	19.250.000,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	73.500.000,00	0,00	73.500.000,00	0,00
18	Dinas Perhubungan	68.052.000,00	326.495.911,00	(258.443.911,00)	(79,16)
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.542.000,00	264.000,00	19.278.000,00	7.302,27
20	Dinas Koperasi dan UMKM	65.015.400,00	196.795.000,00	(131.779.600,00)	(66,96)
21	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	1.137.000,00	29.825.670,00	(28.688.670,00)	(96,19)
22	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	137.000.000,00	9.091.212,00	127.908.788,00	1.406,95
23	Badan Arsip dan Perpustakaan	0,00	69.312.497,00	(69.312.497,00)	(100,00)
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.800.022,00	0,00	1.800.022,00	0,00
25	Dinas Pertanian dan Perkebunan	168.195.000,00	200.593.840,00	(32.398.840,00)	(16,15)
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	58.948.000,00	84.970.500,00	(26.022.500,00)	(30,63)
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	27.981.000,00	0,00	27.981.000,00	0,00
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	49.344.910,00	114.314.078,00	(64.969.168,00)	(56,83)
29	SKPKD	44.356.583.030,47	1.131.200.000,00	43.225.383.030,47	3.821,20
30	Sekretariat Daerah	0,00	48.412.697,00	(48.412.697,00)	(100,00)
31	Inspektorat	5.906.250,00	5.700.000,00	206.250,00	3,62
32	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.894.950,00	0,00	6.894.950,00	0,00
33	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.625.000,00	37.041.716,00	(34.416.716,00)	(92,91)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	44.900.000,00	6.160.000,00	38.740.000,00	628,90
35	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	7.230.000,00	(7.230.000,00)	(100,00)
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	155.754.000,00	65.904.000,00	89.850.000,00	136,33
37	Badan Penghubung	3.250.000,00	207.844.400,00	(204.594.400,00)	(98,44)
	Jumlah	**76.356.713.484,92**	**28.391.653.950,00**	**47.965.059.534,92**	**168,94**

5.4.2.2 BEBAN TRANSFER Rp7.243.333.712.663,71

Beban Transfer merupakan Beban Transfer periode 1 Januari 2018 sampai dengan31 Desember 2018 sebesar Rp7.243.333.712.663,71, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	5.133.264.283.548,71	4.647.671.432.187,29	485.592.851.361,42	10,45
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.187.139.931.635,00	1.440.988.755.292,00	(253.848.823.657,00)	(17,62)
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	894.607.765.980,00	501.416.075.000,00	393.191.690.980,00	78,42
5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	28.321.731.500,00	9.349.488.000,00	18.972.243.500,00	0,00
	Jumlah	**7.243.333.712.663,71**	**6.599.425.750.479,29**	**643.907.962.184,42**	**9,76**

5.4.3 SURPLUS DAN DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL Rp1.913.667.844.880,96

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Pendapatan	26.740.296.197.300,14	25.144.782.615.441,90	1.595.513.581.858,24	6,35
2	Beban	24.826.628.352.419,18	22.633.928.232.052,20	2.192.700.120.366,94	9,69
	Jumlah	**1.913.667.844.880,96**	**2.510.854.383.389,74**	**(597.186.538.508,78)**	**(23,78)**

5.4.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (Rp35.066.901.024,94)

Surplus dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2018 sebesar (Rp35.066.901.024,94) merupakan Surplus Pemulihan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan Pemulihan Penyisihan Investasi Non Permanen Tak Tertagih karena adanya perubahan metode perhitungan penyisihan piutang, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	388.948.019,60	452.764.596,00	(63.816.576,40)	(14,09)

2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(35.455.849.044,54)	(105.207.770,20)	(35.350.641.274,34)	33.600,79
	Jumlah	**(35.066.901.024,94)**	**347.556.825,80**	**(35.414.457.850,74)**	**(10.189,54)**

5.4.5 SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA Rp0,00

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa merupakan penjumlahan antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018adalah nihil.

5.4.6 SURPLUS/DEFISIT LO Rp1.878.600.943.856,02

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2018 surplus sebesar Rp1.878.600.943.856,02 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Surplus/Defisit Operasional	1.913.667.844.880,96	2.510.854.383.389,74	(597.186.538.508,78)	(23,78)
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(35.066.901.024,94)	347.556.825,80	(35.414.457.850,74)	(10.189,54)
3	Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.878.600.943.856,02**	**2.511.201.940.215,54**	**(632.600.996.359,52)**	**(25,19)**

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta saldo kas pada awal maupun akhir periode anggaran. Arus Kas dalam Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan dan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2018 dan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2018.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi **Rp1.892.975.114.043,34**

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.892.975.114.043,34 merupakan indikator yang menunjukan kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas yang terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

	2018	2017
Arus Masuk Kas	24.700.497.668.404,30	23.679.436.479.370,42
Arus Keluar Kas	22.807.522.554.361,00	21.445.575.525.316,00
	1.892.975.114.043,34	2.233.860.954.054,42

5.5.1.1. Arus Masuk Kas **Rp24.700.497.668.404,**

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp24.700.497.668.404,34 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp23.679.436.479.370,42 yang terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1.	Pendapatan Pajak Daerah	11.507.119.643.262,00	10.572.698.332.610,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	104.870.144.923,00	107.294.704.820,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	459.626.767.964,00	371.072.481.501,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah	1.638.398.959.522,34	1.472.709.718.332,42
5.	Dana Bagi Hasil Pajak	760.737.570.218,00	834.422.861.130,00
6.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	8.712.350.806,00	13.887.050.263,00
7.	Dana Alokasi Umum	3.652.586.431.000,00	3.652.586.431.000,00
8.	Dana Alokasi Khusus	267.575.436.659,00	6.566.890.148.700,00

No	Uraian	2018	2017
9.	Dana Penyesuaian	6.277.665.043.013,00	50.197.943.000,00
10.	Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya	1.197.321.037,00	737.884.170,00
11.	Pendapatan Hibah	22.008.000.000,00	36.938.923.844,00
12.	Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	**24.700.497.668.404,34**	**23.679.436.479.370,42**

Total arus masuk kas dari aktivitas operasi tahun 2018 bila dibandingkan dengan total pada LRA tahun 2018 (5.1.1.1) sebesar Rp24.702.318.190.582,34 terdapat perbedaan sebesar Rp1.820.522.178,00. Perbedaan tersebut karena dalam total masuk arus kas dari aktivitas operasi tidak termasuk pendapatan yang masuk dalam arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp1.820.522.178,00 (5.5.2.1).

5.5.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah — Rp11.507.119.643.262,00

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pajak Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp11.507.119.643.262,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp10.572.698.332.610,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Pajak Kendaraan Bermotor	4.248.132.806.425,00	3.846.112.941.500,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.423.363.674.275,00	3.031.219.174.000,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.846.840.170.007,00	1.653.549.702.810,00
4	Pajak Air Permukaan	12.983.347.703,00	11.422.772.199,00
5	Pajak Rokok	1.975.799.644.852,00	2.030.393.742.101,00
	Jumlah	**11.507.119.643.262,00**	**10.572.698.332.610,00**

5.5.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah — Rp104.870.144.923,00

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp104.870.144.923,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp107.294.704.820,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	23.142.707.753,00	26.820.041.491,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan		0,00
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	515.800.000,00	667.475.000,00
4	Retribusi Tera/Tera Ulang	0,00	0,00
5	Retribusi Pelayanan Pendidikan	904.645.000,00	668.607.500,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	48.328.762.107,00	50.535.240.364,00

No	Uraian	2018	2017
7	Retribusi Tempat Pelelangan	978.635.225,00	569.572.000,00
8	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	8.209.161.860,00	3.042.002.500,00
9	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	1.400.000,00	1.400.000,00
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	18.146.102.378,00	17.179.118.015,00
11	Retribusi Ijin Trayek	699.400.000,00	927.486.000,00
12	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	3.159.968.200,00	5.055.191.800,00
13	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	783.562.400,00	772.476.400,00
14	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan terminal	0,00	1.056.093.750,00
	Jumlah	**104.870.144.923,00**	**107.294.704.820,00**

5.5.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yg Dipisahkan Rp459.626.767.964,00

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp459.626.767.964,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp371.072.481.501,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah	6.500.000.000,00	6.224.814.706,00
2	Bagian Laba PT. Bank Jateng	341.139.512.009,00	265.246.817.254,00
3	Bagian Laba BPR-BKK	67.219.285.749,00	57.031.441.365,00
4	Bagian Laba PDAB Slawi	3.315.530.402,00	3.058.025.665,00
5	Deviden PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	3.917.051.730,00	4.295.992.206,00
6	Deviden PT. Asuransi Bangun Askrida	6.360.924.248,00	6.974.113.531,00
7	Deviden PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	20.903.469.671,00	20.886.360.443,00
8	Deviden PT. Sarana Patra Hulu Cepu	7.225.040.483,00	5.750.789.290
9	Deviden PT. Jamkrida	3.045.953.672,00	1.604.127.041
	Jumlah	**459.626.767.964,00**	**371.072.481.501,00**

5.5.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah Rp1.638.398.959.522,34

Arus Kas Masuk dari Lain-Lain PAD yang Sah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.638.398.959.522,34 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp1.472.709.718.332,42 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	483.175.950,00	343.279.165,00
2	Penerimaan Jasa Giro	66.077.362.541,00	71.422.612.976,00
3	Penerimaan Bunga	173.055.752.450,00	148.358.292.756,00
4	Tuntutan Ganti Rugi	30.200.000,00	6.500.000,00

No	Uraian	2018	2017
5	Pendapatan Denda keterlambatan	2.281.614.797,00	1.647.983.674,00
6	Pendapatan Denda Pajak	147.065.780.931,00	76.503.535.952,00
7	Pendapatan Denda Retribusi	89.478.463,00	40.249.695,00
8	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	0,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	7.707.921.585,00	8.671.337.519,00
10	Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	13.065.141.000,00	182.077.031,00
11	Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	16.884.628.386,00	19.258.228.260,00
12	Penerimaan dari BLUD	1.209.365.731.875,34	1.142.248.888.562,42
13	Penerimaan Lain-Lain	2.292.171.544,00	4.026.732.742,00
	Jumlah	**1.638.398.959.522,34**	**1.472.709.718.332,42**

5.5.1.1.5. Dana Bagi Hasil Pajak **Rp760.737.570.218,00**

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp760.737.570.218,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp834.422.861.130,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	63.026.027.692,00	65.474.849.091,00
2	Bagi Hasil PPh Pasal 25 & 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21	493.828.217.226,00	564.809.952.859,00
3	Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	203.883.325.300,00	204.138.059.180,00
	Jumlah	**760.737.570.218,00**	**834.422.861.130,00**

5.5.1.1.6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam **Rp8.712.350.806,00**

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp8.712.350.806,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp13.887.050.263,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	3.400.440.964,00	3.900.637.875,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent)	0,00	57.819.224,00
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)	0,00	33.287.692,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	617.899.676,00	514.742.868,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	4.146.134.208,00	8.171.221.124,00
6	Bagi Hasil dari Panas Bumi	456.667.450,00	1.209.341.480,00
7	Bagi Hasil dari Minerba	91.208.508,00	0,00
	Jumlah	**8.712.350.806,00**	**13.887.050.263,00**

5.5.1.1.7. Dana Alokasi Umum Rp3.652.586.431.000,00

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Alokasi Umum periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.652.586.431.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp3.652.586.431.000,00.

5.5.1.1.8. Dana Alokasi Khusus Rp267.575.436.659,00

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Alokasi Khusus periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp267.575.436.659,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp6.566.890.148.700,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Dana Alokasi Khusus	0,00	6.566.890.148.700,00
2	DAK Bidang Pendidikan	127.757.334.206,00	0,00
3	DAK Bidang Kesehatan	83.219.727.177,00	0,00
4	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	17.652.080.000,00	0,00
5	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	4.733.754.000,00	0,00
6	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	7.586.293.376,00	0,00
7	DAK Bidang Pertanian	14.451.149.400,00	0,00
8	DAK Bidang Kehutanan	9.305.233.600,00	0,00
9	DAK Bidang Pariwisata	2.377.488.400,00	0,00
10	DAK Bidang Energi Sumber Daya Mineral	492.376.500,00	0,00
	Jumlah	**267.575.436.659,00**	**6.566.890.148.700,00**

5.5.1.1.9. Dana Penyesuaian Rp6.277.665.043.013,00

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Penyesuaian periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp6.277.665.043.013,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp50.197.943.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2018	2017
1	Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru	1.028.894.671.500,00	0,00
2	Dana Insentif Daerah	33.500.000.000,00	50.197.943.000,00
3	Bantuan Operasional Sekolah	5.204.476.040.000,00	0,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB)	3.640.458.000,00	0,00
5	Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	2.975.310.100,00	0,00
6	Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil	4.178.563.413,00	0,00
	Jumlah	**6.277.665.043.013,00**	**50.197.943.000,00**

5.5.1.1.10. Penerimaan Bagi Hasil Lainnya **Rp1.197.321.037,00**

Arus Kas Masuk Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.197.321.037,00 merupakan penerimaan kas dari Bagi Hasil Retribusi Ketep Pass dari Kabupaten Magelang dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp737.884.170,00.

5.5.1.1.11. Pendapatan Hibah **Rp22.008.000.000,00**

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp22.008.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp36.938.923.844,00

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Hibah dari pemerintah	0,00	15.982.123.844,00
2	Sumbangan pihak ketiga kayu	0,00	0,00
3	Sumbangan pihak ketiga jasa raharja	22.008.000.000,00	20.956.800.000,00
	Jumlah	**22.008.000.000,00**	**36.938.923.844,00**

5.5.1.1.12. Penerimaan Lainnya **Rp0,00**

Tidak ada Arus Kas Masuk Penerimaan Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

5.5.1.2. Arus Keluar Kas **Rp22.807.522.554.361,00**

Total Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp22.807.522.554.361,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp21.445.575.525.316,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Pembayaran Pegawai	6.472.868.943.589,00	6.092.077.750.517,00
2	Pembayaran Barang	4.048.740.580.767,00	3.397.323.250.875,00
3	Pembayaran Hibah	5.150.000.983.920,00	4.952.781.468.535,00
4	Pembayaran Bantuan Sosial	41.442.950.000,00	238.268.220.000,00
5	Belanja Tak Terduga	13.118.505.530,00	1.130.950.000,00
6	Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota	4.971.230.606.896,00	4.812.323.251.641,00
7	Belanja Bantuan Keuangan	2.110.119.983.659,00	1.951.670.633.748,00
	Jumlah	**22.807.522.554.361,00**	**21.445.575.525.316,00**

5.5.1.2.1. Belanja Pegawai **Rp6.472.868.943.589,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Pegawai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp6.472.868.943.589,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp6.092.077.750.517,00.

5.5.1.2.2. Belanja Barang **Rp4.048.740.580.767,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Barang periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.048.740.580.767,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp3.397.323.250.875,00.

5.5.1.2.3. Belanja Hibah **Rp5.150.000.983.920,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Hibah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp5.150.000.983.920,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp4.952.781.468.535,00.

5.5.1.2.4. Belanja Bantuan Sosial **Rp41.442.950.000,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Bantuan Sosial periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp41.442.950.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp238.268.220.000,00.

5.5.1.2.5. Belanja Tidak Terduga **Rp13.118.505.530,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Tidak Terduga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp13.118.505.530,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp1.130.950.000,00.

5.5.1.2.6. Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota **Rp4.971.230.606.896,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.971.230.606.896,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp4.812.323.251.641,00.

5.5.1.2.7. Belanja Bantuan Keuangan **Rp2.110.119.983.659,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Bantuan Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.110.119.983.659,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp1.951.670.633.748,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten /Kota	1.187.190.486.179,00	1.440.905.070.748,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	894.607.765.980,00	501.416.075.000,00
3.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	19.466.159.000,00	2.271.055.000,00
4.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda Lainnya	8.855.572.500,00	7.078.433.000,00
	Jumlah	**2.110.119.983.659,00**	**1.951.670.633.748,00**

5.5.2. Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan (Rp1.677.239.886.748,00)

Arus kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar. Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar (Rp1.677.239.886.748,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar (Rp1.454.219.774.592,00) dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Arus Masuk Kas	1.820.522.178,00	378.309.872,00
2	Arus Keluar Kas	1.679.060.408.926,00	1.454.598.084.464,00
		(1.677.239.886.748,00)	**(1.454.219.774.592,00)**

5.5.2.1. Arus Masuk Kas Rp1.820.522.178,00

Total Arus Masuk dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.820.522.178,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp378.309.872,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1.	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	151.439.739,00	378.309.872,00
2.	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	1.669.082.439,00	0,00
	Jumlah	**1.820.522.178,00**	**378.309.872,00**

5.5.2.1.1. Penjualan Peralatan dan Mesin **Rp151.439.739,00**

Arus kas masuk dari Penjualan Peralatan dan Mesinperiode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp151.439.739,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp378.309.872,00.

5.5.2.1.2. Penjualan Gedung dan Bangunan **Rp1.669.082.439,00**

Arus kas masuk dari Penjualan Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.669.082.439,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp0,00.

5.5.2.2. Arus Keluar Kas **Rp1.679.060.408.926,00**

Total Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.679.060.408.926,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp1.454.598.084.464,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1.	Belanja Tanah	25.931.283.415,00	21.650.743.424,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	580.580.329.636,00	321.441.003.601,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	349.651.064.473,00	308.934.759.265,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	598.331.686.092,00	799.019.206.624,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	124.229.220.310,00	2.794.491.050,00
6	Belanja Aset Tidak Berwujud	336.825.000,00	757.880.500,00
	Jumlah	**1.679.060.408.926,00**	**1.454.598.084.464,00**

5.5.2.2.1. Belanja Tanah **Rp25.931.283.415,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Tanah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp25.931.283.415,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp21.650.743.424,00.

5.5.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin **Rp580.580.329.636,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp580.580.329.636,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp321.441.003.601,00.

5.5.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan **Rp349.651.064.473,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp349.651.064.473,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp308.934.759.265,00.

5.5.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan **Rp598.331.686.092,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp598.331.686.092,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp799.019.206.624,00.

5.5.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya **Rp124.229.220.310,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp124.229.220.310,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp2.794.491.050,00.

5.5.2.2.6. Belanja Aset Tidak Berwujud **Rp336.825.000,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp336.825.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 Rp757.880.500,00.

5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan **Rp232.578.158.113,00**

Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp232.578.158.113,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar (Rp303.547.235.404,00) dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Arus Masuk Kas	372.578.158.113,00	452.764.596,00
2	Arus Keluar Kas	140.000.000.000,00	304.000.000.000,00
		232.578.158.113,00	**(303.547.235.404,00)**

5.5.3.1. Arus Masuk Kas **Rp372.578.158.113,00**

Total Arus Masuk dari aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp372.578.158.113,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp452.764.596,00 terdiri dari :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1.	Pencairan Dana Cadangan	350.000.000.000,00	0,00
2.	Pengembalian Dana Talangan	0,00	2.727.273,00
3.	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	275.423.625,00	450.037.323,00
4.	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	22.302.734.488,00	0,00
	Jumlah	**372.578.158.113,00**	**452.764.596,00**

5.5.3.1.1. Pencairan Dana Cadangan **Rp350.000.000.000,00**

Arus kas masuk dari Pencairan dana cadangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 Rp350.000.000.000,00 dan 2017 tidak ada pencairan dana cadangan.

5.5.3.1.2. Pengembalian Dana Talangan **Rp0,00**

Tidak ada arus kas masuk dari Pengembalian dana talangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 pengembalian dana talangan pangan sebesar Rp0,00 dari Kabupaten Cilacap dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp2.727.273,00.

5.5.3.1.3. Pengembalian Dana Bergulir **Rp275.423.625,00**

Arus kas masuk dari penerimaan Pengembalian dana Bergulir periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp275.423.625,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar dan untuk Rp450.037.323,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Koperasi dan UKM)	101.358.325,00	328.730.000,00
2	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Biro Perkenomian)	109.245.000,00	0,00
3	Penerimaan Dana Bergulir untuk Peralatan/Bahan Baku bagi IKM	53.320.300,00	110.007.323,00
4	Penerimaan Dana Bergulir Gerbang Mapan (Dinas Ketahanan Pangan)	11.500.000,00	11.300.000,00
	Jumlah	**275.423.625,00**	**450.037.323,00**

5.5.3.1.4. Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank **Rp22.302.734.488,00**

Arus kas masuk dari penerimaan Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp22.302.734.488,00 pada RSUD Dr Moewardi dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp0,00.

5.5.3.2. Arus Keluar Kas **Rp140.000.000.000,00**

Total Arus Keluar untuk aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp140.000.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp304.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	140.000.000.000,00	154.000.000.000,00
2	Pembentukan Dana Cadangan pilkada	0,00	150.000.000.000,00
	Jumlah	**140.000.000.000,00**	**304.000.000.000,00**

5.5.3.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah **Rp140.000.000.000,00**

Arus kas Keluar untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp140.000.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp154.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	BPR-BKK	60.000.000.000,00	99.000.000.000,00
2	PDAB Slawi	53.280.000.000,00	5.000.000.000,00
3	PT. Jamkrida	20.000.000.000,00	50.000.000.000,00
4	PT. Asuransi Bangun Krida	6.720.000.000,00	0,00
	Jumlah	**140.000.000.000,00**	**154.000.000.000,00**

5.5.3.2.2. Pembentukan Dana Cadangan **Rp0,00**

Tidak ada arus kas keluar untuk Pembentukan Dana Cadangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp150.000.000.000,00.

5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran **Rp(173.987.743,00)**

Arus kas dari aktivitas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas bersih dari aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp(173.987.743,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp3.505.019.994,68 dengan perhitungan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Arus Masuk Kas	784.932.559.264,95	678.531.086.040,68
2	Arus Keluar Kas	785.106.547.007,95	675.026.066.046,00
	Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran	**(173.987.743,00)**	**3.505.019.994,68**

5.5.4.1. Arus Masuk Kas **Rp784.932.559.264,95**

Total arus masuk kas dari aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp784.932.559.264,95 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp678.531.086.040,68 terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	784.801.161.647,95	674.974.211.759,00
2.	Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya	51.854.287,00	3.919.427,00
3.	Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Sebelumnya	79.543.330,00	3.552.954.854,68
	Jumlah	**784.932.559.264,95**	**678.531.086.040,68**

5.5.4.1.1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Rp784.801.161.647,95

Arus kas masuk dari penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp784.801.161.647,95 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp674.974.211.759,00 yang terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1.	Pajak-pajak	517.200.384.452,95	398.023.054.791,00
2.	IWP	202.792.993.624,00	209.746.177.446,00
3.	Taperum	4.002.637.261,00	4.140.587.000,00
4.	Askes	60.805.146.310,00	63.064.392.522,00
	Jumlah	**784.801.161.647,95**	**674.974.211.759,00**

5.5.4.1.2. Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Sebelumnya Rp51.854.287,00

Arus kas masuk dari Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Sebelumnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp51.854.287,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp3.919.427,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	3.531.774,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	48.150,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	18,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	430.000,00
5	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	36.072.936,00	24.456,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	33.000,00	800.000,00
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	0,00
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.100.000,00	2.616.153,00
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00
10	Inspektorat	2.449.174,00	0,00
11	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	7.667.403,00	0,00
12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	100,00
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	50,00
14	Badan Koordinasi Penyuluh	0,00	500,00
	Jumlah	**51.854.287,00**	**3.919.427,00**

5.5.4.1.3. Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

Tahun Anggaran Sebelumnya **Rp79.543.330,00**

Arus kas masuk dari Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Sebelumnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp79.543.330,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 Rp3.552.954.854,68 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Dinas Kesehatan	20.451.459,00	1.716.000,00
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	0,00	943.337.552,00
3	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	0,00	2.368.954.899,68
4	RSUD Tugurejo Semarang	0,00	165.045.550,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	0,00	34.548.814,00
6	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	0,00	21.685.641,00
7	RSJD Surakarta	0,00	0,00
8	RSJD Soedjarwadi Klaten	0,00	17.376.398,00
9	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	13.295.000,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	17.920.000,00	290.000,00
11	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.000.000,00	0,00
12	Dinas Perikanan dan Kelautan	1.846.871,00	0,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.130.000,00	0,00
14	Sekretariat DPRD	1.900.000,00	0,00
	Jumlah	**79.543.330,00**	**3.552.954.854,68**

5.5.4.2. Arus Keluar Kas **Rp785.106.547.007,95**

Total Arus Keluar dari Aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp785.106.547.007,95 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp675.026.066.046,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2018	2017
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	784.801.161.647,95	674.974.211.759,00
2	Kas di Bend Penerimaan Tahun Berjalan	43.477.500,00	0,00
3	Kas di Bend Pengeluaran – Sisa UUDP Tahun Berjalan	261.907.860,00	51.854.287,00
	Jumlah	**785.106.547.007,95**	**675.026.066.046,00**

5.5.4.2.1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Rp784.801.161.647,95

Arus kas keluar untuk Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp784.801.161.647,95 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp674.974.211.759,00 yang terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1.	Pajak-pajak	517.200.384.452,95	398.023.054.791,00
2.	IWP	202.792.993.624,00	209.746.177.446,00
3.	Taperum	4.002.637.261,00	4.140.587.000,00
4.	Askes	60.805.146.310,00	63.064.392.522,00
	Jumlah	**784.801.161.647,95**	**674.974.211.759,00**

5.5.4.2.2. Kas di Bendahara Penerimaan-Tahun Berjalan Rp43.477.500,00

Arus kas keluar berupa kas di Bendahara Penerimaan yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum dipertanggungjawabkan dan disetor ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp43.477.500,00 dan untuk tahun 2017 tidak ada sisa kas di Bendahara Penerimaan.

5.5.4.2.3. Kas di Bendahara Pengeluaran-Tahun Berjalan Rp261.907.860,00

Arus kas keluar berupa pengiriman kas ke Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum dipertanggungjawabkan dan disetor kembali ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp261.907.860,00 dan untuk tahun 2017 sebesar Rp51.854.287,00.

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Setara Kas Rp448.139.397.665,34

Kenaikan kas selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp448.139.397.665,34 dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp479.598.964.053,10 yang berasal dari:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	1.892.975.114.043,34	2.233.860.954.054,42
2.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	(1.677.239.886.748,00)	(1.454.219.774.592,00)
3.	Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	232.578.158.113,00	(303.547.235.404,00)
4.	Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	(173.987.743,00)	3.505.019.994,68
	Jumlah	**448.139.397.665,34**	**479.598.964.053,10**

5.5.6. Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD Rp1.570.610.327.430,34

Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD pada posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.570.610.327.430,06 sedangkan untuk tahun 2017 sebesar Rp1.122.164.964.930,10 yaitu jumlah dari saldo awal per 1 Januari 2018 ditambah kenaikan/penurunan kas selama periode Tahun Anggaran 2018 dengan perhitungan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1.	Saldo Awal Kas BUD	1.001.596.763.923,00	502.823.976.126,00
2.	Saldo Awal Kas BLUD	120.874.165.842,00	139.742.024.751,00
3.	Kenaikan/Penurunan Kas	448.139.397.665,34	479.598.964.053,10
	Jumlah	**1.570.610.327.430,34**	**1.122.164.964.930,10**

5.5.7. Saldo Akhir Kas Rp1.615.363.817.893,54

Saldo Akhir Kas merupakan gabungan Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BLUD pada posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.615.363.817.893,54 dan untuk tahun 2017 sebesar Rp1.163.279.517.549,02 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Kas Di Kas Daerah	1.443.326.975.483,00	1.001.596.763.923,00
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	616.508.425,00	51.864.956,00
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	43.477.500,00	2.627.762.536,90
4	Kas Di Bendahara BLUD	129.690.087.434,34	120.568.201.007,10
5	Kas Di Bendahara Sekolah	41.686.769.051,20	38.434.925.126,00
	Jumlah	**1.615.363.817.893,54**	**1.163.279.517.549,00**

Dari saldo akhir kas sebesar Rp1.615.363.817.893,54 tersebut, berupa SiLPA Tahun 2018 sebesar Rp1.615.363.817.893,54 sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.761.336.052,00. Selisih tersebut terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran (Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Gaji) berupa kewajiban kepada pihak lain sebesar Rp354.600.565,00 dan uang muka pasien di Rumah Sakit sebesar Rp2.406.735.487,00.

5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Awal	33.824.129.032.178,70	30.291.587.279.783,70	3.532.541.752.395,00	11,66
2	Surplus/Defisit-LO	1.878.600.943.856,02	2.511.201.940.215,53	(632.600.996.359,51)	(25,19)
3	RK-PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koreksi Kesalahan/Penyesuaian	209.731.790.704,16	1.021.339.812.179,47	(811.608.021.475,31)	(79,47)
	Ekuitas Akhir	**35.912.461.766.739,88**	**33.824.129.032.178,70**	**2.088.332.734.561,10**	**6,17**

5.6.1 Ekuitas Awal Rp33.824.129.032.178,70

Saldo Ekuitas awal tahun 2018 sebesar Rp33.824.129.032.178,70 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	7.749.297.947.703,37	5.246.050.204.142,98	2.503.247.743.560,39	47,72
2	DinasPendidikan	5.606.567.113.971,81	4.274.731.369.573,27	1.331.835.744.398,54	31,16
3	DinasKesehatan	283.993.657.267,67	265.643.892.223,74	18.349.765.043,93	6,91
4	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	564.103.031.453,62	533.395.135.212,27	30.707.896.241,35	5,76
5	RSUD Dr. MargonoSoekarjoPurwokerto	612.217.451.494,46	553.290.806.486,15	58.926.645.008,31	10,65
6	RSUD Tugurejo Semarang	311.901.660.539,57	271.402.618.864,14	40.499.041.675,43	14,92
7	RSUD Kelet/DonorejoJepara	786.428.514.752,78	783.987.775.634,41	2.440.739.118,37	0,31
8	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	184.432.129.083,89	168.173.711.660,24	16.258.417.423,65	9,67
9	RSJD Surakarta	122.436.368.128,31	110.445.731.031,31	11.990.637.097,00	10,86
10	RSJD Dr. RM SoedjarwadiKlaten	92.029.243.830,30	99.676.144.924,85	(7.646.901.094,55)	(7,67)
11	Dinas PU BinaMargadanCiptaKarya	6.073.132.302.975,48	5.913.062.667.697,42	160.069.635.278,06	2,71
12	Dinas PU SumberDaya Air dan Tata Ruang	5.821.997.813.570,99	5.709.810.067.841,15	112.187.745.729,84	1,96
13	DinasPerumahan Rakyat danPemukiman	11.793.717.430,73	17.119.574.734,80	(5.325.857.304,07)	(31,11)
14	BadanPerencana, Pembangunan, PenelitiandanPengembangan Daerah	134.179.918.255,70	125.569.949.813,59	8.609.968.442,11	6,86
15	DinasPerhubungan	254.978.889.086,92	227.812.365.074,00	27.166.524.012,92	11,92
16	DinasLingkunganHidupdanKehutanan	66.712.788.853,25	22.886.604.366,18	43.826.184.487,07	191,49
17	DinasPemberdayaanPerempuan, PerlindunganAnak, PengendalianPendudukdan KB	18.048.899.635,30	14.634.517.822,93	3.414.381.812,37	23,33
18	DinasSosial	239.431.562.510,31	244.051.306.884,61	(4.619.744.374,30)	(1,89)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
19	SekretariatBadanPenanggulanganBencana Daerah	12.999.495.927,28	14.401.369.418,71	(1.401.873.491,43)	(9,73)
20	DinasTenagaKerjadanTransmigrasi	136.054.883.875,48	135.942.846.300,16	112.037.575,32	0,08
21	DinasKoperasidan UMKM	32.140.348.915,20	33.451.043.859,23	(1.310.694.944,03)	(3,92)
22	DinasPenanaman Modal Dan PelayananTerpaduSatuPintu	14.185.193.043,44	14.259.334.100,50	(74.141.057,06)	(0,52)
23	DinasKebudayaandanPariwisata	0,00	119.048.984.121,77	(119.048.984.121,77)	(100,00)
24	DinasPemudaOlah Raga danPariwisata	294.286.067.376,11	160.504.387.269,92	133.781.680.106,19	83,35
25	BadanKesatuanBangsadanPolitik	18.276.817.790,84	18.784.360.136,66	(507.542.345,82)	(2,70)
26	SatuanPolisiPamongPraja	20.739.413.854,83	20.712.361.401,24	27.052.453,59	0,13
27	Sekretariat Daerah	246.599.674.337,61	259.697.687.197,32	(13.098.012.859,71)	(5,04)
28	Sekretariat DPRD	46.093.679.294,48	49.007.091.144,06	(2.913.411.849,58)	(5,94)
29	BadanPengelolaPendapatan Daerah	1.842.788.624.656,90	2.558.303.144.508,75	(715.514.519.851,85)	(27,97)
30	BadanPenelitiandanPengembangan	0,00	9.737.300.728,55	(9.737.300.728,55)	(100,00)
31	Inspektorat	10.314.621.243,49	10.687.664.045,24	(373.042.801,75)	(3,49)
32	BadanPenghubung	20.791.571.059,69	22.003.127.217,61	(1.211.556.157,92)	(5,51)
33	BadanPengembangan SDM Daerah	160.122.202.586,60	162.815.140.118,95	(2.692.937.532,35)	(1,65)
34	BadanKepegawaian Daerah	15.612.589.708,50	14.970.458.177,11	642.131.531,39	4,29
35	BadanKoordinasi Wilayah I	0,00	43.026.519.726,04	(43.026.519.726,04)	(100,00)
36	BadanKoordinasi Wilayah II	0,00	68.998.263.513,10	(68.998.263.513,10)	(100,00)
37	BadanKoordinasi Wilayah III	0,00	62.354.938.942,75	(62.354.938.942,75)	(100,00)
38	DinasKetahananPangan	10.670.551.162,84	10.929.863.376,06	(259.312.213,22)	(2,37)
39	DinasPemberdayaanMasyarakatDesa, KependudukandanCapil	17.231.414.425,23	16.786.370.197,21	445.044.228,02	2,65
40	DinasArsip Daerah danPerpustakaan	35.522.403.315,03	35.278.356.981,82	244.046.333,21	0,69
41	SekretariatKomitePenyiaran Indonesia Daerah	0,00	2.739.184.817,85	(2.739.184.817,85)	(100,00)
42	DinasPertaniandan Perkebunan	963.944.944.726,19	607.634.492.348,07	356.310.452.378,12	58,64
43	Dinas Perkebunan	0,00	371.962.888.293,63	(371.962.888.293,63)	(100,00)
44	DinasPeternakandanKesehatanHewan	374.239.800.688,39	364.679.076.510,47	9.560.724.177,92	2,62
45	SekretariatBadanKoordinasiPenyuluh	0,00	1.714.260.571,00	(1.714.260.571,00)	(100,00)
46	DinasKehutanan	0,00	53.736.305.136,67	(53.736.305.136,67)	(100,00)
47	DinasEnergidanSumberDaya Mineral	108.177.576.358,21	99.871.988.392,18	8.305.587.966,03	8,32
48	DinasKelautandanPerikanan	264.273.396.892,52	259.936.139.017,31	4.337.257.875,21	1,67
49	DinasPerindustriandanPerdagangan	102.892.699.693,13	105.867.888.225,15	(2.975.188.532,02)	(2,81)
50	BadanPengelolaKeuangandanAset Daerah	125.766.629.925,29	0,00	125.766.629.925,29	0,00
51	DinasKomunikasidanInformatika	16.721.420.776,99	0,00	16.721.420.776,99	0,00
	Jumlah	**33.824.129.032.178,70**	**30.291.587.279.783,70**	**3.532.541.752.395,00**	**11,66**

5.6.2 Surplus/Defisit – LO Rp1.878.600.943.856,02

Surplus/defisit – LO sebesarRp1.878.600.943.856,02 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	(264.212.006.282,78)	732.619.351.145,27	(996.831.357.428,05)	(136,06)
2	Dinas Pendidikan	(4.847.177.194.851,09)	(4.463.892.791.781,00)	(383.284.403.070,09)	8,59
3	Dinas Kesehatan	(248.549.902.780,25)	(203.890.826.302,27)	(44.659.076.477,98)	21,90
4	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(151.312.392.925,78)	(176.433.814.312,08)	25.121.421.386,30	(14,24)
5	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(128.663.704.631,84)	(98.270.597.405,88)	(30.393.107.225,96)	30,93
6	RSUD Tugurejo Semarang	(114.494.693.324,21)	(93.028.001.789,53)	(21.466.691.534,68)	23,08
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(59.130.781.607,07)	(49.358.043.582,44)	(9.772.738.024,63)	19,80
8	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(57.976.050.590,12)	(54.887.504.556,54)	(3.088.546.033,58)	5,63
9	RSJD Surakarta	(78.860.080.276,38)	(72.706.911.872,00)	(6.153.168.404,38)	8,46
10	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(45.209.260.201,00)	(43.035.025.648,48)	(2.174.234.552,52)	5,05
11	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	(893.243.304.626,99)	(986.140.371.463,03)	92.897.066.836,04	(9,42)
12	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	(207.099.184.988,21)	(198.684.435.793,71)	(8.414.749.194,50)	4,24
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	(32.863.819.924,35)	(31.688.902.312,57)	(1.174.917.611,78)	3,71
14	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(61.715.047.701,40)	(60.235.987.475,34)	(1.479.060.226,06)	2,46
15	Dinas Perhubungan	(125.041.401.938,45)	(77.158.361.524,01)	(47.883.040.414,44)	62,06
16	Dinas Komunikasi dan Informasi	(56.358.697.614,46)	(48.552.121.730,74)	(7.806.575.883,72)	
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(189.776.670.004,04)	(157.768.996.598,76)	(32.007.673.405,28)	20,29
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(29.993.273.268,02)	(24.116.394.728,63)	(5.876.878.539,39)	24,37
19	Dinas Sosial	(212.497.704.713,77)	(195.490.460.088,50)	(17.007.244.625,27)	8,70
20	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(30.951.064.991,43)	(20.240.273.652,63)	(10.710.791.338,80)	52,92
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(109.289.778.742,71)	(95.229.091.832,98)	(14.060.686.909,73)	14,77
22	Dinas Koperasi dan UMKM	(70.492.890.582,37)	(50.500.897.237,23)	(19.991.993.345,14)	39,59
23	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(27.927.492.346,80)	(23.286.427.842,51)	(4.641.064.504,29)	19,93
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	(65.659.750,00)	65.659.750,00	(100,00)
25	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	(160.813.116.328,42)	(146.043.311.230,54)	(14.769.805.097,88)	10,11
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(46.642.899.385,34)	(35.490.226.193,32)	(11.152.673.192,02)	31,42
27	Satuan Polisi Pamong Praja	(50.397.240.093,45)	(25.702.759.576,61)	(24.694.480.516,84)	96,08
28	KDH dan Wakil KDH	(15.025.625.526,00)	(14.709.657.315,00)	(315.968.211,00)	2,15
29	DPRD	(78.928.893.019,00)	(55.475.495.474,00)	(23.453.397.545,00)	42,28
30	Sekretariat Daerah	(219.072.621.585,94)	(190.076.244.007,90)	(28.996.377.578,04)	15,26
31	Sekretariat DPRD	(160.507.945.147,46)	(132.667.012.226,33)	(27.840.932.921,13)	20,99

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
32	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	11.629.732.607.222,60	10.431.781.297.162,60	1.197.951.310.060,00	11,48
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(56.968.701.119,60)	23.261.903.345,09	(80.230.604.464,69)	100,00
34	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	(24.944.800,00)	24.944.800,00	(100,00)
35	Inspektorat	(42.036.844.182,82)	(37.945.538.586,75)	(4.091.305.596,07)	10,78
36	Badan Penghubung	(24.193.747.951,54)	(22.528.164.051,92)	(1.665.583.899,62)	7,39
37	Badan Pengembangan SDM Daerah	(63.481.242.841,67)	(54.272.091.474,35)	(9.209.151.367,32)	16,97
38	Badan Kepegawaian Daerah	(42.366.655.140,62)	(39.237.408.976,61)	(3.129.246.164,01)	7,98
41	Badan Koordinasi Wilayah III	0,00	(42.340.000,00)	42.340.000,00	(100,00)
42	Dinas Ketahanan Pangan	(31.013.339.460,87)	(28.705.030.136,42)	(2.308.309.324,45)	8,04
43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil	(44.898.265.217,03)	(37.350.958.579,44)	(7.547.306.637,59)	20,21
44	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	(40.937.558.384,10)	(38.802.825.120,99)	(2.134.733.263,11)	5,50
45	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	0,00	(9.611.525,00)	9.611.525,00	(100,00)
46	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(283.777.406.687,53)	(286.364.056.477,99)	2.586.649.790,46	(0,90)
47	Dinas Perkebunan	0,00	(438.286.106,67)	438.286.106,67	(100,00)
48	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(88.148.833.573,57)	(77.297.507.895,28)	(10.851.325.678,29)	14,04
50	Dinas Kehutanan	0,00	(208.949.853,83)	208.949.853,83	(100,00)
51	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(69.615.317.044,63)	(65.224.012.682,18)	(4.391.304.362,45)	6,73
52	Dinas Kelautan dan Perikanan	(99.946.486.495,05)	(83.343.566.601,09)	(16.602.919.893,96)	19,92
53	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(89.522.525.267,19)	(79.838.713.264,35)	(9.683.812.002,84)	12,13
	Jumlah	**1.878.600.943.856,02**	**2.511.201.940.215,53**	**(632.600.996.359,51)**	**(25,19)**

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan MendasarRp209.731.790.704,16

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp209.731.790.704,16dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreks/Penyesuaian Kas	(4.698.562.022,80)	(522.347.426,48)	(4.176.214.596,32)	799,51
2	Koreks/Penyesuaian Piutang	116.688.742.813,02	2.754.030.561,00	113.934.712.252,02	4.137,02
3	Koreks/Penyesuaian Penyisihan Piutang	(398.125.401,67)	(13.051.583,12)	(385.073.818,55)	2.950,40
4	Koreks/Penyesuaian Persediaan	38.834.733.384,89	323.463.347,12	38.511.270.037,77	11.905,91
5	Koreks/Penyesuaian Investasi Non Permanen	(100.333.390,00)	0,00	(100.333.390,00)	0,00
6	Koreks/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	100.333.390,00	0,00	100.333.390,00	0,00
7	Koreks/Penyesuaian Investasi Permanen	(361.047.808.312,78)	9.493.875,68	(100.333.390,00)	(1.056,82)
8	Koreks/Penyesuaian Aset Tetap	(551.490.472.373,00)	722.351.522.715,00	(1.273.841.995.088,00)	(176,35)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
9	Koreks/Penyesuaian Penyusutan	945.426.129.386,34	268.492.599.446,46	676.933.529.939,88	252,12
10	Koreks/Penyesuaian Aset Lainnya	(6.254.961.181,00)	42.889.633.978,45	(49.144.595.159,45)	(114,58)
11	Koreks/Penyesuaian Amortisasi	(282.520.000,00)	19.687.697,00	(302.207.697,00)	(1.535,01)
12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	32.954.634.413,98	(14.986.486.600,64)	47.941.121.014,62	(319,90)
13	Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai	(3.031.114.000,00)	0,00	(3.031.114.000,00)	0,00
14	Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa	3.031.114.000,00	0,00	3.031.114.000,00	0,00
15	Koreks/Penyesuaian Lain-Lain	(2,14)	21.266.169,00	(21.266.171,14)	(100,00)
	Jumlah	**209.731.790.705,16**	**1.021.339.812.180,15**	**(811.608.021.474,99)**	**(79,47)**

5.6.3.1 Koreksi/Penyesuaian Kas Rp(4.698.562.022,80)

Koreksi/Penyesuaian Kas sebesar (Rp4.698.562.022,80)dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	0,00	21.772.279.808,66	(21.772.279.808,66)	(100,00)
2	DinasPendidikan	(4.698.562.022,80)	3.531.774,00	(4.702.093.796,80)	((133.136,88)
3	DinasKesehatan	0,00	18.687.309,00	(18.687.309,00)	(100,00)
4	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	0,00	(24.549.067.663,00)	24.549.067.663,00	(100,00)
5	RSUD Dr. MargonoSoekarjoPurwokerto	0,00	(7.217.421.376,85)	7.217.421.376,85	(100,00)
6	RSUD Tugurejo Semarang	0,00	(5.369.688.661,00)	5.369.688.661,00	(100,00)
7	RSUD Kelet/DonorejoJepara	0,00	2.908.186.954,19	(2.908.186.954,19)	(100,00)
8	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	0,00	7.481.737.827,00	(7.481.737.827,00)	(100,00)
9	RSJD Surakarta	0,00	1.293.851.920,00	(1.293.851.920,00)	(100,00)
10	RSJD Dr. RM SoedjarwadiKlaten	0,00	3.033.593.236,00	(3.033.593.236,00)	(100,00)
11	DinasPerhubungan	0,00	17.630.000,00	(17.630.000,00)	(100,00)
12	DinasLingkunganHidupdanKehutanan	0,00	(430.000,00)	430.000,00	(100,00)
13	Dinas PU BinaMargadanCiptaKarya	0,00	12.488.410,00	(12.488.410,00)	(100,00)
14	DinasSosial	0,00	(219.020,00)	219.020,00	(100,00)
15	DinasArsip Daerah danPerpustakaan	0,00	(187.750,00)	187.750,00	(100,00)
16	DinasKehutanan	0,00	(59.026,00)	59.026,00	(100,00)
17	DinasKelautandanPerikanan	0,00	1.836.139,00	(1.836.139,00)	(100,00)
18	DinasTenagaKerjadanTransmigrasi	0,00	(18,00)	18,00	(100,00)
19	DinasPemudaOlah Raga danPariwisata	0,00	39.072.936,00	(39.072.936,00)	(100,00)
20	DinasPertaniandan Perkebunan	0,00	(800.000,00)	800.000,00	(100,00)
21	DinasPeternakandanKesehatanHewan	0,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)	(100,00)
22	DinasEnergidanSumberDaya Mineral	0,00	(2.616.153,00)	2.616.153,00	(100,00)
23	DinasPerindustriandanPerdagangan	0,00	21.130.000,00	(21.130.000,00)	(100,00)
24	Sekretariat DPRD	0,00	1.900.000,00	(1.900.000,00)	(100,00)
25	Inspektorat	0,00	2.449.174,00	(2.449.174,00)	(100,00)
26	BadanPengelolaPendapatan Daerah	0,00	7.667.403,00	(7.667.403,00)	(100,00)
27	BadanPengembangan SDM Daerah	0,00	(100,00)	100,00	(100,00)
28	DinasKebudayaandanPariwis	0,00	(50,00)	50,00	(100,00)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
29	ata SekretariatBadanKoordinasiPenyuluh	0,00	(500,00)	500,00	(100,00)
	Jumlah	**(4.698.562.022,80)**	**(522.347.426,48)**	**(4.176.214.596,32)**	**799,51**

5.6.3.2 Koreksi/Penyesuaian Piutang Rp116.688.742.813,02

Koreksi/Penyesuaian Piutang sebesarRp116.688.742.813,02dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSUD Dr. MargonoSoekarjoPurwokerto	(4.556.455,00)	20.548.112,00	(25.104.567,00)	(122,17)
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	116.455.400.427,00	0,00	116.455.400.427,00	0,00
3	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	0,00	2.753.766.022,00	(2.753.766.022,00)	(100,00)
4	RSJD Surakarta	856.615.764,00	(2.650.000,00)	859.265.764,00	(32.425,12)
5	RSUD Kelet/DonorejoJepara	832.796,02	0,00	832.796,02	0,00
6	RSJD Dr. RM SoedjarwadiKlaten	(15.716.573,00)	(447.100,00)	(15.269.473,00)	3.415,23
7	DinasPemudaOlahragadanPariwisata	0,00	370.051.571,00	(370.051.571,00)	(100,00)
8	BadanPengelolaPendapatan Daerah	(603.833.146,00)	(406.344.171,00)	(197.488.975,00)	48,60
9	BadanPengelolaKeuangandanAset Daerah	0,00	36.292.600,00	(36.292.600,00)	(100,00)
10	SKPKD	0,00	(17.186.473,00)	17.186.473,00	(100,00)
	Jumlah	**116.688.742.813,02**	**2.754.030.561,00**	**113.934.712.252,02**	**4.137,02**

5.6.3.3 Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang (Rp398.125.401,67)

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang sebesar (Rp398.125.401,67)merupakan koreksi penghitungan Penyisihan Piutang dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	2.193.335,50	(102.740,56)	2.296.076,06	(2.234,83)
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(403.337.902,90)	0,00	0,00	0,00
3	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	0,00	(13.768.830,11)	13.768.830,11	(100,00)
4	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	0,00	2.235,50	(2.235,50)	(100,00)
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	817.752,05	0,00	0,00
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.019.165,73	0,00	3.019.165,73	0,00
	Jumlah	**(398.125.401,67)**	**(13.051.583,12)**	**(385.073.818,55)**	**2.950,40**

5.6.3.4 Koreksi/Penyesuaian Persediaan Rp38.834.733.384,89

Koreksi/Penyesuaian Persediaan sebesar Rp38.834.733.384,89dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSUD Kelet/Donorejo	0,00	(82.055.655,78)	82.055.655,78	(100,00)
2	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	0,00	(50.941.602,10)	50.941.602,10	(100,00)
3	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(2.178.000,03)	456.460.605,00	(458.638.605,03)	(100,48)
4	Dinas Kesehatan	16.155.027.961,00	0,00	16.155.027.961,00	0,00
5	Dinas Pendidikan	17.993.193.673,92	0,00	17.993.193.673,92	0,00
6	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.747.729.750,00	0,00	1.747.729.750,00	0,00
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.940.960.000,00	0,00	2.940.960.000,00	0,00
	Jumlah	**38.834.733.384,89**	**323.463.347,12**	**38.511.270.037,77**	**11.905,91**

5.6.3.5 Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen (Rp100.333.390,00)

Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen sebesar (Rp100.333.390,00)merupakan koreksi atas penghitungan Investasi Non Permanen pada SKPKD.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	(100.333.390,00)	0,00	(100.333.390,00)	0,00
	Jumlah	**(100.333.390,00)**	**0,00**	**(100.333.390,00)**	**0,00**

5.6.3.6 Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen Rp100.333.390,00

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen sebesar Rp100.333.390,00 merupakan koreksi atas penghitungan penyisihan Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih sesuai dengan pada SKPKD.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	100.333.390,00	0,00	100.333.390,00	0,00
	Jumlah	**100.333.390,00**	**0,00**	**100.333.390,00**	**0,00**

5.6.3.7 Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen (Rp361.047.808.312,78)

Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen sebesar (Rp361.047.808.312,78), koreksi ini merupakan koreksi pada SKPKDatasperubahannilaiInvestasipada BUMD berdasarkanperhitungandenganMetodeEkuitas.

5.6.3.8 Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap (Rp551.490.472.373,00)

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap sebesar (Rp551.490.472.373,00)dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	(7.669.304.104,00)	520.426.773.911,00	(528.096.078.015,00)	0,00
2	Dinas Pendidikan	(829.525.289.204,00)	946.166.203.541,00	(1.775.691.492.745,00)	(187,67)
3	Dinas Kesehatan	(255.250.000,00)	915.794.124,00	(1.171.044.124,00)	(127,87)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
4	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	0,00	(868.634.378,00)	868.634.378,00	(100,00)
5	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(626.714.800,00)	13.406.079.420,00	(14.032.794.220,00)	(104,67)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(589.800.000,00)	12.300.622,00	(602.100.622,00)	(4.894,88)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	0,00	(7.699.378,00)	7.699.378,00	(100,00)
8	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	0,00	6.150.311,00	(6.150.311,00)	(100,00)
9	RSJD Surakarta	0,00	(118.699.689,00)	118.699.689,00	(100,00)
10	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	0,00	(509.077.689,00)	509.077.689,00	(100,00)
11	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	155.381.271.953,00	4.164.952.400,00	151.216.319.553,00	3.630,69
12	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	113.455.737.314,00	2.072.011.639,00	111.383.725.675,00	5.375,63
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	(1.097.583.686,00)	(6.171.660.395,00)	5.074.076.709,00	(82,22)
14	Dinas Perhubungan	(295.923.133,00)	(17.853.063.637,00)	17.557.140.504,00	(98,34)
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.152.477.736,00	77.407.258.852,00	(76.254.781.116,00)	(98,51)
16	Dinas Sosial	2.142.278.072,00	1.947.921.726,00	194.356.346,00	9,98
17	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	6.003.115.900,00	(6.003.115.900,00)	(100,00)
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	2.191.473.144,00	(2.191.473.144,00)	(100,00)
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	5.187.695.923,00	(5.187.695.923,00)	(100,00)
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	414.678.000,00	(771.360.695,00)	1.186.038.695,00	(153,76)
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	(153.909.391.208,00)	153.909.391.208,00	(100,00)
22	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	157.468.953,00	64.145.241.064,00	(63.987.772.111,00)	(99,75)
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	(754.500.178,00)	754.500.178,00	(100,00)
24	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	599.875.068,00	(599.875.068,00)	(100,00)
25	Sekretariat Daerah	(3.059.046.455,00)	(19.407.565.794,00)	16.348.519.339,00	(84,24)
26	Sekretariat DPRD	907.096.337,00	(15.889.991.647,00)	16.797.087.984,00	(105,71)
27	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(9.584.819.026,00)	(609.355.640.003,00)	599.770.820.977,00	(98,43)
28	Badan Penghubung	2.814.836.750,00	44.899.517,00	2.769.937.233,00	6.169,19
29	Badan Pengembangan SDM Daerah	224.730.700,00	100.860.000,00	123.870.700,00	122,81
30	Badan Kepegawaian Daerah	354.068.500,00	(576.032.751,00)	930.101.251,00	(161,47)
31	Dinas Ketahanan Pangan	327.034.314,00	100.239.524,00	226.794.790,00	226,25
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil	0,00	3.966.917.440,00	(3.966.917.440,00)	(100,00)
33	Dinas Komunikasi dan Informasi	1.059.748.500,00	37.176.369.992,00	(36.116.621.492,00)	(97,15)
34	Badan Koordinasi Wilayah I	0,00	(53.891.075.666,00)	53.891.075.666,00	(100,00)
35	Badan Koordinasi Wilayah II	0,00	(84.180.531.245,00)	84.180.531.245,00	(100,00)
36	Badan Koordinasi Wilayah III	0,00	(92.641.245.084,00)	92.641.245.084,00	(100,00)
37	Dinas Koperasi dan UMKM	(93.720.000,00)	304.509.524,00	(398.229.524,00)	(130,78)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
38	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	0,00	(6.714.355.749,00)	6.714.355.749,00	(100,00)
39	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	0,00	262.858.257,00	(262.858.257,00)	(100,00)
40	Dinas Pertanian dan Perkebunan	6.834.724.314,00	382.433.077.430,00	(375.598.353.116,00)	(98,21)
41	Dinas Perkebunan	0,00	(397.190.248.627,00)	397.190.248.627,00	(100,00)
42	Dinas Kehutanan	0,00	(82.590.738.529,00)	82.590.738.529,00	(100,00)
43	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	(17.854.715.065,00)	17.854.715.065,00	(100,00)
44	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.643.907.274,00	2.021.267.702,00	2.622.639.572,00	129,75
45	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	287.034.314,00	(1.041.590.576,00)	1.328.624.890,00	(127,56)
46	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	327.034.314,00	3.252.795.474,00	(2.925.761.160,00)	(89,95)
47	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	0,00	(7.827.018.546,00)	7.827.018.546,00	(100,00)
48	Inspektorat	257.210.000,00	(192.020.945,00)	449.230.945,00	(233,95)
49	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(1.035.850.601,00)	16.983.583.685,00	(18.019.434.286,00)	(106,10)
50	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.452.868.066,00	200.615.721.784,00	(189.162.853.718,00)	(94,29)
51	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	148.623.225,00	752.432.215,00	(603.808.990,00)	(80,25)
	Jumlah	**(551.490.472.373,00)**	**722.351.522.715,00**	**(1.273.841.995.088,00)**	**(176,35)**

5.6.3.9 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Rp945.426.129.386,34

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan sebesar Rp945.426.129.386,34dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	5.512.331.193,00	(115.536.069.625,02)	121.048.400.818,02	(104,77)
2	Dinas Pendidikan	880.659.358.826,87	985.868.111,54	879.673.490.715,33	89.228,31
3	Dinas Kesehatan	127.625.000,00	(441.617.916,80)	569.242.916,80	(128,90)
4	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(639.179.669,25)	(5.562.471.428,57)	4.923.291.759,32	(88,51)
5	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	58.800.900,00	(12.960.952.623,08)	13.019.753.523,08	(100,45)
6	RSUD Tugurejo Semarang	566.938.001,00	38.296.610,96	528.641.390,04	1.380,39
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(93.351.636,00)	55.890.130,40	(149.241.766,40)	(267,03)
8	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(78.697.483,20)	(4.791.201.661,60)	4.712.504.178,40	(98,36)
9	RSJD Surakarta	696.190.000,00	128.604.566,00	567.585.434,00	441,34
10	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	0,00	121.460.039,43	(121.460.039,43)	(100,00)
11	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	64.777.646.586,00	242.298.214.949,09	(177.520.568.363,09)	(73,27)
12	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	(823.277.314,00)	(225.571.768,45)	(597.705.545,55)	264,97
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	(9.313.594,00)	1.531.933.697,50	(1.541.247.291,50)	(100,61)
14	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.273.945.551,00	(7.324.410.440,55)	8.598.355.991,55	(117,39)
15	Dinas Perhubungan	(325.497.179,97)	10.067.171.227,60	(10.392.668.407,57)	(103,23)
16	Dinas Komunikasi dan Informasi	(581.924.625,00)	(21.757.887.909,27)	21.175.963.284,27	(97,33)
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(93.451.409,36)	(28.162.506.650,17)	28.069.055.240,81	(99,67)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	(1.016.161.504,00)	1.016.161.504,00	(100,00)
19	Dinas Sosial	(1.894.550.572,00)	(2.938.133.302,80)	1.043.582.730,80	(35,52)
20	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	(5.735.660.530,80)	5.735.660.530,80	(100,00)
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	(2.937.011.485,75)	2.937.011.485,75	(100,00)
22	Dinas Koperasi dan UMKM	118.875.146,34	146.492.845,20	(27.617.698,86)	(18,85)
23	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(103.669.500,00)	779.182.154,45	(882.851.654,45)	(113,30)
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	34.926.066.886,23	(34.926.066.886,23)	(100,00)
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	1.055.096.115,50	(1.055.096.115,50)	(100,00)
26	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	(113.211.942,20)	(18.069.259.407,27)	17.956.047.465,07	(99,37)
27	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	(581.757.448,80)	581.757.448,80	(100,00)
28	Sekretariat Daerah	505.133.736,50	14.412.106.745,19	(13.906.973.008,69)	(96,50)
29	Sekretariat DPRD	(804.861.962,00)	14.116.850.877,75	(14.921.712.839,75)	(105,70)
30	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(63.656.387,00)	144.706.663.631,10	(144.770.320.018,10)	(100,04)
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(617.646.462,00)	(73.371.039.113,80)	72.753.392.651,80	(99,16)
32	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	8.200.389.136,45	(8.200.389.136,45)	(100,00)
33	Inspektorat	(160.756.250,00)	320.104.195,00	(480.860.445,00)	(150,22)
34	Badan Penghubung	(163.322.937,50)	(60.744.184,00)	(102.578.753,50)	168,87
35	Badan Pengembangan SDM Daerah	4.518.050,00	(6.896.000,00)	11.414.050,00	(165,52)
36	Badan Kepegawaian Daerah	(88.517.125,00)	68.874.000,00	(157.391.125,00)	(228,52)
37	Badan Koordinasi Wilayah I	0,00	10.865.551.939,96	(10.865.551.939,96)	(100,00)
38	Badan Koordinasi Wilayah II	0,00	15.182.267.731,90	(15.182.267.731,90)	(100,00)
39	Badan Koordinasi Wilayah III	0,00	30.328.646.141,25	(30.328.646.141,25)	(100,00)
40	Dinas Ketahanan Pangan	(327.034.314,00)	(40.882.904,80)	(286.151.409,20)	699,93
41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil	0,00	(2.369.091.786,54)	2.369.091.786,54	(100,00)
42	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	0,00	(204.408.640,80)	204.408.640,80	(100,00)
43	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	0,00	5.097.445.253,15	(5.097.445.253,15)	(100,00)
44	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(321.810.365,86)	(21.966.232.223,56)	21.644.421.857,70	(98,53)
45	Dinas Perkebunan	0,00	26.147.996.440,04	(26.147.996.440,04)	(100,00)
46	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(264.285.347,02)	5.897.695,20	(270.183.042,22)	(4.581,16)
47	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	0,00	5.004.555.678,00	(5.004.555.678,00)	(100,00)
48	Dinas Kehutanan	0,00	29.078.242.272,16	(29.078.242.272,16)	(100,00)
49	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(327.034.314,00)	(416.713.126,79)	89.678.812,79	(21,52)
50	Dinas Kelautan dan Perikanan	(837.659.990,02)	(284.941.467,70)	(552.718.522,32)	193,98
51	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(142.523.225,00)	(415.646.473,67)	273.123.248,67	(65,71)
	Jumlah	**945.426.129.386,34**	**268.492.599.446,46**	**676.933.529.939,87**	**252,12**

5.6.3.10Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya (Rp6.254.961.181,00)

Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya sebesar (Rp6.254.961.181,00)dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	0,00	294.762.231.099,00	(294.762.231.099,00)	(100,00)
2	Dinas Pendidikan	1.051.278.674.222,00	477.613.196,00	1.050.801.061.026,00	220.010,89
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(361.013.400,00)	295.750.000,00	(656.763.400,00)	(222,07)
4	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	0,00	492.000.000,00	(492.000.000,00)	(100,00)
5	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	(1.056.068.631.708,00)	0,00	(1.056.068.631.708,00)	0,00
6	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	503.852.700,00	(503.852.700,00)	(100,00)
7	Dinas Perhubungan	0,00	53.015.478.670,00	(53.015.478.670,00)	(100,00)
8	Dinas Komunikasi dan Informasi	0,00	1.206.030.001,00	(1.206.030.001,00)	(100,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	14.800.000,00	(14.800.000,00)	(100,00)
10	Sekretariat Daerah	0,00	(7.936.839.790,00)	7.936.839.790,00	(100,00)
11	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	0,00	(299.873.620.024,55)	299.873.620.024,55	(100,00)
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	1.320.220.274,00	(1.320.220.274,00)	(100,00)
13	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	(503.852.700,00)	503.852.700,00	(100,00)
14	Badan Koordinasi Wilayah I	0,00	(423.625.499,00)	423.625.499,00	(100,00)
15	Badan Koordinasi Wilayah II	0,00	(13.000.000,00)	13.000.000,00	(100,00)
16	Badan Koordinasi Wilayah III	0,00	(19.687.697,00)	19.687.697,00	(100,00)
17	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	0,00	(1,00)	1,00	(100,00)
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(16.000.000,00)	1.099.640.000,00	(1.115.640.000,00)	(101,46)
19	Dinas Perkebunan	0,00	(1.099.640.000,00)	1.099.640.000,00	(100,00)
20	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	0,00	(412.916.250,00)	412.916.250,00	(100,00)
21	Dinas Kehutanan	0,00	(14.800.000,00)	14.800.000,00	(100,00)
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(1.087.990.295,00)	0,00	(1.087.990.295,00)	0,00
	Jumlah	**(6.254.961.181,00)**	**42.889.633.978,45**	**(49.144.595.159,45)**	**(114,58)**

5.6.3.11Koreksi/Penyesuaian Amortisasi (Rp282.520.000,00)

Koreksi/Penyesuaian Amortisasi sebesar (Rp282.520.000,00), dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan	Tren %
1	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2	Dinas Pendidikan	(20.327.285,05)	0,00	(20.327.285,05)	0,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(295.071.514,95)	0,00	(295.071.514,95)	0,00
4	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(5.887.200,00)	(55.320.000,00)	49.432.800,00	(89,36)
	Dinas Perhubungan	34.766.000,00	0,00	34.766.000,00	0,00
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	0,00	289.520.000,00	(289.520.000,00)	(100,00)
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	(405.820.000,00)	405.820.000,00	(100,00)
7	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	55.320.000,00	(55.320.000,00)	(100,00)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan	Tren %
8	Badan Koordinasi Wilayah III	0,00	19.687.697,00	(19.687.697,00)	(100,00)
9	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	0,00	116.300.000,00	(116.300.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**(282.520.000,00)**	**19.687.697,00**	**(302.207.697,00)**	**(1.535,01)**

5.6.3.12 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya Rp32.954.634.413,98

Koreksi/Penyesuaian penyusutan aset lainnya sebesar Rp32.954.634.413,98dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	0,00	(458.732.000,64)	(458.732.000,64)	100,00
2	Dinas Pendidikan	(818.454.098.973,27)	(455.317.196,00)	817.998.781.777,27	(179.654,71)
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	127.204.020,00	0,00	(127.204.020,00)	0,00
4	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	(390.502.700,00)	(390.502.700,00)	100,00
5	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	847.329.048.600,16	0,00	(847.329.048.600,16)	0,00
6	Dinas Perhubungan	0,00	(22.939.352.085,67)	(22.939.352.085,67)	100,00
7	Dinas Komunikasi dan Informasi	0,00	(1,00)	(1,00)	100,00
8	Dinas Sosial	0,00	15.340.000,00	15.340.000,00	100,00
9	Sekretariat Daerah	1.332.993.356,00	7.824.231.590,00	6.491.238.234,00	82,96
10	Sekretariat DPRD	0,00	172.100.000,00	172.100.000,00	100,00
11	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	0,00	730.502.300,00	730.502.300,00	100,00
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	(737.560.274,00)	(737.560.274,00)	100,00
13	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	390.502.700,00	390.502.700,00	100,00
14	Badan Koordinasi Wilayah I	0,00	422.629.499,00	422.629.499,00	100,00
15	Badan Koordinasi Wilayah II	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
16	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	0,00	1,00	1,00	100,00
17	Dinas Pertanian dan Perkebunan	16.000.000,00	(610.375.333,33)	(626.375.333,33)	102,62
18	Dinas Perkebunan	0,00	617.290.000,00	617.290.000,00	100,00
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	19.996.650,00	19.996.650,00	100,00
20	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	0,00	292.156.250,00	292.156.250,00	100,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.603.487.411,09	107.604.000,00	(2.495.883.411,09)	(2.319,51)
	Jumlah	**32.954.634.413,98**	**(14.986.486.600,64)**	**47.941.121.014,62**	**(319,90)**

5.6.3.13Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai (Rp3.031.114.000,00)

Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai sebesar (Rp3.031.114.000,00),dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan	(3.012.464.000,00)	0,00	(3.012.464.000,00)	0,00
2	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(13.700.000,00)	0,00	(13.700.000,00)	0,00
3	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(4.950.000,00)	0,00	(4.950.000,00)	0,00
	Jumlah	**(3.031.114.000,00)**	**0,00**	**(3.031.114.000,00)**	**0,00**

5.6.3.14Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan JasaRp3.031.114.000,00

Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasasebesar Rp3.031.114.000,00dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan	3.012.464.000,00	0,00	3.012.464.000,00	0,00
2	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	0,00
3	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	0,00
	Jumlah	**3.031.114.000,00**	**0,00**	3.031.114.000,00	**0,00**

5.6.3.15Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain(Rp2,14)

Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain sebesar minus Rp2,14dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	(1,95)	0,00	(1,95)	0,00
2	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(0,19)	0,00	(0,19)	0,00
3	RSJD Dr. Amino Godohutomo Semarang	0,00	27.266.169,00	(27.266.169,00)	(100)
4	RSUD Tugurejo Semarang	0,00	(6.000.000,00)	6.000.000,00	(100)
	Jumlah	**(2,14)**	**21.266.169,00**	(21.266.171,14)	(100)

5.6.4 EkuitasAkhir Rp35.912.461.766.739,88

Ekuitasakhir sebesar minus Rp35.912.461.766.739,88dengan uraian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	EkuitasAkhir	35.912.461.766.739,88	33.824.129.032.178,70	2.088.332.734.561,78	6,17
	Jumlah	**35.912.461.766.739,88**	**33.824.129.032.178,70**	**2.088.332.734.561,78**	**6,17**

BAB 6
PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah sebesar 3.254.412 Ha atau sekitar 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara geografis Wilayah Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5°40´ dan 8°30´ Lintang Selatan dan antara 108°30´dan 111°30´Bujur Timur.Garis pantai yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah sepanjang 791,76 Km, terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 Km dan pantai selatan sepanjang 289,07 Km. Secara administratif, Wilayah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 35 kabupaten/ kota (29 kabupaten dan 6 kota) yang mempunyai 573 kecamatan dengan 750 kelurahan dan 7.809 desa

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, peruntukan lahan terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan Budidaya meliputi Hutan Produksi, Hutan Rakyat, Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Peternakan dan Permukiman seluas 2.693.008 Ha dan Kawasan Lindung meliputi Hutan Lindung, Kawasan Sempadan, Suaka Alam dan Pelestarian Alam, serta Kawasan Lindung Karst seluas 561.404 Ha.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 berdasarkan Proyeksi BPS sebanyak 34.490.835 jiwa, penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Brebes sebanyak 1.802.829 jiwa , diikuti kotaa Semarang sebanyak 1.786.114 jiwa dan Kabupaten Cilacap sebanyak 1.719.504. Jumlah penduduk paling sedikit terdapat di kota Magelang sebanyak 121.872 jiwa diikuti Kota Salatiga sebanyak 191.571 jiwa dan kemudian Kota Tegal sebanyak 249.003 jiwa. Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah sebesar 1.052 jiwa/km^2 dengan wilayah terpadat di Kota Surakarta sebesar 11.256 jiwa/km^{2,} diikuti kota Magelang sebesar 7.589 jiwa/km^2 dan kota Pekalongan sebesar 6.729 jiwa/km^2 serta yang paling rendah kepadatannya adalah Kabupaten Blora yaitu sebesar 478 jiwa/^{km2,} diikuti oleh Kabupaten Wonogiri sebesar 534/km^2 dan Kabupaten Purworejo sebesar 656 jiwa/km$^{2.}$

Struktur penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 berdasarkan kelompok umur menunjukan bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 23.363.185 jiwa lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif (0-14 tahun ke atas) sebanyak 11.127.650 jiwa. Jumlah penduduk Jawa Tengah yang berusia 15 tahun keatas bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan menempati persentase tertinggi yaitu 27,28% pada Tahun 2018. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada sektor perdagangan dan industri mengalami kenaikan, yaitu di sektor perdagangan pada Tahun 2017 sebanyak 23,64% atau 4,12 juta jiwa meningkat menjadi 25,64% atau 4,48 juta jiwa pada Tahun 2018. Penduduk yang bekerja di sektor industri mengalami peningkatan dari 3,60 juta jiwa atau 20,64% pada Tahun 2017 menjadi 3,75 juta jiwa atau 21,49%.

6.2 SEJARAH PERKEMBANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Sebagai suatu Provinsi, Jawa Tengah sudah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu.

1. Jaman Penjajahan Belanda

Berdasarkan *Wet houdendedecentralisatie van het Bestuur in Nederland - Indie* (*Decentralisatie Wet* 1903), maka pemerintahan di Jawa dan Madura terbagi atas *Gewes*t

(Karesidenan), *Afdeeling/Regentschap* (Kabupaten), *District* / *Standgeemente* (Kotapraja), dan *Oderdistrict* (Kecamatan).

2. Jaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukannya, Jepang mengadakan perubahan Tata Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 (Tahun Jepang 2062) yang menetapkan bahwa seluruh *Jawa kecuali Vorstenkendeh* (Kerajaan-kerajaan) terbagi dalam wilayah *Syuu* (Karesidenan), *Si* (Kotapraja), *Ken* (Kabupaten), *Gun* (Distrik), *Son Conder Distrik dan Ku* (Kelurahan).

3. Setelah Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, diterbitkan UU No. 10 Tahun 1950 yang menetapkan Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan PP No. 31 Tahun 1950, UU No.10 Tahun 1950, dinyatakan berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 ditetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1950.

6.3 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

Sejak merdeka sampai dengan sekarang, Jawa Tengah dipimpin oleh 15 (lima belas) Kepala Pemerintahan yaitu :

1. R. Pandji Soeroso, pada Tahun 1945;
2. KRT MrWongsonegoro, Tahun 1945 s/d 1949;
3. R. Boedijono, Tahun 1949 s/d 1954;
4. RMT. Mangunnegoro, Tahun 1954s/d 1958;
5. R. Soekardji Mangoen Koesoemo, Tahun 1958 s/d 1960;
6. RM Hadisoebeno Sosrowerdojo, Tahun 1958 s/d 1960;
7. Mochtar, Tahun 1960 s/d 1966;
8. Moenadi, Tahun 1966 s/d 1974;
9. Soepardjo Rustam, Tahun 1974 s/d 1983;
10. H.M. Ismail, Tahun 1983 s/d 1993;
11. H. Soewardi, Tahun 1993 s/d 1998;
12. H. Mardiyanto, Tahun 1998 s/d Agustus 2007;
13. H. Ali Mufiz, Agustus 2007 s/d 22 Agustus 2008;
14. H. Bibit Waluyo,Agustus 2008 s/d Agustus 2013;
15. H. Ganjar Pranowo,Agustus 2013 s/d 2018;
16. H. Ganjar Pranowo,Agustus 2018 s/d 2023

Sejak Pemilu Tahun 1955 sampai sekarang DPRD Provinsi Jawa Tengah dipimpin 9 (sembilan) orang, yaitu :

1. H. Imam Sofwan, Tahun 1955 s/d 1971;
2. Parwoto, Tahun 1971 s/d 1977;
3. H. Widarto, Tahun 1977 s/d 1982;
4. Ir. H. Soekorahardjo, Tahun 1982 s/d 1992;
5. Drs. H. Soeparto Tjitrodihardjo, Tahun 1992 s/d 1997;

6. Alip Pandoyo, Tahun 1997 s/d 1999;
7. Mardijo, Tahun 1999 s/d 2004;
8. H. Murdoko SH, Tahun 2004 s/d 2012;
9. Drs. Rukma Setya Budi MM, Tahun 2014 s/d 2019.

6.4 VISI DAN MISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 bahwa **Visi** Jawa Tengah adalah ”Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”Mboten Korupsi Mboten Ngapusi, maka telah ditetapkan **7 (tujuh) Misi**, yaitu :

1. Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”;
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

6.5 KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI LANDASAN KEGIATAN OPERASIONALNYA

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan daerah mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, yang ditetapkan tanggal 23 Nopember 1945, dengan prinsip otonomi berdasarkan kedaulatan rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang ditetapkan tanggal 10 Juli 1948, dengan prinsip otonomi sebanyak banyaknya;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, yang ditetapkan tanggal 4 Juli 1950, dengan prinsip mengatur karisidenan di Jawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tantang Pemerintahan Daerah, yang ditetapkan tanggal 17 Januari 1957, dengan prinsip otonomi yang riil dan seluas-luasnya;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang disahkan tanggal 1 September 1965, dengan prinsip otonomi yang riil dan seluas-luasnya.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, yang disahkan tanggal 23 Juli 1974, dengan prinsip otonomi nyata dan bertanggungjawab;

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang disahkan tanggal 7 Mei 1999, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertangungjawab;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinatahan Daerah, yang disahkan tanggal 15 Oktober 2004, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinatahan Daerah, yang disahkan tanggal 30 September 2014, dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab;

BAB 7

PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018, diwajibkan kepada SKPD untuk menyajikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO